



DR. H. Syafriadi, SH., MH.

HUKUM & POLITIK

PILKADA SERENTAK DI RIAU

Kata Pengantar : PROF. DR. H. Syafrinaldi, SH., MCL.

DR. H. Syafriadi, SH., MH

HUKUM & POLITIK

PILKADA SERENTAK DI RIAU

Kata Pengantar

PROF. DR. H. Syafrinaldi, SH., MCL

Bina Karya

HUKUM & POLITIK

Pilkada Serentak di Riau

DR. H. Syafriadi, SH., MH

Hak Cipta © DR. Syafriadi, SH., MH, 2016

Pewawancara Laporan:

Yanto Budiman, S

Endrizal Yusten

Bambang Irawan Syahputra

Zainul Aziz

Beni Hendra

Irdawati

Sanksi Pidana Pasal 72 ayat (2) UUHC No. 19 Tahun 2002:

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Layout & Cover:

SoeDESIGN

Dicetak oleh:

Bina Karya (BIKA) - Jakarta

ISBN : 978-602-14117-3-5

Penerbit:

Bina Karya

Kata Pengantar

PROF. DR. H. Syafrinaldi, SH., MCL

Ketika terjadi perdebatan di parlemen, apakah kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat atau melalui perwakilan di DPRD, saya termasuk orang yang tidak setuju bila gubernur, bupati dan walikota dikembalikan pemilihannya kepada dewan. Akan tetapi, karena kewenangan merevisi undang-undang ada di DPR RI, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai akhirnya KMP (Koalisi Merah Putih) unggul atas KIH (Koalisi Indonesia Hebat) dalam voting mekanisme pemilihan pilkada atas Rancangan Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah, September 2014.

Ada sejumlah alasan, mengapa saya tetap menginginkan pilkada langsung. *Pertama*, memilih kepala daerah itu adalah hak rakyat yang sudah dilegalkan dalam konstitusi. Filosof Jean Jacques Rousseau yang pemikirannya mempengaruhi Revolusi Prancis telah meletakkan sendi kedaulatan rakyat dengan membatasi kekuasaan raja dan kaum bangsawan. Dalam pandangan Rousseau, dalam kedaulatan rakyat rakyatlah yang berdaulat. Tak ada orang lain atau kelompok yang berhak meletakkan hukumnya pada rakyat. Dan, hukum hanya sah bila ditetapkan atas kehendak rakyat. Mengutip Rousseau, dalam kajian akademis rakyatlah yang memimpin dirinya sendiri.

Kedua, rakyat harus menentukan sendiri pemimpinnya, sebab hal itu merupakan substansi demokrasi. Penentuan pemimpin itu dilakukan melalui sarana politik yang kita sebut dengan pemilihan umum. Kata Samuel Huntington, demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk

dewasa dapat memberikan suaranya. Pemilu dalam buah pikir Samuel Huntington telah kita nikmati pelaksanaannya sejak reformasi, atau pada saat Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah lahir, lalu berlanjut ke UU Nomor 32 tahun 2004, kemudian UU Nomor 23 tahun 2014. Dan, sekarang UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Pilkada. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung oleh Komisi Pemilihan Umum telah mengundang banyak dampak positif disamping tak bisa dipungkiri, kita juga menikmati dampak negatifnya. Walau antara kedua dampak itu bagai mata pisau, akan tetapi rakyat lebih merasakan sisi positif dari pilkada langsung. Antara lain, rakyat merasa lebih dekat dengan pemimpin yang dipilihnya, dan sang pemimpin pun merasa berhutang pada rakyat manakala ia lalai menunaikan janji-janji politiknya saat menjabat sebagai kepala daerah.

Ketiga, pilkada langsung menjadi sarana bagi rakyat menagih janji pembangunan kepada pemimpin. Janji tersebut terkait dengan visi, misi dan program aksi para calon kepala daerah pada saat mereka melaksanakan sosialisasi di tengah masyarakat. Maupun diluar itu yang mereka sampaikan langsung untuk menarek empati rakyat. Dalam banyak kasus pilkada, para calon memang banyak melontarkan janji-janji pembangunan baik yang disampaikan langsung maupun tidak. Ada yang ditunaikan oleh kepala daerah, dan tak sedikit juga dari janji-janji tersebut yang hanya sekadar hiasan bibir. Pemilihan kepala daerah langsung selain mendekatkan kepala daerah dengan rakyatnya sekaligus wadah bagi rakyat mendesak pemimpinnya agar memenuhi kebutuhan pembangunan di wilayahnya, terutama menyangkut parasana jalan, jembatan, sekolah, pendidikan murah yang berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai.

Riau salah satu provinsi di Indonesia yang melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak. Pilkada Serentak di negeri berjuduk 'Tanah Melayu' ini berlangsung 9 Desember 2015 di sembilan kabupaten dan kota. Yakni Kota Dumai, Kabupaten Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Siak Sri Indrapura, Rokan Hilir, Kepulauan

Meranti dan Bengkalis. Dua daerah lain, masing-masing Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar akan menyelenggarakan pilkada yang sama pada Februari 2017. Dibandingkan Pilkada Serentak di provinsi lain, pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Riau relatif lebih aman walaupun sebelumnya banyak pihak menduga akan terjadi distorsi akibat polarisasi di tengah masyarakat. Ada beberapa sebab mengapa pilkada di Riau berjalan aman. *Pertama*, karena konsistensi KPU dan Badan Pengawas Pemilu menjalankan tahapan-tahapan pilkada sesuai dengan jadwal yang sudah mereka tetapkan, dan disosialisasikan dengan baik kepada semua pemangku kepentingan pilkada. *Kedua*, kesiapan aparat kepolisian mengamankan jalannya pilkada, sekaligus mengantisipasi titik-titik rawan yang diperkirakan berpotensi mengundang konflik. *Ketiga*, kedisiplinan para calon bersama tim sukses mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan KPU dan Bawaslu. *Keempat*, partisipasi masyarakat mengikuti pilkada, dan menghendaki agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah berlangsung aman dan sukses. Kita juga tidak melihat adanya fanatisme berlebihan masyarakat dalam mendukung calon-calon tertentu yang dapat mengundang terjadinya gesekan-gesekan politik. *Kelima*, komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota yang turut serta menjaga stabilitas daerah, mendorong pelaksanaan pilkada berjalan sukses.

“Hukum dan Politik, Pilkada Serentak di Riau” yang diterbitkan Dr. H. Syafriadi, SH., MH dan kawan-kawan di Tabloid Berita AZAM menjadi kilas balik untuk mengetahui bagaimana jalannya pelaksanaan pilkada putaran pertama di Provinsi Riau. Buku ini menjadi penting karena memiliki tiga kekuatan utama. Yakni, *satu*, mampu meramal figur-figur yang akan bertarung dalam arena pilkada pada setiap kabupaten dan kota. Hebatnya lagi dapat memproyeksi calon kepala daerah yang populer dan memiliki elaktabilitas tinggi di masyarakat, dan pada akhirnya memenangkan pemilihan kepala daerah. *Dua*, buku ini secara komprehensif menyajikan pelaksanaan pilkada dari tahapan awal sampai ke penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi, dan tahapan-tahapan

tersebut diurai secara sistematis oleh penulisnya sehingga memudahkan kita mengetahui perkembangan jalannya pilkada di masing-masing daerah. *Tiga*, penulisan laporan politik yang tersaji dalam buku ini diulas dengan bahasa yang santun, alur naskahnya mengalir seperti air tanpa tendensi keberpihakan kepada salah satu calon. Ini dapat kita maklumi, karena kemampuan Bung Syafridi yang disamping seorang jurnalis senior juga satu-satunya wartawan bergelar doktor dengan fokus bidang kajian hukum pers.

Saya percaya buku ini banyak manfaatnya, dan dapat memberi kontribusi signifikan dalam upaya kita memahami proses Pilkada Serentak di Provinsi Riau menuju *civil society* yang kuat. Buku ini juga sarat dengan fakta yang disorot melalui kekuatan teori ilmu hukum serta dideskripsikan dengan menarik. Buku ini tidak hanya penting bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di 'Tanah Melayu', tetapi juga bagi penggiat hukum lainnya. Semoga Bung Syafridi tidak akan pernah berhenti menulis untuk bidang-bidang lain dari hukum ketatanegaraan dalam mengisi dan memperkaya referensi hukum di Republik yang kita cintai ini.

Pekanbaru, Juni 2016

PROF. DR. H. Syafrinaldi, SH., MCL

Sekapur Sirih Penulis

Antara hukum dan politik merupakan dua hal yang terpisah. Hukum bukan ruas, politik juga bukan buku. Keduanya tak bisa dicampur dalam satu kamar. Perdebatan hubungan antara hukum dan politik sudah berlangsung cukup lama. Belakangan perdebatan tersebut kembali mencuat menyusul tingginya syahwat kekuasaan mengintervensi, bahkan mengobok-obok hukum. Tingginya indeks persepsi korupsi di Indonesia oleh sebagian kalangan dianggap ketidak-berdayaan hukum atas kekuasaan.

Law is a command of the lawgiver, kata John Austin. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menegaskan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Cita-cita negara hukum (*rule of law*) yang terkandung dalam UUD 1945 itu bukan sekedar simbol atau basa basi politik, dan negara hukum yang dicita-citakan oleh para *founding father’s* Republik ini bukan hukum yang bersandar pada kekuasaan, akan tetapi hukum yang berpijak pada keadilan. Pengakuan ini diperkuat oleh Penjelasan UUD 1945 yang menyatakan, “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*machsstaat*). Filosof Aristoteles merumuskan negara hukum sebagai negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan, dalam pandangan Aristoteles, merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup.

Hukum adalah perintah dari penguasa mengindikasikan, hukum dan politik merupakan dua variable yang berlainan kamar. Sebagai negara hukum, UUD 1945 telah menempatkan hukum menjadi *supremacy* dalam tata kelola pemerintah dan pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara. Problem yang muncul kemudian, pada tahap implementasi hukum menjadi tidak berdaya manakala berhadapan dengan kekuasaan karena hukum ditafsirkan sebagai produk politik. Tarek menarik antara

keduanya tercermin dalam dua pandangan yang berbeda. John Austin (penganut paham positivisme) menempatkan hukum tidak lain dari produk politik atau kekuasaan. Sementara penganut mazhab sejarah seperti Frederich Carl Savigny dan Puchta memandang hukum tumbuh dari dan dengan rakyat. Hukum ditafsirkan tidak semata lahir dari dogma hukum dan undang-undang, akan tetapi juga bertolak dari kenyataan-kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat dan bergantung pula pada penerimaan umum dalam masyarakat dan kelompok yang menciptakan hukum.

Buku “Hukum dan Politik, Pilkada Serentak di Riau” bukan mencari tau hubungan antara hukum dan politik” seperti terdapat dalam dua aliran yang berbeda di atas. Tidak pula untuk memperkeruh perbedaan sudut pandang di dalam dua aliran itu. Akan tetapi berusaha mengurai romantika suasana kebatinan hukum dan suasana kebatinan politik yang tercermin dalam pemilihan kepala daerah yang pertama kali di Indonesia dilakukan secara serentak (Pilkada Serentak).

Suasana kebatinan itu dapat dirasakan dalam dua perspektif. *Pertama*, kemitmen dan keberpihakan *stakeholder* menyelenggarakan pilkada damai terutama oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Penyelenggara Pemilu), kepolisian, Pemerintah Daerah maupun partai politik yang diberi kewenangan oleh undang-undang mengusung calon kepala daerah. *Success story* pelaksanaan pilkada disebabkan karena *political will stakeholder* mentaati aturan-aturan (regulasi) terkait dengan pilkada serentak sehingga mampu menganulir gesekan-gesekan politik diantara tim sukses dan pendukung para calon. Riau dipuji sebagai provinsi paling aman melaksanakan pilkada serentak. Bahkan laporan akhir pelaksanaan pilkada menyiratkan tidak terdapat tingkat kecurangan yang cukup berarti. Dari sembilan daerah yang berpilkada, tiga kabupaten saja yang bertikai di Mahkamah Konstitusi. Yakni Kabupaten Pelalawan, Kuantan Singingi dan Rokan Hulu. Enam lainnya, Kota Dumai, Siak Sri Indrapura, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti, Bengkalis dan Indragiri Hulu praktis pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerahnya sesuai dengan jadwal KPU.

Kedua, semangat demokrasi. Demokratisasi yang terbangun dalam pilkada adalah demokrasi seperti air sungai mengalir, yang di permukaan terlihat tenang. Ketenangan itu membuat suasana pilkada berjalan tak semarak akibat adanya pembatasan ruang gerak para calon dan tim sukses melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada rakyat. Ini berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya, yang ramai, semarak dan bergairah oleh pemasangan baliho, spanduk, poster, kampanye dan lain-lain. Suasana kebatinan ini tentu mengandung sisi positif di samping sisi negatif lainnya. Plus minus dari kedua sisi itu tergantung sudut pandang kita mentelaahnya.

Buku “Hukum dan Politik, Pilkada Serentak di Riau” ini merupakan kilas balik perjalanan pemilihan kepala daerah di sembilan kabupaten dan kota di Riau, yang didokumentasikan oleh Tabloid Berita AZAM. Saban minggu Tim Redaksi yang dipimpin Pemimpin Redaksi, Syafriadi, merancang materi liputan, kemudian membagi tugas wartawan untuk melakukan hunting ke daerah pemilihan, termasuk mewawancarai nara sumber yang berkompeten. Al kisah, selama satu tahun materi liputan yang dituangkan ke dalam laporan utama AZAM itu dapat kami buku kan. Beberapa diantara laporan utama tersebut tidak kami sertakan ke dalam buku ini karena pertimbangan teknis. Untuk memudahkan pembaca mengetahui dan memahami isi buku, kami membaginya ke dalam bagian-bagian. Dan, setiap bagian kami lampirkan cover laporan yang dicetak *full colour*. Semua laporan yang tersaji sudah kami mulai perencanaan dan peliputannya satu tahun sebelum Pilkada Serentak dimulai. Judul pada masing-masing bagian telah mengalami penyuntingan dari judul asli yang termuat dalam edisi AZAM. Disebabkan, semua materi dari laporan ini lebih bermuara kepada politik dan hukum, kami pun memberi judul buku ini dengan “Hukum dan Politik, Pilkada Serentak di Riau”.

“Hukum dan Politik, Pilkada Serentak di Riau” merupakan kontribusi positif AZAM terhadap pembaca yang ingin mengetahui pelaksanaan pilkada di ‘Tanah Melayu’. Sebagai tabloid tertua yang eksis terbit dan konsen menyajikan pemberitaan politik lokal, kami sudah melakukan pekerjaan pembukuan ini sejak tahun 2002 melalui penerbitan buku “Riau

Kontemporer, Kata Kalam AZAM”. Lalu berlanjut ke buku “Gubernur Pilihan, Kilas Balik Suksesi Gubernur Riau 2003-2008 (2005), dan Rusli Mambang Gubernur Pilihan Rakyat, Dokumentasi Politik Pilkada Riau 2013 (2009). Kami berharap terus dipercaya pembaca melakukan pekerjaan serupa, dan dapat eksis menerbitkan tabloid ini di tengah tingginya kompetisi media cetak dan ‘menjamur’ nya kemunculan media *online*.

Secara khusus saya menyampaikan terima kasih kepada Keluarga Besar AZAM baik di Kantor Pusat maupun di biro-biro kabupaten dan kota. Lebih khusus lagi ucapan yang sama saya sampaikan kepada teman-teman seperjuangan: Yanto Budiman, Endrizal Yusten, Bambang Irawan, Zainul Aziz, Beni Hendra dan **Irdawati** yang saban minggu turun ke lapangan menghunting liputan, mewawancarai narasumber, lalu menulisnya ke dalam laporan utama. Semua liputan-liputan tersebut saya ramu kembali dalam bahasa AZAM. Apresiasi dan penghargaan setingginya-tinggi saya sampaikan pula kepada Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah berkenan memberi pengantar atas penerbitan buku ini. Kepada semua nara sumber yang pernah diwawancarai Tim Redaksi AZAM atas penulisan laporan utama yang menjadi materi buku ini, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih. Semoga pemikiran yang Anda berikan kepada awak redaksi kami tak hanya menjadi catatan sejarah dalam pilkada, tetapi bermanfaat pula bagi siapa saja yang ingin menjadikan buku ini sebagai referensi bacaan, termasuk objek penelitian untuk kepentingan akademis. Kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sudah dilantik dan bertugas di kabupaten/kota masing-masing, kami sampaikan selamat menjalankan amanah rakyat. Anda adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah pilihan rakyat.

Kami menyadari, materi dan tampilan buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Kritik, saran dan masukan Anda sangat kami perlukan untuk edisi berikutnya. Salam perjuangan.*

Pekanbaru, Juni 2016

DR. H. Syafridi, SH., MH

Daftar Isi

PENGANTAR	iii
PROF. DR. H. Syafrinaldi, SH., MCL	
SEKAPUR SIRIH PENULIS.....	vii
DAFTAR ISI	xi
Bagian I : Karena <i>Excellent</i> Irwan Bisa Dua Kali	1
Mewujudkan Mimpi di Kepulauan Meranti	3
Tergantung Masyarakat Menilainya.....	8
Mimpi Saya Membuat Masyarakat Tersenyum	10
Berbagai Kemajuan Sudah Diraih.....	17
Hasil Karyanya Sudah Terwujud	20
Belum Ada Tokoh Tandingi Irwan	23
Pemimpin yang Berkarakter	25
Kepulauan Meranti Berlari Kencang	28
Bagian II : Pilkada Serentak Masih Milik <i>Incumbent</i>?	31
Pilkada Serentak Masih Milik <i>Incumbent</i> ?	33
(Herliyan Saleh) Sosok Cerdas dan Kayu Ilmu.....	37
Khairul Anwar) Kembali Tarung Meski Diterpa Isu	39
(Irwan Nasir) Ingin Wujudkan Mimpinya	41
(Yopi Arianto) Rajin Turun ke Desa.....	44
<i>Incumbent</i> yang Tumbang, Pemimpin yang Gagal	46
Reputasi dan Prestasi Jadi Penentu	50
<i>Incumbent</i> Selalu di Atas Angin	53
Bagian III : Milih Bupati Serentak KPU Akui Diintervensi.....	57
Resiko Serempak di Pilkada Serentak	59
Optimisme Pelalawan dan Bengkalis	63
Milih Serentak KPU ‘Digertak’	65

Bawaslu akan Tindak Setiap Pelanggaran	70
Serentak atau Tidak, Biayanya Sama.....	72
Kualitas Pilkada Tergantung Penyelenggara	75
Sengketa Pemilihan Bergeser ke PTTUN.....	77
Bagian IV : Syamsuar-Alfedri Teladan yang Sepadan.....	81
‘Tahta’ Siak Rakyat Masih Ingin Syamsuar dan Alfedri	83
Jumlah Calon (Bisa) Lima Pasang	87
Syamsuar: <i>Nawaitu</i> Saya Membangun Siak	89
Kepemimpinan Syamsuar Sesuai Filosofi Saya	96
“.....Dan, Mereka pun Bertekad Menangkan Syamsuar.....	100
Masyarakat Dampakan Kepemimpinan Ini Terus Berlanjut	103
Di Atas Kertas Syamsuar-Alfedri Unggul.....	106
Bagian V : Strategi Harris di Program Strategis.....	109
Strategi Harris di Program Strategis.....	111
Pertumbuhan Ekonomi di Atas Rata-rata Nasional	115
Harris Banyak Tahu Kepemimpinan Saya.....	117
Kalau Diganti Figur Lain, <i>Ntar</i> Beda Lagi Rencana Aksinya.....	120
Harris Tuai Pujian dan Harapan	122
Saya Ingin Pelalawan Tuan Rumah di Negeri Sendiri.....	126
Bagian VI : Hafith-Nasrul Duet Agamis Reformis	135
Hafith-Nasrul Duet Agamis Reformis.....	137
KPU Pakai Uang Pribadi	141
Rokan Hulu Butuh Pemimpin Energik	143
Saya dan Hafiith Sama-sama Dikader Achmad.....	151
Kami Sudah Bergerak Tanpa Komando.....	155
Bupati Rohul Minimal Punya Kemampuan Sama dengan Achmad.....	158
LAM Mimpikan Cara-cara Adat Memilih <i>Kepala</i> Daerah	161
<i>Incumbent</i> Raih Keuntungan di Pilkada	163

Bagian VII : Irwan Kembali Diminati Pimpin Meranti	165
Merangkai Pulau Negeri Kepulauan.....	167
KPU Butuh Angkutan Tepat dan Cepat.....	171
Irwan Nasir: Banyak Cita-ciita Saya Belum Terwujud	173
Masyarakat Berharap Irwan Lanjutkan Kepemimpinan	181
Kalau Bisa Tingkat Estafet Jangan Pindah.....	183
Pilihlah Pemimpin yang Berikan Bukti Bukan Janji.....	185
Kerja Keras Irwan Diapresiasi Masyarakat	187
Bupati Meranti Berpulang Pada Masyarakat	189
Bagian VIII : Uji Nyali Anggota DPRD di Pilkada	191
Anggota DPRD, Mau Maju Mundur Dulu	193
Anggota Dewan Harus Serahkan SK Berhenti.....	197
Jangankan Jabatan, Nyawapun Diambil Allah Saya Siap	199
Apapun Resiko Politik, Saya Siap	201
Niat Saya Tulus Membangun Rokan Hulu.....	203
Nasrun Berhenti dari Ketua DPRD.....	205
Aturan Ini Jadi Ajang Uji Nyali	207
Mereka Pasti Berfikir Ulang Maju ke Pilkada	209
Kata Syamsul: Politik itu Strategi <i>Bung</i>	211
Andaikan itu Saya, Lebih Baik tak Usah Ikut Pilkada	213
Bagian IX : Adu Balak Pilkada Serentak	215
Adu Balak Pilkada Serentak	217
KPU Verifikasi Berkas Pendaftaran	222
Pelalawan: Siapa Pemenang, Siapa Pecundang?.....	224
Meranti: Irwan Terpopuler, Mustafa Kurang Populis	228
Siak: Ditentukan Kekuatan Figur.....	233
Indragiri Hulu: Adu Kuat <i>Duo</i> Bupati.....	236
Bagian X : Harris-Zardewan Seiya Sekata untuk Pelalawan	241
Duduk Sama Rendah Tegak Sama Tinggi	243
Petahana Berpeluang Menang	247

Masyarakat Jangan Dipecah Belah	250
Harris-Zardewan, Seiya Sekata Membangun Pelalawan	255
HAZAR Kerahkan Semua Kekuatan	259
Program Harris Cukup Bagus	262
Bagian XI : Mursini-Halim Berjalan Seiring Untuk Kuansing.....	265
‘Perang Baliho’ Pilkada Kuansing.....	267
Mursini-Halim Makin Menguat	272
USAHA, Jadikan Kuansing Unggul	275
Seiring Jalan Majukan ‘Negeri Jalur’	280
Serasa Nyaman Dekat Mursini.....	284
Masyarakat Bergelayut Harapan Pada MudHA.....	286
Kami Siap Bersaing Secara Jujur	289
Bagian XII : Siak, Suara Rakyat Untuk SUARA?.....	291
Siak <i>Adem Ayem</i> Songsong Pilkada.....	293
Tak Elok Sebutkan Target Kemenangan	297
Syamsuar-Alfedri Banyak Kesamaan	299
Kata Arwin, SUARA Berpengalaman	304
Terasa Lebih Indah Dipimpin Syamsuar-Alfedri	306
Kader PAN yang <i>Mbalelo</i> Dindak Tegas.....	309
Bagian XIII : Konflik Serempak di Pilkada Serentak	313
Riau Rawan Konflik Pilkada	315
Sulit Petakan Daerah Mana Rawan Konflik	320
Kita Akan Lakukan Tindakan Tegas dan Terukur	323
Konflik tak Terjadi Bila Paslon Taat Aturan.....	328
Partai Yakin Pilkada Aman	331
Validata Pemilih Titik Rawan Utama	333
Indra Gunawan: Mari Saling Menjaga	335
Bagian XIV : Adu (Tim) Sukses Pilkada Bengkalis	337
Adu (Tim) Sukses Pilkada Bengkalis.....	339
KPU <i>Ogah</i> Diwawancarai	343

MANTAP Jauhi Politik Transaksional	345
Hidupkan Lampu Kita Jangan Matikan Lampu Orang	348
SNI Hebat Ajak Hindari Kampanye Hitam.....	351
Sulaiman-Noor Makin Hebat	355
Bagian XV : Jefry Siapkan Bupati yang Peduli dan Punya Hati....	357
‘Perang’ Baliho (Jelang) Pilkada Kampar	359
Itu Strategi Memancing Figur Lain.....	363
Baliho Minus Ketua Partai	365
Pengganti Saya Nanti yang Punya Hati	368
Dinamis di Negeri yang Agamis	374
Banyak Figur Uji Keberuntungan Nasib.....	376
Bagian XVI : Negeri ‘Kubah’ Jauh Berubah.....	379
Negeri ‘Kubah’ Jauh Berubah.....	381
Masih Fokus di Tiga Program Strategis.....	385
Semua yang Kita Lakukan untuk Masyarakat	387
Bupati dan Wabup Berjalan Seiring Langkah	394
Kami Bangga Jadi Warga Rokan Hilir	396
Pilkada Pengaruhi Serapan Anggaran	401
Bagian XVII : Amril Menang Herliyan Tumbang.....	407
Amril Menang Herliyan Tumbang	409
Aman Dalam Balutan Pelanggaran	414
Harris Sumringah dan Tak Lengah.....	416
Syamsuar Kembali Bertapak di Siak.....	419
Suyatno Dipercaya Lagi di Rokan Hilir	422
Tak Kuasai Mandau dan Pinggir Herliyan Minggir.....	426
Bagian XVIII : Tahta’ Siak untuk Syamsuar-Alfedri	429
‘Tahta’ Siak untuk Syamsuar-Alfedri.....	431
Berita Acara Ditolak Hitungan Suara Diterima	434
Bukti Masyarakat Masih Ingin Syamsuar-Alfedri	437
KPU Ketok Palu Panwaslu Tutup Buku.....	440

Yang Menang Jangan Tepuk Dada.....	443
Bagian XIX : Rame-rame Gugat ke MK	447
Pilkada Curang Calon Berang	449
Paslom Menggugat KPU Merapat	453
Kuansing, Rohul, Pelalawan tak Terima Dicurangi	456
Bersemangat Walau Suara Galau	460
Hanya Tiga Kabupaten Selisih Suara di Bawah 2%	464
Ada Calon Keluar dari Range UU	467
Menangkis Gugatan Berharap Kemenangan	469

BAGIAN I



Mewujudkan Mimpi di Kepulauan Meranti

Sebagai ‘wajah’, Kabupaten Kepulauan Meranti mestinya dirawat dengan baik. Bukan dibiarkan ‘bopeng’ karena anggaran pembangunannya minim.

Itulah kalimat pertama yang meluncur dari Bupati Kepulauan Meranti Drs Irwan Nasir MSi ketika AZAM mengajaknya bicara seputar alokasi anggaran pembangunan dari pemerintah provinsi dan pusat untuk kabupaten yang dipimpinnya.

Jika diibaratkan anggota tubuh manusia, wajah merupakan daerah yang paling banyak biaya perawatannya. Wajah selalu dikasi bedak, facial, masker dan sebagainya. Bahkan ada pula perbedaan bedak untuk siang dan bedak malam. Pendek kata, wajah mendapat porsi nomor satu dari segi perawatan. Karena orang akan memandang ke wajah terlebih dahulu.

Nah, sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Meranti diibaratkan sebagai wajahnya negeri kita. Bahkan, Kabupaten Kepulauan Meranti diibaratkan pula sebagai miniaturnya Indonesia. Karena merupakan kabupaten maritim yang terdiri dari beberapa pulau.

Di Riau, hanya Merantilah kabupaten yang berada di daerah terluar yang berbentuk daerah kepulauan. Sementara daerah lainnya, merupakan daerah daratan dan pesisir. Dengan demikian, selayaknya pemerintah provinsi dan pusat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kabupaten yang baru dibentuk pada tahun 2008 ini.

Bukan sebaliknya, membiarkan Kabupaten Meranti kesulitan dalam melakukan pembangunan infrastruktur dan mensejahterakan

masyarakatnya karena minimnya alokasi anggaran. “Di Daerah kami tak ada jalan provinsi atau jalan nasional. Semuanya jalan kabupaten. Sehingga DAU kami juga jadi sedikit,” ujar Bupati Irwan Nasir.

Meski begitu, berkat kegigihan Sang Bupati, APBD yang dulunya hanya Rp600 miliar, tiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Untuk tahun 2015, APBD Kepulauan Meranti di perkirakan mencapai Rp1,67 triliun. Usaha peningkatan APBD tersebut, menurut Irwan Nasir, diupayakan dengan peningkatan PAD dan menggaet dana pusat dengan cara mensinkronkan program daerah dengan provinsi dan pusat.

Lalu bagaimana Irwan Nasir mengelola keuangan daerah agar bisa tepat sasaran dan tepat manfaat? Sekaligus untuk mewujudkan impiannya agar masyarakat Meranti bisa tersenyum menatap masa depan.

Impian Irwan memang sangat indah. Dia tak ingin masyarakat Meranti selalu terpuruk dikalahkan dalam setiap persaingan. Putra-putri Meranti dapat tersenyum menatap masa depannya karena semuanya sudah disediakan oleh pemerintah.

Sepertinya tak lah muluk-muluk. Irwan Nasir tak mencanangkan visi dan misi yang macam-macam. “Saya ingin masyarakat saya perutnya kenyang, badannya sehat, rohaninya penuh keimanan dan ketakwaan,” ujar Irwan Nasir dengan senyum khasnya.

Untuk mewujudkan impian itu, tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Atau hanya sekali ucap mantra ajaib “sim salabim”. Tetapi butuh waktu dan proses yang cukup panjang. Jika mengambil contoh kerusakan akibat tsunami Aceh, ternyata butuh dana Rp100 triliun dan waktu 10 tahun untuk membenahi infrastruktur yang telah rusak di beberapa kota di Bumi Serambi Mekkah itu.

Nah, membangun Kepulauan Meranti yang sudah lama terbiarkan, juga butuh waktu dan dana yang cukup. Tahun pertama menjadi bupati, Irwan belum bisa berbuat banyak. Karena berada dalam pertengahan anggaran dengan perencanaan yang sudah dibuat pemimpin sebelumnya.

Pada tahun kedua, juga belum optimal karena masih berkutat dengan perencanaan dan mencari orang-orang yang pas untuk menjankan program. Barulah di tahun ketiga Irwan benar-benar leluasa melancarkan program pembangunan di Meranti.

Meski begitu, banyak yang menilai Irwan telah mengukir prestasi. Dibawah kendali dia, Meranti seakan berlari kencang meninggalkan keterpurukan. Dari daerah yang hanya sebuah kecamatan yang jauh dari jangkauan, kini tumbuh menjadi sebuah kabupaten dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Angka pengangguran dan angka kemiskinan yang terus menurun.

Bahkan daerah ini menjadi ladang perburuan investasi. Buktinya, belum lama ini mendapat penghargaan sebagai daerah yang layak dan paling diminati investor. Pertumbuhan media massa juga sangat pesat di daerah ini. Jika dahulu para wartawan enggan ditugaskan disini, sekarang media cetak, online, elektronik bahkan tv sudah ada dan berkantor di Kepulauan Meranti.

Irwan terus berusaha mewujudkan mimpinya. Decak kagum, acungan jempol tak jarang dialamatkan ke pria yang suka makan durian ini. Mantan Bupati Bengkalis Fadlah Sulaiman misalnya mengatakan, semenjak dipimpin Drs. Irwan Nasir, M.Si kabupaten ini seolah terus berpacu mensejajarkan dirinya dengan daerah lainnya di Riau.

Apa yang menjadi perjuangan pemerintah Kabupaten Meranti dan seluruh unsur yang ada di dalamnya menurut Fadlah saat ini sudah mulai dapat terujud. Berbagai hasil karya Irwan Nasir selaku bupati sudah mulai terpampang jelas di mata masyarakatnya.

“Luar biasa, barangkali itulah kata-kata yang tepat melihat kondisi dan perkembangan kabupaten Kepulauan Meranti saat ini,” ujarnya.

Fadlah yakin dengan berbagai potensi yang dimilikinya, Kabupaten Meranti akan mampu berkembang lebih maju lagi. Berbagai potensi sumber daya alam baik sektor Migas maupun Non Migas, di sektor Migas berupa minyak bumi dan gas alam, yang terdapat di daerah kawasan

pulau Padang. Di kawasan ini juga katanya telah beroperasi PT Kondur Petroleum yang mampu memproduksi 8500 barel/hari. “Ini salah satu potensi sumber daya alam yang jika dikelola dengan baik maka akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan Meranti,” ungkapnya.

Selain itu juga salah satu potensi daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Meranti adalah, adanya sebuah kota perdagangan yakni kota Selat Panjang. Geliat kota Selatpanjang terus meningkat semenjak Meranti melepaskan diri dari Bengkalis. Kebijakan Pemkab Kepulauan Meranti yang mampu menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif, menjadikan kota Selatpanjang dengan segala keunggulannya semakin berkembang pesat. Jaminan keamanan dunia usaha dan investasi, mampu menarik dunia usaha menanamkan modalnya di kota Selatpanjang.

Pertumbuhan Kota Selatpanjang yang meningkat, tidak hanya menjadi magnet bagi aktifitas dunia perdagangan. Disisi lain, perkembangan kota Selatpanjang turut menarik para pencari kerja menjadikan kota ini sebagai tujuan. Dampak dari kondisi ini, pertumbuhan jumlah penduduk di kota Selatpanjang turut meningkat. Kondisi ini menunjukkan betapa pesatnya pertambahan penduduk di Selatpanjang pasca pemekaran.

“Nah, potensi seperti inilah yang saat ini telah mampu dikelola dengan baik sehingga mampu memberikan konstirbusi yang luar biasa bagi kemajuan dan perkembangan di Kabupaten Kepulauan Meranti,” kata Ketua Riau Tourist And Board ini.

Hal senada juga diungkapkan mantan Bupati Bengkalis Azaly Djohan kepada AZAM pekan silam. Menurut dia, semenjak ditetapkan sebagai daerah otonom, perkembangan kabupaten ini mengalami kemajuan sangat pesat sekali. Terutama dibidang infrastrukturnya seperti jalan dan jembatan yang telah mampu membuka akses wilayah ini lebih cepat.

“Meranti sekarang sudah semakin maju, tidak sama seperti beberapa tahun silam. Infrastruktur seperti jalan dan jembatan juga sudah semakin membaik dan hal tersebut sangat memberikan dampak yang sangat positif bagi kemajuan kabupaten ini,” ujarnya.

Tidak hanya dibidang sarana dan prasarana saja yang mengalami kemajuan. Berbagai bidang juga mengalami peningkatan seperti halnya bidang ekonomi dan investasi. Begitu juga halnya dibidang perkebunan dan pertanian yang juga menjadi andalan bagi peningkatan perekonomian di Kabupaten Meranti ini.

Azaly juga memberikan apresiasinya atas keberhasilan Meranti memproseskan produk-produk sagu hingga ketingkat nasional, bahkan pemerintah kabupaten juga telah memprogramkan untuk dijadikan sagu sebagai panganan Nasional sebagai pengganti beras.

“Hal itu terbukti melalui festival sagu nunsatra yang dilaksanakan di Jakarta beberapa waktu lalu yang ikut dan dihadiri oleh beberapa duta Besar dari Negara tetangga dan Negara sahabat. Sehingga sagu meranti saat ini sudah dikenali hingga ke manca Negara,” jelasnya.

Keberhasilan Irwan membangun Kepulauan Meranti juga diakui Idris SKM salah seorang tokoh pers yang juga menekuni bidang usaha perkapalan, Sehingga, jika Irwan Nasir kembali maju di Pemilukada untuk kedua kalinya, maka Irwan akan dapat memenangkan pertarungan. Selain keberhasilannya sudah terlihat dan dirasakan oleh masyarakat, figur yang sepadan yang akan bertarung belum kelihatan.

“Saya melihat Irwan Nasir sudah menang 50 persen saat ini. Selain keberhasilannya sudah dilihat dan dirasakan masyarakat, tokoh yang muncul untuk menandinginya belum kelihatan,” ujar pria yang kini juga menjadi Bedahara PWI Kepulauan Meranti ini.*

Tergantung Masyarakat Menilainya

Dibanding semasa menjadi kecamatan enam tahun lalu, Kabupaten Kepulauan Meranti hari ini tentu jauh berubah. Yang perlu dilakukan adalah mengurangi acara seremonial dan terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu dikatakan mantan Gubernur Riau Wan Abubakar kepada AZAM ketika dimintai pendapatnya soal perkembangan Kabupaten Kepulauan Meranti hari ini dibawah kepemimpinan Irwan Nasir dan Masrul Kasmy.

Menurut pria yang juga pernah menjadi anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, masa enam tahun menjadi kabupaten, tentu belum banyak yang sudah diperbuat. Usia enam tahun masih terlalu singkat untuk melihat apa yang telah diperbuat dan mengukur keberhasilan sebuah pemerintahan. Yang pasti, dasar-dasar atau pondasi serta perencanaan pembangunan sudah diletakkan di kabupaten yang dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008 ini.

“Secara dasar dan perencanaannya sudah diletakkan di Kabupaten Meranti. Namun penyebaran pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat masih belum merata,” ujar Wan Abubakar.

Hal ini tentu dapat dimaklumi mengingat masa kepemimpinan pasangan bupati dan wakil bupati Irwan dan Masrul masih berusia empat tahun. Tahun pertama, mereka belum bisa berbuat apa-apa karena pengesahan APBD bukan semasa dia menjadi bupati dan wakil bupati. Sementara pada tahun kedua, pasangan ini masih sibuk dengan konsolidasi atau merekrut orang-orang yang dianggap bisa diajak

untuk menjalankan program. Barulah pada tahun ketiga, pembangunan Kabupaten Meranti berjalan dengan baik. Nah, di tahun keempat, dan kelima konsentrasi pun akan terpecah karena akan ada pemilukada.

Untuk itulah Wan Abubakar berpendapat, pada masa yang akan datang pembangunan itu harus benar-benar ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan, kata Wan, hendaknya tidak hanya dirasakan oleh orang atau kelompok dan daerah tertentu saja. Tetapi seluruh lapisan masyarakat hendaknya dapat merasakannya.

Mantan Ketua PPP Riau ini juga mengungkapkan, yang perlu dilakukan pada masa-masa yang akan datang adalah pemerataan pembangunan. Apa lagi di Kepulauan Meranti yang terdiri dari pulau-pulau. Diaman antar daerah atau desa saling berjauhan yang dipisahkan oleh lautan. Untuk itu, sarana infrastrukturnya harus sudah dipersiapkan dan dibangun secara merata.

Wan Abubakar juga mengharapkan pada masa-masa mendatang, kepala daerah hendaknya tidak mementingkan acara seremonial, tetapi buktinya nyata dengan program yang menyentuh masyarakat. Peningkatan ekonomi, peningkatan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran benar-benar dilakukan dengan baik bukan hanya sekedar wacana atau seremonial belaka.

Dibawah kepemimpinan Irwan Nasir dan Masrul Kasmy, Kabupaten Kepulauan Meranti, kata Wan Abubakar sebenarnya sudah memperlihatkan perubahan ke arah yang lebih baik. Lalu apakah Irwan Nasir bisa kembali terpilih jika dia kembali maju menjadi bupati di pemilukada 2015?

Wan Abubakar mengatakan, semua itu masyarakat lah yang akan menilainya. "Saya tak bisa menjawabnya, karena nanti masyarakat lah yang akan menilai dan memilih siapa yang menurut mereka layak menjadi bupati," kata mantan Wakil Ketua DPRD Riau ini.

Wan Abubakar juga menolak untuk menjawab nama-nama tokoh Meranti yang akan meramaikan pilkada di 2015 nanti. Apakah akan muncul tokoh baru atau diramaikan pemain lama? "Wah saya belum tau tuh. Semua bisa saja terjadi. Sekali lagi yang akan menentukannya adalah

Mimpi Saya Membuat Masyarakat Tersenyum

Siapa sangka daerah yang dulu hanya kecamatan, kini menjadi sebuah kabupaten yang paling diminati investor.

Daerah yang dulu susah dijangkau karena sulitnya perhubungan, kini menjadi sentra pertumbuhan ekonomi dan ladang perburuan dunia usaha. Kehidupan ekonomi pun menggeliat, seiring dengan itu angka pengangguran dan kemiskinan terus menurun. Masyarakat yang dahulu selalu kalah dan terpinggirkan kini sudah bisa tersenyum menatap masa depan seperti impian bupatinya Drs Irwan Nasir, M.Si. Dibawah kepemimpinannya, kabupaten termuda di Riau ini memang terus memacu ketertinggalan. Dana APBD yang dulunya hanya Rp600 miliar, kini sudah mencapai angka Rp1.67 triliun. Bagaimana bupati murah senyum ini membangun daerahnya? Apa saja terobosan yang dilakukannya untuk mewujudkan impiannya? Berikut petikan wawancara wartawan AZAM Benny dan Zainul dengan Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan Nasir, M.Si:

Sebagai kabupaten termuda di Riau ini, Anda dinilai banyak kalangan cukup berhasil dalam meletakkan dasar-dasar pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti, komentar Anda ?

Alhamdulillah jika ada yang menilai saya seperti itu, namun sebagai Bupati Kepulauan Meranti definitif pertama, saya akui di tahun-tahun pertama kepemimpinan saya banyak menemukan kesulitan dan hambatan, namun bagi saya itulah tantangan bagi seorang pemimpin.

Sebagai kabupaten yang baru saja di mekarkan, yang masih banyak memiliki berbagai kekurangan, konsep seperti apa yang anda jalankan dalam membangun Kabupaten Kepulauan Meranti ini?

Saya sadar dengan kondisi serba kekurangan, sebagai Bupati defenitif sejak empat tahun lalu, saya bersama jajaran melakukan kajian yang mendalam dengan analisis yang rasional, sampai pada kesimpulan bahwa Kepulauan Meranti harus bangkit dan segera melakukan akselerasi dengan memaksimalkan potensi dan keunggulan yang dimiliki lalu mendesain konsep, paradigma strategi dan pendekatan pembangunan agar dapat melakukan akselerasi dan terobosan demi mengejar ketertinggalan dari daerah lain.

Ketika terpilih menjadi Bupati di kabupaten yang baru saja dimekarkan, apa yang tergambar dalam pikiran anda saat itu?

Yang pertama terfikir oleh saya ketika itu adalah bagaimana menurunkan tingkat kemiskinan, karena motivasi saya untuk membangun Meranti ini adalah menurunkan angka kemiskinan. Tentunya kita harus tahu pula bagaimana caranya menurunkan angka kemiskinan tersebut, maka saya mencoba untuk mempelajari struktur masyarakat disana. Struktur masyarakat Meranti yang tinggal didaerah pesisir pantai dan didaerah yang berpulau-pulau. Substansi yang menjadi persoalan adalah mahalanya harga barang, tingginya angka pengangguran, dan tingkat kejahatan yang cukup tinggi sehingga iklim orang berinvestasi disana masih sangat rendah, maka dari itulah ekonomi tidak dapat tumbuh dengan baik. Oleh karena itulah saya berusaha untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut dengan cara membangun suasana yang lebih aman dan kondusif. Salah satu cara yang kita lakukan adalah merekrut pemuda tempatan untuk menjadi petugas Satuan Polisi Pamong Praja di Pemkab Kepulauan Meranti.

Pada tahun-tahun pertama pemerintahan anda berjalan banyak yang meragukan kemampuan anda...

Untuk memulai menjalankan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk pertama kalinya bukanlah perkara yang mudah, apalagi selama ini telah terbangun suatu stigma bahwa Meranti merupakan daerah miskin sehingga banyak orang gamang, apakah APBD ini mampu untuk membiayai pembangunan di Meranti.

Bisa anda ceritakan sedikit pahit getir perjuangan anda pada tahun-tahun pertama menjabat sebagai bupati di daerah yang baru dimekarkan?

Proses saya menjadi Bupati ini bukanlah sesuatu yang saya rencanakan dari awal. Ketika berawal dari pemekaran kabupaten ini banyak sekali pandangan-pandangan sinis bahwa daerah Selat panjang ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi sebuah kabupaten, bahkan ada menganggap pemekaran ini adalah sesuatu yang dinilai terlalu ekstrim dan tidak masuk akal. Dari perjuangan panjang yang melelahkan yang penuh pengorbanan, akhirnya impian untuk menjadikan Meranti sebagai kabupaten yang berdiri sendiri bisa terwujud. Pada tahun-tahun pertama jalannya pemerintahan di Meranti dengan APBD hanya sebesar 360 Milyar, sementara kebutuhan untuk belanja pegawai saja sebesar 320 Milyar. Bahkan pada tahun 2010 tersebut sempat terjadi defisit. Alhasil gaji para pegawai mengalami keterlambatan ketika itu karena lambatnya bantuan yang datang dari Pemerintah Provinsi Riau . Lalu dalam perjalanannya semakin banyak anggapan bahwa Meranti memang tidak akan mampu berdiri sendiri bahkan tersiar kabar bahwa Meranti akan kembali dilebur ke Kabupaten induknya, yakni Kabupaten Bengkalis. Alhamdulillah pada tahun 2014 sekarang APBD Meranti menjadi 1,67 Triliun, artinya sudah ada kenaikan yang cukup signifikan ketika ditahun-tahun pertama saya menjabat dulunya. Dengan kondisi ini juga akan mampu menjawab keraguan berbagai kalangan tadi. Dengan adanya kenaikan APBD yang cukup besar ini juga memberikan kontribusi dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Ini bisa dilihat bahwa PDRB kabupaten Merant, pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, pembanguna fisik kota, penambahan pajak jalan meningkat.

Selain tingginya angka kemiskinan, apa lagi persoalan yang menjadi prioritas anda saat itu?

Pengangguran dan kemiskinan merupakan masalah besar di Kabupaten Kepulauan Meranti ketika itu. Saat ini persoalan tersebut sudah mulai berangsur-angsur dapat teratasi. Prioritas selanjutnya adalah Percepatan pembangunan infrastruktur dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kepulauan Meranti ini.

Bagaimana kondisi infrastruktur?

Minimnya infrastruktur dasar, menjadi penyebab utama kenapa ekonomi masyarakat di pedesaan terpuruk dan lambat. Buruknya kondisi jalan, jembatan dan pelabuhan, menyebabkan masyarakat petani dan nelayan sulit mengangkut hasil pertanian dan hasil tangkapan ke pasar. Karenanya, dengan percepatan pembangunan infrasturktur dasar, diharap mampu menggesa pertumbuhan ekonomi masyarakat di pedesaan. Untuk tahun 2015 mendatang, program pembangunan infrastuktur akan kita fokuskan di luar kota, terutama di pedesaan. Pemkab Kepulauan Meranti tetap komit mengalokasikan 60 persen lebih dari total APBD tahun 2015 untuk belanja publik.

Bagaimana cara anda mengatasi persoalan infrastruktur tersebut?

Sebagai daerah yang baru dimekarkan, Kepulauan Meranti masih sangat minim infrastruktur. Kemiskinan infrastruktur masih terlihat jelas di berbagai pelosok pedesaan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Karenanya, Pemkab Kepulauan Meranti harus bekerja keras untuk mengubah potret buram desa-desa di daerah ini menjadi lebih baik dan cerah pada masa akan datang. Setiap tahun Pemkab Kepulauan Meranti berupaya menggenjot percepatan pembangunan infrastruktur di pedesaan. Salah satu upayanya, setiap tahun Pemkab berupaya meningkatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan penyertaan anggaran di program PNPM. Diharapkan dengan kebijakan ini, pada akhir 2015 wajah kumuh desa-

desa di Kepulauan Meranti sudah berubah menjadi lebih baik dan cerah. Tidak ada lagi anak-anak sekolah yang berkubang lumpur dan tidak lagi ada warga di pedesaan yang harus berjalan puluhan kilometer karena buruknya kondisi jalan.

Bagaimana pengelolaan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Meranti?

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi sumber daya alam, baik sektor Migas maupun Non Migas, di sektor Migas berupa minyak bumi dan gas alam, yang terdapat di daerah kawasan pulau Padang. Di kawasan ini telah beroperasi PT Kondur Petroleum, yang mampu produksi 8500 barel/hari. Selain minyak bumi, juga ada gas bumi. Di sektor Non Migas kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi beberapa jenis perkebunan seperti sagu, kelapa, pinang, kopi. Sementara di sektor kelautan dan perikanan juga demikian. Selain itu masih ada potensi di bidang kehutanan, industri pariwisata, potensi tambang dan energi.

Apakah potensi sumber daya tersebut cukup mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan?

Sejauh ini pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Meranti telah mampu dikelola dengan baik, manajemen yang kerarah dan terukur telah memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan dan perkembangan di Meranti ini.

Bagaimana pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu empat tahun belakangan ini?

Pertumbuhan ekonomi tanpa Migas di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2011 menunjukkan peningkatan yang sangat tajam yaitu sebesar 8,45 persen. Angka tersebut mengalami pertumbuhan yang positif dibanding tahun sebelumnya, dimana tahun 2010 pertumbuhan ekonominya sebesar 7,45 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi (termasuk migas)

Kabupaten Kepulauan Meranti mencatat pertumbuhan sebesar 5,93 persen pada tahun 2011. Pertumbuhan ekonomi inilah yang dapat menunjukkan perkembangan agregat Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu sasaran utama yang perlu dicapai dalam pelaksanaan pembangunan. Secara umum jika dilihat per sektornya, keseluruhan sektor ekonomi mencatat pertumbuhan yang positif di atas 2,5 persen. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, hampir semua sektor mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi. Terlihat bahwa sektor bangunan mengalami pertumbuhan tercepat, yaitu tumbuh sebesar 16,41 persen. Sektor berikutnya yang mengalami pertumbuhan terbesar kedua adalah sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan, disusul kemudian oleh sektor pengangkutan dan komunikasi.

Bagaimana cara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya?

Ketika maju pada pilkada Meranti empat tahun silam lalu, apakah sudah ada keyakinan sebelumnya bahwa anda akan memenangkan pertarungan tersebut. Ya, saya optimis dan yakin bahwa akan mampu keluar sebagai pemenangnya ketika itu, karena melihat besarnya dukungan yang diberikan oleh masyarakat ketika itu.

Kini nama anda kembali disebut-sebut sebagai salah satu calon kuat, pada pilkada Meranti tahun 2015 mendatang, komentar anda?

Ha.ha. ha. (sambil tertawa) no coment lah kalau soal itu.

Apakah anda memiliki niat untuk kembali maju pada pilkada 2015 mendatang?

Kalau nanti ada tokoh atau figur kuat yang maju, mungkin saya akan berpikir. Karena status saya saat ini masih seorang PNS dan kebetulan pangkat dan golongan saya juga sudah cukup tinggi, dan saya menghitung

dan melihat bahwa hari ini birokrasi kita khususnya di Provinsi Riau para senior-senior kita sebentar lagi akan banyak yang pensiun, artinya dalam waktu 2 atau 3 tahun kedepan kita akan kekurangan kader-kader senior untuk menjabat jabatan stretegis diberbagai posisi di Provinsi Riau.

Untuk menjadi seorang Bupati itu tidaklah sesulit meniti karir di pemerintahan. Jabatan Bupati merupakan jabatan politik, siapa yang memiliki partai, pendukung maka ia bisa dicalonkan. Namun tidak demikian halnya dengan jabatan struktural di pemerintahan ia mesti melalui jenjang yang panjang bahkan seleksi yang cukup ketat.

Apa mimpi anda untuk Kepulauan Meranti?

Saya ingin masyarakat di Kepulauan Meranti bisa tersenyum menatap masa depan mereka. Bukan seperti jaman saya dulu yang selalu terpinggirkan dan dikalahkan. *

Berbagai Kemajuan Sudah Diraih

Tak hanya sarana dan prasarana yang mengalami kemajuan, berbagai bidang juga mengalami peningkatan seperti halnya bidang ekonomi dan investasi. Begitu juga halnya dibidang perkebunan dan pertanian yang juga menjadi andalan peningkatan perekonomian di Kabupaten Meranti.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis pada tahun 2008 silam. Sebagai kabupaten termuda di Riau, perkembangan kabupaten ini tergolong cukup pesat. Hal inilah yang dikatakan oleh mantan Bupati Bengkalis Azaly Djohan kepada AZAM pekan silam. Menurut dia, semenjak ditetapkan sebagai daerah otonom, perkembangan Kabupaten ini mengalami kemajuan sangat pesat sekali. Terutama dibidang infrastrukturnya seperti jalan dan jembatan yang telah mampu membuka akses wilayah ini lebih cepat.

“Meranti sekarang sudah semakin maju, tidak sama seperti beberapa tahun silam. Infrastruktur seperti jalan dan jembatan juga sudah semakin membaik dan hal tersebut sangat memberikan dampak yang sangat positif bagi kemajuan kabupaten ini,” ujarnya.

Tidak hanya dibidang sarana dan prasarana saja yang mengalami kemajuan. Berbagai bidang juga mengalami peningkatan seperti halnya bidang ekonomi dan investasi. Begitu juga halnya dibidang perkebunan dan pertanian yang juga menjadi andalan bagi peningkatan perekonomian di Kabupaten Meranti ini.

Azzaly juga memberikan apresiasi atas keberhasilan Meranti memproseskan produk-produk sagu hingga ketingkat nasional, bahkan

pemrintah kabupaten juga telah memprogramkan untuk dijadikan sagu sebagai pangan Nasional sebagai pengganti beras.

“Hal itu terbukti melalui festival sagu Nunsatra yang dilaksanakan di Jakarta beberapa waktu lalu yang ikut dan dihadiri oleh beberapa duta Besar dari Negara tetangga dan Negara sahabat. Sehingga sagu meranti saat ini sudah dikenali hingga ke manca Negara,” jelasnya.

Kemudian mengenai pembangunan infrastruktur di wilayah Kepulauan Meranti, dalam kurun waktu lebih kurang 4 terakhir, ia menilai Pemkab Kepulauan Meranti telah begitu gencarnya melakukan pembangunan diberbagai bidang, sejumlah nfrastruktur serta sarana parasarana umum sudah mulai dibenahi.

“Contohnya saja seperti Pasar Modern, Jembatan Selat Rengit , Pelabuhan penumpang dan kargo bertaraf internasional, Jalan Lingkar, Jalan Poros lukun Sungai Tohor dan beberapa infrastruktur lain yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan,” katanya.

Menurut dia, dari sejumlah infrastruktur yang di bangun saat ini di yakin akan mampu meningkat Perekonomian masyarakat serta membuka keterisoliran di sejumlah daerah. Maka dari itu pemerintah disana, juga sudah berhasil mendatangkan sejumlah Invetor luar untuk berinvestasi.

“Tidak sedikit lapangan pekerjaan yang terbuka luas untuk masyarakat, mulai dari mendatangkan Investor yang bergerak bidang Air bersih, di bidang pegelolaan potensi sagu, bidang tambang Timah serta sejumlah perusahaan ,” katanya.

Oleh sebab itulah dalam kesempatan ini, Azaly mengharapkan agar kedepan nantinya kerjasama antara pemerintah daerah dan seluruh masyarakat dapat berjalan lebih baik lagi, sehingga akan tercipta suatu hubungan yang harmonis antara pemimpin dan masyarakatnya dan pada akhirnya akan menghasilkan suatu kerjasama yang baik antara pemerintah dan seluruh komponen yang ada di Kabupaten Siak.

Tentunya apa yang sudah ditorehkan oleh para pemimpin di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak hanya berhenti sampai disitu saja, namun kedepan diharapkan pembangunan di berbagai sektor akan dapat

terus tumbuh lebih baik lagi sehingga kabupaten ini mampu menjadi sebuah kabupaten yang disegani oleh daerah lainnya.

Apa yang sudah dicapai oleh Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini tentunya buah dari hasil kerja keras kita semuanya. Nah, oleh sebab itulah diharapkan kedepan Kabupaten Meranti ini akan dapat tumbuh lebih baik lagi dan segala keberhasilan yang sudah dicapai oleh Kabupaten Meranti ini tentu saja tidak terlepas dari kerjasama antara pemerintah daerah dan seluruh masyarakat di sana, niat, tekad yang bulat dan pantang menyerah telah mampu membuat Kabupaten Kepulauan Meranti dapat tumbuh dan berkembang dengan baik seperti saat sekarang ini.

“Inilah buah dari hasil kerja keras antara pemerintah daerah dan seluruh masyarakat di sana, sehingga kabupaten Kepulauan Meranti dapat tumbuh dan berkembang begitu pesatnya seperti saat sekarang ini,” pangkasnya.*

Hasil Karyanya Sudah Terwujud

Apa yang menjadi perjuangan pemerintah Kabupaten Meranti dan seluruh unsur yang ada di dalamnya saat ini sudah mulai terwujud. Berbagai hasil karya Irwan Nasir selaku Bupati sudah mulai terpampang jelas dimata masyarakatnya.

Setelah resmi memisahkan diri dari kabupaten induknya yakni Kabupaten Bengkalis pada bulan Desember 2008 silam, Kabupaten Kepulauan Meranti terus berupaya berbenah mengejar berbagai ketertinggalannya. Sebagai kabupaten termuda di Provinsi Riau ini, Meranti terus berusaha menesejajrkan dirinya dengan daerah-daerah di Riau ini yang sudah lebih duluan di tetapkan sebagai daerah otonom.

Lima tahun usia Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan usia yang terlalu muda bagi sebuah daerah. Dalam rentang waktu 5 tahun sejak berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti, penuh dengan riak dan dinamika sejarah. Sebagai Kabupaten termuda di Provinsi Riau, Kepulauan Meranti merupakan kabupaten yang masih dalam tahap pencarian jati dirinya. Dalam konteks pencarian identitas ini, Kepulauan Meranti terus berbenah dan bersolek untuk menatap masa depan yang jauh lebih baik.

Salah seorang tokoh masyarakat Bengkalis Fadlah Sulaiman, yang tahu betul bagaimana sejarah terbentuknya kabupaten ini kepada AZAM mengatakan bahwa semenjak ditetapkan sebagai salah satu daerah otonomi baru di Riau ini, kabupaten Kepulauan Meranti sudah banyak mengalami kemajuan. Bahkan ia menyebut semenjak di pimpin oleh Bupati pertamanya Drs.Irwan Nasir, M.Si Kabupaten ini seolah terus berpacu mensejajarkan dirinya dengan daerah lainnya di Riau ini.

Apa yang menjadi perjuangan pemerintah Kabupaten Meranti dan seluruh unsur yang ada didalamnya menurut Fadlah saat ini sudah mulai dapat terwujud. Berbagai hasil karya Irwan Nasir selaku Bupati sudah mulai terpampang jelas dimata masyarakatnya.

“Luar biasa, barangkali itulah kata-kata yang tepat melihat kondisi dan perkembangan kabupaten Kepulauan Meranti saat ini,” ujarnya.

Fadlah yakin dengan berbagai potensi yang dimilikinya, Kabupaten Meranti akan mampu berkembang lebih maju lagi. Berbagai potensi sumber daya alam baik sektor Migas maupun Non Migas, di sektor Migas berupa minyak bumi dan gas alam, yang terdapat di daerah kawasan pulau Padang. Di kawasan ini juga katanya telah beroperasi PT Kondur Petroleum yang mampu memproduksi 8500 barel/hari. “Ini salah satu potensi sumber daya alam yang jika dikelola dengan baik maka akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan Meranti,” ungkapnya.

Selain itu juga salah satu potensi daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Meranti adalah, adanya sebuah kota perdagangan yakni kota Selat Panjang. Geliat kota Selatpanjang terus meningkat semenjak Meranti melepaskan diri dari Bengkalis. Kebijakan Pemkab Kepulauan Meranti yang mampu menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif, menjadikan kota Selatpanjang dengan segala keunggulannya semakin berkembang pesat. Jaminan keamanan dunia usaha dan investasi, mampu menarik dunia usaha menanamkan modalnya di kota Selatpanjang.

Pertumbuhan Kota Selatpanjang yang meningkat, tidak hanya menjadi magnet bagi aktifitas dunia perdagangan. Disisi lain, perkembangan kota Selatpanjang turut menarik para pencari kerja menjadikan kota ini sebagai tujuan. Dampak dari kondisi ini, pertumbuhan jumlah penduduk di kota Selatpanjang turut meningkat. Kondisi ini menunjukkan betapa pesatnya penambahan penduduk di Selatpanjang pasca pemekaran.

“Nah, potensi-potensi seperti inilah yang saat ini telah mampu dikelola dengan baik sehingga mampu memberikan konstirbusi yang luar biasa bagi kemajuan dan perkembangan di Kabupaten Kepulauan

Meranti,” kata Ketua Riau Tourist And Board ini.

Sebagai salah seorang yang pernah bersentuhan dengan berbagai daerah bekas kewedanan Kabupaten Bengkalis ini, Fadlah berharap kedepannya Pemerintah Kabupaten Meranti mampu mewujudkan cita-cita dan harapan para tokoh dan pendiri kabupaten ini, sehingga apa yang sudah mereka korbankan demi perjuangan terbentuknya kabupaten ini tidak tersa sia-sia.

Selain itu juga Fadlah memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada pemerintah daerah Kepulauan Meranti. Mulai dari Buapti Irwan Nasir, seluruh unsur muspidanya dan para tokoh masyarakat disana yang selalu menanamkan semangat kebersamaan dan persatuan guna mewujudkan cita-cita dan harapan masyarakat Kabupaten Meranti.

“Apresiasi yang tinggi saya sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah bekerja keras guna membangun Kabupaten Meranti sehingga apa yang menjadi harapan dari masyarakat di sana sudah mulai dapat dirasakan,” pangkasnya.*

Belum Ada Tokoh yang Tandingi Irwan

Jika pemilukada dilakukan saat ini, Irwan Nasir sudah menang 50 persen dari lawannya. Itu lantaran keberhasilannya membawa Meranti seperti sekarang ini.

Hal itu dikatakan Idris SKm salah seorang tokoh pers Riau yang saat ini berdomisili di Kabupaten Meranti. Dimata pria yang kini menekuni bisnis perkapalan ini, Irwan Nasir adalah sosok pemimpin yang memiliki visi dan komitmen yang jelas untuk membangun daerahnya.

Sehingga, perkembangan Kabupaten Meranti dibawah kepemimpinan Irwan terlihat sangat pesat. Itu berkat kegigihannya dalam membangun daerah kelahirannya. “Irwan adalah sosok yang jago meloby pemerintah pusat untuk mendatangkan dana pembangunan bagi Meranti,” ujar Idris.

Pernyataan Idris ini ternyata juga ditunjang oleh data. Masa awal kepemimpinan Bupati Irwan, Kepulauan Meranti hanya memiliki Rp600 miliar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun APBD tersebut terus meningkat setiap tahunnya hingga saat ini mencapai Rp1.6 Triliun lebih.

Itu semua, kata Idris, berkat perjuangan dan kegigihan Bupati Irwan Nasir. Dia juga mengatakan, sejauh ini penggunaan APBD tersebut dinilai masih tepat sasaran, tepat manfaat serta berpihak kepada masyarakat.

Meski disana sini masih perlu ada perbaikan, seperti gagalnya pembangunan jembatan, pelabuhan dan infrastruktur lainnya. Namun Idris yakin, diakhir masa kepemimpinannya, Irwan Nasir dapat menyelesaikan semua itu.

Sebagai salah seorang tokoh pers, Idris juga menilai, Bupati Irwan Nasir adalah sosok yang demokratis, bisa menerima kritikan dan masukan dari orang lain. Demikian pula masukan dan kritikan dari media massa.

Irwan Nasir, kata Idris, memberi peluang untuk perkembangan pers di Kepulauan Meranti. Media massa, baik cetak, elektronik maupun on line, diakomodir dengan baik. Karena Irwan memandang media adalah mitranya dalam membangun Kepulauan Meranti.

Ditambahkan Idris, Bupati Irwan bukan hanya suka terhadap pemberitaan yang mengangkat kebaikan atau keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, tetapi juga membiarkan berkembangnya media yang juga mengangkat sisi negatif atau kelemahan pemerintah. Karena dari situ, dia dapat mengetahui dan mengevaluasi hasil kerjanya selama ini.

“Di Kabupaten Kepulauan Meranti media massa berkembang dengan pesat. Daerah ini kini menjadi tempat perburuan orang-orang yang berusaha dibidang pemberitaan,” ujar Idris.

Menurut Idris lagi, maraknya media massa di Kepulauan Meranti, juga menjadi indikator kemajuan yang telah dicapai daerah ini. Geliat ekonomi bukan hanya bersumber dari dana APBD tetapi juga datang dari sektor usaha yang berkembang dengan pesat.

“Tadi saya baca di salah satu media, Kepulauan Meranti adalah daerah tujuan terbanyak para investor,” ujar Idris.

Dia juga yakin jika Irwan Nasir kembali maju di Pemilu pada untuk kedua kalinya, maka Irwan akan dapat memenangkan pertarungan. Selain keberhasilannya sudah terlihat dan dirasakan oleh masyarakat, figur yang sepadan yang akan bertarung belum kelihatan.

“Saya melihat Irwan Nasir sudah menang 50 persen saat ini. Selain keberhasilannya sudah dilihat dan dirasakan masyarakat, tokoh yang muncul untuk menandinginya belum kelihatan,” ujar pria yang kini juga menjadi Bedahara PWI Kepulauan Meranti ini.*

Pemimpin yang Berkarakter

Dari prosentase hasil suara yang didapat oleh pasangan ini pada pemilu pada empat tahun silam yakni sekitar 30 persen lebih, menunjukkan bahwa pasangan ini merupakan pemimpin yang betul-betul mendapatkan pengakuan atau legitimasi yang cukup kuat dari masyarakat disana. Pemimpin yang kuat, berkarakter akan memberikan kekuatan besar untuk membangun Meranti dan mengejar berbagai ketertinggalannya dengan daerah lain.

Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2015 mendatang kurang dari 1 tahun, sejauh ini pula nama-nama kandidat yang diprediksi akan berlaga dalam Pilkada nanti sudah mulai bermunculan. Salah satunya adalah nama Drs Irwan Nasir, M.Si yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati kepulauan Meranti.

Nama Irwan Nasir digadang-gadangkan bakal kembali memperpanjang jabatannya di Kabupaten Kepulauan Meranti. Banyak kalangan yang menilai peluang Irwan untuk kembali terpilih menakhodai bekas daerah kewedanan Bengkalis ini cukup terbuka lebar. Salah satunya datang dari pengamat politik UR Saiman Pakpahan. Menurutnya peluang Irwan sebagai incumbent jelas sangat terbuka lebar, alasannya selama ini belum ada terdengar gonjang-ganjing tentang kepemimpinannya.

Sebagai Bupati pertama yang dipilih secara langsung oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, jelas Irwan telah menorehkan sejarah baru dalam perjalanan Kabupaten ini. Tidaklah mudah bagi seorang kepala daerah dalam meletakkan dasar-dasar pembangunan di daerah yang baru saja berpisah dari kabupaten induknya dan membentuk daerah otonom sendiri.

Nah, menurut dosen fisipol UR ini, Irwan cukup berhasil dalam memenej dan mengelola kabupaten ini meskipun pemerintahannya baru

terbentuk. “ Inilah salah satu faktor kenapa peluang Irwan sebagai Bupati incumbent akan terbuka lebar,”ujarnya.

Dengan kondisi seperti ini jelas dari sisi politis posisi Irwan sebagai incumbent akan diuntungkan, sebab popularitasnya dimata masyarakat Kepulauan Meranti cukup tinggi. Bila kita coba flasback kebelakang sejenak sejarah politik yang baru pertama kali terjadi pasca terbentuknya Kabupaten Kepulauan Meranti. Salah satunya untuk pertama kali, pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Pasangan Irwan Nasir- Masrul Kasmy menjadi bupati pertama, di kabupaten termuda di Provinsi Riau ini. Pasangan ini yang dijagokan oleh beberapa partai pengsusng seperti Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Bulan Bintang.

Proses terpilihnya seorang pemimpin kata Saiman menjadi gambaran dan sejarah dalam percaturan politik disuatu daerah termasuk di Kabupaten Kepulauan Meranti ini. Oleh sebab itulah proses pemilukada di Kepulauan Meranti pada empat tahun silam menurutnya, paling tidak telah menggambarkan bagaimana kekuatan individu dari sicalon dan kemampuan kerja dari mesin partai merupakan salah satu faktor penentu dalam sebuah pertarungan politik.

“Paling tidak, dari proses Pilkada pada empat tahun lalu di Kabupaten Meranti telah tergambar, bagaimana kekuatan individu dan pergerakan mesin partai menjadi salah satu faktor penentu. Jika faktor terpilihnya Irwan Nasir adalah karena kekuatan individu, tentunya ia seorang pemimpin yang benar-benar dicintai oleh rakyat, pemimpin yang legitimej,” ungkapnya.

Ikatan batin antara pemilih dan pemimpinnya menjadi sinergi yang mampu memberikan kekuatan besar bagi seorang kepala daerah dalam melakukan berbagai terobosan serta program yang betul-betul pro rakyat, dan tentu saja program itu mendapat dukungan secara nyata oleh masyarakat disana.

Dari prosentase hasil suara yang didapat oleh pasangan ini pada pemilukada empat tahun silam yakni sektar 30 persen lebih, menunjukan

bahwa pasangan ini merupakan pemimpin yang betul-betul mendapatkan pengakuan atau legitimasi yang cukup kuat dari masyarakat disana. Pimimpin yang kuat, berkarakter akan memberikan kekuatan besar untuk membangun Meranti dan mengejar berbagai ketertinggalannya dengan daerah lain.

Tidak hanya legitimasi dari masyarakat, dalam catatan Saiman juga menilai bahwa pasangan ini juga mendapat dukungan poltis yang kuat dari parlemen untuk mengamankan berbagai kebijakan pemerintah. supaya jalannya roda pemerintah akan terasa lebih mudah dan tidak mendapatkan batu sandungan di parlemen. Sebab tanpa adanya sokongan dari parlemen maka sulit juga rasanya bagi pemerintah untuk mensinerjikan berbagai kebijakan yang akan dibuat nantinya.

Pasangan Irwan-Masrul telah memiliki keduanya, legitimasi dari masyarakat serta memiliki sokongan yang kuat dari parlemen. Apakah dukungan serta sokongan yang selama ini menjadi kekuatan bagi Irwan dalam membangun dan meletakkan dasar-dasar pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti juga kembali terulang pada pililukda 2015 mendatang ?, tentu saja ini semua kata Saiman akan sangat bergantung kepada dinamika politik menjelang perhelatan pililukada disana.

Meskipun dukungan rakyat sudah ada digenggaman, namun sokongan partai politik tidak bisa diabaikan begitu saja. Dalam sistem demokrasi kekuatan parpol menjadi salah satu elemen penting dalam sebuah proses politik pemilihan seorang kepala daerah. "Irwan harus mampu membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan politik disana sedari dini," pungkasnya. *

Kepulauan Meranti Berlari Kencang

Kabupaten Kepulauan Meranti baru berusia enam tahun lebih. Ibarat manusia, umur enam tahun itu baru duduk di kelas 1 Sekolah Dasar (SD). Meski masih bocah, Meranti beda karena sudah mampu berprestasi.

Pesatnya perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kepulauan Meranti juga dimanini oleh Darwin Susandy S.Hum yang merupakan Ketua Fraksi PAN DPRD Kepulauan Meranti. Menurut dia, Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini telah bisa disejajarkan dengan kabupaten lainnya yang sudah duluan dimekarkan.

Padahal usianya baru genap enam tahun. Ibarat manusia, umur enam tahun itu baru duduk di kelas 1 Sekolah Dasar (SD), sebuah umur yang memang belum bisa diharap banyak, karena masih katagori bocah. Tapi Meranti beda. Walaupun baru seumuran anak sekolah dasar, sudah mampu berprestasi. Berbagai penghargaan berhasil ditoreh. Sebut saja pernah meraih penghargaan Invesment Award dan Achievment Award dari Pemerintah Provinsi Riau pada 2012 lalu. Maka ibarat bocah tadi, Meranti tergolong anak cerdas yang terus tumbuh dengan sehat.

“Coba kita merenung sejenak mengenang Meranti enam tahun lalu. Selat Panjang sebagai ibu kota Meranti sekarang, hanyalah sebuah kota kecamatan dengan geliat pembangunan biasa-biasa saja, standar pembangunan sebuah kota kecamatan dengan kekuatan anggaran yang sangat minim,” katanya.

Maka sepatutnya ucapan terima kasih tak terhingga kita aturkan kepada para pejuang pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti yang berhasil memisahkan Meranti menjadi daerah mandiri dari Kabupaten

Induk Bengkalis. Mereka sudah berjuang gigih dan tak pernah berpikir bagaimana perior rumah sedang kosong, tapi dengan tekad kuat, tetap bersikukuh bagaimana Meranti bisa jadi kabupaten hingga akhirnya Meranti benar-benar terbentuk.

“Luar biasa jasa-jasa pahlawan Meranti. Jasamu tak bisa kami balas dengan hanya kata-kata terima kasih. Mudah-mudahan titipan harapan kepada kami yang muda, dengan semangat yang sama, pembangunan Meranti kelak jauh lebih maju sesuai adat istiadat Melayu yang religius,” ungkapnya.

Dia mengatakan, potensi untuk maju sudah semakin terlihat terang, karena didukung banyak potensi daerah yang cukup menjanjikan. Misalnya saja soal potensi sagu yang kini mulai dikenal luas, dan mungkin sudah merambah pasar Internasional.

Tanaman sagu ini memang sudah sejak dulu menjadi primadoma masyarakat Meranti. Jika orang-orang datang ke Meranti, Selat Panjang khususnya, pasti banyak pesan dibawa oleh-oleh sagu. Maka image Selat Panjang sebagai kota sagu sudah semakin melekat. Ini peluang, tinggal bagaimana produksinya terus ditingkatkan sampai dengan produk-produk turunannya, sehingga kelak bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa diandalkan.

Infrastruktur di sana-sini juga terus dibenah. Kalau dulu mobil hanya bisa dihitung jari hilir mudik di Selat Panjang, tapi kini sudah mulai menyemut. Secara bertahap jalan-jalan utama juga sudah dibangun lebar. Listrik-listrik juga sudah terus berangsur sampai ke pelosok-pelosok desa dan pulau-pulau.

Pembangunan di sana sini juga terus bergeliat. Hotel-hotel dan penginapan terus tumbuh di Selat Panjang. Pusat perbelanjaan semacam mal, juga akan berdiri. Artinya perputaran uang di Meranti akan semakin besar, menyusul makin ramainya investor berdatangan ke Meranti untuk berinvestasi.

Terbukti APBD Meranti juga terus meningkat. Kalau dibandingkan saat masih berbentuk kecamatan, maka sekarang jauh lebih besar dan

sudah menyentuh angka triliunan. Ini bukti Meranti yang baru seumur-anak SD, tapi sudah mampu memperlihatkan jati dirinya yang cerdas dan maju, bahkan bisa berlari kencang.

“Untuk itu, kita semua yakin dan optimis, dengan sejumlah potensi yang ada dan semua kita saling bersinergi dengan baik, maka Meranti siap mengejar berbagai ketertinggalannya dengan menjelma menjadi daerah berkembang dan maju. Saya yakin kita bisa lebih hebat dari daerah lainnya,” jelasnya.

Dia berharap semoga tahun-tahun kedepan Meranti makin jaya dan berkembang. “Saya juga berdoa agar pemimpin-pemimpin kita di Meranti dengan berbagai tingkatan, diberi kesehatan. Sehingga lancar dalam melaksanakan tugas-tugas negara, amin,” tutupnya.*

BAGIAN I



Pilkada Serentak: Masih Milik *Incumbent*?

Kepala daerah yang exelent biasanya selalu mendapatkan kesempatan untuk kedua kalinya. Bagaimana dengan Yopi di Inghu, Irwan di Meranti, Herliyan di Bengkalis, dan Khairul di Dumai?

Tak terasa, waktu lima tahun hampir berlalu. Itu artinya, sejumlah kepala daerah di Riau telah habis masa jabatannya. Jika Juni 2010 lalu dilakukan Pilkada serentak di empat kabupaten, maka di tahun 2015 tepatnya 16 Desember, akan dilakukan pemungutan suara di empat daerah tersebut.

Maka jangan heran, di empat daerah tersebut tensi politiknya sudah mulai memanas. Suasana pilkada pun sudah mulai terasa. Mulai dari munculnya baliho-baliho bakal calon maupun diskusi-diskusi masyarakat di kedai kopi. Semua itu tentu wajar terjadi. Soalnya, tahapan pilkada itu sendiri sudah mulai dilaksanakan KPU sebagai penyelenggara. Sejak awal Januari, kata Ketua KPU Riau Nurhamin SPt, tahapan pilkada sudah dimulai. Yaitu tahapan persiapan oleh KPU dengan menerbitkan PKPU dan selanjutnya pembentukan PPK, PPS dan KPPS. Sedangkan hari H pemungutan suara akan dilaksanakan pada 16 Desember 2015.

Empat daerah itu antara lain, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Indragiri Hulu suasana politik mulai memanas. Dan serba kebetulan pula, di empat daerah tersebut kepala daerah yang saat ini sedang menjabat alias incumbent kembali akan bertarung. Mereka antara lain, Kharul Anwar di Dumai, Herliyan Saleh di Bengkalis, Irwan Nasir di Meranti dan Yopi Arianto di Inhu. Mereka baru satu periode menjabat dan akan mempertahankan kursi kekuasaannya untuk lima tahun kedepan. Sebagai incumbent mereka tentu saja sudah punya modal. Bukan hanya modal materi, tetapi

juga non materi seperti popularitas di tengah masyarakat. Inilah yang kemudian menjadi keuntungan bagi seorang incumbent dalam setiap pilkada. Dia sudah maju satu langkah meninggalkan calon lainnya.

Jika calon lain baru mau mulai bersosialisasi, incumbent sejatinya sudah melakukan itu selama lima tahun. Nah, jika incumbent ada yang tumbang, tentu bisa dibayangkan seperti apa dia memimpin selama lima tahun. Kepala daerah yang exelent biasanya selalu mendapatkan kesempatan untuk kedua kalinya. Bahkan, di daerah lain, seorang kepala daerah (incumbent) tak perlu lagi mengeluarkan dana banyak untuk pilkada berikutnya. Itu lantaran masyarakat sudah melihat dan merasakan apa yang dia lakukan selama lima tahun.

Pengamat politik Saiman Pakpahan mengatakan, sejauh ini peluang calon incmbent masih tetap terbuka lebar. Sebab menurut dia, dari fakta politik yang terjadi selama ini khususnya di Riau, incumbent selalu diunggulkan dalam setiap kontestan politik. Saiman menilai ada beberapa faktor mengapa posisi incumbent selalu diunggulkan, karena beberapa faktor yang menjadi kelebihanannya.

Pertama, mempunyai modal popularitas dan elektabilitas yang teruji. Sosok incumbent menjadi lebih terkenal dan berkemungkinan dipilih kembali karena, jabatan politiknya memberikan ruang kepadanya, untuk dikenal dan ditokohkan oleh masyarakat sebagai pemimpin formal. Keistimewaan inilah, yang selalu dimanfaatkan oleh setiap incumbent untuk meningkatkan popularitas dan daya tarik personal. Namun sebaliknya, Incumbent yang tidak mampu memanfaatkan keunggulan komparatif formal, malah justru menjadi boomerang yang dapat merusak citra dan popularitasnya.

“Jadi semua akan sangat bergantung dengan apa yang sudah dibuat dan seperti apa penilaian masyarakat terhadapnya,” ujar Dosen Fisipol UR ini. Faktor selanjutnya adalah Pengalaman politik yang dimiliki oleh calon incumbent. Jika lawan politik incumbent dalam pertarungan politik, adalah orang yang belum memiliki pengalaman bertarung pada perhelatan kepala daerah secara langsung, maka sudah pasti akan kesulitan melawan

sosok incumbent yang telah unggul duluan secara matematis, dengan kalkulasi suara awalnya pada pemilukada sebelumnya. Apalagi, melawan incumbent yang sangat populis dan disukai oleh masyarakat. Ruang kampanye yang lebih terbuka dengan kemasan program pemerintah, juga akan semakin membuka peluang bagi incumbent, untuk melakukan berbagai pendekatan kedalam bentuk pelaksanaan program Pemerintah yang selalu melekat pada diri seorang kepala daerah.

Masyarakat selalu menyamakan posisi kepala daerah secara personal, dengan program pemerintahan yang dibuatnya. Jika berhasil, maka program tersebut adalah keberhasilan kepala daerah dalam menjalankan program serta visi kerjanya kepada masyarakat. “Sebaliknya jika gagal, maka kepala daerah akan kehilangan legitimasi ketokohnya. Hal-hal seperti ini akan selalu melakat selama masa pemerintahan seorang kepala daerah,” terangnya.

Dalam setiap pelaksanaan pilkada menurut Saiman, posisi incumbent akan selalu menjadi obyek diskusi dan analisa banyak orang yang menarik untuk diperbincangkan. Alasannya sederhana, karena sebagai orang yang sedang berkuasa, kiprahnya selama memimpin menjadi obyek evaluasi rakyat dalam memberikan raport akhir, apakah nilainya baik atau buruk yang berimplikasi pada sebuah keputusan dan sikap politik yang diambil oleh masyarakat.

Salah seorang tokoh masyarakat Riau Tengku Lukman Jaafar kepada AZAM mengharapkan, masyarakat yang akan menggelar hajatan politik lima tahunan tersebut hendaknya mengikuti proses ini dengan cara-cara yang baik. Jangan sampai antar sesama kita terjadi gesekan yang mengakibatkan timbulnya berbagai macam bentuk konflik di tengah masyarakat.

Selain itu juga, Pak TL, sapaan akrab Tengku Lukman, menghimbau masyarakat yang berada di empat daerah tersebut untuk tidak menunjukkan perilaku yang terlalu berlebih-lebihan. “Silahkan berpesta namun harus tetap memperhatikan kemanan, dan ketertiban. Dan yang paling penting harus sama-sama saling menghormati dan saling

menghargai,” ujar mantan Sekdaprov Riau ini.

Pemilihan seorang kepala daerah merupakan sebuah proses politik yang harus sama-sama kita jalani dan kita beri dukungan. Masyarakat sebagai pemilih harus benar-benar memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya, supaya apa yang menjadi keinginan masyarakat akan dapat terlaksana. Pilihlah pemimpin yang mampu bertindak sebagai imam ditengah-tengah masyarakat yang dipimpinnya.

Kepada pihak penyelenggara Tengku Lukman juga menitipkan pesannya supaya pelaksanaan pilkada serentak yang digelar di empat daerah di Riau tersebut nantinya betul-betul dapat berjalan jujur, adil, dan transparan. Dan yang paling penting katanya, hindarkan berbagai macam bentuk politik uang. “Saya berharap penyelenggaraan pilkada serentak di empat daerah di Riau betul-betul dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Selain itu juga pilkada tersebut berjalan dengan jujur, adil dan transparan, sehingga akan dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas,” terangnya.

Pemilihan kepala daerah nantinya, hendaknya betul-betul menjadi momentum untuk mencari pemimpin yang lebih baik, pemimpin yang mau memperhatikan nasib rakyatnya. Maka dari itulah pilihlah pemimpin sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat.

“Jangan memilih pemimpin hanya karena diberi sesuatu ataupun dibujuk untuk menerima sesuatu,” harapnya. Terkait kembali majunya para incumbent di pilkada empat daerah itu, Tengku Lukman mengatakan bahwa setiap pilkada posisi incumbent akan selalu diatas angin. Sebab katanya, incumbent telah lebih dulu melakukan dan meraih simpati dari masyarakat melalui program-program yang dijalaninya selama menjabat. Namun dengan adanya aturan baru yang mengharuskan setiap incumbent harus terlebih dulu mundur jika ingin kembali mencalonkan diri menurut Tengku Lukman, ini merupakan hal yang positif sehingg persaingan yang terjadi akan terasa adil tanpa memanfaatkan jabatan untuk kepentingan politik.*

(Herliyan Saleh)

Sosok Cerdas dan Kaya Ilmu

Jika melihat track record Herliyan Saleh, kita pastilah berdecak kagum. Terutama ketika melihat riwayat pendidikan yang ditempuhnya. Gelar sarjana diraihnya dari perguruan tinggi bergengsi di tanah air, yaitu Institut Pertanian Bogor (IPB).

Sedangkan gelar master perencanaan diraihnya dari luar negeri. Yaitu sebuah universitas ternama di negeri Paman Sam Amerika Serikat (Graduate School of Planning, University of Tennessee, Knoxville, TN, US).

Usai menuntut ilmu di luar negeri, Herliyan Saleh bekerja sebagai PNS di Pemkab Bengkalis. Karena ahli perencana, dia ditempatkan di Bappeda. Mulai dari menjadi seorang staf, hingga akhirnya dia menjadi sorang kepala.

Prestasi yang bagus membuat Herliyan ditarik ke provinsi. Di provinsi pun Herliyan kemudian mengaplikasikan ilmu yang dimilikinya di Bappeda Riau. Dia pun sampai di puncak karir sebagai ahli perencanaan yaitu dengan menjabat sebagai Kepala Bappeda Riau.

Selain itu, berbagai jabatan penting di Pemprov Riau pernah pula dia emban. Dia pernah menjadi salah seorang asisten gubernur, kepala dinas bahkan pernah pula menjadi Pjs Sekdaprov Riau.

Herliyan Saleh sebenarnya sudah sejak lama ingin menjadi orang nomor satu di Bengkalis. Dia ingin menjadi kreator pembangunan di negeri terubuk itu. Namun waktu ikut pilkada pertama di tahun 2000, dia dikalahkan oleh Syamsurizal.

Pada tahun 2005, Herliyan Saleh juga belum mampu menumbangkan Syamsurizal yang kembali terpilih untuk kedua kalinya menjadi bupati.

Herliyan Saleh baru berhasil merebut kursi bupati pada tahun 2010 melalui pilkada langsung yang dilaksanakan serentak di empat kabupaten pada Juni 2010. Diantara empat kabupaten tersebut adalah, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Kota Dumai dan Indragiri Hulu.

Ketika itu Herliyan Saleh yang berpasangan dengan Suayarno. Pasangan ini berhasil mengalahkan pasangan lainnya dan kemudian ditetapkan dan dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis periode 2010-2015. Jadilah pasangan ini sebagai birokrat berpengalaman dan politisi santun yang telah mendayung Bengkalis selama lima tahun. Kini, Herliyan Saleh bakal kembali menghadapi pilkada 2015.

Dia akan diuji apakah mampu mempertahankan kursi bupati di salah satu kabupaten tertua di Riau ini. Atau kalah oleh para penantang yang juga berminat menjadi bupati. Wilayah Kabupaten Bengkalis mencakup daratan bagian timur pulau Sumatera dan wilayah kepulauan, dengan luas sekitar 7.793,93 km². Ibukota kabupaten ini berada di Bengkalis tepatnya berada di Pulau Bengkalis yang terpisah dari Pulau Sumatera. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di muara sungai Siak, sehingga dikatakan bahwa Pulau Bengkalis adalah delta sungai Siak.

Kota terbesar di kabupaten ini adalah kota Duri di kecamatan Mandau. Nah, kabarnya, selain memiliki basis dukungan yang kuat di Pulau Bengkalis, Herliyan juga kuat di Pinggir, Duri dan Mandau. Penghasilan terbesar Kabupaten Bengkalis adalah minyak bumi yang menjadi sumber terbesar APBD-nya bersama dengan gas.

Kabupaten Bengkalis mempunyai letak yang sangat strategis, karena dilalui oleh jalur perkapalan internasional menuju ke Selat Malaka. Bengkalis juga termasuk dalam salah satu program Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle (IMS-GT) dan Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT).*

(Khairul Anwar) Kembali Tarung Meski Diterpa Isu

Meski diterpa berbagai isu miring sejak masa awal kepemimpinannya, Khairul Anwar tidak patah arang mengemban amanah untuk membangun Kota Dumai.

Wali Kota hasil pilkada Juni 2010 ini mengakui bahwa sejak dia dilantik sebagai Wali Kota Dumai periode 2010-2015 pada 12 Agustus 2010 lalu hingga saat ini berbagai isu miring sering dilontarkan orang kepadanya. Padahal menurut dia, kala itu baru efektif melaksanakan tugas selama satu setengah bulan. Sisanya dihabiskan untuk membekali diri pada pendidikan kepemimpinan di Lemhanas, Jakarta.

Berbagai isu tak sedap itu, seperti dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Dumai. Selain itu, dia juga dituding sebagai pejabat yang terlalu banyak bermimpi dengan konsep-konsep pembangunan yang diwacanakannya. Begitu pula, dia dituding sebagai pemimpin yang tak mengutamakan kepentingan masyarakat kecil, karena berangan-angan untuk membangun menara tiang bendera tertinggi di Indonesia.

Bahkan, lebih parah lagi, dia dituding menerima suap dalam mendudukkan pejabat pada jabatan struktural Pemerintah Kota Dumai beberapa waktu lalu. Tidak hanya itu, tuduhan bersikap primordial juga diarahkan kepadanya untuk memilih pejabat yang akan membantunya dalam menyukseskan roda kepemimpinan lima tahun akan datang.

Lelaki kelahiran Bengkalis 17 Maret 1963 ini mengaku memasang niat ikhlas membangun Kota Dumai. Karena itulah perjuangan panjangnya

untuk menjadi Wali Kota Dumai akhirnya mendapat terakabul. Namun untuk sampai ke kursi wali kota, langkah politik mantan Pemimpin Devisi Treasury dan Internasional Bank Riau ini tidaklah mudah. Dia mesti menghadapi dua kali pertarungan dalam pemilihan kepala daerah.

Kegagalan pada pemilihan kepala daerah tahun 2005 lalu menjadi pelajaran berharga baginya untuk mempersiapkan diri ikut kembali dalam helat akbar demokrasi secara langsung pada Pemilhan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Dumai kedua kalinya pada 3 Juni 2010 silam.

Padahal, pada pilkada tahun 2005, Khairul Anwar yang berpasangan dengan Zulkifli Ahad itu jauh tertinggal dalam perolehan suara dengan pasangan calon lainnya, seperti pasangan Zulkifli AS dan Sunaryo yang kala itu sebagai pemenang. Begitu juga bila dibandingkan dengan perolehan suara pasangan incumbent Wan Syamsir Yus dan Mustar Effendi.

Namun, pada Pemilukada 3 Juni 2010 lalu, bintang pria yang pandai memasak ini bersinar terang. Khairul Anwar dan pasangannya Agus Widayat berhasil menumbangkan kepemimpinan Zulkifli AS dan Sunaryo, meskipun pasangan incumbent itu numpang perahu besar karena didukung oleh 12 partai. Takdirnya memang sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa untuk memimpin Kota Dumai periode 2010-2015.

Kini penyandang gelar sarjana hukum ini akan kembali menghadapi pemilukada 2015. Sebagai incumbent dia akan berusaha mempertahankan kursi wali kota. Apakah Khairul Anwar kembali terpilih atau sebaliknya tumbang oleh penangnya? Kita lihat pada hari H nya bulan Desember 2015 ini.

Jika kembali diberi kepercayaan menjadi nahkoda Kota Dumai, dia akan terus melancarkan visi pembangunannya. Dia ingin mewujudkan Kota Dumai sebagai pusat pelayanan Pelabuhan, Perdagangan, Turism, dan Industri.*

(Irwan Nasir) Ingin Wujudkan Mimpinya

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak di empat kabupaten dan kota di Riau Juni 2010 lalu, di 2015 ini akan kembali terulang. Jika lima tahun lalu Irwan Nasir mencatat sejarah sebagai bupati pertama di Kepulauan Meranti, apakah periode kedua dia akan kembali terpilih?

Jawabanya, tunggu tanggal mainnya Bulan Desember 2015 ini. Yang pasti, Irwan Nasir telah menyatakan kesiapannya untuk kembali naik ring pilkada. Lima tahun lalu, Irwan dijagokan Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Bulan Bintang, dengan meraih 28.086 atau 34,6 persen suara. Dia mengalahkan kandidat lainnya yang tak kalah populer dan kuat. Namun Irwan sudah ditakdirkan untuk menjabat sebagai Bupati untuk periode 2010 - 2015.

Dia selalu menyebut daerah yang dipimpinnya sebagai wajahnya Riau dan Indonesia. Sebagai 'wajah', kata dia, Kabupaten Kepulauan Meranti mestinya dirawat dengan baik. Bukan dibiarkan 'bopeng' karena anggaran pembangunannya minim.

Jika diibaratkan anggota tubuh manusia, jelas Irwan, wajah merupakan daerah yang paling banyak biaya perawatannya. Wajah selalu dikasi bedak, facial, masker dan sebagainya. Bahkan ada pula perbedaan bedak untuk siang dan bedak malam. Pendek kata, wajah mendapat porsi nomor satu dari segi perawatan. Karena orang akan memandang ke wajah terlebih dahulu.

Nah, sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga, Meranti diibaratkan sebagai wajahnya negeri kita. Bahkan, Kabupaten Kepulauan Meranti diibaratkan pula sebagai miniaturnya

Indonesia. Karena merupakan kabupaten maritim yang terdiri dari beberapa pulau. Di Riau, hanya Merantilah kabupaten yang berada di daerah terluar yang berbentuk daerah kepulauan. Sementara daerah lainnya, merupakan daerah daratan dan pesisir. Dengan demikian, kata Irwan, selayaknya pemerintah provinsi dan pusat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kabupaten yang baru dibentuk pada tahun 2008 ini.

Bukan sebaliknya, membiarkan Kabupaten Meranti kesulitan dalam melakukan pembangunan infrastruktur dan mensejahterakan masyarakatnya karena minimnya alokasi anggaran. Meski begitu, berkat kegigihan Sang Bupati, APBD yang dulunya hanya Rp600 miliar, tiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Untuk tahun 2015, APBD Kepulauan Meranti di perkirakan mencapai Rp1,67 triliun. Usaha peningkatan APBD tersebut, menurut Irwan Nasir, diupayakan dengan peningkatan PAD dan menggaet dana pusat dengan cara mensinkronkan program daerah dengan provinsi dan pusat.

Lalu bagaimana Irwan Nasir mengelola keuangan daerah agar bisa tepat sasaran dan tepat manfaat? Sekaligus untuk mewujudkan impiannya agar masyarakat Meranti bisa tersenyum menatap masa depan. Impian Irwan memang sangat indah. Dia tak ingin masyarakat Meranti selalu terpuruk dikalahkan dalam setiap persaingan. Putra-putri Meranti dapat tersenyum menatap masa depannya karena semuanya sudah disediakan oleh pemerintah.

Sepertinyata klamuk-muluk. Irwan Nasir ingin perut masyarakatnya kenyang, badannya sehat, rohaninya penuh keimanan dan ketakwaan. Untuk mewujudkan impian itu, tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Atau hanya sekali ucap mantra ajaib “sim salabim”. Tetapi butuh waktu dan proses yang cukup panjang. Nah, membangun Kepulauan Meranti yang sudah lama terbiarkan, juga butuh waktu dan dana yang cukup. Tahun pertama menjadi bupati, Irwan belum bisa berbuat banyak. Karena berada dalam pertengahan anggaran dengan perencanaan yang sudah dibuat pemimpin sebelumnya. Pada tahun kedua, juga belum

optimal karena masih berkulat dengan perencanaan dan mencari orang-orang yang pas untuk menjankan program. Barulah di tahun ketiga Irwan benar-benar leluasa melancarkan program pembangunan di Meranti.

Meski begitu, banyak yang menilai Irwan telah mengukir prestasi. Dibawah kendali dia, Meranti seakan berlari kencang meninggalkan keterpurukan. Dari daerah yang hanya sebuah kecamatan yang jauh dari jangkauan, kini tumbuh menjadi sebuah kabupaten dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Angka pengangguran dan angka kemiskinan yang terus menurun.*

(Yopi Arianto) Rajin Turun ke Desa

Ketika terpilih menjadi Bupati Inhu 2010 lalu, waktu itu Yopi Arianto masih berusia 30 tahun. Sehingga pada waktu itu dia dinobatkan sebagai bupati termuda se-Indonesia.

Waktu ikut pilkada, putra sesepuh Golkar Riau Soegianto itu belum lama terpilih sebagai anggota DPRD Riau. Bersama Harman Harmaini, dia memenangkan pertarungan dengan mengalahkan sejumlah pasangan yang tak kalah kuat pada waktu itu.

Rekor bupati termuda di Indonesia yang dipegang Bupati Sidrap, Sulawesi Selatan Rusdi Masse pada waktu itu menjadi gugur. Karena telah muncul bupati yang jauh lebih muda, yakni Yopi Arianto, Bupati Inhu priode 2010-2015 hasil Pemilu pada 3 Juni 2010 lalu. Jika Rusdi Masse kelahiran 3 Maret 1973, maka Yopi 7 tahun lebih muda.

Pria berpostur tinggi besar ini lahir pada 10 April 1980 di Rengat. Dia lulusan STIE YKPN Yogyakarta dengan segudang pengalaman organisasi. Baik semasa kuliah maupun ketika tampil sebagai pengusaha muda di Riau. Partai Golkar telah mengantarkannya sebagai anggota DPRD Riau. Ketika itu pula dia mencalonkan diri menjadi bupati di tanah kelahirannya. Sebenarnya, Yopi Arianto dan Harman Harmaini ketika itu bukan lah calon yang diunggulkan.

Soalnya, banyak kandidat yang dianggap lebih kuat dibandingkan pasangan ini. Ada Tengku Razamara yang ketika itu menjabat Sekda Inhu. Lalu ada pula Emrizal Pakis yang tak kalah tersohor.

Namun analisa dan prediksi orang, banyak yang salah. Yopi Arianto yang tak diunggulkan justru keluar menjadi pemenangnya. Dia menjungkirbalikkan analisa dan prediksi.

Rahasia kemenangan Yopi Arianto, ternyata karena dia memang rajin turun bersosialisasi ke masyarakat di tingkat bawah. Dia tak segan-segan tidur di rumah warga yang jauh terpencil di pelosok desa.

Yopi Arianto membaur dengan masyarakat Inhu ketika itu. Bahkan gaya blusukan seperti itu terus berlanjut hingga sekarang. Setelah menjadi bupati, dia justru semakin gencar turun ke desa-desa dengan memakai sepeda motor trail. Dia turun bersama staf dan kepala dinas sehingga dapat sekaligus mengetahui persoalan masyarakat dan mencari solusi.

Kini Yopi Arianto kembali tampil di pilukada 2015. Sebagai incumbent dia ingin kembali melanjutkan pembangunan Inhu yang telah dia jalankan selama lima tahun ini.

Yopi Arianto sepertinya akan berhadapan dengan wakilnya Harman Harmaini yang juga ikut bertarung. Disamping itu, sosok Emrizal Pakis bisa jadi kembali bertarung. Demikian pula figur-figur lainnya yang kemungkinan muncul di masa-masa akhir pencalonan.

Sebagai incumbent Yopi tentu saja masih dianggap sebagai calon kuat. Batu sandungannya, barangkali hanya soal isu perselingkuhan atau kasus asusila yang sempat heboh beberapa waktu lalu. Tetapi semua itu, masyarakat Inhu yang akan menilainya.*

Incumbent yang Tumbang, Pemimpin yang Gagal

Semua akan sangat bergantung pada penilaian masyarakat, apakah calon incumbent tersebut selama memimpin telah mampu memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Jika selama memimpin masyarakat telah merasa puas dengan kinerjanya maka saya yakin masyarakat akan kembali memberikan kepercayaan kepadanya. Namun sebaliknya jika calon incumbent tersebut belum mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, maka jangan harap masyarakat akan kembali memilihnya. Oleh karena itulah kepada calon incumbent yang kembali berniat maju pada pilkada mendatang, sebaiknya mengukur diri dan melakukan introspeksi, apakah selama berkuasa telah berbuat untuk kepentingan masyarakat banyak, atau malah sebaliknya. Jika memang dirasa apa yang dilakukan belum maksimal maka sebaiknya saya menyarankan pikir-pikirlah terlebih dahulu. Secara pribadi saya sangat setuju dan mendukung adanya pilkada serentak seperti ini, tujuannya jelas salah satunya adalah untuk efisiensi anggaran. Maka dari itulah saya berharap mudah-mudahan saja pilkada serentak yang diakan digelar di empat kabupaten /kota di Riau ini dapat berjalan dengan aman, lancar, tertib tanpa ada kendala yang berarti sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Mudah-mudahan saja pilkada serentak yang digelar di empat daerah di Riau ini nantinya akan mampu menghasilkan pemimpin yang lebih berkualitas yang mampu mensejahterahkan masyarakatnya disana.

Tahun 2015 ini memang ada empat kabupaten kota di Riau ini yang akan menggelar pemilihan kepala daerah secara serentak, yakni kabupaten Indragiri Hulu, Bengkalis, Kepulauan Meranti dan Kota Dumai. Memang sejauh ini para incumbent di empat daerah tersebut

rencannya akan kembali maju bertarung mempertahankan kekuasaannya. Menurut saya hal tersebut wajar-wajar saja, mengingat rata-rata ke empat kepala daerah tersebut hanya baru satu kali periode menjabat, artinya menurut ketentuan yang ada masih terbuka peluang bagi mereka untuk kembali mencalonkan dan dicalonkan pada pilkada tersebut. Persoalan apakah mereka kembali terpilih atau tidak, itu tergantung dari penilaian masyarakat terhadap mereka. Jika memang masyarakat disana masih mengharapkan pemimpin yang lama untuk kembali berkuasa tentunya harus sama-sama kita hormati sebagai pilihan rakyat. Masyarakat di sanalah yang lebih tahu. Hanya saja saya berharap pilkada serentak yang akan digelar di beberapa daerah di Indonesia ini termasuk juga empat kabupaten kota yang ada di Riau dapat berjalan sesuai dengan rencana. Kerana ini merupakan tahap awal sekaligus tahap uji coba pelaksanaan pilkada serentak. Mudah-mudahan saja pilkada tersebut akan dapat menghasilkan pemimpin yang lebih baik dan lebih berkualitas bagi rakyatnya. Kepada pihak penyelenggara saya berharap kiranya bekerja secara profesional, jujur, adil dan juga transparan sehingga proses pilkada tersebut memang merupakan proses demokrasi yang bersih.

Menurut saya ini merupakan sejarah baru dan langkah maju dalam proses demokrasi pemilihan kepala daerah di negara kita, karena di lakukan secara serentak di beberapa daerah yang ada di negara kita, termasuk juga empat daerah di Riau ini. Terkait kembali majunya calon incumbent di empat daerah yang akan menggelar pilkada nantinya menurut saya tidaklah jadi persoalan sebetulnya, asalkan calon incumbent tersebut benar-benar memenuhi kriteria sesuai undang-undang yang ada. Baik itu Yopi Arianto di Inhu, Herlyan Saleh di Bengkalis, Irwan Nasir di Kepulauan Meranti dan Khairul Anwar di kota Dumai, mereka menurut penilaian saya adalah incumbent yang cukup berhasil menjadi pemimpin dan membagun daerahnya. Namun tentunya akan ada proses politik yang akan mereka lalui nantinya. Jika memang pada akhirnya mereka berhasil maju dan mendapat kembali mendapat kepercayaan masyarakat berarti kinerja mereka selama lima tahun cukup berhasil dimata masyarakat

di sana. Selain itu juga saya berharap para kontestan nantinya betul-betul bersaing secara jujur dan tidak saling menjatukan apalagi dengan kampanye hitam. Berjuanglah dengan cara-cara yang bijaksana, jujur, dan tetap mengedepankan nilai-nilai serta etika yang ada sebagai negeri melayu yang memiliki kebudayaan yang tinggi.

Apapun nantinya hasil dari pilkada yang akan digelar serentak di empat daerah di Riau nantinya harus sama-sama kita hormati dan kita hargai sebagai bentuk proses berdemokrasi. Namun tentunya harapan kita adalah proses tersebut haruslah benar-benar sebuah proses yang lebih baik, sehingga apa yang dihasilkan juga akan lebih baik. Maka dari itulah kepada pihak penyelenggara pemilu di empat kabupaten/kota di Riau hendaknya betul-betul bekerja profesional, jujur, dan transparan. Masyarakat disana juga harus mampu menilai rekan jejak setiap calon kepala daerah yang akan maju nanti. Tentunya memilih pemimpin haruslah benar-benar seorang pemimpin yang mampu memberikan kebaikan dan kemajuan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Jika memang masyarakat disana kembali menginginkan pemimpin yang lama tentunya harus juga kita hargai, hal tersebut menandakan bahwa pemimpin yang lama masih dicintai oleh rakyatnya. Mudah-mudahan saja pelaksanaan pilkada serentak nantinya mampu menghasilkan pemimpin yang lebih baik lagi dan harapan saya juga mudah-mudahan saja pilkada serentak yang digelar di empat daerah di Riau akan mampu membuat pesta demokrasi ini akan lebih bergairah dan lebih hidup lagi. Sekali lagi apapun hasilnya nanti harus sama-sama kita hormati dan siapapun pemimpin yang lahir nantinya harus tetap kita beri dukungan.

Empat daerah di Riau akan segera menggelar pemilihan kepala daerah secara serentak bersama 204 daerah lainnya yang ada di Indonesia ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa tiga Bupati dan satu Walikota yang saat ini masih menjabat dikabarkan juga akan kembali ikut bertarung artinya di empat daerah tersebut incumbent akan kembali maju bertarung. Memang selama ini peluang incumbent dalam setiap pemilihan sebagian besar akan menang. Namun tak sedikit incumbent yang juga kalah dalam

beberapa pemilihan seperti pilkada DKI Jakarta Dulunya. Dimana Fauzi Bowo selaku incumbent harus mengakui kemenangan pasangan Jokowi-Ahaok. Artinya peluang itu akan selu tetap ada bagi seluruh calon yang akan maju bertarung. Tinggal lagi seperti apa stretegi yang akan di gunakan oleh pasangan bakal calon dalam reaih simpati publik.

Partai politik juga menjadi salah satu ornamen penting dalam sebuah pemilihan. Namun yang paling penting dari kesemuanya adalah bagaimana program yang diusung oleh pasangan calon nantinya betul-betul real sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sana. Sebagai masyarakat saya berharap KPU selaku penyelenggara akan dapat bekerja secara maksimal dalam mensukseskan helat pesata demokrasi tersebut. KPU juga ditntut harus benar-benar berlaku jujur, adil dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan demikian nantinya tidak akan ada yang merasa dirugikan.

Proses pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan serentak di empat daerah di Riau nantinya harus benar-benar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan harapan kita bersama. Sebab selama ini apapun bentuk pemiihan yang dilakukan di Riau ini baik pemilihan bupati, walikota, gubernur, hingga presiden masih jauh dari kata berkualitas seperti yang selalu digadang-gadangkan oleh KPU selaku penyelenggara, alasannya tingkat partaisipasi masyarakat sangat rendah bahkan cenderung terus mengalami penurunan. Angka golput pada pilgubri yang lalu saja melebihi angka 40 persen, artinya hampir separoh dari masyarakat Riau tidak menyalurkan hak politiknya. Peran pemerintah daerah saya nilai masih sangat minim dalam melakukan sosialisasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya pesta demokrasi yang sedang kita laksanakan ini. Namun yang paling penting bagaimana nantinya KPU dan pemerintah untuk bisa lebih meningkatkan kesadaran masyarakat Riau termasuk di empat daerah yang akan menggelar pilkada serentak untuk mau menggunakan hak pilihnya. Sehingga pad tingkat golput dapat di minimalisir. Sehingga proses pemilihan kepala daerah betul-betul dapat dikatakan berkualitas dan tentunya legitimasi dari masyarakat juga akan tinggi terhdap lahirnya soosok pemimpin yang baru di empat

Reputasi dan Prestasi Jadi Penentu

Posisi incumbent akan selalu menjadi obyek diskusi dan analisa banyak orang. Reputasi dan elektabilitas seorang incumbent diuji, apakah masih mendapat apresiasi dari rakyat atau tidak.

Bisa jadi tahun 2015 ini merupakan tahun politik di empat daerah kabupaten kota yang ada di Riau ini. Pasalnya ke empat daerah tersebut pada tahun ini akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak bersama sekitar 204 daerah lainnya di Indonesia. Ke empat daerah tersebut adalah Kabupaten Indragiri Hulu, Bengkalis, Meranti dan Kota Dumai yang masa jabatan Bupati dan Walikota nya akan habis pada tahun ini juga.

Konstelasi politik jelang pemilihan kepala daerah di ke empat daerah tersebut sudah mulai meningkat. Kabar nya juga kepala daerah incumbent akan kembali ikut bertarung bersama para kontestan lainnya.

Pengamat politik Saiman Pakpahan mengatakan, sejauh ini peluang calon incumbent masih tetap terbuka lebar. Sebab menurut dia, dari fakta politik yang terjadi selama ini khususnya di Riau, incumbent selalu diunggulkan dalam setiap kontestan politik. Saiman menilai ada beberapa faktor mengapa posisi incumbent selalu diunggulkan, karena beberapa faktor yang menjadi kelebihan nya.

Pertama, mempunyai modal popularitas dan elektabilitas yang teruji. Sosok incumbent menjadi lebih terkenal dan berkemungkinan dipilih kembali karena, jabatan politiknya memberikan ruang kepadanya, untuk dikenal dan ditokohkan oleh masyarakat sebagai pemimpin formal. Keistimewaan inilah, yang selalu dimanfaatkan oleh setiap incumbent untuk meningkatkan popularitas dan daya tarik personal. Namun

sebaliknya, Incumbent yang tidak mampu memanfaatkan keunggulan komparatif formal, malah justru menjadi boomerang yang dapat merusak citra dan popularitasnya.

“Jadi semua akan sangat bergantung dengan apa yang sudah dibuat dan seperti apa penilaian masyarakat terhadapnya,” ujar Dosen Fisipol UR ini.

Faktor selanjutnya adalah Pengalaman politik yang dimiliki oleh calon incumbent. Jika lawan politik incumbent dalam pertarungan politik, adalah orang yang belum memiliki pengalaman bertarung pada perhelatan kepala daerah secara langsung, maka sudah pasti akan kesulitan melawan sosok incumbent yang telah unggul duluan secara matematis, dengan kalkulasi suara awalnya pada pemilu pada sebelumnya. Apalagi, melawan incumbent yang sangat populis dan disukai oleh masyarakat.

Ruang kampanye yang lebih terbuka dengan kemasan program pemerintah, juga akan semakin membuka peluang bagi incumbent, untuk melakukan berbagai pendekatan kedalam bentuk pelaksanaan program Pemerintah yang selalu melekat pada diri seorang kepala daerah.

Masyarakat selalu menyamakan posisi kepala daerah secara personal, dengan program pemerintahan yang dibuatnya. Jika berhasil, maka program tersebut adalah keberhasilan kepala daerah dalam menjalankan program serta visi kerjanya kepada masyarakat.

“Sebaliknya jika gagal, maka kepala daerah akan kehilangan legitimasi ketokohnya. Hal-hal seperti ini akan selalu melekat selama masa pemerintahan seorang kepala daerah,” terangnya.

Dalam setiap pelaksanaan pilkada menurut Saiman, posisi incumbent akan selalu menjadi obyek diskusi dan analisa banyak orang yang menarik untuk diperbincangkan. Alasannya sederhana, karena sebagai orang yang sedang berkuasa, kiprahnya selama memimpin menjadi obyek evaluasi rakyat dalam memberikan raport akhir, apakah nilainya baik atau buruk yang berimplikasi pada sebuah keputusan dan sikap politik yang diambil oleh masyarakat.

Disinilah reputasi dan elektabilitas seorang incumbent diuji, apakah masih mendapat apresiasi dari rakyat atau tidak. Sistem demokrasi kita menempatkan partai politik sebagai peran yang teramat strategis dalam keberhasilan seseorang dalam sebuah proses pilkada. Partai politik tidak hanya sebatas alat ataupun perahu untuuk mengantarkan seseorang sebagai calon. Akan tetapi peran partai politik juga sangat dominan dalam menggerakkan berbagai elemen yang ada di lapisan masyarakat.

Makanya kerja mesin politik juga akan sangat menentukan. Tinggal lagi bagaimana para kandidat yang akan bertarung nantinya mendapatkan dukungan dari partai politik yang ada. Tentu saja berbagai lobi serta pendekatan dan membangun komunikasi politik yang lebih intens.

“Satu hal yang juga menjadi penentu kemenangan seorang calon dalam sebuah pilkada, yaitu bagaimana mendapatkan dukungan partai poltik sebanyak-banyaknya, dan bagaimana supaya mesin partai harus bekerja lebih optimal,” pungkasnya. *

Incumbent Selalu di Atas Angin

Dalam setiap pilkada, posisi incumbent berada di atas angin. Tapi dengan aturan yang mewajibkan incumbent mundur, permainan terasa lebih fair.

Eskalasi politik di empat kabupaten kota yang ada di Riau kian meningkat seiring proses pemilihan kepala daerah (pemilukada) serentak yang akan segera bergulir pada tahun ini. Masing-masing bakal calon yang berniat untuk maju meramaikan bursa pencalonan bupati dan walikota pun kian memanas. Di Indragiri Hulu misalkan baliho serta foto-foto bakal calon sudah mulai bertebaran hampir di tiap sudut kota.

Begitu juga di Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti dan juga Kota Dumai. Pemandangan yang sama jelas terlihat. Begitu juga kesibukan yang sudah mulai terlihat dari pendukung masing-masing bakal calon yang akan maju. Masing-masing kelompok masyarakat juga pastinya sudah memiliki jagoan yang mereka unggulkan.

Oleh karena itulah salah seorang tokoh masyarakat Riau T Lukman Jaafar kepada AZAM mengatakan bahwa masyarakat yang akan menggelar hajatan politik lima tahunan tersebut hendaknya mengikuti proses ini dengan cara-cara yang baik. Jangan sampai diantara sesama kita terjadi gesekan yang mengakibatkan timbulnya berbagai macam bentuk konflik di tengah-tengah masyarakat.

Selain itu juga T Lukman menghimbau kepada masyarakat yang berada di empat daerah tersebut untuk tidak menunjukkan perilaku yang terlalu berlebih-lebihan. “Silahkan berpesta namun harus tetap memperhatikan keamanan, dan ketertiban. Dan yang paling penting harus sama-sama saling menghormati dan saling menghargai,” ujar manta

Sekdaprov Riau ini.

Pemilihan seorang kepala daerah merupakan sebuah proses politik yang harus sama-sama kita jalani dan kita beri dukungan. Masyarakat sebagai pemilih harus benar-benar memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya, supaya apa yang menjadi keinginan masyarakat akan dapat terlaksana. Pilihlah pemimpin yang mampu bertindak sebagai imam ditengah-tengah masyarakat yang dipimpinnya.

Kepada pihak penyelenggara T Lukman juga menitipkan pesannya supaya pelaksanaan pilkada serentak yang digelar di empat daerah di Riau tersebut nantinya betul-betul dapat berjalan jujur, adil, dan transparan. Dan yang paling penting katanya, hindarkan berbagai macam bentuk politik uang.

“Saya berharap penyelenggaraan pilkada serentak di empat daerah di Riau betul-betul dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Selain itu juga pilkada tersebut berjalan dengan jujur, adil dan transparan, sehingga akan dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas,” terangnya.

Kepada masyarakat yang akan mengikuti proses pemilihan kepala daerah nantinya, hendaknya betul-betul menjadikan momentum ini untuk mencari pemimpin yang lebih baik, pemimpin yang mau memperhatikan nasib rakyatnya. Maka dari itulah pilihlah pemimpin sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat.

“Jangan memilih pemimpin hanya karena diberi sesuatu ataupun dibujuk untuk menerima sesuatu,” harapnya.

Terkait kembali majunya para incumbent di pilkada empat daerah itu, T Lukman mengatakan bahwa setiap pilkada posisi incumbent akan selalu diatas angin. Sebab katanya, incumbent telah lebih dulu melakukan dan meraih simpati dari masyarakat melalui program-program yang dijalannya selama menjabat.

Namun dengan adanya aturan baru yang mengharuskan setiap incumbent harus terlebih dulu mundur jika ingin kembali mencalonkan

diri menurut T.Lukman ini merupakan hal yang positif sehingga persaingan yang terjadi akan terasa adil tanpa memanfaatkan jabatan untuk kepentingan politik.

T Lukman dalam kesempatan ini juga berharap kepada masyarakat kiranya lebih memprioritaskan putra daerah disana untuk menjadi pemimpin. Sebab jika pemimpinnya merupakan orang asli sana, maka ia akan memiliki hubungan kebatinan yang kuat dengan daerah dan masyarakat.

Sehingga diharapkan akan tercipta semangat kerja yang betul-betul dilandasi semangat ingin membuat daerah sendiri dan masyarakat disana lebih baik dan lebih maju lagi.

“Jika kepala daerahnya putra daerah, maka saya yakin ia akan memiliki ikatan batun dan hubungan emosional yang kuat dengan daerah dan masyarakat di sana,” pungkasnya.*

BAGIAN III



أفكاتن ذريات أنق ملايو



AZAM

PEMILIHAN Kepala Daerah di Indonesia memasuki babak baru. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 memerintahkan pemilukada dilakukan serentak secara bertahap. Tahap pertama digelar 9 Desember 2015, berikutnya tahap kedua pada Februari 2017. Sembilan kabupaten dan kota di Provinsi Riau menyelenggarakan pemilihan di tahap pertama. Yakni Dumai, Kepulauan Meranti, Siak Sri Indrapura, Bengkalis, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Pelalawan, Kuantan Singingi dan Indragiri Hulu. Sementara Pekanbaru, Kampar dan Indragiri Hilir terseret arus pemilukada tahap kedua.

Karena waktu persiapan yang pendek ditambah ketersediaan sumberdaya penyelenggara yang kurang mumpuni, banyak pihak meragukan pemilukada berlangsung sesuai kehendak undang-undang. Kepala daerah yang dilahirkan pun dikuatirkan tak berkualitas. Begitu pula resiko politik yang akan dituai secara serempak. Benarkah? Ketua KPUD, Dr. Nurhamin membantah asumsi itu. "Kami sangat siap menggelar pemilukada," tegasnya kepada AZAM.*

**MILIH BUPATI SERENTAK
KPU AKUI DIINTERVENSI**

Resiko Serempak di Pilkada Serentak

Demokrasi di Indonesia berkembang seperti air laut. Dari orde ke orde, ia terus bergerak. Dulu kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Kini langsung dicoblos rakyat. Dari mengikuti masa jabatan kepala daerah, sekarang digelar serentak.

Masih ingat Ismail Suko? Putera kelahiran Pasir Pengaraean itu sempat membuat langit politik di Riau memerah pada September 1985. Ia sukses mengantongi suara terbanyak dalam pemilihan Gubernur Riau 1985-1990 oleh anggota DPRD. Ismail Suko juga menyingkirkan ambisi Pemerintah Orde Baru yang kembali menghendaki Imam Munandar berkuasa di tanah Melayu.

Akan tetapi takdir berkata lain. Ismail Suko dipaksa mundur agar Pemerintah dapat melantik Imam Munandar menjadi Gubernur Riau. Apa hendak dikata, suara bulat anggota dewan yang memilih Ismail Suko secara demokratis itu terbuang sia-sia. Karena suko tak suko, Pusat tak menghendaki Ismail Suko memimpin negeri terkaya di Indonesia ini.

Itulah sisi lain demokrasi di Republik ini. Penuh formalitas. Banyak orang menyindir, pelaksanaan demokrasi di Indonesia masa itu dengan istilah demokrasi basa basi alias demokrasi gincu. Manis di permukaan, di dalam penuh rekayasa.

Masa berakhirnya kekuasaan Orde Baru di tahun 1998, demokrasi menjadi alat penting untuk menguatkan kekuasaan civil. Berbagai peraturan perundang-undangan di bidang politik dicabut, dan direvisi. Salah satu diantaranya Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merevisi UU Nomor 22 tahun 1999. Pasal 56 UU itu menyebutkan, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan

asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dan, pasangan calon tersebut diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Sejak undang-undang ini lahir, pemilihan kepala daerah dari awalnya dipilih anggota DPRD provinsi untuk gubernur dan DPRD kabupaten untuk bupati dan walikota, bergeser ke pemilihan langsung. Rakyat memiliki kedaulatan hukum dan politik menentukan siapa figur yang memimpin daerahnya. *One man one vote*. Suara rakyat itu dalam ungkapan latin dikenal dengan istilah *vox pouuli*, *vox dei* alias suara rakyat adalah suara Tuhan.

Setelah undang-undang ini berjalan 10 tahun, demokrasi langsung mengalami guncangan hebat terutama pasca pemilihan presiden. Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla mendulang suara terbanyak, dan mengalahkan duet Prabowo Subianto – Hatta Radjasa. Pertarungan kedua pasang tokoh ini tak berhenti begitu presiden dan wakil presiden dilantik. Akan tetapi merembes ke parlemen.

Partai Golkar bersama sekutunya yang mengusung Prabowo-Hatta, setelah sukses menguasai pimpinan dan alat kelengkapan dewan, menginisiasi perubahan sistem pemilihan langsung menjadi pemilihan tidak langsung. Dari awalnya gubernur, bupati dan walikota dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah dikembalikan ke DPRD.

Kontan saja gagasan mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD mendapat tantangan publik. Publik selain menyatakan ketidaksetujuannya, juga menilai terjadinya kemunduran demokrasi. Tokoh penting yang tak setuju demokrasi dikembalikan ke DPRD adalah Soesilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat. SBY kemudian menggunakan hak prerogatifnya dalam sistem pemerintahan presidensial dengan membatalkan undang undang yang mengatur soal pemilihan kepala daerah yang disahkan DPR RI. Lalu menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang). Perppu itu disahkan oleh DPR dan diundangkan dalam lembaran negara dengan nama Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

KPU Optimis

Di Provinsi Riau terdapat sembilan daerah yang akan menggelar pemilukada. Yakni Dumai, Bengkalis, Siak Sri Indrapuri, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Pelalawan dan Kepulauan Meranti. Kesembilan daerah itu masuk dalam kategori waktu tahap pertama. Sementara tiga daerah lain, Kampar, Pekanbaru dan Indragiri Hilir ditarek ke tahap kedua pada Februari 2017.

Ketua KPU Riau, Dr. Nurhamin menyebutkan, pihaknya sangat siap melaksanakan pemilukada serentak di sembilan kabupaten dan kota. Dia mengatakan, pesta demokrasi itu bisa berjalan sesuai harapan, mengingat KPU Riau sudah mengantisipasinya sejak November 2014. “Kami sudah melakukan persiapan sejak November 2014 dengan melaksanakan forum *group discusion* untuk empat daerah yang semula melaksanakan pemilukada tahun ini. Sekarang tinggal menularkan hasil diskusi itu kepada lima daerah lain,” ujar Nurhamin menjawab AZAM pekan lalu.

Awalnya hanya empat kabupaten yang menggelar pemilukada serentak. Yaitu Meranti, Bengkalis, Inhu, dan Dumai, karena hanya empat daerah itu yang masa jabatannya berakhir pada 2015. Namun dalam pembahasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 antara Pemerintah dengan DPR RI disepakati pula, bahwa masa jabatan kepala daerah yang habis pada semester pertama 2016, harus ikut program pemilukada serentak tahap pertama. Sehingga jumlah daerah yang tadinya empat, berubah menjadi sembilan. Lima kabupaten/kota tambahan adalah Pelalawan (dilantik 7 April 2011), Siak Sri Indrapura (dilantik 19 Juni 2011), Kuantan Singingi (dilantik 1 Juni 2011), Rokan Hulu (dilantik 19 April 2011), dan Rokan Hilir (dilantik 8 Juni 2011).

Resiko Serempak

Pemilukada serentak di samping dapat menghemat anggaran dan waktu juga mengundang resiko. Antara lain, *pertama*, disebabkan beberapa daerah yang dipercepat pelaksanaan pemilukadanya, tentu kepemimpinan kabupaten kota akan diserahkan kepada pelaksana tugas

yang ditunjuk gubernur sampai dilantiknya kepala daerah baru hasil pemilihan.

Kedua, KPU sebagai penyelenggara pemilu bakal kerepotan mengawasi pelaksanaan pemilukada. Apalagi jumlah anggota KPU provinsi cuma lima orang. Bila komisi ini tidak didampingi dengan staf penyelenggara dan staf administrasi yang berkualitas, sulit bagi KPU menangani problem tingkat bawah dalam waktu cepat. Problem ini akan datang susul menyusul mengingat materi Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah muatannya lebih berat dibanding undang undang sebelumnya.

Ketiga, aspek pengamanan. Jumlah personil kepolisian yang terbatas membuat tugas-tugas polisi makin berat apalagi kalau pesta demokrasi itu diwarnai dengan konflik horizontal antarpendingkal calon seperti terjadi selama ini pada beberapa daerah. Karena itu, untuk mengantisipasi resiko serempak ini, KPU harus merencanakan tahapan pemilukada secara baik. Administrasi yang tertib yang didukung oleh IT, serta staf yang berkualitas.

“Kita memang sulit berharap kalau cuma mengandalkan KPU. Jika dahulu tahapan-tahapan itu dilaksanakan 8 bulan sekarang lebih singkat hanya 6 bulan. Tapi mau gimana lagi, UU telah disahkan maka harus dilaksanakan,” tegas Nurhamin, Ketua KPU Riau.*

Optimisme Pelalawan dan Bengkalis

Walau masuk dalam agenda pemilukada serentak pada 9 Desember 2015 namun Pemerintah Kabupaten Pelalawan belum mengalokasikan anggaran di APBD. KPU mengaku membutuhkan dana Rp 20 miliar.

A genda pemilukada serentak di sembilan kabupaten kota sudah diambil pintu. Masing-masing Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) telah mulai melakukan persiapan. Diantaranya menyangkut pemutakhiran daftar pemilih dan seleksi penyelenggara pemilu di tingkat TPS dan KPPS. Selain itu mensosialisasikan Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 yang kini menjadi payung hukum pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah.

Dua Ketua KPUD yang dihubungi AZAM secara terpisah menyampaikan kesiapan pihaknya menyelenggarakan pemilukada serentak. “Dari 20 miliar dana yang kita butuhkan, Rp 3 miliar diantaranya sudah dianggarkan dalam APBD. Sisanya dimasukkan pada Perubahan APBD,” kata Nasaruddin, Ketua KPUD Kabupaten Pelalawan kepada Asnol di Pangkalan Kerinci pekan lalu.

Menurut Nasar, dana awal sudah digunakan KPUD untuk memulai persiapan pemilukada termasuk merekrut penyelenggara di tingkat bawah, misalnya di TPS dan KPPS. Dengan keterbatasan anggaran yang tersedia, KPUD Pelalawan akan memanfaatkan anggaran tersebut semaksimal dan se-efektif mungkin.

Nasar menegaskan, KPUD akan mulai melaksanakan tahapan pemilukada secara berkesinambungan pada April mendatang. Tenggat waktu April dipilih karena pihaknya masih menunggu regulasi-regulasi dari KPU Pusat terkait dengan juknis dan juklak pemilukada serentak. Ia

juga menyebut, jumlah pemilih di kawasannya bertambah dari pilkada sebelumnya. Pertambahan ini membuat jumlah TPS dan kertas suara juga bertambah. Di pemilihan presiden lalu, daftar pemilih tercatat 241.295 jiwa dan jumlah TPS 637. Kini, TPS yang harus disediakan adalah 750. “Jadi terjadi penambahan 113 TPS. Validata akurat tentang pemilih ini akan difinalkan bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,” tukas Nasar.

Tak jauh beda dengan Pelalawan, progras kinerja KPUD Kabupaten Bengkalis juga sama. Saat ini, KPUD setempat baru menyelesaikan tahapan memilih penyelenggara di tingkat bawah. Begitu pun dengan pembiayaan. Ketua KPUD Bengkalis, Defitri Akbar, menyebutkan pihaknya membutuhkan dana Rp 33 miliar. Dan anggaran sebesar itu sudah dialokasikan di APBD untuk dua putaran.

“Karena pilukada hanya berjalan satu putaran, maka kebutuhan dana diperkecil menjadi Rp 23 miliar,” tegas Defitri. Penggunaan dana tersebut akan disesuaikan dengan regulasi. Dan kalau bersisa diserahkan kembali ke pemerintah daerah. KPUD, tambah Defitri, bekerja menurut ketentuan undang-undang. Dalam undang-undang ditegaskan, bahwa tidak ada ambang batas kemenangan untuk pasangan calon. Karenanya, pada aturan baru tidak diperkenankan pilukada berjalan dua putaran.

Defitri mengurai, beberapa item dari tahapan pilukada serentak akan dibiayai melalui APBN. Akan tetapi disebabkan APBN tidak menampung keseluruhan tahapan pemilihan kepala daerah maka, pembiayaan-pembiayaan tertentu tetap ditanggung oleh APBD Kabupaten Bengkalis. “Kami optimis pilukada serentak berjalan sesuai kehendak undang-undang,” tangkas Defitri yakin,*

Milih Serentak KPU 'Digertak'

Untuk pertama kali, KPU menggelar pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2015. Pemilukada serentak ini merupakan amanah Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015. Dalam undang-undang itu waktu pelaksanaan pemilihan dibagi ke dalam tujuh tahap. Tahap pertama dilaksanakan 9 Desember 2015. Menurut Ketua KPU Riau, Dr. Nurhamin, sembilan daerah di Riau yang masuk tahap pertama adalah Dumai, Siak Sri Indrapuri, Kepulauan Meranti, Bengkalis, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu dan Pelalawan. Tiga daerah lain, Kampar, Indragiri Hilir dan Pekanbaru digilirkan pada Februari 2017. Bagaimana persiapan KPU menyelenggarakan tahapan-tahapan pemilukada? Apa kendala yang dihadapi? Berikut penuturan Nurhamin kepada Bambang Irawan dari AZAM yang bertandang ke kantornya di Jalan Gajah Mada, Pekanbaru.

Pemerintah dan DPR sudah memutuskan bahwa pemilihan gubernur, bupati dan walikota di Indonesia dilakukan secara serentak dan dimulai pada tahun ini. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan serentak itu?

Jadi pemilihannya serentak pada hari, tanggal yang sama dan pada bulan Desember 2015 tepatnya tanggal 9 Desember 2015. Ini perintah UU No. 1/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Ada berapa kabupaten yang melaksanakan serentak di Riau?

Di Riau awalnya ada empat kabupaten yang melaksanakan pemilihan. Yakni Meranti, Bengkalis, Inhu, dan Dumai yang akhir masa

jabatan kepala daerahnya habis pada 2015. Tapi UU pemilihan hasil revisi memerintahkan pemilihan kepala daerah yang akhir jabatannya semester pertama 2016 ditarik bersama ke bulan Desember 2015. Maka ditambah lima lagi, yaitu Pelalawan, Siak, Kuansing, Rohul dan Rohil. Seluruhnya sembilan kabupaten/kota yang mengikuti pemilihan kepala daerah serentak.

Apakah KPU Riau siap menyelenggarakan serentak?

Sangat siap. KPU Provinsi Riau dan kabupaten/kota siap melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak untuk sembilan kabupaten dan kota. KPU Riau tidak mempermasalahkan keputusan pemerintah menggelar serentak akhir tahun ini. Pesta demokrasi tersebut bisa berjalan sesuai harapan, mengingat kita sudah mengantisipasi dan melaksanakan persiapan sejak November 2014 dengan menggelar Forum Group Discussion (FGD) untuk 4 daerah. Saat ini kita tinggal menularkan hasil diskusi itu kepada lima daerah tambahan.

Berapa total anggaran yang dibutuhkan?

Diperkirakan total anggaran di sembilan kabupaten/kota mencapai Rp 190 miliar. Untuk pelaksanaan serentak di empat kabupaten/kota (Bengkalis, Meranti, Dumai dan Indragiri Hulu) sudah dianggarkan dalam APBD 2015 di masing-masing daerah. Rata-rata tiap kabupaten menganggarkan dana Rp 20 miliar. Sisanya, lima kabupaten lagi (Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kuantan Singingi, Pelalawan dan Siak) diakomodasi melalui Perubahan APBD.

Apa saja persoalan yang dihadapi KPU?

Persoalan yang masih dialami dalam penyelenggaraan serentak 2015 adalah tidak adanya anggaran KPU Riau untuk monitoring pelaksanaan di kabupaten/kota. KPU Riau tidak mendapat bantuan dari APBD Provinsi, sementara anggaran melalui APBN hanya untuk honor dan gaji karyawan. Selama ini kegiatan kita ke daerah-daerah meninjau kesiapan pemilukada

pakai dana pinjaman, sebab kita belum punya anggaran buat itu.

Kemudian masalah validasi DPT di perusahaan perkebunan dan pertambangan yang mobilisasinya tinggi sehingga terjadi selisih DPT mencapai puluhan ribu suara. Di salah satu daerah, kita temukan sesuatu yang sangat aneh yang tidak bisa dijelaskan yakni selisih DPT pilgub dan pileg yang mencapai puluhan ribu. Ini perlu jadi catatan agar validasi DPT bisa lebih maksimal. Lalu, masalah konflik desa di perbatasan, lima desa yang masih berkonflik antara Kampar dan Rokan Hulu. Masalah DPT di Kecamatan Mandau yang jumlah pemilihnya terlalu besar, memerlukan payung hukum bahwa satu kecamatan boleh memiliki dua atau lebih PPK. Begitu juga logistik di daerah sulit dan terpencil. Sementara dukungan dana sama dengan daerah-daerah yang biasa.

Lalu apa solusinya?

Kita meminta Kementerian Dalam Negeri mencari solusi agar semua permasalahan tersebut dapat diantisipasi. Caranya, ya memerintahkan segera kabupaten/kota yang belum memiliki anggaran melakukan perubahan APBD. Kemudian menyelesaikan sebaik mungkin soal kisruh DPT melalui penyempurnaan e-KTP. Kata anggota DPR RI, Lukman Edi, APBNP 2015 sudah menganggarkan tambahan Rp 1 triliun untuk penyempurnaan e-KTP dalam rangka mendukung pelaksanaan serentak. Yang jelas KPU RI akan secepatnya menyelesaikan seluruh Peraturan KPU, yang mengatur lebih detail tentang pelaksanaan serentak. Paling lambat bulan Mei harus sudah selesai, karena tahapan akan dimulai bulan Juni.

Apakah UU No 1 Tahun 2015 sudah disosialisasikan?

Kepada seluruh pimpinan KPU di Riau sudah. Di rapim, kita menekankan ada beberapa poin yang mesti diketahui oleh seluruh pimpinan KPU seperti penganggaran. Kemudian tahapan pelaksanaan. Juga disosialisasikan mengenai pembiayaan yang berasal dari APBN dan dibantu melalui APBD. Kepada masyarakat sudah mulai melalui media cetak dan elektronik.

Katanya UU juga memerintahkan ada uji publik pasangan calon?

Ya. Beberapa aturan baru dalam pelaksanaan adalah uji publik terhadap pasangan calon. Uji publik dilakukan sebanyak tiga kali. Selanjutnya, pelaksanaan hanya dilakukan dalam satu kali putaran, tidak lagi dua putaran. Untuk itu, kepada KPU daerah yang telah melampirkan rencana anggaran dua putaran, kemungkinan biayanya akan berkurang 40 persen dari anggaran awal. Seperti Bengkalis, semula dianggarkan Rp 33 miliar untuk dua putaran. Satu putaran direncanakan Rp19 miliar. Jadi KPU Bengkalis hanya memperoleh dana Rp 19 miliar.

Soal dualisme kepengurusan partai bagaimana KPU Riau mensikapinya?

KPU Riau belum mendapat edaran dari KPU pusat terkait dualisme kepemimpinan Partai Golkar dan PPP. Pasalnya, rekapan partai dan calon perorangan tahap pertama sudah harus selesai Juni mendatang. KPU Riau tidak akan memberi toleransi kepada pengurus partai yang memiliki dualisme kepemimpinan saat proses tahapan. Tindakan tegas akan merujuk dari partai yang kepengurusannya jelas seperti ketua, sekretaris dan bendahara yang disahkan kemenkumham sesuai Undang Undang Partai Politik. Agar kedua partai politik itu tetap terlibat dalam pemilu maka mereka diharapkan segera menyelesaikan masalah internal. KPU tidak akan mencampuri urusan internal partai. Kawan-kawan kabupaten kota dihimbau memberikan pemahaman sehingga tidak terjadi persoalan yang masuk ke ranah konflik partai.

Ada himbauan kepada kepala daerah?

Ada. KPU Riau mengingatkan kepada seluruh kepala daerah yang akan melaksanakan serentak untuk tidak melakukan intervensi terhadap kebijakan yang dilaksanakan KPU Kabupaten dan kota. Kita melihat ada indikasi upaya dari birokrasi mempersulit kinerja KPU Kabupaten/kota dikarenakan beberapa permintaan mereka tidak diperkenankan KPU. Saya mengingatkan supaya tidak ada pihak yang melakukan intervensi, menekan

sehingga menghilangkan independensi komisi pelaksana pemilihan kepada daerah ini dalam bersikap.

Kalau ada yang melakukan tindakan menghalang-halangi tugas aparaturnya bagaimana?

Bersiap-siap saja, kita akan perkarakan secara hukum. Secara lembaga saya ingin, selama masa bertugas ini tidak ada yang cacat, sehingga tugas KPU juga lancar. Tapi bila juga tidak dilaksanakan maka kita siap mempidanakan mereka.

Pelaksanaan pemilu pada serentak jelas tidak mudah. Selain waktu pelaksanaannya yang singkat, khususnya untuk sosialisasi, KPU juga dihadapkan dengan terbatasnya sumber daya manusia juga kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi?

Benar. Karena itulah, seluruh variabel penentu terlaksananya baik KPU, pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha harus mendapatkan pemahaman yang sama terkait pelaksanaan proses demokrasi ini. Targetnya adalah bagaimana supaya masyarakat cerdas dalam berpolitik. Sekali lagi, jelas ini tak mudah. Karena Amerika saja butuh waktu beratus tahun untuk mendapatkan kondisinya sekarang. Bandingkan dengan Indonesia, undang-undangnya saja baru saja disahkan. Kita memang sulit berharap kalau cuma mengandalkan KPU. Jika dahulu tahapan-tahapan tersebut dilaksanakan delapan bulan sekarang lebih singkat hanya enam bulan saja. Tapi mau gimana lagi, UU telah disahkan maka harus dilaksanakan.

Apakah aspek kualitas penyelenggaraan menjadi prioritas Anda?

Pelaksanaan harus mementingkan aspek kualitas dibanding kuantitas. Kalau tidak, pemilu tak lebih dari sekedar memobilisasi massa sehingga tidak bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas pula. Banyak contoh yang terjadi di berbagai daerah yang jauh dari perkotaan, dimana secara kuantitas tinggi namun secara kualitas dinilai rendah.*

Bawaslu akan Tindak Setiap Pelanggaran

Bawaslu bertekad akan mengawalinya dengan penuh integritas dan profesional. Sekecil apapun pelanggaran tak akan dibiarkan. Jika terjadi, akan langsung ditindak.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Propinsi Riau sudah menyiapkan langkah-langkah yang akan dijalankan jelang perhelatan pemilukada serentak. Menurut Komisioner Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan, S.Ag. M.Pd.I, bawaslu sudah mendapatkan instruksi dari Bawaslu RI untuk membentuk dan menyeleksi panwaslu di lima Kab/Kota.

Empat kabupaten sudah terbentuk sebelumnya yaitu Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Bengkalis dan Dumai. Yang akan segera dibentuk adalah Kabupaten Rokan Hulu, Kuantan Singingi, Siak, Pelalawan dan Rokan Hilir.

“Dengan revisi perppu yang sudah disahkan menjadi UU No.1 tahun 2015 berakibat pada penambahan kabupaten yang mengikuti pemilukada pada Desember 2015, dari empat Kabupaten menjadi sembilan,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, kata Rusidi Rusdan, bawaslu akan membentuk panitia pansel dalam rangka pembentukan panwas di lima kabupaten se Propinsi Riau. Setelah pansel terbentuk, tugas mereka selanjutnya adalah menseleksi calon menjadi enam, kemudian diserahkan ke Bawaslu Provinsi untuk di *fit and proper test* dan diseleksi menjadi tiga calon. Setelah itu baru dilantik.

“UU mengatakan, satu bulan sebelum tahapan pertama dimulai, yaitu tahap pemuktahiran data pemilu, panwas sudah harus terbentuk,” ujar Rusdi.

Soal pelanggaran, jelas Rusidi, akan ditindak sesuai aturan yang sudah dibuat. Bagi peserta yang melanggar akan dilihat dulu apa jenis

pelanggarannya. Kalau pelanggarannya bersifat adminisitratif, akan kami rekomendasikan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten untuk dibetulkan.

Kalau pelanggaran pidana akan kami teruskan ke kepolisian, yang bukan pidana atau administrative, kami kategorikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilukada karena berkaitan dengan profesionalitas, integritas dan netralitas baik yang dilaporkan atau ditemukan. Pelanggaran kode etik ini direkomendasikan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Untuk mengantisipasi tidak terjadi pelanggaran dan mencegah terjadinya pelanggaran kita melakukan sosialisasi ke berbagai pihak baik kepada pengurus partai politik dan tim suksesnya maupun masyarakat. Materi sosialisasi meliputi aturan-aturan terkait dengan pelanggaran pemilukada,” jelas Rusidi.

Bawaslu bertekad, pemilihan bupati dan walikota serentak di Propinsi Riau berjalan lancar. Kami secara maksimal ingin menciptakan pengawasan dengan penuh integritas dan profesional. Tidak membiarkan pelanggaran sekecil apapun terjadi, dan kalau terjadi, akan tindak,” tambah kandidat doktor UIN Susqa Pekanbaru itu.

Komitmen bawaslu kita seperti itu. Bawaslu sudah banyak belajar dari pengalaman pelaksanaan pemilihan Gubernur Riau 2013, Pilpres dan Pileg sebelumnya.

Apalagi, Bawaslu sudah mempelajari dengan baik materi UU No.1 tahun 2015. Tentunya sekarang, Bawaslu menyiapkan strategi-strategi pengawasan dengan memetakan dimana titik-titik rawan pelanggaran terjadi. Mulai dari pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, pemugutan dan penghitungan suara, rekapilitulasi pengumpulan suara, sampai merekap suara di TPS. Di tahapan-tahapan ini yang rawan terjadi kecurangan adalah menambah atau mengurangi suara peserta.

Itu yang akan diantisipasi Bawaslu, ungkap Rusidi. Apalagi sekarang Bawaslu juga terbantu dengan UU No. 1 tahun 2015 yang menetapkan adanya pengawas di TPS. “Dengan demikian kami optimis pengawasan di

Serentak atau Tidak, Biayanya Sama

Tidak ada perbedaan mendasar. Dari segi anggaran juga tidak akan jauh beda pemilukada serentak dengan tidak serentak.

Terkait pelaksanaan pemilukada yang akan dilaksanakan di sembilan kabupaten dan kota di Riau, mantan anggota KPU Kota Pekanbaru, Fachri Yasin mengatakan, sesungguhnya tidak ada perbedaan mendasar antara pemilukada serentak dengan pemilukada yang dilaksanakan sendiri-sendiri. Hanya waktunya saja yang dilaksanakan serentak.

“Hanya kesamaan waktu saja. Tidak ada bedanya dengan pelaksanaan pemilukada sebelum-sebelumnya yang pernah digelar. Begitu juga dari segi anggaran juga tidak ada bedanya. Sebab anggaran yang dipergunakan merupakan anggaran pemerintah daerah setempat dan pos-pos pengeluaran pun juga tetap sama,” jelasnya.

Lain halnya, kata Fachri, jika pemilihan presiden disamakan waktu pelaksanaannya dengan pemilihan DPR-RI, pemilihan Gubernur Riau dilaksanakan dengan pemilihan DPRD Riau, maka ini baru bisa dilakukan penghematan anggaran.

Karena, sebut Fachri, dua agenda berbeda dijadikan satu agenda yang sudah tentu anggarannya akan jauh berkurang. “Contohnya ketika Pemilukada Inhil yang disamakan waktunya dengan Pemilihan Gubernur Riau beberapa tahun silam,” sebut Fachri.

Dengan digelar bersamaan, maka beberapa pos anggaran akan bisa dipangkas, seperti honor panitia hanya dibayarkan untuk satu kali kegiatan, namun di dalamnya ada dua agenda. Begitu juga dengan biaya pengamanan yang tidak lagi dikeluarkan dua kali. Namun hal ini juga menimbulkan rasa ketidak-adilan bagi pihak penyelenggara, karena mereka hanya dibayar satu kali untuk dua agenda sekaligus.

Yang menjadi persoalan sekarang, menurut Fachri adalah KPU Riau yang saat ini tidak memiliki anggaran dalam melaksanakan pemilukada serentak. Sementara KPU Provinsi Riau memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan monitoring di kabupaten dan kota yang menyelenggarakan pemilukada serentak.

“Ini akan jadi persoalan baru, bagaimana KPU Provinsi Riau bisa melakukan tugas-tugasnya sebagai koordinasi di tingkat provinsi, sementara mereka sendiri tidak memiliki anggaran,” terang Fachri kepada AZAM pekan silam.

Memang ada beberapa aturan baru yang dituangkan dalam Perppu Pilkada yang baru saja disahkan DPR-RI menjadi undang-undang. Seperti adanya aturan yang menjelaskan bahwa posisi wakil kepala daerah akan ditunjuk kepala daerah terpilih.

Artinya dalam pelaksanaan Pilkada nanti yang dipilih hanyalah satu kepala daerah saja. Sementara dalam pelaksanaan pemilukada sebelumnya pemilihan kepala daerah dan wakilnya dilakukan satu paket.

Di dalam UU tersebut juga dijelaskan bahwa sengketa pemilukada tidak lagi akan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK). Penggantinya akan diperankan Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara (PTTUN) dan Mahkamah Agung (MA).

Untuk beberapa hal akan didelegasikan ke Pengadilan Tinggi. Peran Bawaslu dan Pengadilan Negeri tidak mengalami perubahan, yang juga turut serta mengadili atau memeriksa sengketa pemilukada.

Tidak hanya itu saja, dalam pemilukada serentak akan ada tahapan uji publik yang tidak ada pada pemilukada sebelumnya. “Dari sinilah kualitas serta kemampuan calon kepala daerah akan diuji, sehingga masyarakat dapat menilai mana calon kepala daerah yang betul-betul memiliki kualitas bagus,” ujar Fachri.

Namun yang jadi persoalan, apakah kualitas pemilukada serentak ini lebih baik dari pemilukada sebelumnya? Menurut Fachri, jika KPU bersama *stakeholder* lainnya benar-banar mampu menjalankan ini dengan

sungguh-sungguh sesuai tahapan yang sudah dibuat dengan perencanaan yang matang, maka pemilukada serentak akan memiliki kualitas lebih baik.

Hanya saja kualitas hasil pemilukada sangat bergantung kepada pilihan masyarakat. Yang pasti KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan Kota, Bawaslu harus bekerja ekstra keras guna mempersiapkan segalanya. Jika nanti masih terdapat kekurangan, itu hal lumrah karena pemilukada serentak perdana dilakukan, dan berbagai kekurangan itu harus dijadikan evaluasi pelaksanaan pemilukada serentak tahap kedua.*

Kualitas Pilkada Tergantung Penyelenggaranya

Meski bukan pelaksana secara langsung, tapi peran KPU Provinsi Riau akan sangat menentukan kualitas pemilukada serentak.

Sembilan kabupaten dan kota di Riau akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak pada bulan Desember mendatang. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau harus segera mempersiapkan berbagai perangkat guna mendukung kelancarannya.

Menurut Ketua Komisi A DPRD Riau, Ir Hazmi Setiadi, KPU Provinsi Riau harus segera membuka diri dan berkoordinasi dengan KPU kabupaten dan kota yang akan menggelar pemilukada serentak, terutama terkait masalah anggaran.

Dia mengaku, beberapa waktu lalu Komisi A DPRD Riau telah melihat kesiapan di empat kabupaten dan kota, yakni Inhu, Dumai, Bengkalis dan Meranti. Namun, lantaran adanya regulasi baru yang menegaskan ada beberapa kabupaten dan kota yang jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2016 dimasukan pada pemilukada serentak Desember 2015.

Artinya, kata politisi PAN, ini ada tambahan sebanyak lima kabupaten lagi yang akan mengikuti pemilukada serentak, yakni Rohil, Kuansing, Rohul, Siak dan Pelalawan.

Untuk lima daerah yang baru saja bergabung dalam pemilukada serentak tahap pertama ini, rencananya Komisi A akan kembali menjadualkan memanggil KPU dan Bawaslu Riau mendengarkan kesiapan penyelenggaraannya.

“Untuk yang empat kabupaten dan kota sebelumnya kita sudah dapat gambaran berapa jumlah anggaran, beberapa pemerintah kabupaten dan kota juga sudah memasukan ke APBD. Inhu sebesar Rp 17 miliar, Dumai

Rp 13 miliar, Bengkalis Rp 33 miliar, dan Meranti Rp 17 miliar. Kalau ada kekurangan nanti akan mereka masukan ke APBD Perubahan,” ujarnya.

Lima daerah yang baru saja bergabung di pemilukada serentak ditahun 2015 ini, kata Hazmi, diharapkan juga bisa memasukan anggaran di APBD Perubahan. Jika sendainya kelima daerah ini belum berhasil memasukan anggaran di Perubahan karena persoalan payung hukum, mudah-mudahan saja bisa dibantu Kemendagri.

Komisi A berharap, penyelenggara benar-benar mempersiapkan pesta demokrasi ini secara matang dan terukur, mulai dari mencari petugas yang bekerja mempersiapkan pemilukada, seperti PPK, PPS, hingga ke tingkat KPPS. Juga tahapan yang sudah disusun harus dijalani dengan konsisten.

Jangan sampai, ungkap Hazmi, persiapan dilakukan mendekati hari pelaksanaan pemilukada, tapi jauh-jauh hari semuanya harus sudah siap, sebab mencari penyelenggara sampai ke TPS tidaklah mudah.

“Kualitas pemilukada sangat bergantung kepada penyelenggara. Karena itu, kesiapan KPU termasuk KPU Riau akan sangat menentukan kualitas pemilukada serentak,” jelas Hazmi saat ditemui AZAM di ruang Komisi A DPRD Riau, pekan silam.

Ia memastikan pemilukada serentak akan menimbulkan kesibukan yang luar biasa, tidak hanya bagi penyelenggara, namun kesibukan luar biasa pasti terjadi pada partai politik dalam proses penjaringan dan pencolanan kepala daerah yang akan mereka usung.

Dikuatirkan dengan keterbatasan waktu yang tersedia, proses yang dilakukan parpol dalam mencari dan menseleksi calon kepala daerah tidak lagi maksimal, sehingga kualitas dari kepala daerah yang dihasilkan pun diragukan.

Menanggapi hal itu, Hazmi mengatakan partai politik sedari awal sudah mulai membuka diri. Masing-masing parpol seharusnya sudah mulai memproses pendaftaran, penjaringan atau seleksi para bakal calon kepala daerah yang dianggap betul-betul memiliki kualitas serta integritas untuk diusung dalam pemilukada.*

Sengketa Pemilihan Bergeser ke PTTUN

Yang terbaru dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 untuk calon kepala daerah, selain membatasi usia, juga di uji publik secara terbuka. Sengketa pemilihan bergeser dari Mahkamah Konstitusi ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Anda berminat menjadi gubernur, bupati dan walikota? Silakan mempersiapkan diri. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Selain syarat bersifat normatif terdapat pula persyaratan teknis. Semua tercantum lengkap dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang.

Undang Undang ini lahir karena Undang Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD telah mendapatkan penolakan luas oleh rakyat, dan proses pengambilan keputusannya tidak mencerminkan prinsip demokrasi.

Selain itu juga bersandar pada pertimbangan kepentingan yang memaksa sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam amar putusannya, MK menyebut perlunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang apabila ada keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang undang. Sementara undang undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum. Kekosongan hukum itu tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang dengan prosedur biasa karena memerlukan

waktu lama. Sedang dalam keadaan mendesak perlu kepastian hukum.

Diantara persyaratan baru untuk calon yang kepala daerah adalah batas usia. Batas usia calon gubernur paling rendah 30 tahun, calon bupati dan calon walikota 25 tahun. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat, dan telah mengikuti uji publik. Belum pernah menjabat sebagai gubernur, bupati, dan walikota selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Berhenti dari jabatannya bagi gubernur, bupati, dan walikota yang mencalonkan diri di daerah lain, tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati dan penjabat walikota. Bagi anggota TNI dan PNS harus mengundurkan diri sejak mendaftar sebagai calon.

Uji Publik merupakan pengujian kompetensi dan integritas, yang dilaksanakan secara terbuka oleh panitia yang bersifat mandiri bentukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dan hasilnya tidak menggugurkan pencalonan. Panitia uji publik terdiri dari lima orang yang dipilih dari unsur akademisi, tokoh masyarakat dan anggota KPU sendiri. Dalam ketentuan undang-undang, uji publik dilaksanakan paling lambat tiga bulan sebelum pendaftaran calon gubernur, calon bupati dan calon walikota. Bakal calon yang sudah diuji publik berhak mendapat surat keterangan telah mengikuti uji publik dari panitia uji publik.

Sama seperti ketentuan sebelumnya, calon gubernur, bupati dan walikota dapat berasal dari partai politik atau gabungan partai politik, bisa juga perseorangan. Hanya saja ambang batas persyaratan pencalonan dalam undang-undang baru lebih berat. Yakni paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah bersangkutan.

Begitu pun untuk perseorangan. Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri menjadi calon gubernur jika memenuhi syarat dukungan, untuk provinsi dengan jumlah penduduk sampai 2 juta jiwa harus didukung paling sedikit 6,5%, lebih dari 2 juta sampai 6 juta jiwa 5%, 6 juta sampai 12 juta 4%, lebih dari 12 juta jiwa harus didukung paling sedikit 3%. Jumlah dukungan tersebar di lebih dari 50% jumlah kabupaten/kota pada provinsi bersangkutan.

Bagaimana dengan calon bupati dan walikota? Rada-rada mirip karena tetap memakai standar dukungan berdasarkan jumlah penduduk. Untuk kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250 ribu jiwa harus didukung paling sedikit 6,5%, kemudian 250 ribu-500 ribu didukung 5%, 500 ribu – 1 juta 4%, dan lebih dari 1 juta paling sedikit 3%. Jumlah dukungan tersebar di lebih dari 50% jumlah kecamatan di kabupaten tersebut. Dukungan dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi KTP elektronik atau surat keterangan tanda penduduk sesuai ketentuan perundang-undangan. Hayo, sanggup tak?

Yang menarik, soal penanganan sengketa pemilihan. Kalau selama ini, sengketa pilkada diajukan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi, tidak demikian dengan pemilukada serentak. Undang Undang No. 1 tahun 2015 menetapkan, sengketa yang timbul dalam pemilihan calon gubernur, bupati dan walikota dikategorikan ke dalam sengketa tata usaha, dan penyelesaiannya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah melewati upaya administratif di bawah atau panwas.

Pengajuan gugatan paling lama tiga hari setelah dikeluarkannya keputusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota. PTTUN akan memeriksa dan memutus gugatan paling lama 21 hari sejak gugatan dinyatakan lengkap. Keberatan atas putusan PTTUN dapat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung paling lambat tujuh hari kerja sejak putusan PTTUN dijatuhkan. MA akan memutus permohonan kasasi paling lambat 14 hari sejak permohonan diterima. Selanjutnya, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota wajib menindak-lanjuti putusan tersebut paling lambat tujuh hari.

Kapan peserta pemilihan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi? Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 memberi tenggat waktu tiga hari sejak diumumkannya penetapan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*

BAGIAN IV

اڻڄاتل زريعات اٿن، ڀليو

SPS
Seri Pustaka Press

AZAM

16



SYAMSUAR 'menproklamlirkan' kembali berpasangan dengan Alfredri pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Siak, Desember 2015. Keduanya juga sudah mengikuti penjarangan partai politik sebagai pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Siak periode 2016-2021. Keputusan politik Syamsuar 'menikah' dengan Alfredri termasuk 'barang langka'. Karena jarang terjadi bupati dan wakilnya bisa akur dalam satu periode. Selain 'pecah kongsi' di paroh jalan, keduanya juga saling jegal di pemilukada. Duet Syamsuar-Alfredri mengulang kisah sukses Annas Mammun-Suyatno di Kabupaten Rokan Hilir.

Apa yang mendorong mereka berpasangan di periode kedua? Kata Syamsuar, "hampir empat tahun kami memimpin, kami merasakan belum banyak yang kami lakukan. Banyak program harus dilanjutkan mengantarkan Siak lebih maju". Sementara Alfredri merasa, prinsip kerja Syamsuar sesuai dengan filosofinya dalam bekerja, yakni "kalau memberi masukan kepada pimpinan jangan mengugui, kalau bertanya jangan keras-keras, kalau disuruh maju jangan mendahului selangkah".*

SYAMSUAR-ALFEDRI TELADAN YANG SEPADAN

'Tahta' Siak Rakyat Masih Ingin Syamsuar dan Alfedri

Awalnya sebuah kewedanan. Lalu menjadi kecamatan di Kabupaten Bengkalis. Kini Siak Sri Indrapura menjadi kota berkembang. Jalan Syamsuar dan Alfedri kembali 'bertahta' di periode kedua bakal mulus.

Genderang perang suksesi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak memang belum ditabuh KPU. Tapi suasana politik di negeri peninggalan Sultan itu sudah mulai terasa hangat. Pembicaraan politik di sudut keramaian kota Siak Sri Indrapura seakan tiada henti dibicarakan sejumlah warga.

Tak sedikit yang memuji ketenangan kepemimpinan Syamsuar-Alfedri, Bupati dan Wakil Bupati. Kedua birokrat yang memiliki pengalaman panjang di pemerintahan itu dianggap berhasil menjalankan roda pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan itu. Perubahan bisa dirasakan, dilihat dan dinikmati oleh masyarakat," komentar H. Wan Anwar, Ketua Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu (LAM) Siak.

Siak dulunya memang sebuah kewedanan yang sangat terkenal. Sebagai daerah bekas kerajaan yang didirikan oleh Raja Kecik (Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah putera Raja Johor (Sultan Mahmud Shah) dari isteri Encik Pong, tahun 1723, Siak tumbuh menjadi kota berkembang tanpa menghilangkan bekas-bekas peninggalan Sultan.

Bertapak kaki di kota ini berbeda dengan di kota lain. Sentuhan Melayunya terasa kental. Mulai dari nama-nama jalan, ornamen bangunan kantor dan perumahan sampai kepada logat bahasa. Apalagi memasuki Istana Siak dan jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah. Kita akan

dibuat terkagum oleh nilai sejarah dan kebesaran kota bersejarah itu di masa lalu.

Siak hari ini adalah rentetan sejarah panjang Siak tempo dulu. Kearifan Tengku Putera Sayed Kasim (bergelar Sultan Assyaidis Sjarif Kasim II Abdul Djalil Sjaifuddin, raja terakhir) dalam memimpin, mampu mengangkat Siak menjadi daerah yang adil, makmur dan sejahtera. Akan tetapi kondisi itu berubah setelah Siak bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kebesaran nama Siak hanya tinggal catatan sejarah. Ia tak lagi sepopuler masa kejayaannya karena status kewilayahannya hanya sebagai ibukota kecamatan.

Ketertinggalan ini dirasakan masyarakatnya cukup lama. Baru setelah menjadi daerah otonom melalui UU Nomor 53 Tahun 1999, Siak perlahan tapi pasti dapat bangkit, mengejar ketertinggalan itu.

Arwin AS yang dipercaya masyarakat memimpin Kabupaten Siak mampu menjalankan amanah dengan baik. Berbagai program dan kebijakan strategis ia buat untuk menjawab kebutuhan Siak. Hanya dengan luas wilayah 8.556,09 km², Arwin menyulap Siak menjadi daerah yang berkembang pesat. Layaknya mengangkat batang terendam, aspek ekonomi, infrastruktur, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, hankam, dan lain-lain berjalan menurut alur dan patut.

Lima prioritas pembangunan yang dipancarkan Arwin, diantaranya penataan kota sejarah dan Kota Baru, pengembangan dan pembangunan infrastruktur daerah, pembenahan dan peningkatan kualitas sumber daya pendidikan (guru dan murid), peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan peningkatan produktifitas kerja dan pelayanan kepada masyarakat. Ini dimaksudkan agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah dan tepat sasaran. Termasuk membangun jembatan yang sangat tersohor itu.

Tangan Dingin Syamsuar

Arwin pulang, Syamsuar datang. Usai dua periode membangun Siak, alih generasi pun terjadi. Syamsuar yang di masa Arwin dipercaya menjadi

wakil bupati, berhasil mendulang suara pada Pilkada Siak tahun 2011. Ia berhasil merebut suara rakyat, dan mengalahkan rival-rival politiknya kemudian dilantik Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menjadi Bupati Siak masa bhakti 2011-2016. Dalam waktu bersamaan Alfedri juga dinobatkan sebagai wakil bupati.

Empat tahun di kursi 'empuk' bupati, Syamsuar mengaku masih banyak tugas pembangunan yang terbengkalai. Misinya mensejahterakan masyarakat Siak, dan mengantarkan kabupaten itu lebih maju belum tercapai dalam satu periode jabatan. Karenanya, menurut Syamsuar, ia ingin melanjutkan misi pembangunan untuk periode kedua, dan berpasangan kembali dengan Alfedri.

Pengakuan Syamsuar, sudah banyak yang ia lakukan dalam empat tahun masa kerja. Di bidang pendidikan, misalnya, ia menggratiskan pendidikan mulai dari SD sampai SLTA. Juga mendirikan Akademi Komunitas Negeri Siak bekerjasama dengan Politeknik Sriwijaya dan Politeknik Bandung. Lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seperti madrasah ibitidaiyah, tsanawiyah, aliyah dan pondok pesantren juga ia dirikan. Bahkan, kata Syamsuar, Kementerian Agama mempercayakan kepada Siak mendirikan sekolah unggulan setingkat SLTA.

Begitupun di bidang kesehatan. Syamsuar meluncurkan jamkesda bagi setiap warga Siak. Mereka dapat berobat ke rumah sakit-rumah yang ditunjuk pemerintah daerah, termasuk RS Arifin Achmad Pekanbaru dan RSCM Jakarta secara gratis. Program lain yang diunggulkannya adalah ekonomi kerakyatan. Menyediakan kebun kelapa sawit untuk warga tidak mampu. Serta bantuan modal untuk para petani.

Di luar itu, membenahi dan membangun infrastruktur jalan dan jembatan, termasuk listrik. Dan menyusun grand design pengembangan kepariwisataan Siak. "Kita juga menggelar banyak event budaya untuk memperkenalkan Siak ke luar," tukas Syamsuar.

Selain itu, kita juga memperbaiki apa yang ada di Siak terutama taman-taman, dan pembenahan infrastruktur, menyediakan ruang terbuka hijau bagi masyarakat. Termasuk juga akan mengembangkan wisata air, wisata

religius untuk orang beribadah, dan agrowisata. Jadi sudah lengkap wisata di Kabupate Siak.

Kendati sudah banyak terobosan, Syamsuar ingin melanjutkan bengkalai tugasnya di periode kedua bersama Alfredri. Di mata Alfredri, Syamsuar adalah figur yang amanah, beriman dan bertaqwa. “Ia komit dengan masyarakat. Prinsip kerjanya sejalan dengan filosofi bekerja saya, yakni *“kalau memberi masukan kepada pimpinan jangan menggurui, kalau bertanya jangan keras-keras, kalau disuruh maju jangan mendahului selangkah”*, Alfredri memuji Syamsuar.*

Jumlah Calon (Bisa) Lima Pasang

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak menyatakan kesiapannya melaksanakan pemilukada, memilih bupati dan wakil bupati. Menurut hitungan politik, jumlah calon bisa lima pasang.

Ada 168 kabupaten dan kota di Indonesia yang melaksanakan pesta pemilihan umum kepala daerah secara serentak dan langsung. Di Riau, terdapat sembilan daerah. Yakni Siak, Bengkalis, Inhu, Kota Dumai, Kepulauan Meranti, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Pelalawan dan Kuantan Singingi.

Sesuai jadwal KPU Pusat, hari 'H' pencoblosan dilaksanakan 9 Desember 2015. Pada tanggal itu, masyarakat di sembilan kabupaten/kota di Riau akan berbondong-bondong masuk ke TPS memberikan hak suaranya. Menentukan pemimpin di daerah masing-masing.

"Jadwalnya sudah ada. Akan tetapi belum diberi nomor oleh KPU Pusat. Jadi belum bisa disebut jadwal pasti. Kalau sudah bernomor, baru kita bekerja sesuai tahapan," kata Ketua KPU Siak, H. Agus Salim, SH.

Kendati jadwal pasti belum ditetapkan, KPU Siak tetap bekerja sesuai tahapan pilkada. Yaitu membentuk PPK, PPS dan KPPS. "Sesuai dengan tahapan, kita sedang membentuk pelaksana di tingkat kecamatan dan desa," ujar lelaki yang pernah bertugas di Kesbangpol Pemprov Riau itu.

Tentang jadwal pendaftaran calon, Agus Salim mengatakan, merujuk kepada jadwal yang belum bernomor itu, pencalonan akan berlangsung pada 26 Juli. Agus Salim mengingatkan masyarakat, agar tidak salah mengartikan pendaftaran calon di partai politik yang sudah dimulai itu. Kegiatan tersebut, tidak ada hubungannya dengan KPU. "Pendaftaran

di parpol itu urusan interen partai. KPU belum sampai ke tahap sana,” tegasnya.

Saat ini, lanjutnya, KPU masih dalam tahap persiapan. Ini ditandai dengan penyerahan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum. “Penyerahan dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada Ketua KPU Husni Kamil Malik,” ujarnya.

Data DAK2 merupakan data yang digunakan KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk menentukan batas jumlah penduduk yang harus memberikan dukungan kepada calon perseorangan. Data ini akan langsung didistribusikan KPU Pusat kepada KPU daerah. Setelah itu bisa diketahui berapa jumlah yang dibutuhkan calon perseorangan untuk mengikuti pilkada serentak.

Agus menambahkan, melihat kepada jumlah kursi DPRD Siak, jumlah calon dari partai politik bisa empat pasang. Kalau nanti muncul pula calon independen, maka bisa menjadi lima pasang. “Kursi DPRD Siak saat ini 40. Satu pasang calon minimal didukung delapan kursi atau 20 persen suara. Sementara itu, di DPRD Siak tidak ada partai politik yang memperoleh saura mencapai 8 kursi sehingga diwajibkan berkoalisi menjadi satu perahu,” ungkap Agus Salim. Ditegaskannya, semua hitungan tersebut merujuk pada ketentuan. Dalam kenyataannya nanti, berapa calon yang pasti, sangat tergantung pada tokoh-tokoh masyarakat di Siak.*

Syamsuar: *Nawaitu* Saya Membangun Siak

Drs H Syamsuar, MSi telah ‘memproklamkan’ kembali berpasangan dengan Drs. H. Alfredi, M.Si pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Siak, Desember depan. Keduanya juga sudah mengikuti penjurangan partai politik di Negeri Sultan itu. Syamsuar mendaftar sebagai calon bupati dan Alfredi sebagai calon wakil bupati. Partai Golkar Siak dalam rapimdanya, juga menetapkan duet Syamsuar-Alfredi sebagai pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Siak periode 2016-2021.

Keputusan politik Syamsuar kembali ‘menikah’ dengan Alfredi termasuk ‘barang langka’. Soalnya jarang terjadi bupati dan wakilnya bisa akur dalam lima tahun kerja. Selain ‘pecah kongsi’ di paroh jalan, juga saling bersiteru di pemilukada berikutnya. Duet Syamsuar-Alfredi mengulang kisah sukses Annas Maamun-Suyatno di Kabupaten Rokan Hilir dua tahun lalu.

Apakah ini isyarat, Syamsuar-Alfredi seiya sekata memimpin Siak? Atau karena merasa masih banyak bengkalan tugas yang terbengkalai sehingga harus dituntaskan di periode kedua? “Hampir empat tahun kami memimpin, kami sama-sama merasakan belum banyak yang dapat kami lakukan. Banyak program harus dilanjutkan agar Siak lebih berkembang,” kata Syamsuar kepada *Endrizal Yusten, Zainul Aziz dan Beni Hendra* dari **AZAM** yang menemuinya di ruang kerja Kantor Bupati Siak Sri Indrapura, Kamis pekan lalu. Berikut petikannya.

Siapa pun orangnya, jika ia kembali berpasangan di periode kedua dengan orang sama, berarti ia merasa nyaman memimpin. Apa saja keberhasilan Anda memimpin Siak?

Alhamdulillah apa yang kami lakukan telah sejalan dengan visi dan misi. Yakni terwujudnya masyarakat Siak yang sehat, cerdas, dan sejahtera dalam lingkungan masyarakat yang agamais dan berbudaya Melayu serta mewujudkan pelayanan publik yang terbaik di Provinsi Riau tahun 2016. Menurut saya, apa yang sudah kami lakukan telah membuahkan hasil. Baik di sektor pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur maupun sektor-sektor lainnya.

Bisa Anda perjelas lagi maksudnya?

Di sektor pendidikan, kami menjalankan program pendidikan gratis mulai dari SD, SMP, SLTA sederajat. Ini terobosan baru yang sebelumnya tak pernah ada. Kami menilai program ini berhasil karena mampu meningkatkan prestasi siswa. Kami juga merasa bangga dengan prestasi anak-anak kami. Baik tingkat SD, SMP, dan SLTA, anak-anak Siak sudah ada yang menjuarai olimpiade baik di tingkat Provinsi Riau, bahkan salah seorang siswa SMA Negeri 1 Perawang menjuarai olimpiade tingkat Provinsi dan persiapan ke tingkat nasional. Tahun lalu, untuk tingkat nasional ada siswa SD kita juara III olimpiade Matematika.

Apakah sudah ada rencana mendirikan perguruan tinggi di Siak?

Pastinya sudah. Karena sekarang telah berdiri Akademi Komunitas Negeri Siak kerja sama dengan Politeknik Sriwijaya. Dan *alhamdulillah*, kita juga bekerjasama dengan Politeknik Bandung sebagai cikal bakal mempersiapkan Politeknik Siak. Tujuannya, mempersiapkan SDM Siak ke depan. Akademi ini merupakan amanah UU Pendidikan Nasional yang memberi kesempatan kepada daerah membangun perguruan tinggi setingkat D-II untuk memperoleh pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di masing-masing daerah. Dan, untuk keperluan ini kita sudah bekerjasama dengan PT Indah Kiat. Jadi, kita siapkan dulu lembaga pendidikannya, setelah anak-anak tamat mereka langsung diterima di perusahaan tersebut.

Bagaimana perhatian Anda untuk sekolah-sekolah agama?

Ya itu pasti. Saat ini di Siak sudah ada beberapa Madrasah Ibtidaiyah, MTS, dan Madrasah Aliyah, juga pondok-pondok pesantren. Ada pula pesantren tahfidz di dua kecamatan, kemudian Gontor Putra Cabang 14 di Sungai Mandau. Siak juga dipercaya Kementerian Agama mendirikan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia di Perawang. Ini merupakan sekolah unggulan Kementerian Agama.

Bagaimana pula dengan sektor lain?

Di bidang kesehatan, kami meluncurkan jamkesda yang menggratiskan biaya pengobatan untuk seluruh masyarakat Siak. Artinya selagi memiliki KTP Siak, ia bisa menikmati pelayanan kesehatan secara gratis. Dalam perjalanannya, masyarakat menyampaikan kepada agar program ini dilanjutkan karena dinilai cukup baik.

Apa yang berbeda antara jamkesda Siak dengan jamkesda daerah lain?

Dalam pelaksanaannya, Pemkab Siak bekerjasama dengan banyak rumah sakit, termasuk di Pelalawan dan Bengkalis. Masyarakat yang perlu dirujuk cukup berobat di rumah sakit di Pelalawan atau Bengkalis, yang membayar Pemkab Siak. Kita juga bekerjasama dengan RSUD Arifin Achmad, Rumah Sakit Ibnu Sina, juga rumah sakit Harapan Kita di Jakarta dan RSCM, termasuk Rumah Sakit Ortopedi di Solo. Perlu dicatat semuanya dibiayai Pemkab Siak.

Bagaimana dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat?

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena masyarakat kami banyak petani, khususnya kelapa sawit dan tanaman pangan, juga karet, kita sediakan 15 ribu hektare kebun sawit yang harus *direplanting*. Tahun lalu kita telah melakukan 1.200 hektare, dan masih tersisa 13 ribu hektare lagi. Untuk program pertanian tanaman pangan, terjadi peningkatan produksi dari tahun 2012, 2013, hingga 2014. Atas keberhasilan

ini saya menerima penghargaan dari Bapak Presiden. Tentunya ini bukan perstasi saya, akan tapi prestasi petani yang berhasil meningkatkan produksi. Presiden juga memberi penghargaan kepada kepala desa di Sungai Mandau, dan kepada petani.

Upaya di sektor lain bagaimana?

Perlu diketahui, saat ini Kabupaten Siak dipercaya Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat (cq. Kementerian Pertanian) sebagai sentra peternakan sapi di empat kecamatan. Yakni Kecamatan Dayun, Lubuk Dalam, Koto Gasib dan Kerinci Kanan. Peternakan sapi terintegrasi dengan perkebunan sawit dan ini merupakan metode baru dimana satu hektare sawit terdapat dua ekor sapi. Kalau ini bisa diberlakukan, maka setiap kepala keluarga yang memiliki dua hektar kebun sawit dapat memelihara empat ekor sapi. Hasilnya lumayan. Karena selain berternak sapi, mereka juga bisa memanfaatkan urine dan kotoran sapi. Kotoran sapi mereka jadikan pupuk sehingga banyak nilai tambahnya. Disamping itu, disediakan pula bantuan modal oleh Pemprov Riau melalui program UEK-SP yang bersinergi dengan bantuan dari Pemkab Siak. Kita telah menyalurkan pinjaman modal lebih kurang Rp54,5 miliar. Dan *alhamdulillah* saat ini sudah berkembang menjadi Rp245 miliar.

Selama ini Siak menjadi tujuan wisata. Apakah sektor pariwisata juga menjadi fokus perhatian Anda?

Sebagai daerah tujuan wisata di Riau, kita terus berupaya dengan berbagai strategi agar orang berminat datang ke Siak. Selama kepemimpinan kami, banyak terobosan yang kami buat antara lain, menambah kegiatan budaya untuk memperkenalkan Siak secara nasional. Sekarang kita sudah memberi motto pariwisata Siak dengan Siak *truly of Malay*. Artinya kita ingin memperkenalkan kepada khalayak, kalau orang ingin melihat budaya Melayu sesungguhnya, tempatnya ada di Siak.

Selain memberi perhatian kepada *event* sejarah, kita juga mengembangkan budaya. Itulah sebabnya beberapa *event* kebudayaan

seperti festival budaya, Siak Bermadah kita gelar setiap tahun termasuk festival kuliner. Kita juga sudah memiliki *grand design* pengembangan kepariwisataan yang penyusunannya dibantu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan melibatkan pakar-pakar handal yang menguasai budaya Jawa, Minang, Melayu, Batak, dan Bugis. Mereka yang merangkum ini semua. *Grand design* ini yang kini menjadi konsep pembangunan budaya di Siak.

Kenapa *grand design* kami buat? Karena sebagai pusat budaya Melayu di Riau, kalau kita tidak mempunyai konsep dalam membangun kebudayaan Melayu, maka arahnya tidak akan jelas.

Selain itu, kita juga memperbaiki apa yang ada di Siak terutama taman-taman, dan pembenahan infrastruktur, menyediakan ruang terbuka hijau bagi masyarakat. Termasuk juga akan mengembangkan wisata air, wisata religius untuk orang beribadah, dan agrowisata. Jadi sudah lengkap wisata di Kabupate Siak.

Akhir-akhir ini banyak daerah lain belajar ke Siak. Apa sebenarnya yang membuat mereka tertarik ke mari?

Memang benar. Yang banyak mereka pelajari itu masalah pelayanan publik. Pelayanan di sini sudah menjadi percontohan nasional. Bedanya dengan daerah lain kita menerapkan pelayanan secara terpadu, dimana kewenangan bupati dilimpahkan ke camat sehingga masyarakat tidak perlu lagi berurusan ke kantor bupati. Karena akan butuh biaya lebih banyak dan waktu yang lama. Tahun lalu kita juara tiga nasional terkait pelayanan dari BKPM. Badan pelayanan terpadu ini ada di kecamatan dan di kabupaten. Kewenangannya juga kita bedakan. Untuk kabupaten melalui Badan Pelayanan Penanaman Modal satu pintu.

Apakah Anda tidak takut kewenangan yang diberikan itu diselewengkan camat?

Sejauh ini belum ada staf saya berbuat macam-macam.

Bagaimana dengan pembangunan infrastruktur?

Pastinya itu juga menjadi fokus perhatian kita selama hampir empat tahun menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Siak. Terutama soal jalan. Program kita membangun jalan yang menghubungkan desa ke desa berjalan baik, dan sudah mencapai 90 persen. Memang masih ada jalan yang belum di aspal, tapi jumlahnya sedikit. Pembangunan listrik juga menjadi perhatian kita. Saat ini sudah kami mulai membangun jaringan sampai ke desa-desa. Jika PLN tidak mampu, Pemkab yang mengerjakannya. Kalau sebelum kami memimpin Siak, kemampuan listrik baru 34 persen, sekarang sudah 54 persen.

Ada yang mengatakan kepemimpinan Anda tiada hari tanpa rapat. Apa komentar Anda?

Memang seperti itu. Rapat dalam rangka memantapkan tugas, dimana perlu kesepahaman dan kerjasama. Kalau kita tidak mengadakan rapat nanti tidak jelas arahnya kemana.

Bagaimana hubungan Anda dengan DPRD?

Komunikasi dengan legislatif sangat bagus, setiap perda dan pembahasan APBD tidak pernah ada persoalan.

Apa yang melandasi Anda mengambil keputusan kembali berpasangan dengan Alfredri?

Kami sama-sama merasakan hampir empat tahun menjadi Bupati dan Wakil Bupati, belum banyak yang kami lakukan dan masih banyak program pembangunan yang harus dilanjutkan untuk membawa Siak lebih maju dan berkembang. Ini juga dilandasi komunikasi yang baik dan selalu kompak. Saya pernah bertemu salah seorang bupati, ia menyatakan akan maju lagi tapi belum menemukan pasangan. Lantas dia bilang Pak Syamsuar enak dan bagus, karena sudah ada pasangan, saya sampai sekarang masih pusing mencari pasangan. Perlu juga dipahami membangun ini susah, saya sudah pengalaman jadi wakil bupati, kalau

orang tidak pernah jadi wakil bupati mungkin orang tidak tahu, makanya saya membangun ini diiringi dengan *nawaitu* yang ikhlas, bagaimana kita ingin melanjutkan pembangunan, dan berbuat yang terbaik bagi daerah.

Apakah juga karena banyak masyarakat yang meminta?

Dukungan masyarakat *alhamdulillah*. Masyarakatlah yang mendorong dan meminta kami kembali maju dan tetap berpasangan. Jangan pecah kongsi dan itu mereka sampaikan setiap berjumpa. Mudah-mudahan saja atas izin Allah SWT, masyarakat Siak kembali memberi amanah kepada kami membangun Siak.

Apakah ada yang datang kepada Anda dan minta dijadikan wakil bupati?

Kalau itu jelaslah.

Untuk bisa bertarung di pilukada, semangat dan dukungan masyarakat saja tidak cukup. Bagaimana komunikasi dengan parpol?

Sejauh ini kita sudah mulai membangun komunikasi dengan beberapa partai politik, seperti PAN, Nasdem, PKS, Demokrat dan Hanura. Pokoknya sudah ada beberapa partai yang siap membangun koalisi bersama-sama.

Dengan kian dekatnya pilukada, pasti Anda makin sibuk. Bagaimana Anda menjaga kebugaran tubuh?

Kalau soal ini saya pikir kuncinya adalah keikhlasan dalam bekerja. Anak dan istri kita ikhlas melepaskan kita kemana-mana yang diiringi dengan doa. Termasuk juga kita selalu meminta ampun kepada Allah SWT dengan selalu beribadah, Hanya itu saja modal saya. *Alhamdulillah* saya tetap dilindungi Allah SWT. Saya merasa dalam bekerja banyak mendapatkan pertolongan dari Allah. Jadi zikir tidak boleh kita tinggalkan, begitu pun membaca al Quran bersama keluarga, juga tak pernah kami tinggalkan.*

Kepemimpinan Syamsuar Sesuai Filosofi Saya

Tak banyak orang seperti Drs H Alfredri, MSi. Meski sudah menjabat sebagai wakil bupati, namun ia tetap memilih kembali menjadi wakil. Padahalnya peluangnya menjadi orang nomor satu di Siak juga terbuka lebar. Apa yang mendasari Alfredri tetap mencalonkan diri menjadi wakil bupati di Pemilukada Siak Desember mendatang? Berikut wawancara **Endrizal Yusten** dan **Beni Hendra** dari **AZAM**.

Apa yang mendasari Anda kembali berpasangan dengan Syamsuar?

Perlu dipahami bersama bahwa saya maju sebagai wakil bupati niatnya untuk mengabdikan diri kepada masyarakat dan daerah, supaya saya bisa mensejahterakan masyarakat, dan pembangunan di Siak lebih meningkat dari yang kita capai sekarang. Begitupun dengan pelayanan, bisa lebih baik lagi.

Mungkin ada faktor lain?

Ada. Keputusan ini juga didasari atas figur Pak Syamsuar yang dalam menjalankan kepemimpinannya memang penuh amanah, orangnya juga beriman dan bertaqwa. Komit atas apa yang disampaikan kepada masyarakat tentang program-program pembangunan yang akan dilaksanakan. Makanya menurut saya beliau cocok melanjutkan pembangunan lima tahun yang akan datang, supaya Siak lebih maju lagi dan menjadi kabupaten yang terbilang dan cemerlang.

Apakah juga karena besarnya dorongan masyarakat?

Sebagai abdi negara prinsipnya saya siap mengikhhlaskan diri berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Namun tentunya kita juga harus melihat

dukungan atau respon masyarakat. Sejauh yang saya rasakan, saya lihat dan saya terima baik dari kepala desa atau tokoh masyarakat, banyak yang ingin kami tetap maju bersama, saya tetap mendampingi Pak Syamsuar.

Banyak orang mengatakan hubungan Anda dengan Syamsuar sangat harmonis. Komentar Anda?

Selaku bupati dan wakil bupati, rasanya hubungan kami selalu harmonis. Itu karena hampir setiap hari melakukan komunikasi. Apapun tugas yang diberikan kepada saya tetap saya laporkan kepada bupati. Entah pagi, atau subuh. Bupati juga memberikan kewenangan dan kepercayaan kepada saya selaku wakil Bupati. Misalnya, dia meminta saya menjadi Ketua BAZ, Ketua Kwarcab Pramuka dan sebagai Badan Wakaf, itu semua tetap saya jalani. Artinya ada distribusi tugas dan kewenangan secara merata. Tugas-tugas kedinasan juga demikian, kalau ada rapat di Jakarta dan beliau sudah dua kali hadir, untuk yang berikutnya saya lagi yang ditugaskan. Jadi semua pekerjaan terdistribusi dan terkomunikasikan dengan baik dan lancar.

Apa sisi positif yang Anda nilai dari kepemimpinan Syamsuar?

Dalam kepemimpinan formal dan informal (dinas dan kemasyarakatan) beliau membuat semacam pengkaderan dan memberikan kepercayaan kepada kami. Jadi pelaksanaan tugas tidak dimonopoli oleh Pak Bupati. Prinsip ini sesuai dengan filosofi saya dalam bekerja, yakni kalau memberi masukan kepada pimpinan jangan menggurui, kalau bertanya jangan keras-keras, kalau disuruh maju jangan mendahului selangkah.

Apakah tak ada masyarakat yang minta Anda mencalonkan diri menjadi bupati?

Memang ada orang mengatakan seperti itu, kenapa saya tidak maju saja sendiri? Lalu saya bilang, kalau untuk masyarakat kita tidak perlu memperhitungkan kita ini bupati atau wakil, yang penting niat untuk

masyarakat. Pak Syamsuar sendiri agamanya cukup kuat dan semenjak mendampingi beliau agama saya juga ikut terbawa-bawa kuat.

Sesuai UU ASN, Anda harus mengundurkan diri sebagai PNS. Apakah Anda siap dengan konsekuensi itu?

Saya siap mendampingi Pak Syamsuar untuk periode kedua walaupun saya harus mengundurkan diri dari PNS. Kendati usia saya baru 49 tahun dan masih banyak waktu untuk mengabdikan, namun karena kami hadir hanya untuk masyarakat dan oleh rakyat, maka kami siap berbuat yang terbaik untuk rakyat Kabupaten Siak.

Apa tanggapan masyarakat atas keputusan Anda itu?

Alhamdulillah, selama ini kami telah banyak menyerap, mendengar, dan melakukan sosialisasi tentang program dan kebijakan-kebijakan, termasuk menjelaskan apa yang telah kami buat, respon masyarakat sangat positif dan sangat mengharapkan kami berdua kembali bisa memimpin Kabupaten Siak.

Hampir empat tahun Anda bergandengan tangan dengan Syamsuar, apakah pencapaian yang diraih sesuai dengan visi dan misi?

Kalau ditanya soal pencapaian dalam program pembangunan tentu kita melihatnya dari capaian kinerja mulai dari visi dan misi sampai pada program-program strategis yang sudah kita tuangkan dalam RPJMD. Berangkatnya dari situ, karena kami ini satu paket, kebijakan Pak Syamsuar merupakan kebijakan saya juga selaku wakil. Apa yang sudah kita programkan dulunya banyak yang berjalan sesuai harapan.

Bisa Anda contohkan pencapaian yang sesuai dengan visi dan misi itu?

Pastinya banyak. Seperti di bidang kesehatan melalui program jamkesda yang diminta masyarakat untuk tetap dilanjutkan. Ini sejalan

dengan komitmen bahwa kami ingin memberi pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat. Tolak ukur keberhasilan juga bisa dilihat dari harapan hidup di Siak yang mengalami peningkatan menjadi 77,9 tahun. Kita nomor tiga di Riau setelah Dumai dan Pekanbaru.

Pencapaian bidang lain bagaimana?

Di bidang pendidikan, terjadi peningkatan dari segi perhatian bagaimana lamanya anak bersekolah atau angka partisipasi kasar. Ini karena adanya program pendidikan gratis mulai dari SD, SMP, SMA atau SMK. Dan kita juga telah membuat perda wajib belajar 12 tahun. Kita membantu anak-anak yang tidak mampu mulai dari sepatu, pakaian dan tas. Sehingga diharapkan tidak ada lagi anak-anak tidak mampu yang tidak bisa sekolah sampai ke tingkat SMA sederajat.

Menurut Anda, apa pencapaian yang paling mengembirakan?

Yang paling mengembirakan adalah pelayanan kepada masyarakat melalui Badan Perizinan dan Pelayanan Terpadu. Kita berada di peringkat pertama dua tahun berturut-turut. Malah tahun 2014 kita juara tiga dari 501 kabupaten dan kota. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan kita juga menjadi percontohan di Kemendagri, dan sudah 72 kabupaten/kota yang studi banding ke sini. Ini memang komitmen kami untuk memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bahkan dengan UU NO 6 Tahun 2014 bupati dan juga saya selaku wakil, berazam akan melimpahkan wewenang kepada penghulu atau kepala desa dalam masalah pengurusan perizinan.*

“... Dan, Mereka pun Bertekad Menangkan Syamsuar”

Kedudukan Syamsuar dan Alfredri di Siak sangat kuat, dan sepertinya sulit ditumbangkan. Sebagai incumbent, banyak puja-puji masyarakat bahwa keduanya berhasil membawa perubahan. Mereka ingin pasangan ini kembali memimpin Negeri Istana.

Cobalah tanya ke tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Siak. Siapa yang akan mereka pilih di pemilukada nanti? Jawabannya adalah bupati dan wakil bupati yang menjabat saat ini, yaitu pasangan Syamsuar dengan Alfredri. Mengapa? Karena keduanya dianggap berhasil membangun Siak. Kepemimpinan mereka dinilai seakan tanpa cela. Para tokoh bertekad kembali memenangkan Syamsuar-Alfredri.

Awak Redaksi AZAM pekan lalu turun ke masyarakat Siak. Berdialog dan berbincang dengan sejumlah tokoh. Simpulannya, mereka menginginkan Syamsuar dan Alfredri bisa kembali menjadi bupati dan wakil bupati. Menurut tokoh, seandainya Siak dipimpin orang baru tentu figur tersebut perlu waktu menyesuaikan diri, termasuk konsep dan ide-ide barunya.

Lain dengan Syamsuar dan Alfredri, yang menurut mereka, tinggal melanjutkan program yang sudah disusun dan dijalankan selama empat tahun. Haji Wan Anwar menyatakan, pembangunan telah banyak dirasa oleh masyarakat. “Ini menjadi bukti. Perubahan itu bisa dirasakan, dilihat dan dinikmati oleh masyarakat,” ujar mantan polisi yang kini menjabat Ketua Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu (LAM) Siak.

Keberhasilan Syamsuar dan Alfredri, kata Wan Anwar, tidak sebatas pembangunan fisik saja tetapi juga non fisik. “Beliau orangnya agamis.

Dekat dengan rakyat dan mampu menularkan kedamaian, ketenangan dan ketentraman di tengah masyarakat,” jelas Anwar.

Ia mengaku, tak akan malu-malu memuji kepemimpinan Syamsuar dan Alfredri. Sebab, apa yang dia katakan adalah fakta yang dapat dinikmati masyarakat. Yang menarik bagi Wan Anwar, pasangan Syamsuar-Alfredri bisa menjaga kekompakan hingga akhir periode. Bahkan keduanya kembali maju berpasangan. Kerukunan seperti dicontohkan dua pemimpin ini, jarang terjadi di daerah lain.

“Tak pernah kita dengar ada masalah. Mereka mampu memberi contoh dan menularkan kedamaian bagi masyarakat. Ini yang saya maksud salah satu bukti pembangunan non fisik, beliau bisa dijadikan tauladan,” ujar pria yang juga pengusaha perhotelan di Siak ini.

Demikian pula dengan Haji Wan Said, tokoh masyarakat Kecamatan Mempura. Pria berperawakan tinggi kurus ini menyebut, Siak hari ini sudah sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Terutama sebelum dimekarkan menjadi kabupaten. “Dulu kami seperti katak dalam tempurung. Setelah dimekarkan dan pembangunan merata di Siak, dunia ini terasa luas,” ujar pria yang telah memasuki usia senja ini.

Wan Said mengaku sangat bersyukur karena pemimpin Siak memperhatikan semua aspek. Dulu, tak banyak masyarakat yang bisa bersekolah tinggi. Sekarang, pemerintah daerah menyediakan semuanya. “Mau keluar Siak saja susah, sebab tak ada jalan. Kini, kemana nak pergi bisa. Banyak jalan dan jembatan. Semuanya bagus-bagus,” ungkap Wan Said. Ingin sekolah, sudah dibangun oleh Pak Bupati sampai ke perguruan tinggi.

“Anak-anak kita sudah banyak yang bersekolah ke luar daerah bahkan keluar negeri. Mereka mendapat beasiswa dari Pemkab Siak,” tambah Wan Said. Kepada AZAM, Wan Said membuka kartu, dulu di Mempura pasangan Syamsuar dan Alfredri tidak menang. Walau demikian daerah ini tidak dianaktirikan dalam pembangunan. Pembangunan tetap merata dan mendapat perhatian yang sama seperti daerah lain.

“Sekarang kami sadar, Syamsuar dan Alfredri betul-betul pemimpin yang baik. Di pilkada nanti, saya yakin 90 persen masyarakat Menpura menjatuhkan pilihan pada pasangan ini,” tegas Wan Said.

Hal serupa juga diucapkan tokoh masyarakat di Kecamatan Siak, Zul Fakhri. Kata Zul, pasangan Syamsuar dan Alfredri jempat tahun lalu uga kalah di daerahnya. Tetapi, sekarang masyarakat sudah bisa menilai, perubahan yang terjadi. “Kami yakin mayoritas masyarakat di Kecamatan Siak memberikan hak suara pada Syamsuar dan Alfredri. Keduanya adalah orang luar biasa. Kami menyadari semua itu setelah melihat komitmennya membangun Siak,” puji Zul Fakhri.

Ia menambahkan, Syamsuar merupakan sosok yang dekat dengan masyarakat. Dia sering berkunjung ke pelosok desa berdialog dengan warga. Tanpa protokoler, dengan gayanya Syamsuar bisa berada di tengah masyarakat tanpa acara-acara seremonial.

“Kita banyak melihat pemimpin itu besar karena dibesarkan dengan protokoler, Syamsuar tidak demikian. Dia besar karena sering berada di tengah masyarakat biasa,” ujar Zul Fakhri.

Pujian sama diamini Syamsurizal, tokoh adat Siak. Menurutnya, bupati sering terlihat berada di tengah masyarakat ketika melayat, saat takziah, atau melihat orang sakit.

Menurut Syamsurizal, duet Syamsuar dan Alfredri akan sulit ditumbangkan oleh pasangan lain. Mereka sangat kuat karena sudah memiliki sifat kepemimpinan yang dipraktekkan. Keduanya juga amanah dan fathonah.*

Masyarakat Dambakan Kepemimpinan Ini Terus Berlanjut

Kabupaten Siak membutuhkan pemimpin yang sehati membangun negeri. Karena itu pula mereka mendambakan kepemimpinan yang terus berlanjut, kata Indra Gunawan.

Sebelum memberi penilaian terhadap kinerja pasangan Bupati dan Wakil Bupati Siak periode 2011-2016, Drs H Syamsuar, MSi dan Drs H Alfredri, MSi, Ketua DPRD Siak, Indra Gunawan menggambarkan perbedaan antara pemimpin dengan penguasa.

Menurut Indra, pemimpin itu benar-benar bekerja sesuai dengan visi misi dan ikhlas. Sedang penguasa biasanya agak lari dari visi dan misi. Dilihat dari perjalanannya menjadi Bupati dan Wakil Bupati Siak, Syamsuar dan Alfredri, sangat aktif turun bergantian ke masyarakat. Malah bersama-sama. Mereka saling menutupi dan melengkapi kelebihan dan kekurangannya.

Tidak bisa dipungkiri, kata Indra, Kabupaten Siak merupakan salah satu daerah pemekaran, walaupun APBD-nya lumayan besar banyak sisi yang harus dibangun dan dikerjakan, baik infrastruktur maupun peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan. Itu artinya, Siak butuh pemimpin yang memiliki komitmen tinggi, dan sehati membangun negeri.

“Syukur *alhamdulillah* saya sampaikan, jika benar kabar bahwa Syamsuar dan Alfredri kembali maju dan masih tetap berpasangan. Ini merupakan harapan masyarakat Siak. Boleh sama-sama kita lihat sudut-sudut pelosok di Siak rata-rata menginginkan itu. Ini juga sejarah dimana saat ini sangat sulit mencari duet pemimpin yang sehati,” ujar Indra ketika ditemui AZAM diruang kerjanya, pekan silam.

Indra memastikan jika antara bupati dan wakil tidak lagi sehati, tidak lagi harmonis dan sejalan, maka akan berimbas kepada SKPD, sehingga para kepala dinas tidak lagi konsisten, masing-masing pejabat akan saling curiga. Ketika masih sejalan, maka suasana kecurigaan tidak akan muncul, yang ada rasa saling percaya, saling menghargai satu sama lainnya.

Kabupaten Siak tidak bisa dibangun dalam waktu 1 atau 2 tahun, karena keterbatasan dana. “Kalau saya perhatikan semangat membangun bupati dan wakil bupati saat ini begitu kuat. Karena itulah masyarakat berharap dan mendambakan kepemimpinan ini terus berkelanjutan dan mudah-mudahan bisa diteruskan untuk lima tahun ke depan,” kata Indra yang juga Ketua KNPI Siak ini.

Bukan hanya memuji, tapi Indra menilai keharmonisan bupati dan wakil bupati merupakan komitmen sejak awal untuk sama-sama membangun Siak, jadi tidak dipaksakan. “Ini timbul dari hati, karena merasa memiliki Siak dan bagian dari rumah mereka. Kalau merasa Siak menjadi bagian dari rumah, pasti mereka ingin membaguskannya. Kan tak mungkin orang lain yang akan membaguskan rumah kita, kalau tidak kita sendiri,” katanya.

Dalam Pilkada, sebut Indra, banyak sisi yang bisa diraih. Mau memilih pemimpin atau memilih penguasa. Kalau ingin memilih pemimpin mungkin dengan *style* sederhana, tapi penuh dengan konsep dan adanya di dua figur ini. Dan masyarakat justru merasa agak was-was ketika keduanya berpisah.

Selaku Ketua DPRD, Indra sangat mengetahui bagaimana hubungan antara eksekutif dan legislatif di Siak yang sangat bagus dan harmonis. Terbukti penyusunan anggaran Siak tiga tahun berturut-turut selalu tepat waktu. Itu akibat hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif.

Barangkali pada awal-awal memimpin Siak, jelas Indra, para kepala dinas agak sedikit terkaget-kaget melihat gaya kepemimpinan Syamsuar-Alfredri, Tapi lama kelamaan menjadi terbiasa, terutama bagi mereka yang betul-betul bekerja.

“Mudah-mudahan saja pasangan ini kembali mendapat restu dari Allah SWT untuk memimpin Siak dan apa yang sudah diprogramkan dapat terwujud serta bisa dilanjutkan. Kita akui rencana pembangunan jangka pendek dan jangka menengah sudah mereka rajut dan sudah disambung dari desa ke desa. Mudah-mudahan saja pada periode mendatang bisa merangkai dusun-dusun,” tuturnya.*

Di Atas Kertas Syamsuar-Alfedri Unggul

***Incumbent* selalu diuntungkan oleh situasi politik dan berpeluang untuk menang termasuk pasangan Syamsuar-Alfedri di Siak Sri Indrapura, kata pengamat poliik Universitas Riau, Zaili Rusli kepada AZAM.**

Peluang pasangan Syamsuar-Alfedri kembali memimpin Siak di atas rata-rata pesaing politiknya. Sebagai *incumbent* mereka memiliki banyak sumber daya dan potensi yang bisa digerakkan. Duet ini juga mampu bekerjasama dengan baik dan menjaga keharmonisan, itu dibuktikan dengan kembali berpasangan pada Pilkada Siak Desember depan.

Analisis itu diulas Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Universitas Riau, Zaili Rusli, kepada AZAM pekan silam. Ia mengatakan, Syamsuar-Alfedri merupakan pasangan kepala daerah yang mampu mempertahankan dan menjaga hubungan diantara mereka. Keharmonisan pasangan ini setidaknya mampu memberikan nilai tambah.

“Memang jarang terjadi, namun ini membuktikan dan menunjukkan suatu hubungan baik dan harmonis antara kepala daerah dan wakilnya yang biasanya selalu mengalami keretakan, apalagi dipenghujung jabatan, masing-masing ingin maju, namun tidak demikian halnya dengan Syamsuar-Alfedri,” ujar Zaili.

Dari pengamatan Zaili, sejauh ini dalam setiap pemilihan kepala daerah, apakah itu bupati, wali kota ataupun gubernur, peluang *incumbent* selalu di atas pesaingnya. Dalam perspektif komunikasi politik, calon *incumbent* dikatakan banyak sumber daya serta potensi yang akan mampu digerakan, apakah itu sumber daya yang berasal dari kelompok-

kelompok masyarakat, partai pengusung atau bahkan sumber daya yang ada di dalam lingkungan pemerintahan.

“Para calon *incumbent* tentunya sudah mempersiapkan diri sebelum berakhir masa jabatan dengan melakukan sosialisasi sampai kepedesaan atas nama kepala daerah. Dan bagaimanapun *incumbent* masih tetap diuntungkan dengan kepopuleran mereka jika dibandingkan dengan dengan calon lain yang baru mulai ikut proses Pilkada,” ungkap Zaili.

Apalagi apabila selama menjabat calon *incumbent* tidak memiliki rekam jejak buruk. Artinya, sebut Zaili, penilaian masyarakat terhadap kinerja calon *incumbent* bisa dikatakan baik-baik saja. Nah, kesemuanya itu menurut Zaili ada pada pasangan Syamsuar-Alfedri.

“Peluang Syamsuar-Alfedri masih di atas rata-rata pesaingnya, sebagai pasangan *incumbent*, mereka memiliki banyak sumber daya atau potensi yang akan gerakan nantinya,” ungkap Zaili.

Meskipun di atas kertas calon *incumbent* relatif kuat bagi pesaingnya, namun itu sangat bergantung kepada kesiapannya merebut peluang tersebut. Seperti, misalnya, bagaimana membangun komunikasi yang intens dengan berbagai partai politik pengusung.

Pilkada Siak yang digelar 9 Desember 2015, sudah memunculkan beberapa nama, namun dari sederet nama-nama tersebut, kepopuleran pasangan Syamsuar masih cukup tinggi, apalagi ia berpasangan dengan Wakilnya, Alfredri. Dari sisi popularitas, keduanya memiliki tingkat elektabilitas yang lebih tinggi. “Mereka sama-sama populer dan popularitas itu memberi nilai tambah bagi pasangan Syamsuar-Alfedri,” tutur Zaili.

Kendati demikian, Zaili mengingatkan, politik sifatnya dinamis dan sangat bergantung pada situasi dan kondisi politik terkini di Siak. Meskipun di atas kertas calon *incumbent* lebih unggul, namun tidak tertutup kemungkinan dikalahkan calon lain. Semua sangat tergantung pada masyarakat Siak memberi penilaian.

“Dalam politik pilkada tidak ada alat yang bisa dijadikan ukuran

pasti mengukur kekuatan seseorang, semua tergantung masyarakat yang memilih. Kalau masyarakat masih menghendaki yang lama, itu artinya pemimpin tersebut benar-benar sudah berbuat dan bermanfaat bagi masyarakat banyak,” jelas Zaili lagi.*

BAGIAN V



انفكاتن ذريات اتق ملايو

SPS
Serentak Pemilukada Serentak

AZAM

16
edisi

STRATEGI Bupati Pelalawan, HM Harris, di tujuh program strategis mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Utamanya warga di pedesaan. Selain pendidikan dan pengobatan gratis, setiap desa dan kelurahan juga kebagian dana pembangunan antara Rp 400-500 juta. Peluangnya kembali memimpin Pelalawan di Pemilukada Serentak Desember 2015, kian terbuka lebar. Pasaunya, masyarakat tetap mendambakan kepemimpinan yang berkelanjutan agar tak terjadi bongkar pasang program.

“Sebagai politisi yang berfikir praktis dan selalu ada di tengah masyarakat, telah saya bulatkan tekad maju di Pemilukada melanjutkan tujuh program strategis itu. Tapi semua berpulang kepada masyarakat. Mereka adalah pemilik sah kedaulatan demokrasi,” kata Harris kepada AZAM di Pangkalan Kerinci, Rabu (22/4).*

**STRATEGI HARRIS
DI PROGRAM STRATEGIS**

Strategi Harris di Program Strategis

Strategi Bupati Pelalawan HM Harris di tujuh program strategis mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Utamanya warga di pedesaan. Selain pendidikan dan pengobatan gratis, setiap desa dan kelurahan juga kebagian dana pembangunan antara Rp 400-500 juta. Peluang Harris kembali memimpin Pelalawan Desember 2015, terbuka lebar.

Sejarah Kabupaten Pelalawan tak bisa dilepas dari Kerajaan Pekantua yang berganti nama menjadi Kerajaan Pelalawan. Lokasinya berada di hulu Sungai Pekantua, anak Sungai Kampar, sekarang termasuk Desa Tolam. Dan, Istana Sayap menjadi bukti peninggalan Kerajaan Pelalawan itu.

Kerajaan Pelalawan berakhir setelah Indonesia merdeka. Tahun 1946, Raja Pelalawan terakhir, Tengku Sayed Harun menyerahkan kerajaannya kepada Pemerintah Republik Indonesia. Setelah itu, status kerajaan berubah menjadi Kewedanaan Pelalawan di bawah Kabupaten Kampar.

Dengan status kewedanaan, kehidupan masyarakat dan perkembangan daerahnya sama dengan daerah lain. Kawasan-kawasan yang berkembang hanyalah daerah-daerah di sepanjang aliran Sungai Kampar. Ini karena dipengaruhi oleh ketersediaan transportasi sungai.

Perubahan mendasar baru terasa sejak Pelalawan menjadi daerah otonom. Melalui Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, Pelalawan 'dipisahkan' dari Kabupaten Kampar, dan diresmikan pembentukannya oleh Menteri Dalam Negeri, Syarwan Hamid, pada 12 Oktober 1999 dengan Pangkalan Kerinci sebagai ibukota.

Di awal berdiri, pemerintahan Pelalawan dijalankan oleh seorang

pejabat dengan status pelaksana tugas (Plt). Tugas utama Plt adalah membentuk struktur pemerintahan dan bertugas hingga terpilihnya bupati dan wakil bupati definitif. Tugas tersebut dipercayakan kepada H Azwar AS (Plt Bupati) dan H Marwan Ibrahim (Plt Sekda). Perlahan tapi pasti pembangunan di kabupaten dengan 12 kecamatan, 106 desa dan 12 kelurahan ini mulai menggeliat. Kondisi itu makin lengkap setelah terbentuknya kelembagaan DPRD berdasarkan hasil Pemilu tahun 1999.

Azmun-Anas

Anggota Dewan yang dibentuk itu berjumlah 25 orang. Mereka dilantik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.528/XI/2000 tanggal 9 November 2000. Tugas utama anggota dewan adalah memilih bupati dan wakil bupati definitif. Dari sejumlah calon yang bertarung dalam pemilihan, terpilihlah pasangan H. Tengku Azmun Jaafar, SH dan Abdul Anas. Azmun dan Anas terpilih untuk masa bhakti 2001-2006 dalam Sidang Paripurna DPRD Pelalawan pada 5 Maret 2011, yang diketuai HM Harris.

Sebagai birokrat yang berkarir di Badan Perencanaan Pembangunan, di awal kepemimpinannya Azmun merancang program pembangunan yang menjadi kebutuhan kabupaten baru. Antara lain, menata Pangkalan Kerinci dari sebuah desa menjadi Kecamatan Langgam, lalu pusat pemerintahan ibukota kabupaten. Azmun membebaskan lahan ribuan hektar, kemudian membangun pusat perkantoran bernama Bhakti Praja.

Periode pertama berhasil ia jalani dengan mulus. Tak sekedar pusat perkantoran yang tertata apik dengan ornamen Melayu, Putera Jaafar ini pun membenahi infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan. Pendidikan dan kesehatan, juga pertanian dan perkebunan. Programnya berjudul, “Membangun Kampung, Merangkai Desa”, mendapat apresiasi berbagai pihak termasuk oleh Pemerintah Pusat. Atas keberhasilan itu, jebolah Fakultas Hukum UII Yogyakarta ini kembali dipercaya masyarakatnya menjadi bupati di periode kedua, dan berpasangan dengan Rustam Effendi, Dosen IAIN Susqa. Malang tak dapat ditolak mujur tak dapat

diraih, diparoh jabatan kedua Azmun tersandung kasus ilegal logging, dan setelah divonis Hakim PN Jakarta, ia harus menjalani hukuman 11 tahun.

Rustam yang berada di posisi wakil, dilantik menjadi Bupati Pelalawan sampai periode Azmun berakhir tahun 2011. Kekosongan posisi wakil ini kemudian dimanfaatkan Rustam dan koalisi partai pendukung Azmun untuk mengisi jabatan wakil bupati melalui DPRD. Dua putera terbaik Pelalawan yang maju adalah HM Harris dan Tengku Zulmizan Assegaff dari Partai Golkar dan PAN. Harris menang telak, lalu dilantik Mendagri menjadi Wakil Bupati Pelalawan hingga periode berakhir.

Harris Bupati

Tahun 2011. Harris memantapkan diri maju ke kursi bupati. Sementara Rustam Effendi kembali ke kampus. Ia berpasangan dengan H. Marwan Ibrahim, dan melalui Pemilu yang digelar KPU Pelalawan, 16 Februari 2011, pasangan itu pun terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati masa bhakti 2011-2016.

7 April 2015. Kepemimpin Harris-Marwan genap empat tahun. Dalam visi, misi dan rencana strategis keduanya, Harris-Marwan merancang tujuh program strategis pembangunan. Yakni Pelalawan Sehat, Pelalawan Cerdas, Pelalawan Terang, Pelalawan Lancar dan PPIDK, Pelalawan Makmur, Pelalawan Eksotis dan Pelalawan Inovatif.

Realisasi atas tujuh program itu cukup menggembirakan. Data yang diperoleh AZAM menyebutkan, IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Pelalawan naik dari 74,27 (tahun lalu) menjadi 74,75. Angka kemiskinan turun dari 12,0 dari 0% tahun 2013 menjadi 11,57% tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 7,07% (tahun 2013) menjadi 7,11% tahun 2014. Peningkatan paling menggembirakan adalah APBD Pelalawan yang naik selama tiga tahun terakhir (2012-2015), atau dari Rp1,5 triliun lebih menjadi Rp 2,183 triliun lebih. Tahun 2014 APBD Pelalawan menyentuh angka Rp2,106 triliun lebih, dan tahun 2015 menjadi Rp2,183 trilion lebih.

Tokoh masyarakat Pelalawan, Prof. Dr. H. Tengku Dahril menilai, geliat pembangunan Pelalawan empat tahun ini cukup bagus dan bisa dinilai berkembang pesat. Menurut Tengku Dahril, lewat tujuh program strategis pembangunan, Harris sudah memenuhi harapan masyarakat. “Tujuh program strategis itu bukan hanya sebatas jargon, tetapi wujud nyata yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Dahril.

Mantan Rektor UIR itu juga mengkritik, masih ada yang mesti dibenahi Harris. Yakni, “Sinergitas antara daerah, provinsi dan pusat, saya kira perlu ditingkatkan lagi agar ke depan Pelalawan lebih baik,” ujar Tengku Dahril kepada AZAM.

Dahril juga mengamati ada irama yang berbeda antara Bupati Harris dengan SKPD-SKPD. Kepala SKPD belum sepenuhnya mampu mengimplementasikan tugas pokok dan fungsinya dalam tujuh program strategis. “Saya melihat masih banyak *stakeholder* yang tidak seirama dengan gendang yang dimainkan bupati. Ini juga perlu dibenahi,” tegas Dahril.

Soal Pilkada, kata Tengku Dahril, semua calon yang maju memiliki peluang menang yang sama. Hanya saja, ia menginginkan bupati dan wakil bupati ke depan tetap berpijak pada arah kebijakan yang sudah dibuat bupati sekarang. “Kita mengharapkan bupati hasil pilkada tetap memegang prinsip melanjutkan semua kebijakan yang sudah ada sekarang. Artinya, Pelalawan membutuhkan pemimpin yang memiliki arah pembangunan berkelanjutan. Mana dirasa masih kurang, itu yang ditingkatkan. Mana yang sudah bagus, dipertahankan atau dibuat menjadi lebih bagus lagi,” pintu Tengku Dahril.*

Pertumbuhan Ekonomi di Atas Rata-rata Nasional

Tujuh program strategis yang dicanangkan Bupati Pelalawan HM Harris telah berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi negeri itu. Yakni 7 persen setahun. Atau di atas rata-rata nasional.

Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pelalawan, M Syahrul Syarif, memastikan, tujuh program strategis berjalan baik dan hasilnya sesuai target. Tapi, tentu tak mungkin mulus-mulus saja. Tetap ada hal-hal yang menggajal. Ia mencontohkan Pelalawan Sehat. Program layanan kesehatan gratis di seluruh Puskesmas bagi semua masyarakat baik kaya maupun miskin. Juga rujukan berobat gratis untuk masyarakat miskin dan rawan kemiskinan, semua berjalan baik.

Meski demikian tetap ada tantangan dan kendala. Yakni, pertumbuhan penduduk Pelalawan yang rata-rata tujuh persen pertahun, lima persen diantaranya adalah pendatang, cuma dua persen dari kelahiran. Ini mau tidak mau harus dilayani sebab mereka sudah bagian dari Pelalawan.

“Kecepatan pertumbuhan penduduk itu harus kita ikuti dengan kecepatan layanan. Kendala lain adalah sarana prasarana yang masih belum memadai, misalnya ada beberapa puskesmas yang dianggap kurang layak, seperti di Teluk Meranti, Bandar Petalangan dan ada juga sejumlah desa yang belum berdiri puskesmas pembantu,” ungkap Syahrul.

Program lain, lanjut Syahrul, berjalan tapi tetap ada kendala di lapangan. Meski demikian, Bappeda menilai tujuh program strategis itu sudah membawa banyak perubahan terhadap perkembangan Kabupaten Pelalawan. Itu bisa diamati dari angka statistik yang menunjukkan peningkatan.

Contohnya, program Pelalawan Makmur yang terkait dengan ekonomi. Dalam peningkatan ekonomi masyarakat, terutama bagaimana ketahanan pangan bisa terwujud, telah menjadi pencaharian utama masyarakat baik di sektor perkebunan, perikanan maupun peternakan.

Fokus utama intensifikasi pangan di Kuala Kampar sebagai lumbung pangan di Pelalawan. Sekitar 6.000 hektare hasilnya cukup memuaskan. Atau paling tidak kita mampu berswasembada dimana jumlah kebutuhan beras dengan jumlah penduduk seimbang.

Dari program ini pastinya pertumbuhan ekonomi masyarakat meningkat. “Padi kalau dihitung-hitung nilai ekonominya lebih ekonomis daripada sawit. Ini salah satu yang membuat pertumbuhan ekonomi Pelalawan stabil pada angka 7 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional,” tutur Syahrul.

Dalam penyusunan program pertahunnya, Syahrul memastikan, dimulai dari rencana pembangunan lima tahun, yakni RPJMD dan ini *dibreakdown* ke Renstra SKPD, programnya apa dan kegiatannya apa. Lalu di musrenbang dibahas lagi untuk menentukan target dan focus sasaran.

“Perencanaannya kita mulai dari musrenbang tingkat desa dan kelurahan pada Januari, kemudian kecamatan di bulan Februari. Musrenbang kabupaten pada Maret. Ini kegiatan rutin setiap tahun,” jelas Syahrul kepada **AZAM** di ruang kerjanya, Pangkalan Kerinci, Rabu (23/4).*

Harris Banyak Tahu Kepemimpinan Saya

Tengku Azmun Jaafar mengharapkan Pemkab Pelalawan ‘tidak tidur’. Katanya, pondasi sudah kita bangun, sekarang tinggal melanjutkan dan memperbaikinya. “Saya titip Pelalawan kepada Pak Harris dan kawan-kawan,” tegas Azmun.

Tak bisa dibantah, Tengku Azmun Jaafar adalah orang pertama yang meletakkan pondasi pembangunan kabupaten pecahan Kampar itu. Lama menghilang karena berurusan dengan KPK, kini Azmun kembali ke masyarakat. Saat dihubungi via ponsel di Pangkalan Kerinci, Azmun menolak diwawancarai dan diminta komentarnya tentang perkembangan Pelalawan. “Saya ini milik semua masyarakat. Tak elok menilai pembangunan Pelalawan seperti yang Anda tanya itu,” kata Azmun kepada Syafriadi dari AZAM, Rabu siang.

Tapi sikap teguhnya itu kemudian melunak. Dan, bersedia diwawancarai. “Ini wawancara saya pertama dengan media,” kata Azmun pula. Ia menuturkan, “Saya terpilih jadi Bupati tahun 2001. Sejak itu ibarat membangun rumah, saya bentuk pondasi pembangunannya mulai dari masalah ekonomi, pendidikan, infrastruktur, pemerintahan, termasuk kesehatan. Semuanya kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan ini yang harus kita utamakan,” ujarnya.

Ia lanjutkan, jangan memandang Pelalawan dari satu kelompok saja, pandanglah keseluruhan Pelalawan. Sebab penduduk Pelalawan itu terdiri dari berbagai suku dan berasal dari berbagai daerah. Sebanyak 60 persen penduduk negeri ini adalah kaum pendatang. Mereka tentu memiliki kebutuhan yang berbeda. Dengan masuknya pendatang, pertumbuhan ekonomi, dan itu perlu dijaga.

Kebutuhan infrastruktur, kata Azmun, mulai dari Kuala Kampar sampai Langgam. Dulu sudah dibangun badan jalan lebih kurang 167 kilometer. Jembatan Langgam juga diusahakan. Begitu juga jembatan dari Pelalawan sampai ke Bunut. Jarak tempuh masyarakat dari satu tempat ke tempat lain harus diutamakan. Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar.

Menumbuh-kembangkan ekonomi masyarakat bukan hanya dalam bentuk formal saja. Untuk urusan ini, bagaimana pasar yang ada baik di masing-masing kecamatan maupun di desa, bisa terus berkembang. Sebab perkembangan tersebut akan berdampak langsung kepada ekonomi masyarakat.

“Semasa saya menjadi bupati, pasar juga menjadi fokus perhatian. Sehingga saat itu satu-satunya ibukota kabupaten pemekaran yang ada swalayan dan mall hanya di Pangkalan Kerinci. Jadi tak usahlah program itu terlalu muluk yang jangkauannya jauh ke depan. Orang butuh hari ini. Jangan terlalu banyak bermimpi suatu keindahan yang kira-kira tangan kita tidak sampai menjangkaunya,” tutur Azmun pula.

Ia bukannya tidak setuju dengan berbagai macam program itu, yang terpenting adalah bagaimana hari ini masyarakat bisa menikmati. Misalnya soal listrik yang masih sering padam, bagaimana hari ini listrik di Pelalawan hidup terus. Kepedulian pemerintah terhadap masyarakat harus terus ditingkatkan. Caranya, jika datang keluhan masyarakat segera turun tangan. “Saya mengharapkan pemerintah daerah “tidak tidur”. Pondasi sudah kita bangun, sekarang tinggal melanjutkan dan memperbaikinya,” sebut Azmun Jaafar.

Azmun mengaku, tidak mengkritik tujuh program strategis Bupati Harris asalkan program itu jelas dan lebih fokus sasarannya. Contoh, program Pelalawan Pintar. Sebaiknya fokuskan gerakannya ke salah satu jenjang saja, misalnya di Sekolah Dasar atau SMP. Artinya program tersebut nyata, bukan samata slogan.

Azmun meminta dua hal kepada Harris. *Pertama*, perhatikan putra daerah baik dalam proyek maupun pemerintahan. Jangan sampai ada

orang Pelalawan lari ke tempat lain mencari usaha. “Dulu saya usahakan dari mereka yang pakai sepeda, trus sudah bisa pakai mobil,” tegas Azmun memberi contoh. *Kedua*, ciptakan pemerataan pembangunan. Karena Pak Bupati itu orang Langgam, pembangunan jangan hanya di Langgam saja. Silakan Langgam dibangun, tapi jangan lupa yang lainnya supaya pembangunan itu sama-sama dirasa manfaatnya oleh masyarakat. Denyut nadi masyarakat Pelalawan harus diketahui oleh pemimpinnya.

Begitu pun infrastruktur jalan. Yang dipikirkan bukan pembangunan untuk hari ini saja. Melainkan dipredikisi buat 10-15 tahun akan datang. Saat itu orang baru terasa siapa yang membangun. “Pak Harris itu, banyak tahu tentang kepemimpinan saya. Kemana saya pergi dulu dia juga ikut, karena dia Ketua DPRD. Jangan pecah-pecahkan masyarakat. Jangan ciptakan kelompok. Semuanya sama bersatu dalam motto, *“Tuah Negeri Seiya Sekata”*, Azmun berharap. Saya titip Pelalawan ini kepada Pak Harris dan kawan-kawan. *

Kalau Diganti Figur Lain, *Ntar* Bedanya Lagi Rencana Aksinya

Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, Nazaruddin, memuji tujuh program strategis Bupati Harris. Masyarakat, katanya, berharap Harris melanjutkan pembangunan di periode kedua.

Empat tahun terakhir, sejak HM Harris dilantik menjadi bupati, Kabupaten Pelalawan mengalami kemajuan cukup pesat. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) nya meningkat mendekati Rp 2 triliun lebih. Sementara pembangunan terus menggeliat utamanya di pedesaan. Menurut Ketua DPRD Pelalawan, Nazaruddin SH., MH, tujuh program strategis Harris sudah banyak dirasa manfaatnya oleh masyarakat.

“Alhamdulillah telah banyak mengalami kemajuan termasuk APBD. Sejak dipimpin Harris, anggaran daerah mendekati angka Rp2 triliun,” kata Nazaruddin kepada AZAM di Pangkalan Kerinci pekan lalu.

Dijelaskan Nazar, yang paling menonjol dari program-program itu adalah Pelalawan Sehat, Pelalawan Cerdas, Pelalawan Terang, dan Pelalawan Lancar. Sebagai mantan Ketua Pansus Ranperda Pendidikan Gratis DPRD Pelalawan, Nazaruddin mengungkapkan, saat ini pemkab sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 miliar setiap tahun untuk 1.500 mahasiswa asal Pelalawan. Sebelumnya juga disediakan pendidikan di 44 desa tertinggal bekerja sama dengan perguruan tinggi di Yogyakarta.

*“Ini bentuk komitmen dan perhatian serius peningkatan sumber daya manusia. Diharapkan *output* program ini, masyarakat Pelalawan mampu bersaing dengan daerah lain. DPRD mendukung dan mengapresiasi*

setinggi-tingginya Pelalawan Cerdas itu,” ungkap politisi asal Partai Golkar ini.

Tentang alokasi pembangunan untuk desa, lanjut Nazar, DPRD juga terus mendorong pemkab mengalirkan dana ke pedesaan. Maka melalui program PPIDK setiap desa telah ‘dijatahi’ anggaran antara Rp400-500/tahun. “Kita berharap, Pak Harris dapat meningkatkan lagi program-program pembangunan yang pro rakyat seperti ini,” terangnya.

Nazaruddin mengakui, masih ada sejumlah persoalan yang menjadi fokus perhatian bersama untuk membenahi Pelalawan. Seperti infrastruktur jalan. Kita tahu, Pelalawan ini terletak di daerah lintas timur Pulau Sumatra, mobilitas jalur angkutan barang yang memakai jalan sangat tinggi, terutama kendaraan bertonase besar.

Akibatnya, jelas Nazaruddin, jalan yang tersedia meskipun kelasnya sudah dinaikan, belum juga mampu mengimbangi tingginya mobilitas kendaraan yang melewati jalan tersebut. Itulah sebabnya kondisi jalan-jalan lintas di Pelalawan cepat rusak.

“Kendalanya, jalan tersebut berstatus jalan negara yang perbaikannya harus menggunakan ABPN. Kita minta Pemkab dan Pemprov Riau, membuat jalan alternatif khusus untuk kendaraan bertonase tinggi sehingga mereka tidak lagi melewati jalan lintas timur itu,” tegas Nazaruddin.

Ketua DPRD ini menilai, karena ketujuh program strategis ini masih terus berjalan, dan hasilnya sudah dirasa masyarakat, rakyat berharap Harris dapat kembali melanjutkan kepemimpinannya di periode kedua. “Kalau diganti dengan pemimpin lain, kuatirnya bupati yang baru memulai lagi dari awal. Biasanya kan begitu. Apalagi masing-masing calon memiliki visi, misi dan rencana aksi yang berbeda. Kan *eman-eman*, sebab ketujuh program strategis yang dirancang Pak Harris, semua nya bertitik tolak dari kondisi lapangan. Dan, memang diperlukan masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat mempercayakan Pak Harris melanjutkan kepemimpinan di periode kedua,” tambah Nazaruddin.*

Harris Tuai Pujian dan Harapan

Succes Story kepemimpinan Bupati Harris di Kabupaten Pelalawan telah mengukir kisah sendiri bagi masyarakatnya. Pujian dan harapan seakan menjadi dua ‘pohon sialang’ tempat bergelayut. Dan, itu modal besar bagi Harris memimpin kembali Pelalawan.

7 April 2015. HM. Harris-H. Marwan Ibrahim genap berusia empat tahun memimpin Kabupaten Pelalawan. Selain merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan, duet ini juga menjalankan roda pemerintahan dan melayani masyarakat dalam berbagai bidang. Sayangnya, Marwan tak sampai habis mendampingi Harris. Ia terpaksa berhadapan dengan hukum dalam kasus pengadaan lahan perkantoran Bhakti Praja, Pangkalan Kerinci. Dan, satu tahun jelang masa bhakti berakhir, Harris mendayung biduk pemerintahan seorang diri.

Empat tahun berlalu. Bagaimana masyarakat menilai kepemimpinan Harris? Berhasilkah putera kelahiran Langgam ini mengemban amanah rakyat? Menurut Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Pelalawan, Tengku Edy Sabli, keberhasilan dan kemajuan suatu daerah tidak hanya diukur dari ketersediaan dan kelengkapan infrastruktur, sarana dan prasarana yang dibangun.

Akan tetapi juga dilihat dari sejauhmana pemerintah dan masyarakatnya mampu mempertahankan, mengangkat nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang ditinggalkan generasi sebelumnya.

Ia menilai, apa yang dilakukan Pemkab Pelalawan dalam empat tahun terakhir, sudah memberikan ruang dan perhatian khusus bagi pengembangan nilai budaya yang ada. Edy Sabli mengakui, antara pembangunan fisik dengan pembangunan mental, telah banyak mengalami

kemajuan. Pemkab juga telah memberi porsi khusus bagi pembangunan di bidang kebudayaan. “Diharapkan pemimpin Pelalawan ke depan haruslah orang yang benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat dan cita-cita pendiri Pelalawan,” ujarnya kepada AZAM.

Salah satu perhatian yang diberikan adalah direhabnya Balai Adat Pelalawan. Selain itu Pemkab memberikan dukungan penuh terhadap berbagai kegiatan LAM Pelalawan, khususnya menyangkut pelestarian nilai-nilai budaya.

“Pemkab sudah memberi ruang dan porsi khusus untuk kemajuan dan perkembangan budaya di Pelalawan. Peran ini tentu sangat kita harapkan agar generasi mendatang tidak kehilangan arah dalam berpijak dan melangkah,” sebut mantan Ketua KPU Riau ini.

Sebagai kabupaten pemekaran, Tengku Edy menilai, apa dilakukan pemimpin Pelalawan hari ini, sudah membuahkan hasil. Berbagai kemajuan di bidang infrastruktur telah mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat di Pelalawan.

Ke depan, LAM Pelalawan berharap, lebih ditingkatkan keseimbangan antara pembangunan fisik dan mental masyarakat. Pembangunan mental bisa diperoleh dari bagaimana memberi porsi khusus kepada generasi muda dan masyarakat akan pentingnya mengenal, mempelajari, mendalami serta mengamalkan nilai-nilai luhur dari budaya yang dimiliki.

Masyarakat yang mendiami Pelalawan, lebih dari setengahnya adalah pendatang. Mereka berasal dari berbagai suku, adat istiadat, dan agama yang berbeda. Namun sejauh ini bisa hidup berdampingan satu sama lainnya. Ini tak lepas dari peran pemerintah memberikan perhatian terhadap kerukunan antarumat beragama.

“Kondusifitas Pelalawan sangat stabil. Masyarakat dapat hidup berdampingan dan saling menghargai meskipun mereka berbeda budaya, agama, suku dan adat istiadat. Ini tak lepas dari peran dan perhatian Pemkab,” urainya

Harus diakui, tambah Tengku Edy, empat tahun kepemimpinan Harris, ia telah memberi warna baru bagi kemajuan Pelalawan. Karenanya, harapan masyarakat Harris dapat kembali melanjutkan pembangunan. “Pelalawan harus dipimpin oleh orang yang sesuai dengan harapan masyarakat. Juga figur yang memahami cita-cita pendiri Pelalawan,” kata Edy Sabli. Jadi, pilihlah pemimpin yang sesuai hati nurani.

Patut Dijempoli

Pandangan positif juga mengalir dari masyarakat. Asnawir, warga Ukui menyebut, visi dan misi pembangunan Kabupaten Pelalawan untuk mewujudkan kemandirian patut diacungi jempol. Masyarakat yang mandiri adalah harapan seluruh masyarakat.

Program yang dijalankan pemkab saat ini, kata Asnawir, langsung menyentuh masyarakat pedesaan. Misalnya Pelalawan Terang melalui Langgam Power, juga pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Yang tak kalah hebatnya Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan (PPIDK) Mandiri dimana satu desa/kelurahan mendapat alokasi anggaran Rp400-500.

“*Alhamdulillah*, program ini direspon positif masyarakat. PPIDK saya nilai sangat menyentuh masyarakat lapisan bawah karena perencanaan, pelaksanaan sampai ke pemeliharaan dilakukan langsung oleh masyarakat,” ungkap Asnawir.

Pandangan serupa juga dilontar Dwi Surya Pamungkas. Mahasiswa ini menilai, sejak menjadi daerah otonom perlahan tapi pasti Pelalawan terus bergerak mengejar ketertinggalan pembangunan. “Di masa kepemimpinan Pak Harris, saya melihat banyak prestasi dan keberhasilan pembangunan. Tujuh program unggulan itu untuk menjawab kebutuhan kekinian masyarakat Pelalawan,” ujarnya.

Misalnya, gebrakan teknopolitan yang dipersiapkan untuk melahirkan teknokrat handal. Begitupun pendidikan gratis di semua jenjang pendidikan. Sekarang telah berdiri pula Akademi Komunitas

Negeri Pelalawan. Yang tak kalah pentingnya, tambah Dwi Surya, promosi wisata Bono Teluk Meranti. Sangat gencar dilakukan bupati baik di dalam maupun di luar negeri. Pemerintah Kabupaten juga rutin mengagendakan festival di kawasan wisata itu.

Di tempat terpisah, warga Teluk Meranti, Marzuki, pun melontar pujian yang sama. Ia mengapresiasi Harris karena sukses membawa program pusat ke Pelalawan. Meski demikian, masih banyak hal yang perlu diperhatikan dan ditangani serius. Antara lain peningkatan ekonomi masyarakat. Dan, penyelesaian tapal batas tanah warga dengan perusahaan. "Sampai sekarang masalah tersebut masih menghantui warga," tegas Marzuki.

Pandangan lain disampaikan Muazli. Tokoh muda Pangkalan Kerinci ini menilai, tujuh program strategis Harris, boleh dikata menjadi masa keemasan pencapaian visi dan misi Kabupaten Pelalawan. Berbagai program yang dilaksanakan seakan melambangkan kemakmuran negeri dan kesejahteraan masyarakat. Tinggal pelaksanaannya saja yang belum pas. "Masih ditemukan sekolah yang mengutip biaya pendidikan. Dan RSUD Selasih masih menelantarkan pasien miskin. Bahkan jalan ke kampung saya di Kelurahan Pelalawan sangat memprihatinkan. Akses jalan dari dan ke Pangkalan Kerinci sangat susah. Kami merasa tertinggal banget," ujar Muazli. Ia berharap, Pemkab selain bicara ide dan gagasan, dapat pula memikirkan pelaksanaannya.*

Saya Ingin Pelalawan Tuan Rumah di Negeri Sendiri

Menurut budayawan Tenas Effendy, yang disebut pemimpin sejati itu adalah *“Cerdiknya menjadi penyambung lidah, beraninya menjadi pelapis dada, mana yang kusut diselesaikannya, mana yang keruh dijernihkannya, mana yang bengkok diluruskannya, dan mana yang berbongkol ditarahnya”*. Kata amanah dalam Tunjuk Ajar Melayu itu sangat pas bila dipatrikan pada seorang H.M. Harris, Bupati Pelalawan.

Sebagai Kepala Daerah, Harris selain melanjutkan program pembangunan yang sudah ditarah pendahulunya, Azmun Jaafar, ia juga melapis program-program itu dengan inovasi baru buah pikir dan karyanya. Harris merancang tujuh program strategis untuk menjadikan Pelalawan mandiri, dan rakyatnya berdikari. Tidak menjadi penonton di rumah sendiri. Ketujuh program itu adalah Pelalawan Cerdas, Pelalawan Terang, Pelalawan Sehat, Pelalawan Lancar, Pelalawan Makmur, Pelalawan Eksotis dan Pelalawan Inovatif.

Empat tahun di kursi ‘empuk’ bupati, Harris yang kini menjalankan sendiri pemerintahannya (tanpa wakil bupati) merasa ibarat menanam pohon, ia sudah memetik buah. Banyak progres dari ketujuh program itu dirasa manfaatnya oleh masyarakat, banyak juga keberhasilan dicapai.

“Saya ini bukan konseptor yang mampu menceritakan kebijakan ketujuh program strategis itu secara akademis. Saya cuma bisa melihat kondisi lapangan yang dialami dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Selanjutnya Anda yang menilai,” kata HM Harris kepada **Syafriadi, Endrizal Yusten dan Beni Hendra** dari AZAM, Rabu (22/4) lalu di ruang kerjanya Pangkalan Kerinci. AZAM berkunjung ke ibukota Pelalawan itu menemui Harris untuk wawancara khusus terkait tujuh program strategis di empat tahun masa kerjanya. Berikut petikannya.

Tujuh program strategis merupakan jargon Anda membangun Pelalawan. Sektor mana yang paling membanggakan Anda?

Kalau apa yang sudah saya capai disebut sebuah kebanggaan, saya rasa tidak juga. Yang jelas saya sudah menjalankan amanah sesuai visi dan misi, yakni pembaharuan menuju kemandirian pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Pelalawan. Dari visi dan misi itu kita mulai bergerak, membuat program-program strategis mulai dari perencanaan sampai pada tujuan yang hendak kita capai. Pembaharuan itu menyangkut pola pikir. Maksudnya mengubah *mindset* masyarakat. Basic saya kan seorang praktisi, tentu kalau saya bicara tak hanya sekedar buah bibir atau bahasa anak muda sekarang gombal, akan tetapi kita melihat, memahami dan juga berbuat. Jadi semua yang sudah kita rekanakan kita wujudkan dalam visi, misi dan rencana strategis.

Kita perlu mengubah *mindset* masyarakat untuk menghadapi persaingan global. Di era globalisasi kita berhadapan dengan kualitas sumberdaya manusia. Kita menyadari, SDM kita belum kompetitif, masih banyak terjadi kesenjangan sosial. Putera puteri Pelalawan jika ingin mencari pekerjaan belum banyak yang diterima di perusahaan-perusahaan karena SDM nya. Soluasinya, kita gratiskan biaya pendidikan dari SD sampai ke SLTA, kemudian kita dirikan Akademi Komunitas Pelalawan.

Apa yang melatar-belakangi Anda melahirkan tujuh program strategis ini?

Ada sejumlah persoalan yang belum tuntas oleh pemerintahan sebelumnya. Seperti masalah kesehatan. Kita masih menemukan penyakit yang kerap berkembang di masyarakat. Misalnya, penyakit kaki gajah yang sempat heboh, dan busung lapar. Busung lapar biasanya hanya diderita oleh satu atau dua orang saja, tapi waktu itu jumlahnya lumayan banyak. *Nah* kita berikan pelayanan maksimal kepada penderita busung lapar dan kepada semua jenis penyakit, dari sini kemudian lahir ide menjadikan Pelalawan Sehat.

Apakah benar tujuh program strategis itu hanya ambisi pribadi Anda?

Kalau saya cerita nanti larinya ke masalah pribadi. Walau latar belakang saya pengusaha, tapi dulunya saya orang susah juga. Soal anak yang tidak sekolah karena ketiadaan biaya pendidikan, semua pernah saya alami. Begitu juga masalah kesehatan. Saya pernah meminta surat miskin ketika anak saya meninggal 13 hari di rumah sakit, dan saya tidak bisa membawa anak saya pulang walau sudah gratis biaya perawatan. Itu karena saya tidak punya uang membayar ongkos ambulan. Saat itu jangankan membayar ambulan, buat makan saja susah. Jadi konsep ini muncul dari pengalaman pribadi saya, karena saya pernah merasa jadi orang susah.

Bukan dari ambisi pribadi, akan lebih tepat bila disebut pengalaman pribadi. Kenapa saya yang *notabene* nya seorang anak yang tidak mampu, bisa sukses dan memiliki industri di Jakarta. Itu karena segala sesuatunya saya perhitungkan secara cermat. Selain itu ulet dan gigih mencari peluang, bekerja keras dan berani mengambil keputusan. Disinilah kita mengajak kawan-kawan di dinas mengubah pola pikirnya. Jangan sampai sebagai seorang kepala dinas mereka bertanya, “apa yang saya dapatkan” melainkan berbuat yang terbaik untuk Pelalawan sesuai jabatannya. Dan membalik pertanyaan tadi, “selama saya disini apa yang bisa saya perbuat”. Kalau itu pertanyaannya, berarti kita harus bekerja keras dan memenej seluruh permasalahan.

Apa bentuk nyata program Pelalawan Sehat yang dirasa langsung oleh masyarakat?

Dalam pelaksanaan Pelalawan Sehat, langkah pertama yang kita lakukan adalah meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Masyarakat kita arahkan supaya rajin bergotong royong membersihkan lingkungan tempat tinggalnya. Setelah itu kita berikan pelayanan kesehatan gratis. Sebab dari pantauan saya sangat banyak orang sakit yang tidak berobat ke rumah sakit atau ke puskesmas karena karena tidak punya uang. Syukur *alhamdulillah* melalui Pelalawan Sehat

saya tidak mendengar lagi berita ada masyarakat Pelalawan yang tidak ke rumah sakit kalau menderita penyakit. Pelayanan kesehatan juga sudah kita tingkatkan secara maksimal, dan itu setiap tahun terus kita evaluasi.

Itu baru soal Pelalawan Sehat, program lainnya bagaimana?

Program lain adalah Pelalawan Terang. Ini menyangkut pembangkit tenaga listrik. Kita bicara dengan PLN bagaimana kalau kita membangun pembangkit yang dayanya kita jual ke PLN. Mereka setuju. PLN sendiri juga sedang membangun pembangkit di Siak, tepatnya di Rawa Minyak. Setelah pembangkit ini selesai dan beroperasi dayanya bisa dioper juga ke Pelalawan. Namun karena sasaran kita jangka panjang dan sekaligus ingin mandiri akhirnya kita bangun pembangkit sendiri. Tahun 2012 kemampuan daya kita baru 21,17 persen, sekarang setelah Langgam Power beroperasi, listrik di Pelalawan meningkat menjadi 62 persen. Daya pembangkit yang kita miliki itu sudah tidak tersisa lagi setelah didistribusikan ke desa-desa. Jadi, untuk urusan yang satu ini kita tidak bisa berharap kepada PLN semata, sebab kemampuan mereka juga terbatas.

Bukankah program yang Anda uraikan itu sama dengan yang dijalankan pemerintahan sebelumnya, namanya saja yang berbeda. Tanggapan Anda?

Program kita memang tidak berbeda dengan Pemerintah Kabupaten Pelalawan sebelumnya. Dan semua yang saya sampaikan itu adalah problem yang dihadapi di seluruh Indonesia. Cuma sekarang ini disinkronkan dengan program nasional 2025.

Bagaimana dengan pemberdayaan ekonomi rakyat? Kabarnya Anda mengalokasikan anggaran cukup besar untuk setiap desa?

Kita telah meluncurkan Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa/Kelurahan (PPIDK). Program ini sangat berdampak positif bagi percepatan pembangunan pedesaan. Tidak hanya hasil,

kualitas pekerjaan juga mengembirakan sekali. Untuk merencanakan pembangunan infrastruktur, masyarakat harus berembuk dengan ninik mamak, cerdik pandai, alim ulama dan komponen lain, “mau dijadikan apa uang yang kita bantu”. Setelah mufakat dicapai mereka kerjakan proyek dengan swadaya. Awalnya, tahun 2013 kita luncurkan dana Rp50 miliar untuk pembangunan infrastruktur pedesaan. Ada desa yang dapat Rp100 juta, ada pula Rp500 juta.

Bagaimana dengan pembiayaan ketujuh program strategis tadi?

APBD kita masih kecil, tetapi kita berani menggratiskan pendidikan dan kesehatan karena kita memotong belanja rutin menjadi 32 persen, sisanya 67 persen lebih belanja pembangunan. Dana pembangunan kita kita alokasikan untuk pembangun jalan khususnya di desa, kelurahan dan kecamatan. Setiap desa, kelurahan, kecamatan, yang mau membangun dapat meminjam alat ke Pemkab Pelalawan. Saya juga memberi *reward* kepada desa, kelurahan dan kecamatan yang berprestasi dalam men-swadaya-kan pembangunan dengan masyarakat.

Kalau dipersentase, mana dari ketujuh program strategis itu yang paling tinggi pencapaiannya?

Kita tidak menghitung prosentase pencapaian karena ketujuh program itu untuk jangka panjang. Misalnya Pelalawan Terang, kita merasa sudah melebihi target pencapaian. Pelalawan Sehat, belum bisa diprosentasekan, sebab setiap hari ada saja masyarakat yang sakit. Pelalawan Cerdas, kita terus mendata apakah masih ada anak-anak di Pelalawan yang pendidikannya terlantar? Pelalawan Lancar, program-programnya sedang kita laksanakan secara bertahap, dan apa yang diinginkan masyarakat sangat bergantung pada hasil musyawarah desa. Kalau mereka mengusulkan listrik, kita lihat dulu jaringannya ada atau tidak. Begitu juga dengan Pelalawan Makmur, kita lihat dan pelajari kantong-kantong kemiskinan di masing-masing desa, apakah penyebab

kemiskinan itu faktor SDM, ekonomi, budaya atau ketiadaan infrastruktur untuk menunjang aktifitas perekonomian masyarakat? Tahun 2012-2013 kantong-kantong kemiskinan banyak berada di pinggiran sungai. Solusi yang kita berikan adalah membantu warga alat penangkap ikan. *Nah*, bantuan yang kita beri tentu berbeda satu desa dengan desa lainnya. Di Kuala Kampar yang rata-rata masyarakatnya bertani dan berkebun kelapa kita bantu bibit. Di desa lain tidak demikian karena mereka memiliki sector unggulan yang berbeda-beda.

Dari tujuh program strategis itu mana program yang Anda jadikan *icon*?

Kalau ditanya mana *icon* saya ingin ketujuh program tersebut menjadi icon. *Icon* ini kita kembalikan ke masyarakat Pelalawan, masyarakat semua yang menilai. Yang pasti semua yang kita rancang muara akhirnya adalah mengubah pola pikir. Dan perubahan itu kita masukkan ke dalam program Pelalawan Inovatif. Di sana kita bangun kawasan teknopolitan. Ada Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan. Kemenristek juga akan membangun sekolah ristek di areal seluas 100 hektare. LIPI juga ingin disediakan 100 hektare, ya silakan saja. Kemudian Australia, katanya mau membuat percontohan peternakan sapi. Ke depan dari ketujuh program itu kita berharap, masyarakat Pelalawan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, siap bersaing dengan orang luar. Karenanya mulai dari sekarang saya ajak masyarakat bekerja ulet, gigih dan berani. Kenapa orang lain bisa, kita tidak? Dimana kelebihan mereka dan dimana kelemahan kita.

Kalau ketujuh program strategis ini untuk jangka panjang, sementara jabatan Anda hanya tinggal setahun lagi. Berarti Anda maju lagi di pilkada depan?

Memang benar program strategis tersebut tidak bisa dijalankan satu periode kepemimpinan, melainkan harus dilanjutkan pada periode berikutnya. Sekarang jabatan saya baru berjalan empat tahun, dan saya

masih butuh waktu di periode kedua. Untuk itu saya berniat kembali maju di Pilkada tanggal 9 Desember 2015. *Insyallah* kalau Tuhan mengizinkan dan didukung masyarakat, saya akan maju lagi. Saya ingin Pelalawan disegani kabupaten lain.

Artinya, Anda terpanggil lagi untuk menjadi bupati?

Ini bukan masalah terpanggil atau tidak terpanggil. Kalau terpanggil banyak orang yang merasa terpanggil. Tapi terus terang saja, saya orang politik. Dengan jabatan politis saya bisa melakukan kebijakan-kebijakan membangun daerah.

Ada *adigium* politik mengatakan, “orang politik itu tidak akan berhenti berfikir sebelum niatnya tercapai. Komentar Anda?

Itu memang benar ketika ada niat yang belum tercapai, saya tidak bisa tidur. Lagian peraturannya kan bisa dua periode. Mudah-mudahan setelah dua periode sudah ada pondasi yang kuat untuk masa depan negeri ini.

Mewujudkan tujuh program strategis itu bukan pekerjaan mudah, apakah Anda tidak merasa capek?

Ini bukan soal capek atau tidak. Orang politik itu kan sampai ajal menjemput pun masih punya keinginan dan cita cita. Nabi Muhammad SAW saja, ketika mau wafat masih saja memikirkan umatnya, “*ummati, ummati, ummati*”. Orang politik pun demikian, selalu memikirkan, “negeriku dan masyarakatku”. Itulah kepuasaannya. Ia mampu mempersembahkan yang terbaik untuk negeri dan masyarakatnya.

Kalau Anda maju lagi, tentu harus punya partai pendukung. Apa yang sudah Anda lakukan mendapatkan dukungan?

Saya sudah mendaftar di beberapa partai politik, soal apakah diterima atau tidak itu keputusan masing-masing DPP Partai. Mudah-mudahan saja mereka menerima saya.

Soal calon pendamping, bagaimana. Kriteria seperti apa yang Anda inginkan?

Soal siapa wakil, saya harus mencari figur yang memiliki kemampuan. Pencarian ini tidak bisa kita sendiri yang melakukannya. Partai dan masyarakat tentu harus didengar. Kita cari wakil yang sejalan dengan kita. Siapa figurnya, kita lakukan melalui mensurvey. Saat ini ada 16 nama yang terjaring. Ada pendidik, politisi, birokrat dan lain-lain. Dari 16 nama itu disisakan dua atau tiga nama, Lalu saya pilih mana figur yang paling pas mendampingi saya.

Ada informasi beredar, Anda akan berpasangan dengan Zukri dari PDI Perjuangan, komentar Anda?

Sekarang saya tidak bisa mengatakan sama siapa saya berpasangan. Karena, seperti saya katakan tadi, di situ ada kepentingan politik, kepentingan pribadi, juga kepentingan masyarakat. Semua harus diakomodir dan dipertimbangan.

Kalau disuruh memilih apakah Zukri itu lebih baik menjadi rival atau pasangan?

Saya tidak bisa memutuskan, mau rival tidak masalah, mau berpasangan *alhamdulillah*, itu tergantung partai pendukung. Walau saat ini partai yang saya pimpin sedang galau, tapi tidak ada masalah. Yang galau itu kan yang di atas, kita di bawah tetap berpedoman pada keputusan partai.*

BAGIAN VI

SPS
Sistem Penyelesaian Pertikaian

اشكاتن ذريعات أنق ملايو



AZAM



**HAFITH-NASRUL, DUET
AGAMIS REFORMIS**

Hafith-Nasrul

Duet Agamis Reformis

Suasana politik yang adem di Rokan Hulu tak menyurutkan tekad Hafith Syukri dan Nasrul Hadi untuk mensosialisasikan diri ke masyarakat. Mereka, tokoh muda berpendidikan yang agamis, juga reformis.

Tak seperti di daerah kebanyakan yang melaksanakan pemilukada, Kabupaten Rokan Hulu terlihat sepi dari aktivitas berbau politik. Tak ada ‘perang’ baliho, poster atau spanduk apa lagi sosialisasi kandidat dalam bentuk pertemuan tatap muka bersama masyarakat.

Lihatlah, sejak memasuki kawasan Rokan Hulu dari perbatasan Kabupaten Kampar, tak terlihat tanda-tanda daerah ini akan melaksanakan pesta rakyat. Sejauh perjalanan yang ditempuh, hanya satu dua poster kandidat yang bernuansa pemilukada. Itu pun poster yang sama. Yaitu poster ‘Berseri’. Poster dengan ukuran kecil terlihat dipakukan ke pohon kayu.

Memasuki kota Ujung Batu, belum juga terlihat baliho kandidat. Lagi-lagi hanya ‘Berseri’ yang menghiasi di beberapa sudut kota dan tepi jalan. Dari Ujung Batu ke Pasir Pengaraian yang ditempuh hampir satu jam, juga tak terlihat poster maupun baliho kandidat lain selain Berseri.

Di jantung Kota Pasir Pengaraian, barulah AZAM menemukan sejumlah baliho selain Berseri. Tetapi baliho itu pun sepertinya tidak benar-benar dimaksudkan untuk sosialisasi atau pencalonan di pemilukada. Baliho Suparman, misalnya, yang terpajang besar di pinggir jalan, ternyata berada di dekat Kantor Golkar Rokan Hulu. Lagi pula, di baliho Suparman itu, tidak ada kata-kata yang mengisyaratkan bahwa yang bersangkutan maju di Pemilukada Rokan Hulu.

Senada dengan baliho Superman, **AZAM** juga menemukan baliho Partai Gerindra dengan foto Prabowo yang bersanding dengan Ketua DPC Gerindra Rokan Hulu Syamsul. Di baliho ini juga tidak ada tersurat bahwa yang bersangkutan akan maju di Pemilukada Rokan Hulu.

Padahal, menurut jadwal KPU Rokan Hulu, pemilukada sudah memasuki masa pendaftaran calon perseorangan atau calon independen. Meski demikian, sampai kini tak ada kandidat atau tim sukses mendatangi KPU Rokan Hulu terkait penerimaan pendaftaran dari jalur independen itu. Hal itu diakui salah seorang komisioner KPU Rohul Sri Wahyudi. Menurut dia, sejak dibuka pendaftaran, hingga sekarang belum ada bakal calon yang mendaftar dari jalur independen.

Duet Hafith & Nasrun

Apakah jalur independen tidak diminati? Mungkin juga seperti itu, tetapi Rokan Hulu pernah punya pengalaman menyelenggarakan pemilukada dengan menyertakan calon independen pada tahun 2010. Calon tersebut adalah Teddy Mirza Dal, mantan Ketua DPRD Rohul. Namun, Teddy tidak berhasil menumbangkan keperkasaan *incumbent* ketika itu, yaitu duet Ahmad-Hafith Syukri.

Di Pemilukada 2015, sepertinya Teddy tak lagi maju. Baik di jalur perseorangan maupun yang diusung partai politik. Penyebabnya antara lain, karena Teddy yang saat ini menjadi dedengkot Partai Nasdem Rohul, tersandung kasus hukum. Sehingga ia harus fokus menghadapi proses hukum. Disamping itu, Teddy merupakan tokoh Rokan Kanan dengan basis suara Ujung Batu dan sekitarnya, sehingga jika dia ikut bertarung, suara di basis ini akan terpecah lantaran seorang tokoh daerah ini, Hafits Syukri juga menjadi calon kuat.

Disebut calon kuat, karena Hafits Sukri adalah kandidat *incumbent*. Sebagai wakil bupati, ia sudah dikenal luas oleh masyarakat Rohul. Disamping itu, Hafits juga putra Rokan Hulu berlatar belakang birokrat. Ia pernah menduduki jabatan Kepala Dinas Cipta Karya Pemkab Rohul. Dan memiliki latar belakang tergolong bersih. Tak ada isu miring terkait perjalanan karirnya. Hafits pun bisa mengimbangi Bupati Ahmad.

Hingga akhir masa jabatannya, tidak ada terdengar keretakan hubungan keduanya.

Kabarnya, pencalonan Hafith Syukri ini sudah mendapat restu dan dukungan dari Achmad. Hafith semakin kuat, karena didampingi Nasrul Hadi sebagai calon wakil. Nasrul sendiri adalah Ketua DPRD Rokan Hulu dan sekretaris DPC Partai Demokrat. Boleh disebut, pasangan ini benar-benar serasi. Hafith mewakili Rokan Kanan, Nasrul Rokan Kiri. Lebih dari itu, keduanya figur berpendidikan yang agamis dan reformis.

Demokrat & Koalisinya

Menurut data KPU Rohul, pada Pemilu lalu, Partai Demokrat adalah partai paling banyak meraih kursi, yaitu delapan kursi. Meski demikian, jumlah itu belum dapat menjadi sebuah perahu untuk mengajukan pasangan calon. Demokrat mesti berkoalisi dengan partai lain.

Di tempat kedua ada Partai Golkar dengan tujuh kursi. Seperti juga Demokrat, Golkar harus lebih banyak mendapatkan tambahan kursi agar bisa mencapai satu perahu. Selanjutnya PDIP dengan enam kursi. PAN, PPP dan Nasdem empat kursi. Hanura dan PKS tiga kursi. Sedangkan PKB meraih satu kursi. PBB dan KPPI tidak mendapat kursi.

Bilamelihataktivitaspolitikyangsepijelangpemilukada,kemungkinan calon yang akan bertarung pun tidak akan banyak. Masyarakat malah banyak yang tidak tau siapa saja yang akan maju menjadi calon bupati mereka. Sejumlah warga yang kami ajak bicara soal pemilukada, jawabannya hampir sama. Justru mereka balik bertanya kepada **AZAM**, kapan pemilukada dan siapa saja yang akan maju menjadi calon.

Siapa berpasangan dengan siapa, ternyata juga ada tempatnya. Di salah satu kedai kopi di Ujung Batu, **AZAM** sempat terlibat pembicaraan serius dengan sekelompok anak muda yang ternyata kader Demokrat. Salah seorang dari mereka, Muhammad Fadli. Generasi muda Partai Demokrat ini mengatakan, kini Hafith Syukri-Nasrul Hadi sudah pasti berpasangan. Pasangan ini, sepertinya sudah dipersiapkan dari awal.

Sementara Suparman, Ketua Golkar Rokan Hulu, Erizal Ketua PAN, Syamsul Ketua Gerindra dan Syarifudin Poti dari PDI Perjuangan, belum

jelas. Nama-nama itu, hingga sekarang masih sebatas mendaftar di partai. Siapa berpasangan dengan siapa, belum ada kepastian.

Pemilukada Rokan Hulu menjadi menarik justru di media sosial. Soalnya, beberapa kandidat rajin menggunakan media ini untuk sosialisasi. Lagi-lagi 'Berseri' (Erizal) yang lebih awal menggunakan media sosial menyapa pengguna internet. Ketua PAN ini mengangkat tema-tema sosial, pembangunan, serta kata-kata bijak di statusnya.

Respon pengguna media sosial pun beragam. Ada yang sekedar memberi tanda 'like' ada juga yang berkomentar yang beragam, ada yang mendukung, berbasa-basi, ada pula yang dengan gamblang mengkritisi status Erizal.

Kandidat lain yang bersosialisasi di fb Hafits Syukri dan Nasrul Hadi. Selain akun dalam bentuk pribadi keduanya, akun bersama yang menggandengkan Hafith-Nasrul juga sudah terpajang dengan slogan 'Lebih Peduli'.

Pengamat komunikasi Riau Ridar Hendri menilai, media sosial cukup efektif digunakan dimasa pemilukada. Segmennya, kata dosen UR ini, adalah pengguna internet yang biasanya anak muda dan kalangan intelektual. "Media sosial itu turunannya kan sangat banyak. Ada *facebook, line, twitter, instagram, whatsapp* dan lain-lain. Saya kira ini cukup baik dimanfaatkan," ujar Ridar.

Ridar mengatakan, untuk komunikasi dan sosialisasi, media sosial sangat dianjurkan untuk digunakan. Namun, seberapa besar pengaruhnya kepada masyarakat, itu tergantung kandidat dan timnya. "Soal isi atau konten itu soal lain. Tergantung admin atau orang yang menggunakannya," jelasnya.

Kata Ridar, seorang kandidat bisa saja memakai orang-orang yang benar-benar ahli. Terutama dalam memposting hal-hal yang bersentuhan dengan masyarakat. Menarik perhatian, sehingga pengguna media sosial yang berteman dengannya akan bersimpati. Bukan sebaliknya, setelah akun dibuat, tidak dikelola secara baik.*

KPU Pakai Uang Pribadi

Sayang sekali, dana Pemilukada Rohul yang sudah dianggarkan di APBD sebesar Rp18.6 miliar, tak bisa digunakan. Masalahnya, KPUD Rohul belum punya sekretaris.

Sejak November 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rokan Hulu tak punya seorang sekretaris. Padahal, fungsi seorang sekretaris sangat vital. Terutama mengatur tugas administrasi dan keuangan. Buktinya, tanpa seorang sekretaris, dana yang diperuntukkan bagi pelaksanaan Pemilukada di APBD Rohul sebesar Rp18.6 miliar, tak bisa dicairkan.

Lalu, apakah KPU Rohul lumpuh? Ternyata tanpa dana Rp18.6 miliar di APBD itu, KPU Rohul masih tetap bisa melaksanakan tugas. “Sebetulnya tak ada kegiatan yang bisa kami lakukan akibat ketiadaan dana APBD itu. Hingga saat ini kami pakai dana pribadi dulu,” ujar Ketua KPU Rohul Fahrizal melalui komisioner Sri Wahyudi S.Kom.

Kegiatan yang baru saja dilaksanakan KPU Rohul adalah pembentukan badan *ad hoc*, yaitu PPK, PPS dan KPPS. Meski membutuhkan dana, semua itu bisa ditanggulangi dengan dana pribadi, dengan harapan nanti diganti setelah ada sekretaris.

KPU Rohul, kata Sri Wahyudi, sedang menunggu munculnya seorang sekretaris yang ditetapkan oleh Sekjen KPU Pusat. Sesuai prosedur, pihaknya sudah mengajukan tiga nama ke Pemkab Rohul, kemudian ketiga nama tersebut diajukan ke Sekjen KPU. Satu dari tiga nama itu, ditetapkan sebagai sekretaris KPU Rohul.

“Sepertinya tak lama lagi kami punya sekretaris. Meski begitu, kami tetap bersabar,” ujar Sri Wahyudi dengan nada datar.

Dia mengatakan, tahapan yang sekarang berlangsung adalah pembukaan atau penerimaan pendaftaran calon perseorangan. Persyaratannya yaitu surat dukungan yang dibuktikan dengan lampiran foto copy KTP sebanyak 7,5 persen jumlah pemilih. Ini lebih berat dari

persyaratan calon perseorangan pada pemilukada sebelumnya yang hanya 4 persen. Jika ada calon independen yang mendaftar, pada 4 Juni mendatang, kami akan melakukan verifikasi faktual kepada setiap desa secara acak.

Adakah calon independen? Hingga kini, kata komisioner KPU Rohul ini, memang belum ada yang mendaftar. Tetapi KPU tetap siap sedia menerima pendaftarannya. “Mana tau nanti ada yang daftar. Soalnya, Rohul sudah memiliki pengalaman di pemilukada lalu, ada calon perseorangan yaitu Teddy Mirza Dal,” ujar Sri Wahyudi.

Soal calon dari partai politik, Sri memprediksi kemungkinan mencapai empat pasang calon. Prediksi ini dilihat dari jumlah kursi di DPRD Rohul dengan hitungan, sebuah parpol minimal memperoleh dukungan 9 kursi di DPRD.

Untuk diketahui, Partai Demokrat mempunyai 8 kursi. Meski demikian jumlah itu belum dapat mengajukan pasangan calon. Demokrat harus berkoalisi dengan partai lain. Setelah itu Partai Golkar dengan tujuh kursi. Seperti juga Demokrat, Golkar harus lebih banyak mendapatkan tambahan kursi agar bisa mengusung calon. Selanjutnya PDIP dengan enam kursi. Lalu PAN, PPP dan Nasdem sama-sama mendapatkan empat kursi. Hanura dan PKS tiga kursi. PKB satu kursi. PBB dan KPPI tidak memperoleh kursi.

“Tidak ada satu partai pun yang mencapai angka 9 kursi yang dipersyaratkan agar bisa menjadi sebuah perahu. Mau tak mau, partai politik harus berkoalisi,” ujar Sri Wahyudi.

Sri Wahyudi menegaskan, setiap partai bebas berkoalisi dengan partai mana pun untuk mengajukan calon. Begitu pun masyarakat berhak mendukung calon yang dia suka. Yang perlu dijaga, persatuan dan ketentraman Rokan Hulu. Jangan sampai, gara-gara berbeda dukungan politik, saling bermusuhan dan memutus silaturahmi. Ia menghimbau, masyarakat hendaknya dapat mengawasi setiap tahapan yang dilaksanakan. “Ini demi terwujudnya pemilukada yang berkualitas,” ujar Sri Wahyudi.*

Rokan Hulu Butuh Pemimpin Energik

Sama dengan daerah lain, jelang helat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember, banyak muncul figur-figur yang menyatakan diri maju menjadi bakal calon (balon) kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), ada nama Ir H Hafith Syukri, MM dan Nasrul Hadi. Pasangan ini patut dibincangkan karena figur-figur lain masih ‘malu-malu kucing’ memproklamirkan diri ke masyarakat baik sebagai orang nomor satu maupun nomor dua. Tapi tidak demikian dengan Hafith dan Nasrun, keduanya sama-sama sepakat berpasangan.

Hafith Syukri yang kini masih berstatus Wakil Bupati Rohul, maju sebagai calon bupati dan Nasrul Hadi yang tak lain adalah Ketua DPRD Rohul, maju sebagai calon wakil bupati. Lantas apa pertimbangannya kedua begitu cepat memastikan berpasangan dan bertarung di Pilkada serentak Rohul?

Ditemui *Endrizal Yusten*, *Zainul Aziz* dan *Beni Hendra* dari **AZAM** di kediamannya, Kamis (28/5) malam, Hafith Syukri menjelaskan banyak hal. “Untuk memacu pembangunan di Rohul, perlu orang-orang enerjik yang tentunya masih muda. Kita butuh percepatan pembangunan yang lebih kuat,” ujarnya.

Selain soal pasangan, Hafith Syukri juga memaparkan motivasinya maju dan ikut bertarung di Pilkada Rohul 2015. Termasuk impian dan konsep pembangunannya untuk kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Kampar itu. Berikut petikannya.

Apa kabar Pak Hafith?

Alhamdulillah sehat.

Kabarnya Anda maju dan berpasangan dengan Nasrul Hadi. Bagaimana persiapan Anda?

Iya, memang benar saya maju di Pilkada Rohul 2015, dan berpasangan Nasrul Hadi. Persiapan, ya sejauh ini kami melakukan sosialisasi ke berbagai desa.

Seperti apa komitmen yang dibuat sehingga lebih cepat memutuskan diri berpasangan?

Mungkin kalau orang berfikir siapkan dulu perahunya baru pasangan. Kalau kita siapkan dulu pasangannya, baru siapkan perahunya. Untuk menyiapkan perahu kita bisa bersama-sama sehingga ada kebersamaan dan kesepahaman yang dimulai dari awal.

Bagaimana pandangan Anda tentang Rohul saat ini?

Kita harus *fair* dan harus bisa mengakui bahwa Bupati Achmad dalam 10 tahun terakhir giat membangun Kabupaten Rohul. Dua periode kepemimpinan, beliau telah meletakkan pondasi pembangunan yang hari ini bisa kita lihat hasilnya. Tentunya pada periode kedua beliau, saya yang mendampingi di kursi Wakil Bupati. Kita akan terus melanjutkan program-program pembangunan, terutama program di bidang keagamaan yang menjadi unggulan. Program ini akan lebih kita tingkatkan.

Sebagai seorang birokrat, telah banyak jabatan yang Anda pegang, termasuk sekarang menjadi Wakil Bupati, lantas apa motivasi Anda maju?

Motivasi utama tentu membangun. Dengan segala kemampuan dan pengalaman yang saya miliki sebagai seorang birokrat, semaksimal mungkin akan saya curahkan untuk Rohul sebagai, negeri tumpah darah saya. Saya harus berfikir bagaimana mensejahterakan masyarakat minimal lima tahun ke depan.

Setiap pasangan yang maju pasti punya visi dan misi. Kalau Anda bagaimana?

Ya, pastilah ada. Visi misi kita yang pertama akan tetap melanjutkan dasar-dasar pembangunan yang sudah dibuat dari kepemimpinan sebelumnya, sebab bagaimanapun saya ada dalam pemerintahan tersebut. Kalau lima tahun atau sepuluh tahun belakangan ini visi kita menjadikan Kabupaten Rohul sebagai kabupaten terbaik di Provinsi Riau pada tahun 2016, walaupun itu belum semuanya kita wujudkan, tetapi dari begitu banyak penghargaan yang sudah diterima Pak Bupati baik di bidang pendidikan, kesehatan, juga keagamaan, itu membuktikan bahwa kita sudah mengarah kepada yang terbaik. Sehingga visi kita ke depan bagaimana yang terbaik itu kita tingkatkan supaya bisa lebih sejahtera. Kalau kita bisa menjadi yang terbaik tentu ujungnya kesejahteraan masyarakat meningkat. Visi utama kita adalah mensejahterakan masyarakat Rohul, sumber daya dan potensi sumber daya alam yang kita miliki harus kita maksimalkan.

Sektor mana yang akan menjadi fokus Anda?

Kita sudah berkomitmen menjadikan Rohul sebagai lumbung ternak di Riau. Fokus lain bidang pertanian, baik perikanan, peternakan maupun pertanian tanaman pangan. Kita tetap mengacu kepada tujuan utama membuat Rohul mandiri pangan, bagaimana kita tidak memiliki ketergantungan pangan kepada impor ataupun pangan dari luar Rohul. Juga pembenahan infrastruktur desa. Dulu sarana transportasi dari ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten sangat susah, hari ini kita melihat sudah tidak ada masalah lagi. Ke depan kita ingin bagaimana sarana transportasi dari ibukota desa ke ibukota kecamatan. Selanjutnya soal listrik dan air bersih. Kalau soal jaminan kesehatan dan pendidikan saya rasa 10 tahun terakhir ini sudah dinikmati oleh masyarakat. Listrik akan kita sinergikan dengan PLN, kita bukannya tidak mampu memberikan sarana kelistrikan mandiri kepada masyarakat seperti genset, tapi kita tahu dengan harga BBM naik turun sangat memberatkan masyarakat. Untuk itu kita akan

membuat beberapa desa sebagai mandiri energi dimana kecamatan atau desa tersebut akan memiliki satu unit pabrik kelapa sawit berkapasitas 45-60 ton perjam. Ini bisa kita sarankan untuk membuat pembangkit listrik dari biogas yang memanfaatkan limbah PKS. Selanjutnya air bersih. Hari ini sudah hampir 60 persen desa kita menikmati air bersih sehingga pada musim kemarau pun ketersediaan air tetap mencukupi. Inilah yang dalam lima tahun ke depan secara bertahap akan kita benahi sampai ada progresn yang cukup baik.

Bagaimana soal infrastruktur jalan?

Untuk lima tahun ke depan kita juga fokus kepada pembenahan infrastruktur sebagai urat nadi perekonomian masyarakat. Kita tahu Rohul adalah negeri agraris yang bertitik tumpu pada sektor pertanian dan perkebunan. Untuk mengeluarkan hasil produksi pertanian dan perkebunan diperlukan infrastruktur jalan yang menjadi sarana transportasi. Mungkin lima tahun terakhir ini kita fokus kepada bagaimana membangun ibukota Rohul yakni Pasir Pangaraian agar bisa mensejajarkan diri dengan ibukota-ibukota kabupaten lain, sehingga kita bisa membedakan mana ibukota kecamatan dan mana ibukota kabupaten. Itu sudah kita lakukan. *Nah*, ke depan kita akan fokus kepada bagaimana membangun infrastruktur di desa atau daerah pinggiran. Kalau semua transportasi lancar dan ekonomi masyarakat baik tentu mereka akan menyekolahkan anak-anaknya lebih baik. Bahwa antara kemiskinan dan kebodohan itu sesuatu yang tak bisa dipisahkan. Begitu banyak orang bodoh itu miskin, sebaliknya karena kemiskinannya dia menjadi bodoh. Dengan demikian wajib belajar 12 tahun akan kita perkuat, makanya kita terus mendorong UPP (Universita Pasir Pangraian) sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat. Kalau tidak ada halangan tahun ini atau tahun depan UPP akan kita negerikan, kalau sudah negeri tentu ia sejajar dengan universitas lain.

Sebagai Wakil Bupati Anda tentu tahu kendala utama pembangunan di Rohul. Apakah karena masyarakat atau faktor geografis?

Kalau utama adalah minimnya APBD yang kita miliki. Kalau geografis saya rasa tidak ada masalah, mungkin ada beberapa kabupaten di Riau yang kondisi geografisnya lebih berat, seperti Rohil dan Bengkalis dengan kontur alamnya banyak gambut. Dengan posisi APBD kita nomor dua terkecil di Riau, besarnya keinginan yang akan kita lakukan untuk mempercepat pembangunan, tapi dengan keterbatasan anggaran terpaksa kita harus lakukan secara bertahap dengan skala prioritas khususnya yang langsung dinikmati masyarakat. Makanya dengan sumber daya alam yang dimiliki kita akan berangsur-angsur meningkatkan jumlah APBD.

Maju di pilkada tak cukup dengan semangat membangun saja, mesti dipersiapkan perahunya. Bagaimana urusan Anda dengan partai pengusung?

Pak Nasrul Hadi merupakan Sekretaris Partai Demokrat Rohul, memang memiliki 8 kursi di DPRD, sementara persyaratannya 9 kursi baru bisa mengajukan calon. Kita akan terus upayakan tambahan perahu lain, tapi tidak usah kita kasih tahu dulu lah, kita sudah lakukan komunikasi dengan berbagai partai politik. Saya juga sudah mendaftar ke PDIP, artinya tetap kita lakukan komunikasi dengan berbagai partai politik untuk membuat sebuah kesepakatan politik dan juga kesepakatan membangun. Kalau sudah diperoleh kesepakatan akan kita deklarsikan koalisi partai politik yang akan mengusung kita pada Pilkada Desember mendatang. Selain mendaftar di Partai Demokrat dan PDIP, beberapa partai politik lain yang tidak membuka pendaftaran, kita lakukan juga komunikasi dan kita tetap berharap partai politik tersebut bisa bersama-sama dengan kita. Sekarang kita dalam tahap memfinalisasi perahu. Harapan kita karena Pak Nasrul Hadi Sekretaris Partai Demokrat Rohul, tentu kita harapkan dukungan dari Partai Demokrat walaupun harus melalui berbagai proses dari DPC ke DPD hingga ke DPP dan sambil menunggu kita terus melakukan gerak langkah yang sama.

Kalau Partai Demokrat hampir final, bagaimana dengan parpol lain?

Ya begitu lah, keputusan kan ada pada mereka, kalau mereka merasa punya kesepahaman dengan visi kita, mungkin mereka akan putuskan akan mengusung kita, tapi sampai hari ini komunikasi itu tetap kita lakukan.

Untuk mencalonkan diri, Anda harus mengundurkan diri dari PNS. Apakah Anda siap dan tidak sayang melepaskan status yang telah Anda rintis sejak lama?

Inikan sebuah pilihan, memang ini sesuatu hal yang berat bagi saya, karena saya masih punya masa kerja 7 tahun, tapi dengan ketentuan perundang-undangan seorang PNS harus melepas statusnya jika ingin maju dalam pilkada. Menurut saya ini resiko yang harus saya terima, makanya resiko ini harus saya imbangi dengan kerja keras agar apa yang saya pertaruhkan itu bisa berbuah hasil. Berjuang, kerja keras lalu kita bertawakal kepada Allah SWT. Bagaimanapun ini bukan kerja manusia semuanya ada di tangan Allah SWT yang akan memberikan amanah itu kepada orang yang dikehendakiNya, tentunya kita berharap dalam doa kita lah orang yang dikehendaki Nya. Hidup itu harus ada pilihan.

Begitu cepat Anda bersepakat dengan Nasrul Hadi, apakah memang sudah lama direncanakan?

Ha...ha...ha..., Ini semua karena gerakan Allah SWT. Saya sebagai manusia harus meyakini bahwa kapan kita dijodohkan, kapan kita lahir semua ada ditangan dan takdir Allah SWT. Selama ini saya tidak pernah berfikir akan berpasangan dengan Pak Nasrul Hadi, tetapi kalau Allah SWT tetapkan begitu kita akan jalani dan kita akan berjuang bersama-sama.

Kan masih banyak figur lain yang sudah mapan, sementara Pak Nasrul Hadi masih muda, apa pertimbangannya. Apakah karena merasa cocok,

atau memang potensi yang dimilikinya, atau karena keterwakilan daerah?

Itu mungkin salah satu, keterwakilan daerah memang salah satu faktor juga, orang juga tahu bahwa saya mewakili komunitas masyarakat Rokan Kiri, dan Nasrul Hadi dari Rokan Kanan. Tapi yang penting adalah bagaimana ke depan kita bisa memacu pembangunan di Rohul. Kita memerlukan orang-orang yang energik dan masih muda. Kita butuh percepatan yang lebih kuat sehingga kalau masih muda tentu ia punya kecepatan membangun Rohul.

Bagaimana dukungan dan respon masyarakat?

Ya, itu silakan tanya ke masyarakat. Yang penting kita akan bekerja lebih baik dalam membangun Rohul yang lebih baik dan lebih maju.

Hampir lima tahun bersama memimpin Rohul, Anda degan Achmad akur-akur saja. Bagaimana cara Anda mempertahankan keharmonisan ini?

Kalau saya kiatnya hanya tahu diri saja, bahwa sebagai seorang wakil harus tahu jabatannya, jangan berfikiran punya kewenangan dan jangkauan yang sama dengan bupati. Saya tetap menghormati beliau, karena saya seorang birokrat barangkali saya dilahirkan dari alam birokrasi yang harus tunduk dan taat kepada pimpinan sehingga saya tidak pernah berfikir bahwa saya akan *ya katakanlah akan menyalip*, tapi bagaimana saya sebagai seorang wakil bupati bisa bersinergi baik dengan bupati. Mudah-mudahan saja kalau Allah SWT menghendaki kami bisa memimpin Rohul lima tahun ke depan, mudah-mudahan pula kami bisa tetap akur. Karena dasarnya saya dari wakil bupati, maka setidaknya saya akan tahu apa dan bagaimana yang dirasakan seorang wakil. Selama ini saya merasa nyaman sebagai wakil. Ke depan saya akan berbuat hal yang sama dan memberikan kenyamanan bekerja kepada wakil bupati untuk bisa bersama-sama sampai di akhir masa jabatan.

Dimata Anda, bagaimana sosok Pak Achmad?

Kalau ditanya sosok Pak Achmad, saya menilai beliau sosok yang konsisten dengan pembangunan di Rohul, karena kita tahu beliau dari latar belakang pamong.

Bagaimana dukungan Pak Achmad kepada Anda?

Ha... ha... ha... kita lihat sajalah.

Apa impian Anda terhadap Rohul?

Saya ingin melihat masyarakat Rohul sejahtera. Karena apapun yang kita lakukan sebagai orang pemerintahan kalau tidak berujung kepada kesejahteraan masyarakatnya itu belum pemerintahan yang baik, kita bekerja hanya untuk masyarakat, apapun program yang kita buat dan kita lakukan harus berujung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.*

Saya dan Hafith Sama-sama Dikader Achmad

Muda, energik dan bersahaja. Begitu kesan pertama bersua dengan **Nasrul Hadi, ST, MT**. Nama lelaki kelahiran Kota Tengah, 23 November 1975 ini, kini sedang menjadi buah bibir di masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. Bukan karena sebagai Ketua DPRD, tapi lantaran ia menjadi calon wakil bupati di pilkada serentak Desember ini.

Ditemui **AZAM** akhir pekan lalu, anak pertama pasangan H Nazar dan Hj Nurbaiti ini, bercerita tentang rencana dan persiapan yang telah dilakukannya menyosong suksesi Rohul-1. Termasuk kepastiannya berpasangan dengan Ir H Hafith Syukri, MM. Kepada **Endrizal Yusten** dan **Beni Hendra**, suami Nani Feti Wulandari ini menyampaikan pertimbangannya mengambil posisi sebagai Wakil Bupati Rohul periode 2016-2021. Berikut penuturan Nasrul Hadi.

Kalau Hafith Syukri sudah menyatakan kepastian untuk berpasangan, bagaimana dengan Anda?

Insya Allah iya, kita berpasangan.

Kan belum dideklarasikan, lantas seperti apa bentuk kepastian berpasangan yang Anda maksud?

Kita telah beberapa kali turun bersama ke masyarakat. Kita juga sudah umumkan bahwa kita akan berpasangan pada Pilkada Rohul mendatang. Selanjutnya di internal partai khususnya Partai Demokrat, kita telah menerima pengembalian formulir pendaftaran para bakal calon. Itulah yang akan kita godok dan dari hasil kajian Partai Demokrat yang paling berpotensi adalah Hafith Syukri dan saya. Selanjutnya, karena di

Demokrat ini sudah *clear*, kita ke partai lain dan ini juga yang kita usung. **Anda sekarang Ketua DPRD dan Sekretaris Partai Demokrat Rohul, kalau boleh dibilang Anda lah “pemilik” perahu Demokrat. Kenapa Anda mau mengambil posisi sebagai wakil, apa pertimbangannya?**

Bagi saya, untuk meraih suatu jabatan apakah bupati atau wakil bupati bukan hanya karena nafsu kekuasaan semata. Kalau cuma pertimbangan nafsu, maka ego sebagai sekretaris saya lah yang memiliki “perahu” dan harus saya yang menjadi bupati. Tapi ini kan tidak. Kita harus melihat potensi orang yang menjadi bupati dan wakil bupati nanti adalah figur yang betul-betul mampu membawa kemajuan bagi Kabupaten Rohul. Saya juga mempertimbangkan peluang untuk menang. Saya baru beberapa bulan menjabat Ketua DPRD, lebih pantas rasanya Pak Hafith yang menjadi bupati dan saya wakilnya. Selain itu, beliau juga sudah berpengalaman di birokrasi. Jadi kalau orang yang menjadi bupati itu, saya rasa harus yang telah berpengalaman di pemerintahan. Pertimbangan lainnya, karena saya sudah kenal beliau dari tahun 2000, saya menilai Pak Hafith memiliki konsep, terus tidak membedakan antara yang kaya dan miskin, yang punya jabatan dan yang tidak punya jabatan. Orangnya supel dan mudah bergaul. Tidak ada istilah ini orang saya, ini bukan orang saya, harus saya singkirkan. Pak Hafith bukan orang seperti itu. Begitu juga terhadap pembangunan. Sewaktu beliau menjadi kepala dinas, ia tidak membedakan satu daerah dengan daerah lainnya.

Apakah ini karena sudah lama saling kenal dan kebutuhan punya hobi yang sama?

Memang Pak Hafith saya sudah lama mengenal saya, dan saya juga tahu dengan beliau. Kebetulan kami punya hobi yang sama.

Apa motivasi Anda maju di Pilkada Rohul?

Pertama, karena ada dukungan dan permintaan masyarakat, hanya saja masyarakat meminta saya sebagai calon bupati. Namun karena berbagai

pertimbangan, saya katakan waktu itu, saya belum siap untuk itu. *Kedua*, kalau di legislatif kita belum bisa berbuat banyak untuk masyarakat. Saya menilai, eksekutif lah yang mampu berbuat banyak mewujudkan impian dan harapan masyarakat. Jadi intinya, saya ingin bisa berbuat lebih baik dan lebih banyak lagi untuk masyarakat.

Meski baru beberapa bulan menjabat Ketua DPRD, tapi Anda sudah lama mengetahui pembangunan Rohul. Lantas, sisi mana yang akan menjadi fokus perhatian?

Kalau di periode Pak Achmad sepuluh tahun ini beliau telah mengubah corak Pasir Pengarayan dari ibukota kecamatan menjadi ibukota kabupaten dengan membangun infrastruktur. Di daerah pinggiran masih tertinggal, ada memang perubahan tapi belum maksimal. Makanya nanti kita akan lebih banyak membangun daerah pinggir dan pedesaan, seperti listrik dan jalan. Daerah-daerah yang jauh dari ibukota kabupaten, kita bangun puskesmas rawat inap. Begitu juga sektor pendidikan, juga tetap menjadi fokus perhatian.

Partai Demokrat baru memiliki 8 kursi, masih kurang untuk bisa mengusung pasangan calon. Bagaimana solusi Anda?

Insya Allah kita sudah berkomunikasi dengan parpol lain dan mungkin dalam waktu dekat sudah ada keputusannya. Mereka sudah komit kepada kita. Sudah ada juga yang mengatakan sebelum Ramadhan telah ada keputusan.

Katanya sekarang Anda rajin turun ke masyarakat. Seperti apa respon dan antusias masyarakat?

Kalau antusias warga, saya rasa sangat luar biasa. Karena Pak Hafith sudah dikenal masyarakat Rohul, sementara saya tidak begitu banyak. Tapi di Dapil I, rata-rata orang kenal semua dengan saya. Setiap kali saya turun ke sana saya tidak pernah menganggap mereka orang lain akan

tetapi sudah seperti keluarga sendiri. Seperti itulah pola saya di pemilu lalu. Makanya antusias masyarakat sangat tinggi.

Lantas bagaimana respon Achmad terhadap pasangan Anda?

Salah seorang yang mendorong kami maju adalah Pak Achmad. Beliau membuat semacam kaderisasi melanjutkan kepemimpinan. Pak Hafith sebagai wakil bupati, hampir lima tahun dikader Pak Achmad. Secara politik, saya adalah Sekretaris Partai Demokrat Rohul, dan ketuanya adalah Pak Achmad. Beliau juga sudah mengkader saya. Tapi untuk bisa meraih puncak, kan ada tahapannya, artinya kita tidak mungkin langsung melompat bisa sampai ke atas.*

Kami Sudah Bergerak Tanpa Komando

Delapan orang anggota DPRD Rokan Hulu dari Partai Demokrat telah melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk memenangkan jagoan mereka. “Kami sudah bergerak meski tanpa komando,” ujar Gusri, S.Si.

Hafits Syukri-Nasrul Hadi hampir dipastikan akan mendayung perahu Partai Demokrat di Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) yang dilakukan secara serentak pada 9 Desember 2015. Kenyataan ini disambut baik sejumlah kader partai besutan mantan Presiden RI SBY itu, karena Narul Hadi merupakan Ketua DPRD Rohul yang juga sekretaris DPC Partai Demokrat.

Hal ini terungkap ketika **AZAM** berbincang-bincang dengan sejumlah kader Partai Demokrat Rohul. “Kami merasa bangga kader terbaik Demokrat Rohul ikut maju di pemilukada. Dan kami akan berjuang memenangkan Hafits-Nasrul,” ujar Gusri, S.Si, wakil rakyat dari Partai Demokrat Rohul.

Ketua Badan Kehormatan DPRD Rohul ini menyatakan, dirinya sejak awal sudah memperkirakan Hafits dan Nasrul akan ‘kawin’ di pemilukada. Sebab, keduanya sudah menjalin ‘kemesraan’ sejak lama. Bukan hanya dalam tugas, Hafits-Nasrul juga telah akrab pada kehidupan sehari-hari.

“Mereka sepertinya ditakdirkan untuk berpasangan. Saya lihat ini sudah sejak lama. Bahkan mereka juga punya kesamaan hobi,” ujar Gusri, yang diamini Muhammad Fadli, SH Ketua Generasi Muda Demokrat Rokan Hulu.

Maka wajar kiranya, kader Partai Demokrat, secara bulat mendukung Hafits Syukri-Nasrul Hadi. Dukungan secara penuh pun datang dari

delapan orang anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD Rohul.

“Bukan itu saja, para caleg di Pemilu Legislatif 2014, semuanya turun gunung untuk memenangkan pasangan Hafits Syukri-Nasrul Hadi. Semua itu kami lakukan secara spontanitas bukan ada komando,” ujar Gusri.

Ke depan, lanjut Gusri, pergerakan kader partai ini akan tersusun dengan baik. Tidak lagi spontanitas tetapi terstruktur dan direncanakan. Soal trik dan intrik mendekati masyarakat, kata Gusri, kader partai punya cara tersendiri. Yang pasti, kata dia, semua mesin partai telah bergerak.

Dia juga mengatakan, besarnya Partai Demokrat di Rokan Hulu tak lepas dari sosok Bupati Ahmad. Karena, Ahmad sendiri adalah dedengkot Partai Demokrat di Rohul juga di tingkat Provinsi Riau. Wajar kiranya, di Pemilu tahun 2014 lalu, Partai berlambang matahari merah biru itu mendapatkan kursi paling besar di DPRD Rokan Hulu.

Soal sosok Hafits Syukri dan Nasrul Hadi, Gusri mengatakan, keduanya figur yang telah dikenal luas oleh masyarakat Rohul. Hafits adalah birokrat yang sudah sejak lama meniti karir di birokrasi Rohul, hingga akhirnya menjadi wakil bupati. Hafits sudah banyak berinteraksi dengan masyarakat. Masyarakat juga sudah tahu siapa dan bagaimana sosok Hafits sebenarnya. “Kita lihat sendiri, hingga kini belum ada kita dengar nada miring tentang beliau. Jika di tempat lain bupati dan wakilnya pecah kongsi, di Rohul justru baik-baik saja. Ini menandakan bahwa beliau orang yang pandai,” ujar Gusri.

Sebagai birokrat, Hafits juga berpengalaman menjalankan roda pemerintahan dan birokrasi. Dia tidak akan canggung lagi jika nanti menjadi bupati. Bahkan, bisa berkaca dari pengalaman sebelumnya untuk kemajuan Rokan Hulu. Sementara Nasrul Hadi, kata Gusri, figur muda yang enerjik. Memiliki ide-ide cemerlang untuk kemajuan Rohul. Meski masih muda, Nasrul kaya pengalaman. Ia pernah menjadi anggota KPU Rohul, kemudian terjun ke politik hingga akhirnya menjadi Ketua DPRD Rohul.

Sama seperti Hafits, Narul juga populer di masyarakat. Jika Hafits mewakili daerah Rokan Kanan, Nasrul mewakili Rokan Kiri. Nasrul sendiri, kata Gusri, paling populer di tiga Daerah Pemilihan (Dapil). “Dia lahir di Kota Tengah, Dapil Tiga. Ia sekolah dan dibesarkan di Dalu-Dalu atau Dapil Dua. *Nah*, tempat tinggalnya di Dapil Satu,” ujar Gusri.

Melihat *trackrecord* kedua tokoh ini, Gusri yakin keduanya akan memenangkan pertarungan di pilukada. “Kami optimis, jagoan yang kami usung akan menang,” ujarnya.*

Bupati Rohul Minimal Punya Kemampuan Sama dengan Achmad

Untuk melanjutkan program pembangunan di Rohul yang secara fisik sudah maju, bupati ke depan minimal memiliki kemampuan yang sama dengan Achmad.

Bupati Rokan Hulu ke depan minimal memiliki kemampuan manajerial yang sama dengan Drs H Achmad, MSi, Itulah yang dilontarkan drh H Chaidir, MM saat disodorkan pertanyaan figur seperti apa yang cocok memimpin ‘Negeri Seribu Suluk’ lima tahun ke depan.

Pendapat itu dilontar anak jati Rohul ini, karena ia melihat kondisi Rohul sekarang pembangunan fisiknya sudah maju. Keadaan itu sangat dipengaruhi karena Achmad dinilai memiliki kemampuan manjerial yang bagus mengelola tata pemerintahan. Masalahnya, Achmad tidak bisa lagi maju, karena telah menjabat dua periode.

“Kalau saya boleh menilai sebetulnya Bupati Rohul ke depan minimal memiliki kemampuan manajerial yang seperti Pak Achmad. Coba kita lihat Pak Achmad orang yang berpengalaman di bidang birokrasi dan disiplin ilmunya di bidang ilmu pemerintahan. Jadi ia punya kompetensi di bidang pemerintahan. Kalau ada kelemahan di sana sini itu hal biasa. Kalau boleh saya memilih orang-orang atau figur yang minimal punya kemampuan seperti Pak Achmad untuk melanjutkan pembangunan Rohul menjadi kabupaten terbaik,” ujarnya.

Diakui, salah seorang tokoh masyarakat Rohul ini, saat ini muncul beberapa nama yang diprediksi maju memperebutkan kursi Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada serentak Desember mendatang. Sebut,

misalkan, Wakil Bupati *incumbent*, Ir H Hafith Syukri, MM, Ketua DPRD Riau, Suparman, Ketua DPRD Rohul, Nasrul Hadi, ST, MT, Erizal dan beberapa nama lainnya.

Mengomentari nama-nama itu, kepada **AZAM**, Chaidir mengatakan siapapun figur yang akan memimpin Rohul dia haruslah seorang pemimpin yang mampu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan dengan baik. Karena yang dituntut masyarakat untuk mempercepat pembangunan daerah sekarang adalah kepemimpinan yang efektif.

Artinya, kepemimpinan itu mampu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan secara baik. Jadi seluruh fungsi perencanaan, pengorganisasian dan juga mengkoordinasikan pembangunan kalau dijalankan dengan efektif dan baik oleh kepala daerah, maka pembangunan di daerah itu akan berjalan baik.

“Kemampuan manajerial sangat perlu dimiliki seorang kepala daerah. Kalau menurut saya baik saja tidak cukup, seorang kepala daerah harus baik dan memiliki kemampuan manajerial, sebab ia akan menggerakkan pembangunan, menggerakkan masyarakat dan sumber daya yang ada di daerah tersebut,” ungkap Chaidir.

Menurutnya, peran seorang kepala daerah sangat penting dalam otonomi daerah, karena peluang bagi masyarakat untuk berperan dalam pembangunan lebih besar dibanding era sentralistik. Itu juga sangat dipengaruhi oleh jarak antara masyarakat dengan yang punya kedaulatan dan pengambil kebijakan.

Rohul merupakan salah satu kabupaten yang sejak dulu banyak melahirkan tokoh, baik birokrat, politisi dan akademisi, tapi jelang pilkada serentak ini belum banyak tokoh yang muncul dan menampakkan “batang hidungnya” untuk ikut bertarung.

Soal itu, Chaidir berpendapat untuk ikut serta dalam membangun daerah, tidak mesti harus menjadi seorang bupati atau seorang kepala daerah. Mungkin karena itulah para tokoh Rohul yang tersebar di berbagai wilayah dan ikut berperan aktif memberikan konstribusinya

dalam kemajuan Rohul, tapi tidak muncul kepermukaan. “Kan tidak semua harus menjadi kepala daerah, untuk ikut membangun daerah para tokoh mungkin berpikiran tidak harus menjadi bupati. Pemikiran-pemikiran bisa disalurkan melalui Bupati atau DPRD,” tambah mantan Ketua DPRD Riau ini.

Chaidir menyayangkan dihapusnya tahapan uji publik dalam proses pilkada. Padahal melalui uji publik, setidaknya bisa diuji kemampuan manajerial dan segi kompetensinya, jadi tidak asal maju saja. “Sayangnya uji publik itu dihilangkan dalam UU Pilkada No 8 tahun 2015,” sebutnya.*

LAM Mimpikan Cara-cara Adat Memilih *Kepala Daerah*

Tokoh-tokoh masyarakat di Rohul tengah mempersiapkan kriteria pemimpin masa datang. Jika bisa dirembukkan, pemilihan kepala daerah bisa bernuansa pemilihan secara adat.

Demikian impian Tengku Rafli Amrien, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Rokan Hulu dalam menghadapi Pemilukada Rohul 2015. Untuk itulah, dia dan beberapa unsur masyarakat lainnya membuat beberapa kriteria calon bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan. "Saat ini saya sedang menunggu kedatangan Ketua MUI dan beberapa tokoh lainnya untuk merumuskan kriteria tersebut," ujar Tengku Rafli Armien kepada **AZAM** di ruang kerjanya di Pasir Pengarayan.

Pria yang juga menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu ini mengatakan, masing-masing unsur di masyarakat akan memberi masukan seperti apa kriteria pemimpin ke depan. "Kalau dari LAM, kita masukkan kriteria bahwa seorang pemimpin itu harus mengerti dan faham dengan resam adat," ujarnya.

Rokan Hulu hari ini, kata Tengku Rafli Armien, sudah cukup maju dalam menjaga dan melestarikan adat. Dibawah kepemimpinan Ahmad-Hafith Syukri, adat dan agama benar-benar menjadi perhatian di Rohul. "Kita punya Islamic Centre sebagai tempat mensyiarkan agama. Nah, ini sejalan dengan adat kita yang bersandi syarak," ujar mantan Camat Rambah ini.

Pemimpin ke depan, kata Rafli Armien, hendaknya dapat mempertahankan bahkan meningkatkan pencapaian hari ini. Rohul saat ini sudah memiliki Peraturan Daerah tentang LAM dan beberapa Peraturan Bupati tentang berpakaian Melayu dan penggunaan bahasa

daerah. “Jika pemimpin tidak mengenal adat dan resam, mereka tak akan peduli. Jangankan meningkatkan, yang sudah ada saja bisa hilang,” ujar Rafli lagi.

Ia mendorong semua pihak di Rokan Hulu agar menerapkan cara-cara adat dalam pelaksanaan pilkada. Dalam adat, kata Rafli, tidak ada istilah *voting* mengambil keputusan. Semua keputusan diambil dengan cara musyawarah dan mufakat.

Rafli memimpikan, para elite di Rohul menyadari pentingnya cara pengambilan keputusan seperti itu. Sehingga mereka tak perlu bertelaga memperebutkan kursi bupati, karena sebelumnya sudah dimusyawarahkan siapa yang pantas dipilih. Sesuai dengan kriteria yang sudah dibuat sebelumnya.

Pria bergelar Tongku Majo Lelo ini menyadari, cara seperti itu sulit dilaksanakan mengingat aturan pilkada yang sudah ada. Dalam peraturannya, setiap orang berhak maju asalkan memenuhi persyaratan, dukungan partai politik atau dukungan yang dibuktikan dengan KTP untuk calon perseorangan.

Persyaratan tersebut membuka peluang terjadinya pertarungan secara terbuka bagi orang-orang yang menginginkan jabatan. Untuk itulah, LAM bersama forum ulama, cendikia dan berbagai unsur di masyarakat mengingatkan adanya kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap calon.

Kriteria ini, kata dia, hendaknya dipenuhi oleh setiap bakal calon. Jika tidak,sebaiknya tidak usah maju di Pilukada Rokan Hulu. Dan bila tetap mendapat perahuatau memiliki dukungan KTP bagi calon perseorangan, maka masyarakat tidak akan memilihnya

Incumbent Raih Keuntungan di Pilkada

Sebagai calon berstatus *incumbent*, pemilukada jelas memberi keuntungan bagi pasangan Hafith-Nasrul. Apalagi jika mendapat ruang dari bupati Achmad.

Diantara sekian nama yang muncul dan berniat mencalonkan diri menuju Rohul-1, kehadiran Ir H Hafith Syukri, MM dan Nasrul Hadi, ST, MT, cukup menarik diperbincangkan. Pasalnya, keduanya telah sepakat berpasangan saat bertarung di pilkada serentak Kabupaten Rohul, Desember mendatang.

Menariknya lagi, Hafith berstatus Wakil Bupati Rohil *incumbent*, sedang Nasrul Hadi adalah Ketua DPRD Rohul periode 2014-2019. Maka bisa disebut pasangan ini sebagai calon *incumbent*, karena sama-sama berada di pemerintahan Rohu. Satu di eksekutif, satunya di legislatif.

Dengan status itu, pengamat politik Universitas Riau (UR), Saiman Pakpahan, menilai posisi Hafith sebagai calon *incumbent* jelas akan memperoleh keuntungan sepanjang Bupati Achmad memberi ruang baginya untuk menggerakkan dan menggunakan mobilisasi birokrasi.

“Meskipun posisi Hafith hanya sebagai Wakil Bupati, namun ketika Achmad memberikan ruang untuk menggunakan berbagai potensi birokrasi, maka saya yakin ini akan menjadi sebuah keuntungan. Potensi birokrasi itu berbagai macam bentuknya, semisal Achmad memberikan waktu dan kesempatan melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah, jika Hafith mampu memanfaatkan momen seperti itu, jelas ini suatu keuntungan,” ujarnya kepada **AZAM**.

Saiman melihat ada sisi menarik dari pasangan Hafith-Nasrul. Biasanya para bakal calon dalam setiap pilkada selalu mengumumkan

siapa pasangannya ketika sudah mendekati waktu pendaftaran ke KPU. Namun tidak demikian dengan Hafith dan Nasrul. Keduanya justru mengumumkan jauh-jauh hari sebelumnya.

Soal ini, Saiman menilai itu merupakan sebagai salah satu bentuk strategi politik. Ketika calon sudah mengumumkan siapa pasangannya, maka ini akan menjadi mudah bagi partai politik memberikan penilaian. Artinya, parpol tidak perlu lagi harus mencari dan menunggu siapa yang akan menjadi pendampingnya.

Dan mengingat Nasrul merupakan Sekretaris Partai Demokrat Rohul, Saiman berpendapat kemungkinan besar pasangan ini akan mampu mendapatkan perahu Partai Demokrat. Karena delapan kursi di DPRD Rohul belum memenuhi syarat bisa mengusung calon sendiri, maka Partai Demokrat harus berkoalisi dengan parpol lainnya.

Saiman menyarankan pasangan ini lebih intens membangun komunikasi dengan berbagai parpol. “Bangun komunikasi politik sebanyak mungkin. Jika ini mampu dilakukan, jelas akan menambah amunisi. Mesin partai sangat dibutuhkan untuk menggalang dukungan bagi pasangan dalam sebuah pilkada,” ungkap Dosen Fisipol UR ini.

Soal riak jelang pilkada yang belum terasa, menurut Saiman disebabkan waktu yang tersisa masih panjang sehingga calon dan parpol lebih menunggu sembari menyusun strategi politik. Tapi, ketika KPU telah menabuh gong pertanda dimulainya pelaksanaan pilkada, kata Saiman, maka para kontestan, calon dan pasangannya, akan mulai bersosialisasi. “Tidak hanya di Rohul, hampir di seluruh daerah di Indonesia yang menggelar pilkada serentak, suasana pilkada masih terasa sepi dan tenang-tenang saja. Ini karena calon dan parpol tengah melakukan konsolidasi dan penjaringan sehingga semuanya serba belum pasti. Baik itu perahu maupun pasangannya,” tuturnya.*

BAGIAN VII



اشكاتن ذريات أنق ملبو



AZAM

3 0 JULI 2015. Masa tugas Irwan Nasir sebagai Bupati Kepulauan Meranti akan berakhir. Kepemimpinan pemerintahan pun dipelaksana-tugaskan kepada pejabat eselon dua yang ditunjuk Plt. Gubernur Riau sampai bupati hasil pilkada 9 Desember dilantik Gubri. Sebagai pemimpin muda yang dekat dengan rakyat, Irwan terbilang sukses menakodai negerinya. Walau tak mudah, tugas berat itu ia lalui dengan sabar dan kerja keras.

"Masih banyak cita-cita saya untuk Meranti yang belum terwujud karena keterbatasan waktu dan anggaran," kata Irwan kepada Zainul Aziz dan Beni Hendra dari AZAM di Kepulauan Meranti. Antara lain, pembangunan infrastruktur jalan yang oleh Irwan dirumuskan ke dalam empat koridor. Keempat koridor itu menghubungkan transportasi antardesa dengan kecamatan, antartkecamatan dengan kabupaten, dan antarkabupaten dengan provinsi. Bagaimana persiapan Irwan menghadapi pilkada serentak, apa yang sudah ia lakukan selama lima tahun, dan bagaimana harapan rakyat terhadapnya? Baca laporan lengkap AZAM di hal. 10-15.*



IRWAN KEMBALI DIMINATI PIMPIN MERANTI

Merangkai Pulau Negeri Kepulauan

30 Juli 2015. Masa tugas Irwan Nasir sebagai Bupati Kepulauan Meranti akan berakhir. Kepemimpinan pemerintahan pun dipelaksana-tugaskan kepada pejabat eselon dua yang ditunjuk Gubernur Riau sampai bupati hasil pilkada 9 Desember dilantik.

Bagaimana dengan Irwan? Bupati yang telah memoles wajah Meranti selama lima tahun itu, masih diinginkan sebagian besar rakyatnya kembali memimpin. Sehingga ia harus fokus mengikuti tahapan pemilukada serentak pada 9 Desember mendatang.

Untuk memastikan langkahnya menjadi peserta pilkada, Irwan kemungkinan diusung oleh koalisi PAN, PKS, PKB dan sejumlah partai lain. Soal calon pendamping, info yang beredar di Selatpanjang menyebutkan, Irwan memilih Said Hasyim, tokoh Meranti yang lima tahun lalu berhadapan dengan Irwan-Masrul Kasmy.

“Nantilah, tentang siapa calon wakil dan partai mana saja yang mengusung saya, dua minggu lagi akan kita umumkan,” kata Drs Irwan Nasir MSi menjawab **AZAM** yang berkunjung ke Kepulauan Meranti, Selasa-Kamis pekan lalu.

Seperti kepala daerah lain yang masa jabatannya segera berakhir, Irwan sangat disibukkan oleh pekerjaan daerah. Hari-hari di Selatpanjang, ia nyaris menghabiskan waktu untuk melayani masyarakat. Jadwal wawancara khusus yang sudah *dischedule* dengan kru **AZAM** terus tertunda beberapa kali. Walau demikian **AZAM** berkesempatan melihat langsung kehidupan masyarakat di Kepulauan Meranti. Terutama desa-desa terluar di Pulau Merbau, Rangsang dan Pulau Padang.

Memang tak mudah. Untuk menjangkau sejumlah desa di pulau-pulau yang ada di sana, butuh kesungguhan dan perjuangan. Utamanya transportasi. Masalahnya agar bisa sampai bertapak kaki dari pulau ke pulau itu kita harus naik perahu, *boat* atau *speed*. Dan, yang terpenting mempersiapkan mental se baja mungkin karena Anda akan berhadapan dengan ombak, gelombang dan tiupan angin yang luar biasa hebat.

Itu pun belum dirasa cukup. Setelah kaki merapat di pelabuhan, problem besar pun masih menghadang. Yakni, sarana transportasi. Di darat untuk bisa menjangkau daerah yang dituju, sarana yang tersedia hanya ada ojek atau sepeda motor. Itu pun harus melewati jalan yang berlobang. Pabila hujan turun, *alamaak* pinggang serasa ditusuk sembilu. Hampir di setiap ruas jalan di pulau terluar yang dilewati dalam Kabupaten Meranti rusak parah.

“Wanita yang sedang hamil kalau melewati jalan-jalan itu bisa keguguran nih,” ujar salah seorang rombongan Bupati Irwan yang ikut berkunjung ke desa-desa di pulau terluar itu.

Semenisasi Hancur

Jalan-jalan di darat dari dan menuju desa-desa di pulau terluar itu, yang terbuat dari semenisasi kebanyakan sudah hancur. Batu dan pasir yang dulu saling mengikat, kini telah bercerai. Sehingga tinggal lobang-lobang yang sulit dilalui. Celakanya, besi yang dijalin dibagian bawah banyak yang menjulur keluar. Kondisi ini kian memperparah keadaan pejalan yang lewat di sana. Mereka harus berhati-hati memilih peletakan kaki di semenisasi itu agar kakinya tidak terpijak besi.

Sepanjang perjalanan yang kami lewati di pulau terluar itu, beberapa kali penumpang harus turun dari sepeda motor untuk mendorong sepeda motornya agar terbebas dari terjalnya jalanan semenisasi yang sudah hancur itu. Kondisi jejalanan kian parah bilamana di istu terdapat titian atau jembatan kayu.

Saat turun hujan lebat, hati makin tersentuh karena sepanjang jalan yang dilewati tak ditemukan tempat berteduh. Kiri dan kanan jalan hanya tersedia tanaman pohon sagu, karet atau kelapa. Itulah kisah duka kami alami saat mengikuti rombongan Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir yang berkunjung ke Desa Tanah Merah pekan lalu.

Walau demikian. Niat yang sudah bulat bertemu dengan warga tak menyurutkan langkah kaki bupati. Kendati dihadang beragam hambatan transportasi dan cuaca yang kurang bersahabat, Irwan tetap berteguh hati menuju Tanah Merah untuk melantik kepala desa. “Kasihannya rakyat sudah menunggu. Bagaimanapun saya harus sampai ke sana. Berjumpa warga dan berdialog dengan mereka,” kata Irwan kepada **AZAM** di sela perjalanan. Seorang staf bergegas mempayung Irwan dan istrinya, Nirwan Sari, yang ikut dalam rombongan itu.

Merangkai Pulau

Hujan deras terus jatuh dan menggugur tubuh orang nomor satu di Kepulauan Meranti itu. Kendati sudah berpayung diri, percikan air ditambah tempias jalanan yang becek tetap tak menyurutkan Irwan melanjutkan perjalanan. Staf di bagian humas, sejumlah wartawan termasuk kru **AZAM** yang ikut mendampingi Irwan, tak menyia-nyiakan moment bersejarah itu. Blit lampu kamera wartawan seakan tiada henti mengambil gambar langka itu.

“Kita lanjutkan perjalanan nanti terlambat,” tegas Irwan kepada rombongan. Ia bergegas menaiki sepeda motornya. Lalu sejurus, Nirwana Sari ikut pula naik dan berbonceng dengan suaminya. Nirwana dengan cekatan memegang payung dan menutup kepala Irwan dari terpaan air dan derasannya angin.

Di jalanan terlihat Nirwana Sari agak kesusahan memegang payung. Maklum satu waktu ia harus konsen mengatur pinggulnya dari jalanan yang berlobang, becek dan bergoyang. Di lain masa, wanita itu harus mengendalikan payung dari hembusan angin. Seketika ia terlihat

mengganti pegangan tangkai payung dari tangan kiri ke kanan. Kalau tangan kirinya memayungi Irwan, tangan kanan ia jadikan tempat bergantung memeluk pinggang suaminya. Begitu seterusnya.

Perjalanan itu sungguh menegangkan. Dengan penuh sabar, rombongan akhirnya memasuki Desa Tanah Merah. Usai melantik kepala desa, Irwan melanjutkan perjalanan ke Desa Bungur melintasi Desa Sonde di ujung Pulau Rangsang. “Di seberang itu kota Johor,” ujar Irwan kepada AZAM sambil menunjuk ke arah laut di Selat Melaka. Terlihat, ke arah yang ditunjuk Irwan, gedung-gedung pencakar langit negara tetangga Malaysia itu tampak julang menjulang.

Kunjungan Irwan ke pulau-pulau terluar itu bukan pertama ia lakukan. Selama menjabat, lelaki asal kelahiran Meranti itu termasuk rajin mengunjungi desa-desa. Itu pula sebabnya, ia dekat dengan warga, dan memahami geografis wilayah yang dipimpinnya. Irwan mengaku, dirinya bertekad merangkai pulau-pulau itu menjadi satu kesatuan yang tak sulit ditempuh. “Mimpi saya, merangkai pulau-pulau ini menjadi kesatuan yang utuh di Kepulauan Meranti. Tentu dengan membangun infrastruktur yang layak,” tukas Irwan Nasir.*

KPU Butuh Angkutan Tepat dan Cepat

Salah satu tantangan besar bagi KPU Kabupaten Meranti adalah akses jalan menuju desa-desa di pulau terluar. Tepat dan cepat walau berbiaya tinggi.

Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Riau yang wilayahnya terdiri dari pulau-pulau. Karena berbilang daerah kepulauan, banyak desa-desa di Meranti yang sulit dijangkau apalagi menggunakan jalan darat. Solusinya, tentu memanfaatkan jalur transportasi laut dan, berikutnya naik ke darat. Dari sini, baru naik sepeda motor menuju desa yang dituju.

Itupun harus sepeda motor yang bagus, kata Anwar Basri, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Meranti. Sebab hampir semua jalan yang ada di pulau terluar dalam wilayah kabupaten termuda di Riau itu rusak parah. Misalnya jalan menuju ke Pulau Padang, Pulau Merbau dan Pulau Rangsang. “Semua itu tentu membutuhkan *cost* yang tinggi,” kata Anwar Basri kepada **AZAM** di Selatpanjang pekan lalu. Anwar didampingi Yusli (Devisi Data), Dadang (Devisi Sosialisasi dan SDM, serta Abu Hamid dari Devisi Logistik.

Menurut para Komisioner KPU Meranti itu, medan daerah yang paling berat adalah daerah dimana terdapat Suku Akit, atau biasa diistilahkan dengan Komunitas Adat Terpencil (KAT). Suku ini merupakan suku asli di Kabupaten Meranti. KAT terdapat di semua kecamatan dalam wilayah Kepulauan Meranti.

Meski jumlahnya tak begitu banyak, tetapi penyebaran KAT cukup signifikan. “Kita harapkan dukungan semua pihak, terutama *stakeholder* agar penyelenggaraan pemilu kadea berjalan baik,” ujar Anwar Basri diamini Yusli, Abu Hamid dan Dadang.

Dukungan dimaksud Anwar Basri berupa ketersediaan transportasi dan petugas yang nanti dapat bekerja sama dengan KPU saat pencoblosan kertas suara di hari “H”. Kita butuh transportasi cepat dengan konsekwensi biaya tinggi,” tegasnya lagi.

Anwar mengakui besarnya dukungan Pemkab Meranti untuk penyelenggaraan pilkada. Terutama masalah pendanaan di APBD. “Soal dana tidak ada masalah bahkan kita termasuk kabupaten paling siap di Riau melaksanakan pemilukada serentak,” ungkap Anwar. Termasuk rekrutmen badan ad hoc dan PPK di setiap kecamatan. Semua sudah dibentuk dan dilantik.

Begitupun pendaftaran calon independen. Setakat ini tidak ada kendala. “Kita sudah umumkan dan membuka pendaftaran bagi perseorangan yang hendak menjadi peserta. Namun setakat ini belum ada yang mendaftar,” tukas Anwar Basri. Anwar memprediksi, melihat situasi politik yang masih *adem ayem*, boleh jadi tidak ada calon independen yang mendaftar. “Ada pernah yang bertanya dan berkonsultasi ke kami soal persyaratan calon independen, tetapi hingga sekarang tak ada tindak lanjutnya,” katanya.

Walau demikian, lanjut Anwar, peserta pilkada tetap bakal ramai. Malah bisa lima pasang. Prediksi itu berdasarkan perolehan kursi oleh masing-masing partai politik di DPRD Kabupaten Meranti. Yakni, PAN lima kursi. Gerindra, Demokrat dan PDIP empat kursi, Golkar, PPP dan Hanura tiga kursi. PKB dua kursi, PKS dan PBB masing-masing satu kursi.

Satu perahu bernilai enam kursi. Karena tak ada satu partai yang mencukupi syarat mengusung calon maka partai-partai harus membangun koalisi. Dengan nilai satu perahu enam kursi, sementara jumlah kursi ada 30, “makanya saya sebut calon yang bertarung bisa mencapai lima pasang,” papar Anwar Basri optimis.*

Irwan Nasir: Banyak Cita-cita Saya Belum Terwujud

Selepas ba'da Maghrib, *speed* bertuliskan: 'Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti' bersandar di Pelabuhan Tanjung Buton, Kecamatan Sungai Apit. Sejurus kemudian, Bupati Drs Irwan Nasir, MSi bersama rombongan langsung bergegas berjalan menghampiri *speed* yang sudah mulai menyalakan mesinnya.

Sembari berjalan ke arah *speed*, Bang Irwan sapaan akrab bupati muda nan enerjik ini menghampiri **Zainul Aziz** dan **Benny Hendra** dari **AZAM**. Lalu orang nomor satu di Meranti itu mengajak keduanya mengikuti berbagai kegiatan yang sudah ia jadwal. "AZAM apa kabar? Ikut ya, kita akan turun ke masyarakat dalam beberapa hari ke depan," kata Irwan. Tanpa basa basi, kru redaksi itu mengikuti jejak langkah Irwan memasuki *speed*.

Satu jam usai perjalanan, *speed* yang membawa rombongan Irwan bersandar di Pulau Merbau. Kehadirannya di pulau itu untuk memenuhi undangan Isra Mi'raj. Hari kedua, lagi-lagi Irwan membawa **AZAM** mengunjungi beberapa desa di pulau terluar, seperti Centai, Tembukut, Rangsang Barat, Tanah Merah juga Rangsang Pesisir. Dalam waktu-waktu mengikuti perjalanan ke masyarakat ini, **AZAM** mendapat kesempatan berbincang-bincang dengan Irwan. Berikut petikannya.

Selalu turun ke masyarakat tanpa mengenal waktu dan tempat. Apakah ini sebuah rutinitas keseharian Anda?

Tidak juga. Tapi ini hampir setiap hari saya lakukan kalau tidak dinas ke luar kota. Geografis Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari pulau-

pulau. Ada sekitar lima atau enam pulau, tapi pulau besarnya hanya satu. Ada tiga kecamatan dan satu kecamatan terdiri 10 sampai 12 desa. Desanya pun besar-besar dengan letak yang sangat berjauhan. Ini tantangan yang kita hadapi.

Bagaimana Anda mendesign pembangunan di Meranti?

Design pembangunan Kepulauan Meranti kita fokuskan ke beberapa bidang. Diantaranya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Jalan yang kita utamakan adalah jalan poros yang menghubungkan antardesa atau kecamatan sehingga akses bisa terbuka. Kemudian listrik. Jadi ketika kita turun beberapa waktu lalu, Anda dapat melihat langsung di desa-desa sudah dialiri listrik. Itu sesungguhnya bukan listrik dari PLN melainkan dibangun Pemkab Meranti. Terus terang ini sangat memberatkan. Coba Anda bayangkan dengan kondisi pulau yang begitu besar, desa yang begitu banyak, berapa dana yang dihabiskan untuk membangun itu. Begitu pula air bersih, memang belum ada air bersih yang dikelola Perusahaan Daerah Air Minum. Tapi yang kami lakukan adalah membangun sumur-sumur bor yang didistribusikan ke rumah warga dan membagikan alat-alatnya untuk penampung air hujan. Lalu melalui bantuan APBN, kita buat Program Air Minum Berbasis Masyarakat. Masalah kesehatan, kalau dulu puskesmas masih terbatas kini sudah ada di setiap desa, dan sekarang kita sedang membangun sembilan puskesmas rawat inap di kecamatan-kecamatan. Selain itu, membangun 59 unit puskesmas. Dan, sekolah di setiap desa.

Bagaimana dengan program peningkatan ekonomi masyarakat?

Dalam mengelola sebuah pemerintahan sebetulnya ada dua sisi. *Pertama*, sisi politik yakni bagaimana kita menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat. Kemudian bagaimana pula kepemimpinan kita bisa menenangkan masyarakat. *Kedua*, sisi bisnis, bagaimana kita mengembangkan perekonomian sehingga berdampak kepada

kesejahteraan masyarakat. Dari sisi itulah saya selalu memposisikan diri sebagai *menejer marketing*. Saya memasarkan Kepulauan Meranti keluar, karena selama ini orang kan tidak tahu dimana dan seperti apa Meranti. Pernah suatu ketika saya bertemu teman-teman di Jakarta, mereka sempat berseloroh kepada saya, dimana Kepulauan Meranti itu, kok tidak ada di *Google* ya, akhirnya hal-hal seperti inilah yang sering memotivasi saya supaya orang-orang tahu Kepulauan Meranti. Makanya kami berusaha membangun bagaimana bisa selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat, pengusaha dan investor secara maksimal. Kita juga tetap memperhatikan kerapian keuangan agar tetap meraih WTP sehingga walaupun miskin, namun Meranti tetap menjadi perhitungan dan incaran investor.

Dalam setiap kesempatan Anda selalu mengatakan Program Meranti Mandiri (PMM), bisa Anda jelaskan seperti apa program tersebut?

Dulu di pedesaan ada namanya Program Nasional Pembangunan Mandiri (PNPM). Ini merupakan program pusat yang di *sharing*-kan dengan APBD, dan itu sangat menyentuh masyarakat. Rata-rata kualitas bangunan PNPM lebih bagus karena dikerjakan sendiri secara swakelola oleh warga. Akan tetapi begitu terjadi pergantian pemerintahan PNPM dihentikan. *Nah*, untuk menutupi PNPM yang kami nilai bagus itu, kami mengambil sikap mengalokasikan anggaran melanjutkan program tersebut. Jadi kalau dulu namanya PNPM sekarang PMM.

Apa tidak ada masalah dengan payung hukumnya?

Tidak ada masalah karena ini murni menggunakan APBD. Kalau APBD kan sudah ada aturan yang mengaturnya.

Apa keunggulan dari PMM?

Tahun 2015 PMM sudah mulai berjalan. Kalau dulu Meranti mendapat dana PNPM sekitar Rp67 miliar, *sharing* Rp35 miliar dari

pusat, dan Rp42 miliar APBD. Untuk PMM kita menganggarkan Rp144 miliar. Jadi setiap desa menerima Rp1,4-1,7 miliar, tergantung jumlah penduduk dan luas wilayah ditambah tingkat kemiskinannya. Makin banyak penduduk, makin tinggi kemiskinan anggarannya makin besar. Saya menilai lantaran PNPM sudah berhasil, namun tiba-tiba dihentikan, makanya saya mengambil inisiatif bagaimana program ini tetap berjalan, tapi tidak lagi menunggu pusat. Kita buat program yang hampir sama dengan nama PMM. PMM sangat membantu percepatan pembangunan di setiap desa, dan ini salah satu bentuk komitmen kita dalam pemerataan pembangunan hingga ke desa-desa dan pulau-pulau terluar di Meranti.

Di Meranti ada Suku Akit, apa program Anda untuk suku asli yang seolah semakin tersingkir itu?

Pertama-tama kita dorong bagaimana penduduk asli, terutama anak-anak, bisa menikmati pendidikan. Karena yang menyebabkan mereka tertinggal itu adalah masalah pendidikan. Tujuannya supaya masa depan mereka lebih baik. Anak-anak kita sekolahkan dan juga kita bangun pemukiman mereka. Sebab selama ini hidup mereka ada di tepi-tepi air dan di hulu-hulu sungai. Jadi dalam lima tahun ini kita sudah membangun beberapa ratus unit rumah untuk penduduk Akit dan mereka bermukim dalam satu kawasan. Juga membantu mereka menggunakan alat-alat industri dan pertanian supaya mereka bisa bersaing dengan masyarakat lain.

Lima tahun Anda menjadi Bupati, apa mimpi Anda yang belum terwujud?

Masih banyak sebetulnya cita-cita saya untuk Meranti namun belum tuntas semua karena keterbatasan waktu. Kalau kita lihat Kota Selatpanjang sebagai ibukota Kepulauan Meranti mungkin 80 persen jalannya sudah bagus. Di kecamatan Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Barat, di Pulau Padang, jalan poros sudah mulai bagus. Sisanya, Pulau Merbau baru sekitar 50 persen, Pulau Rangsang sebagai ibukota kecamatan kondisi

jalannya baru 30 persen yang bagus. Saya pikir ini harus dituntaskan sebab tanpa infrastruktur yang memadai akan dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Karena itulah saya kembali berniat maju menjadi calon Bupati Kepulauan Meranti lima tahun ke depan.

Jadi Anda positif maju sebagai calon bupati pada Pilkada 9 Desember depan?

Insyallah atas izin Allah SWT, saya akan kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Kepulauan Meranti, sebab masih banyak cita-cita saya belum terwujud untuk kemajuan Meranti.

Seperti apa persiapan Anda menghadapi Pilkada terutama dukungan partai politik?

Kalau dukungan partai politik *of the record* dululah tapi sampai hari ini Insya Allah jumlah perahu yang mendukung kita sudah lebih dari cukup.

Bisa Anda sebutkan parpol mana yang sudah mendukung Anda?

Nantilah saya sampaikan.....

Artinya, Anda sudah membangun komunikasi dengan beberapa parpol?

Sudah, kita sudah lakukan komunikasi politik dengan berbagai parpol dan sebagai partai pendukung minimal untuk syarat pencalonan, sudah terpenuhi.

Bagaimana dengan calon wakil yang akan mendampingi Anda?

Pada waktunya semua akan tahu, sekarang masih rahasia, *ha..ha..ha*. Karena saya bukan orang partai politik, jadi dalam hal menentukan siapa yang menjadi calon wakil untuk mendampingi saya, tentu harus

disetujui oleh partai pendukung. Kalau saya sampaikan sekarang ternyata nanti tidak cocok dengan partai pendukung, akan timbul masalah baru. Akan lebih baik kalau soal siapa wakil sudah disepakati, baru saya deklarasikan.

Bisa Anda beri bocoran kriteria calon wakil yang akan mendampingi Anda?

Saya pikir seorang wakil harus memahami bagaimana mengelola pemerintahan. Dia harus netral, dan sosok yang mampu berkomunikasi dengan semua kelompok masyarakat, di samping diterima semua kalangan.

Calon wakil yang netral seperti apa yang Anda maksud?

Kalau saya mengambil calon wakil dari partai politik, itu akan terasa berat. Karena di Meranti tidak ada satupun parpol yang punya perahu cukup mengusung calon sendiri. Jadi kalau masing-masing parpol minta posisi wakil tentu ini akan sulit. Makanya saya pikir calon wakil lebih baik dari posisi yang netral, dan saya lebih cenderung dia dari kalangan birokrat. Sejauh ini nama-nama yang masuk sudah banyak, nantilah pada waktunya semua akan tahu.

Kira-kira kapan Anda mengumumkan partai pendukung dan juga calon wakil?

Dalam waktu dekat, Insha Allah dua minggu ini atau bulan puasa lah.

Anda sepertinya masih diinginkan masyarakat kembali memimpin Kepulauan Meranti, komentar Anda?

Kalau masyarakat menilai saya seperti itu, *alhamdulillah* ternyata kerja keras Pemkab Kepulauan Meranti hasilnya bisa dirasakan masyarakat walaupun kita paham dalam proses pembangunan ada yang puas dan

ada yang tidak puas. Kalau daerahnya sudah terbangun lebih dulu, tentu mereka merasa puas. Sebaliknya bagi daerah yang belum mendapat giliran, pasti mereka tidak puas. Tapi kita hadir bukan untuk memuaskan semua orang, akan tetapi pembangunan ini merupakan sebuah proses melakukan peningkatan dan pembenahan. *Nah*, disebabkan apa yang saya impikan itu belum tercapai sebagaimana saya harapkan, makanya saya bertekad maju lagi supaya yang tersisa bisa dituntaskan.

Jika Anda kembali diberi kepercayaan oleh masyarakat, apa program prioritas Anda berikutnya?

Saya akan kembali melanjutkan beberapa program yang belum selesai sambil melakukan penyesuaian-penyesuaian. Sekarang ini perkembangan situasi begitu cepat. Kadang ada hal-hal tertentu yang mungkin kini belum terpikirkan, tapi kelak jadi prioritas. Sekarang saya ingin menuntaskan dulu hal-hal yang sifatnya sangat mendasar dan menurut saya hal yang mendasar itu merupakan hak masyarakat yang harus disiapkan Pemerintah. Kalau tidak, inilah pemerintah yang dzolim saya rasa.

Sebentar lagi pilkada akan digelar, namun tanda-tanda ke arah itu belum terlihat di Meranti, apakah tidak ada calon lain yang muncul di samping Anda?

Mungkin saja kondisi Meranti agak beda dengan daerah lain. Kalau di daerah lain sudah terpasang spanduk, baliho atau poster-poster balon, di Meranti hampir kita temukan tidak ada satupun atribut yang berkaitan dengan proses pilkada. Makanya banyak yang bertanya, apakah Meranti ikut pilkada serentak atau tidak. Saya memang menginginkan Pilkada Kepulauan Meranti berlangsung sejuk, aman, dan damai. Dan proses kesejukan ini sangat tergantung kepada calon *incumbent*. Kalau *incumbent* memulainya dengan masif, pasti akan timbul reaksi, tapi ketika *incumbent* bersikap biasa-biasa saja, maka lawan politik juga akan berpikir, *incumbent* saja tidak berlebihan menghadapi pilkada, *kok* calon lain yang bukan

siapa-siapa justru malah berlebihan.

Apakah ini salah satu strategi politik Anda?

Iya, saya akui ini salah satu strategi yang saya lakukan supaya pilkada berjalan tenang tanpa harus merusak kerukunan dan kedamaian yang sudah ada di tengah masyarakat.

Apa harapan dan himbauan Anda kepada masyarakat Meranti menghadapi pilkada?

Harapan saya sudah sering saya sampaikan dalam forum-forum resmi, bahwa masyarakat jangan sampai terpecah belah menghadapi pilkada. Artinya, jangan hanya gara-gara pilkada masyarakat jadi terkotak-kotak. Saya selalu menghimbau masyarakat silakan menyalurkan aspirasi sesuai hati nurani masing-masing dengan tetap mengedepankan silaturahmi, siapapun yang didukung silakan, tapi jangan sampai menimbulkan gesekan-gesekan di tengah masyarakat. Jangan saling hasut-menghasut, adu domba dan saling berbenturan.*

Masyarakat Berharap Irwan Lanjutkan Kepemimpinan

Pilkada serentak 9 Desember di Kepulauan Meranti, sepertinya masih menjadi milik Bupati Irwan Nasir. Sebagian besar masyarakat masih mengharapkan kepemimpinannya di periode kedua.

Progres pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti lima tahun ke belakang telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Salah satu indikatornya adalah menurunnya angka kemiskinan dari 45 menjadi 35 persen. Itu artinya, kesejahteraan masyarakat berangsur-angsur membaik.

Setidaknya itulah pendapat dilontarkan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Fauzi Hasan, SE, saat diminta **AZAM** pandangannya terkait kondisi terkini kabupaten termuda di Riau ini. “Kurun waktu lima tahun Kepulauan Meranti mengalami berbagai kemajuan di berbagai bidang. Terutama menyangkut persoalan kemiskinan yang progresnya cukup bagus. Begitu juga alokasi program APBD yang lebih memprioritaskan pada pembangunan kerakyatan,” jelas Fauzi Hasan.

Ketua DPRD ini mengapresiasi Pemkab Meranti yang mengalokasikan anggaran sangat besar bagi pembangunan di setiap desa. Tak tanggung-tanggung satu desa menerima dana Rp1,4 miliar pertahun untuk percepatan pembangunan.

Persoalan listrik juga teratasi secara baik. Hingga hari ini sudah 90 persen lebih masyarakat pedesaan menikmati listrik. “Ini bentuk perhatian serius Pemkab Meranti melayani masyarakat. Ke depan tentu kita berharap seluruh lapisan masyarakat bisa menikmati listrik selama 24 jam,” kata Fauzi.

Selama Irwan Nasir memimpin Kepulauan Meranti, sebut Fauzi, hubungan antara eksekutif dan legislatif berjalan baik dan harmonis sehingga dua lembaga poros kekuasaan ini saling melengkapi dan mengisi satu sama lain.

Fauzi memastikan kinerja di legislatif tidak banyak berpengaruh dengan adanya koalisi KMP dan KIH. “Kami disini tetap sama-sama bekerja dan bersatu bersama pemerintah daerah memajukan dan membangun Meranti,” ungkapnya.

Diakuinya, memang masih ada beberapa persoalan yang menjadi fokus perhatian bersama untuk segera dibenahi. Antara lain, masalah akses jalan antara satu desa dengan desa lain. Menurut Fauzi, penyebab kenapa persoalan belum dapat teratasi, karena faktor geografis Meranti yang terdiri dari pulau-pulau sehingga memerlukan biaya pembangunan yang cukup besar.

Keterbatasan anggaran ini ditambah lagi pemotongan alokasi anggaran oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp300 miliar lebih, dijelaskan Fauzi, menjadi salah satu sebab belum optimalnya pembangunan di Kepulauan Meranti.

Terkait figur bupati mendatang, Fauzi menyakinkan seperti masyarakat masih mengharapkan kepemimpinan Irwan Nasir terus dilanjutkan pada periode kedua. Masih banyak bengkalan-bengkalan tugas yang belum tuntas. Politisi dari PAN ini juga menilai, sejauh ini suasana kebatinan politik relatif stabil. “Bupati *Incumbent* masih memiliki memiliki tingkat elektabilitas tinggi dari figur-figur lainnya. Dan, atas pertimbangan ini pula, PAN Kepulauan Meranti menjatuhkan pilihan kepada Irwan Nasir untuk dicalonkan kembali sebagai bupati. Semua tentu atas persetujuan DPP. Mudah-mudahan saja dukungan DPP sama dengan yang dikehendaki oleh daerah,” tambah Fauzi.*

Kalau Bisa Tingkat Estafet Jangan Pindah

Biasanya berganti pemimpin, berganti pula program pembangunan walau program itu sudah sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

Tak hanya pembangunan di bidang infrastruktur, peningkatan eksistensi kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Meranti juga mengalami banyak kemajuan. Pandangan itu dilontarkan Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Meranti, Ridwan Hasan.

Kepada **AZAM** Ridwan menilai, segala capaian dan keberhasilan yang telah diraih ini tentunya tidak lepas dari kerjasama semua unsur di Meranti. Mulai dari Pemerintah Kabupaten, DPRD, masyarakat, tokoh adat, sampai ke tokoh agama. Mereka saling bersinerji dan bahu membahu membangun. Yang tak kalah penting, tegas Ridwan, Bupati Kepulauan Meranti sekarang mampu menggandeng dan menjadi perekat diantara berbagai suku dan adat istiadat.

“Terus terang, sebagai bagian dari masyarakat Kepulauan Meranti, saya sangat bangga dengan berbagai kemajuan yang sudah dicapai. Masyarakat bisa hidup rukun tanpa pernah ada gesekan meskipun diantara mereka terdapat perbedaan agama dan adat istiadat. Kondisi ini harus tetap dipertahankan untuk menunjang pembangunan di Meranti,” ujarnya.

Menghadapi pilkada, Ridwan mengajak seluruh masyarakat Kepulauan Meranti sama-sama mensukseskan pesta demokrasi lima tahunan ini. Ia yakin, masyarakat sudah cerdas menyikapi situasi dan perkembangan politik yang terjadi. Mereka juga paham betul sosok dan kriteria pemimpin seperti apa yang diharapkan memimpin Meranti. “Masyarakat inginkan

sosok pemimpin yang mampu memberi kesejahteraan, yang tak hanya sekedar mengubar janji manis tetapi bekerja dengan bukti.

Figur Bupati Meranti mendatang adalah sosok yang memiliki kejujuran, berakhlakul kharimah dan juga amanah. Kriteria ini, menurut Ridwan, ada pada Irwan Nasir. Rasa hormat yang tinggi terhadap kepemimpinannya adalah sebagai bukti bahwa ia merupakan seorang pemimpin dan menjadi suri tauladan bagi masyarakat.

Lima tahun menjabat, lanjut Ridwan, suasana kebatinan masyarakat di Kepulauan Meranti sudah sangat tenang. Dan apa yang menjadi harapan masyarakat satu per satu sudah mulai terjawab. *Nah*, tinggal bagaimana lima tahun ke depan Meranti berkembang lebih baik lagi.

Itulah sebabnya Ridwan berharap, masyarakat lebih jeli dan cerdas memilih pemimpin. “Saya harapkan masyarakat mampu memilih pemimpin yang betul-betul sesuai dengan keinginan dan harapan kita lima tahun mendatang. Pemimpin yang benar-benar mampu melanjutkan tongkat estafet, dan kalau bisa tongkat itu jangan sampai berpindah ke orang lain. Sebab biasanya setiap berganti pemimpin, berganti pula program dan konsep pembangunan yang selama ini sudah sangat bagus,” papar Ridwan.

Ridwan menghimbau sekaligus mengajak seluruh masyarakat Meranti agar menjaga kedamaian dan ketenangan. Meski Meranti didiami berbagai suku (Melayu, Jawa, Minang, Batak, dan Suku asli) hendaknya kita tetap kompak dan sama-sama menjaga keharmonisan hubungan. Jangan sampai perbedaan pandangan dan dukungan dalam pilkada membuat masyarakat terkotak-kotak dan terpecah belah. “Mari kita jaga hubungan silaturahmi. Jangan pernah memadamkan perbedaan suku. Masyarakat harus bisa membuktikan bahwa perbedaan pilihan tidak membuat kita terpecah belah,” tuturnya.* ziz/ben

Pilihlah Pemimpin yang Berikan Bukti Bukan Janji

Nizam Munadi berpesan, dalam memilih pemimpin masyarakat harus lebih cerdas. Pilihlah pemimpin yang telah memberi bukti nyata. Bukan mengumbar janji-janji manis.

Menurut H. Nizam Munadi, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kepulauan Meranti, kerukunan hidup antarumat beragama sudah sangat terjaga dengan baik. Ini tidak lepas dari peran aktif Pemkab Meranti dalam memberikan bantuan baik berupa pendidikan ataupun anggaran untuk membangun berbagai kebutuhan umat beragama.

Nizam mengapresiasi Pemkab Meranti atas upaya membangkitkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan sehingga tercipta kerukunan dan kedamaian antarumat bergama. Dan, suasana ini telah memberi konstribusi positif bagi Pemkab dalam menjalankan program pembangunan yang telah direncanakan.

“MUI Kepulauan Meranti memberikan apresiasi tinggi kepada Pemkab dalam menegakan keadilan dan asas pamarataan diantara umat beragama. Meski Meranti dihuni berbagai suku dan agama namun suasana harmonis masih tetap terbina dan terjaga hingga sekarang,” ujar Nizam kepada **AZAM** di Selatpanjang pekan lalu.

Dia menilai, usaha dan kerja keras Pemkab Meranti mensejahterakan masyarakat pantas dihargai. Karena sebelumnya Meranti hanyalah sebuah daerah terpencil yang terisolir dan jauh dari pembangunan. “Masyarakat di sini seolah-olah termarginalkan. Namun tidak demikian dalam kurun lima tahun terakhir,” ungkapnya.

Meranti dulu berbeda dengan Meranti kini. Meranti sekarang sudah menjelma menjadi Kabupaten yang lebih baik dan maju. Bahkan kabupaten ini mampu mensejajarkan diri dengan kabupaten lain yang lebih dulu dimekarkan. Karena itu, Nizam berharap kepada seluruh masyarakat Kepulauan Meranti agar tetap sama-sama bahu membahu membantu Pemkab mewujudkan Meranti yang lebih maju sehingga masyarakatnya dapat hidup sejahtera.

Terkait pilkada, Ketua MUI ini menghimbau masyarakat tetap menjaga perdamaian dan keharmonisan diantara sesama umat beragama. Jangan terpengaruh oleh berbagai hasutan dari pihak-pihak yang mengambil keuntungan sehingga pada akhirnya, dapat merusak dan memecah belah persatuan yang selama ini telah terjaga secara baik.

“Kita tentu tidak ingin, gara-gara mencari pemimpin baru lalu merusak tatanan dan kerukunan hidup antarumat beragama. Makanya saya mengajak seluruh masyarakat mari sama-sama kita jaga kerukunan dan persatuan yang sudah baik, jangan buat kagaduhan hanya karena memilih seorang pemimpin,” ujarnya.

MUI Meranti, ditegaskan Nizam, tidak memiliki kriteria khusus calon bupati dan wakil bupati Meranti mendatang. Namun yang paling penting, pemimpin itu harus berakhlak yang baik, memiliki niat memajukan kampung dan mau mendengar keluhan masyarakat. Juga memiliki tujuan dan visi yang jauh ke depan.

“Siapa pun yang terpilih menjadi bupati silakan saja. Kita cuma berharap, masyarakat memilih dengan pilihan yang cerdas. Pilihlah calon pemimpin yang telah memberi bukti nyata memajukan Meranti, bukan mengumbar janji-janji manis,” tutur Nizam. Sebab, salah dalam memilih pemimpin, masyarakat sendiri yang mananggung dan merasakan akibatnya.*

Kerja Keras Irwan Diapresiasi Masyarakat

Dari daerah yang dulunya tak terlacak oleh google, kini Kepulauan Meranti tumbuh menjadi ladang buruan investor. Bupati Irwan Nasir pun menuai banyak pujian.

Belum lama berselang, Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat penghargaan sebagai daerah yang layak dan paling diminati investor. Pertumbuhan media massa di 'Negeri Sagu' itu juga lumayan pesat. Jika dulu wartawan enggan ditugaskan ke daerah ini, sekarang media cetak, online, elektronik bahkan tv sudah tayang bahkan berkantor di Meranti.

Semua perkembangan dan kemajuan itu diraih karena kegigihan Bupati Irwan Nasir dalam mewujudkan mimpinya. Sehingga ia sering mendapat acungan jempol dari sejumlah tokoh. Idris Syam, misalnya, wartawan senior yang berdomisili di Meranti menyebut, ia cukup bangga ketika teman-temannya memuji Bupati Kepulauan Meranti.

"*Your Bupati is good,*" ujar Idris Syam meniru ucapan teman-temannya yang berkomentar usai menyaksikan dialog Irwan di salah satu stasion tv nasional dalam program *economic chalangger*.

Pujian terhadap Irwan juga muncul dari mantan Bupati Bengkalis Fadlah Sulaiman. Fadlah pernah menyatakan, sejak dipimpin Irwan kabupaten ini seolah terus berpacu mensejajarkan diri dengan daerah lain di Riau.

Perjuangan Pemerintah Kabupaten Meranti dan seluruh unsur di dalamnya, menurut Fadlah, sudah dapat terwujud. Berbagai karya pembangunan oleh Irwan terlihat jelas di mata masyarakat. "Luar biasa, barangkali itulah kata-kata yang tepat melihat kondisi dan perkembangan Meranti sekarang," ujarnya.

Fadlah yakin, dengan potensi yang dimilikinya, Kabupaten Meranti mampu berkembang lebih maju. Minyak bumi dan gas alam, terdapat di daerah kawasan Pulau Padang. Di kawasan ini juga telah beroperasi PT Kondur Petroleum yang mampu memproduksi 8500 barel/hari. “Ini salah satu potensi sumber daya alam yang jika dikelola secara baik akan memberi kontribusi besar bagi kemajuan Meranti,” ungkapnya.

Meranti juga memiliki Selatpanjang sebagai kota perdagangan. Geliat kota ini terus meningkat sejak Meranti melepaskan diri dari Bengkalis. Kebijakan Pemkab Meranti dalam menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif, membuat Selat Panjang berkembang pesat. Jaminan keamanan dunia usaha dan investasi, mampu menarik investor menanamkan modal di kota itu.

Selatpanjang tak cuma menjadi magnet bagi aktivitas dunia perdagangan, akan tetapi turut menarik pencari kerja ke kota ini. Dampak dari situasi ini, menyebabkan pertumbuhan penduduk di Selat Panjang terus meningkat. Ini menunjukkan pesatnya pertumbuhan penduduk di Selatpanjang pasca pemekaran. “*Nah*, potensi seperti ini mampu dikelola secara baik sehingga berkontribusi luar biasa bagi perkembangan di Kabupaten Kepulauan Meranti,” kata Fadlah kepada AZAM.

Hal senada juga pernah diungkap mantan Bupati Bengkalis Azaly Djohan. Menurut Azaly, sejak ditetapkan sebagai daerah otonom, Meranti mengalami kemajuan yang sangat pesat. Infrastruktur jalan dan jembatan telah membuka akses ke wilayah ini lebih cepat. Meranti juga mengalami peningkatan di sektor ekonomi dan investasi, perkebunan dan pertanian.

Azaly mengapresiasi keberhasilan Meranti mempromosikan produk-produk sagu hingga ke tingkat nasional, bahkan Pemerintah Kabupaten telah pula memprogramkan sagu sebagai pangan nasional pengganti beras. “Sagu Meranti sudah dikenal hingga ke manca negara. Itu bisa diamati dalam festival sagu nusantara di Jakarta yang dihadiri beberapa duta besar negara sahabat,” ungkap Azaly.* [Jiz/ben

Bupati Meranti Berpulang Pada Masyarakat

Mantan Anggota DPRD Riau asal Kepulauan Meranti tak mempersoalkan jika masyarakat masih menginginkan incumbent kembali menjabat bupati. Sebab mereka lah yang tahu siapa pemimpin yang ideal di matanya.

Sebelum berpisah dari Kabupaten Bengkalis akhir 2008, Kepulauan Meranti hanyalah sebuah kecamatan kecil yang jauh dari sentuhan pembangunan. Itu disebabkan, antara lain, kondisi alam dan geografis daerahnya yang berpulau sehingga akses dari dan menuju ke sana sangat sulit.

Tetapi setelah menjadi daerah otonom, Kepulauan Meranti mengalami kemajuan sangat pesat terutama Selatpanjang, ibukota kabupaten. Menurut salah seorang tokohnya, Zulkarnain Nurdin, SH., MH, perjuangan pemerintah bersama masyarakat Meranti berangsur-angsur mulai terwujud. Ia yakin, kelak Meranti mampu tumbuh dan berkembang jauh lebih pesat dari hari ini. Potensi dan sumber daya yang dimilikinya akan mampu mensejajarkan Meranti dengan daerah lainnya di Riau.

“Saya yakin, beberapa tahun ke depan Meranti mampu berkembang lebih pesat lagi. Mengingat potensi dan sumber daya alam yang dimiliki sangat luar biasa, baik di sektor migas maupun bahari. Di migas telah berdiri PT Kondur Petroleum yang memproduksi minyak 8.500 barel perhari. Selatpanjang juga telah menjelma menjadi kota perdagangan,” ujarnya.

Pertumbuhan Selatpanjang, lanjutnya, terus mengalami peningkatan. Kota ini tidak hanya menjadi magnet bagi aktifitas dunia perdagangan.

Namun turut diincar para pencari kerja. Dampak dari semua ini jelas membuat jumlah penduduk Kota Selatpanjang mengalami peningkatan.

Zulkarnain berharap, Pemerintah Kabupaten Meranti mampu mewujudkan cita-cita dan harapan pendiri kabupaten ini sehingga apa yang sudah mereka korbankan memperjuangkan terbentuknya Meranti, tidak sia-sia. Ia juga mengapresiasi Pemkab yang bersama masyarakat selalu menanamkan semangat kebersamaan dan persatuan untuk mewujudkan cita-cita bersama. “Saya memberi apresiasi kepada seluruh unsur yang terkait dalam kemajuan Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat sudah mulai terwujud,” ungkapnya kepada **AZAM** pekan silam.

Terkait digekarnya pilkada, lelaki yang berprofesi sebagai advocat ini menghimbau masyarakat Meranti hendaknya mampu memilih pemimpin yang berkualitas sehingga *output* pilkada berkontribusi positif bagi kemajuan Meranti. “Saya tidak bisa menilai mana yang bagus, semua tergantung masyarakat menentukan pilihan. Jika masih menginginkan bupati *incumbent* tetap menjadi pemimpin, itu tidak jadi persoalan asal amanah tersebut tetap dijalankan sebaik-baiknya,” pesan Zulkarnain. Yang penting masyarakat tetap menjaga ketenangan dan keamanan. Jangan sampai suasana yang sudah tenang dan aman sekarang rusak gara-gara berbeda pilihan.

“Perbedaan pilihan hal yang lumrah dalam berdemokrasi. Iklim demokrasi yang sehat harus menciptakan persaingan yang sehat pula.*

BAGIAN VIII



اشکاتن ذریات أنق ملایو



AZAM



**UJI NYALI
ANGGOTA DPRD
DI PILKADA**

Syafaruddin Poti

Zukri Misran

Indra Putra

Anggota DPRD, Mau Maju Mundur Dulu

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan legislator untuk mundur dari jabatannya sejak ditetapkan KPU atau KIP sebagai calon Kepala Daerah. Pasca putusan MK, anggota dewan yang sudah berniat maju, urung masuk arena pilkada karena ogah berhenti dari keanggotaan dewan.

Dalam pembacaan amar putusan, MK mengabulkan sebagian permohonan dari uji materi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang diajukan oleh Adnan Purichta Ichsan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan atau setidaknya berpotensi dilanggar dengan berlakunya norma pasal dalam UU 8 Tahun 2015 yang diuji pada perkara itu.

“Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” kata Ketua Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan amar putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu (8/7).

Pemohon mengajukan uji materi dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 7 huruf r dan Pasal 7 huruf s. Pasal 7 huruf s UU Pilkada 2015 tersebut dinyatakan oleh Mahkamah telah berlaku diskriminatif, karena tidak mengharuskan anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk berhenti dari jabatannya, melainkan

cukup hanya memberitahukan pencalonannya kepada pimpinan masing-masing.

“Terdapat potensi bahwa hak konstitusional pemohon akan dirugikan dan kerugian dimaksud, menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi,” kata Hakim Konstitusi ketika membacakan pertimbangan Mahkamah.

Petahana Dbolehkan

MK juga memutuskan keluarga petahana boleh mengikuti pemilihan kepala daerah. Dalam putusannya MK menilai bahwa syarat tidak punya konflik kepentingan dengan petahana bagi seorang calon kepala daerah, melanggar konstitusi. Tak hanya itu, MK juga berangapan bahwa pasal tersebut bersifat diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia.

“Pasal 7 huruf r Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah bertentangan dengan Pasal 28 j ayat 2 Undang Undang Dasar 1945. Pasal 7 huruf r itu mengandung muatan diskriminasi, dan telah diakui oleh pembentuk undangundang memuat perbedaan perlakuan yang semata-mata didasarkan atas status kelahiran dan kekerabatan,” ujar Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, saat membacakan pertimbangan hakim dalam sidang putusan uji materi UU Nomor 8 Tahun 2015 di Gedung MK.

Dalam Pasal 7 huruf r Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota disebutkan, bahwa yang dapat menjadi calon kepala daerah adalah yang memenuhi persyaratan, yaitu tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.

Dalam penjelasan UU, yang dimaksud dengan tidak memiliki konflik kepentingan itu mencakup tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu, kecuali telah melewati jeda satu kali masa jabatan.

Adnan menilai, aturan dalam pasal tersebut telah melanggar konstitusi. MK berpendapat pengawas pemilu seharusnya mampu mengawasi kepala daerah yang sedang menjabat. Dengan begitu, kepala daerah petahana tidak menggunakan kekuasaannya untuk menguntungkan keluarga atau kerabatnya yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

“Problem sesungguhnya adalah tidak optimalnya pengawasan terhadap petahana oleh institusi yang melakukan pengawasan pilkada,” ujar Patrialis Akbar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sempat mengeluarkan Surat Edaran tertanggal 12 Juni 2015, yang menjelaskan mengenai definisi petahana bagi kepala daerah. KPU harus merevisi surat edaran itu setelah putusan MK ini.

Mahfud Dukung MK

Putusan MK ini mendapat dukungan dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD. “Putusan MK ini sudah sangat tepat bahwa tidak boleh keluarga pejabat itu dilarang untuk menjadi calon,” kata Mahfud di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (8/7).

Sebab, lanjutnya, bisa saja kerabat dari pejabat tersebut memiliki kapasitas yang lebih baik. Oleh karena itu, ia menilai tepat langkah MK yang mengabulkan calon kepala daerah yang berasal dari keluarga *incumbent* maju sebagai kepala daerah. “Belum tentu juga dia didukung oleh kerabat, bisa jadi dia saudara tapi dia ingin mengganti kakaknya karena kakaknya dianggap kurang baik, itu bisa juga. Maka tidak boleh ada larangan dan MK sudah benar memutus itu,” jelas Mahfud.

Mahfud menjelaskan, hak setiap orang berpartisipasi dalam hukum dan pemerintahan pun terjamin dalam undang-undang. Dan, pemerintah dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur hal ini. Dalam PP tersebut dapat diatur sanksi bagi calon kepala daerah yang menggunakan fasilitas negara melalui petahana dalam melancarkan pencalonan pilkada.

“Pemerintah bisa membuat PP sebagai panduan melaksanakan itu bahwa apabila petahana atau calon menggunakan kedudukan petahan untuk mengambil keuntungan di situ bisa dibatalkan pencalonannya dalam proses apa pun,” jelas Mahfud. PP tersebut juga dapat dijadikan panduan bagi MK maupun pengadilan dalam memutus sengketa pilkada.*

Anggota Dewan Harus Serahkan SK Berhenti

60 hari setelah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DCT), calon kepala daerah yang berasal dari anggota DPRD, harus menyerahkan SK bahwa dia telah berhenti. Jika tidak, dianggap tidak memenuhi syarat.

Penegasan itu disampaikan DR. H. Nurhamin, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau kepada **AZAM** terkait keharusan mundur dari anggota dewan bagi calon kepala daerah. Menurut mantan Ketua KPU Kabupaten Kampar ini, ketentuan ini telah diatur melalui Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 yang telah direvisi menjadi Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015.

Dia mengatakan, Peraturan KPU itu merujuk kepada Undang Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilu. Keputusan KPU juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan seorang anggota dewan mundur jika mencalonkan diri jadi kepala daerah.

“Anggota dewan yang mencalonkan diri jadi kepala daerah diwajibkan mundur. Ini sudah keputusan final, tentang tata cara mengundurkan diri sudah diatur dalam Peraturan KPU,” ujar Nurhamin.

Nurhamin melanjutkan, bukti seorang anggota dewan mundur adalah dengan menunjukan Surat Keputusan (SK). Jika calon bersangkutan anggota dewan tingkat provinsi, maka SK-nya berasal mendagri, sedang anggota dewan kabupaten/kota SK-nya dari gubernur.

Dikatakan, ketika mendaftar ke KPU, seorang calon kepala daerah yang juga wakil rakyat, mungkin saja belum memiliki SK pengunduran diri. Karena SK nya dalam proses. Saat mendaftar menjadi calon, KPU hanya minta surat permohonan pengunduran diri.

“Jika DCT sudah ditetapkan, 60 hari setelah itu, tak ada lagi alasan, bukti pengunduran diri berupa SK sudah harus disampaikan ke KPU. Jika tidak ada, ia dianggap tidak memenuhi syarat sebagai calon,” ujarnya.

Nurhamin mengatakan, karena ketentuan ini baru saja ditetapkan, maka pihaknya harus segera melakukan sosialisasi. Buktinya, hari pertama masuk kantor setelah libur lebaran, pihaknya langsung mengundang KPU kabupaten dan kota ke KPU Provinsi Riau untuk menyatukan langkah.

KPU kabupaten dan kota, kata Nurhamin, diminta melakukan sosialisasi mengenai aturan tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak dimaksud adalah partai politik, penyelenggara pilkada dan pihak-pihak terkait lainnya.

“Kita harus bergerak cepat. Tanpa KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan Kota boleh melakukan sosialisasi terkait adanya aturan ini. Saya sendiri akan bersosialisasi ke Pelalawan, sedang di Kuansing, KPU di sana juga sedang melakukan sosialisasi,” ujar Nurhamin.

Apakah terkait aturan mundur untuk anggota dewan ini masih bisa berubah? Nurhamin mengatakan, ketentuan ini sudah final dan tak mungkin lagi berubah. Putusan MK harus dijalankan dan tak akan berubah dalam waktu dekat. Setiap bakal calon tentu sudah tahu aturan ini. Meski baru ditetapkan tetapi informasinya telah beredar luas di media.

Namun kalau ingin info lebih detil, KPU siap memberi sosialisasi. “Silakan menghubungi KPU atau mengikuti sosialisasi yang kami lakukan,” ujarnya singkat.*

Jangankan Jabatan, Nyawapun Diambil Allah Saya Siap

Zukri Misran menjadi calon Bupati Pelalawan dengan niat mulia ingin mensejahterakan masyarakat kendati harus melepas keanggotaannya di DPRD Riau.

Keseriusan anggota DPRD Riau, H Zukri Misran maju dan bertarung di Pemilukada Pelalawan, tak perlu diragukan lagi. Bersama PDI Perjuangan dan koalisinya, Zukri yang berpasangan dengan Anas Badrun telah cukup syarat menjadi calon, dan keduanya siap mendaftar ke KPU Pelalawan.

“Saya tetap istiqomah maju. *Alhamdulillah* dukungan parpol sudah cukup. Yang pasti dari PDIP lima kursi, Partai Demokrat dua kursi, PBB satu kursi, ditambah partai lain,” kata Zukri menjawab **AZAM** pekan silam.

Terkait adanya aturan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan setiap anggota DPR, DPD, Dan juga DPRD mundur dari keanggotaan karena mencalonkan diri sebagai kepala daerah, bagi Zukri peraturan itu tidak penting. Yang lebih penting adalah bagaimana bisa membuat orang bahagia.

Menurut Ketua DPC PDIP Pelalawan ini, jabatan hanya sarana. Dengan jabatan bupati, ia mengaku dapat leluasa dan memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk membuat orang sejahtera. “Kalau konsekuensinya harus menanggalkan jabatan, saya fikir kita harus ikhlas. Jangankan jabatan, nyawa saja diambil Allah SWT saya pun siap. Jadi tak perlu takut kalau kehilangan jabatan,” ujarnya.

Zukri berpendapat kalau ada niat dan kesempatan, kenapa harus takut kehilangan jabatan. Baginya yang paling penting adalah bisa membuat

banyak orang sejahtera, banyak orang tersenyum, dan banyak orang bahagia, dan kalau semua itu bisa dilakukan besar sekali ibadahnya.

Dengan keyakinannya, Zukri mengaku sejak awal putusan MK keluar, tidak ada keraguan sedikitpun dalam dirinya. “*Alhamdulillah* Allah SWT memberi saya ketenangan hati, tidak ada keraguan dan kebimbangan, karena yang dicari dalam hidup ini bukanlah jabatan, melainkan bagaimana hidup ini bisa bermanfaat bagi orang banyak,” tuturnya.

Memang jabatan sebagai anggota DPRD merupakan jabatan yang diincar banyak orang, sementara bertarung di pilkada akan ada konsekuensi yang diterima, kata Zukri. Tapi semuanya sudah diperhitungkan dan dipertimbangkan secara matang.

Terbitnya putusan MK, lanjut Zukri, tentu harus diiringi niat mulia, tidak hanya sekedar coba-coba atau main-main. Tanpa putusan MK sekalipun niat itu harus tetap ada, yang penting bekerja dan berusaha mengambil hati masyarakat melalui program-program nyata.

Salah satu yang mendorongnya ikut bertarung adalah ingin mengantarkan orang-orang miskin keluar dari kemiskinannya, baik itu miskin secara ekonomi, miskin secara infrastruktur, miskin secara kesehatan, miskin pendidikan maupun kemiskinan sosial lainnya. “Artinya saya punya konsep mengentaskan kemiskinan, dan itu menjadi fokus kita nanti. Juga meningkatkan ekonomi secara terukur dan tersistem,” ungkap Zukri lagi.

Pelalawan merupakan salah satu kabupaten yang berpotensi untuk berkembang lebih baik, baik potensi di bidang perkebunan, perikanan, juga potensi pertanian. “Saya maju dengan hati, saya membangun juga dengan hati. Saya hadir bukan untuk menikmati kekuasaan, tetapi menjadi sarana bagi masyarakat agar mereka keluar dari kemiskinan. Sudah sewajarnya masyarakat itu kaya dengan berbagai potensi yang dimiliki Pelalawan,” terang Zukri.*

“Apapun Resiko Politik, Saya Siap

Setelah mendapat ‘perahu’, Indra Putra mengaku siap maju dan bertarung di Pilkada Kuansing. Ia didukung sejumlah partai. Antara lain PAN, Nasdem, Hanura, Demokrat, PKS dan Golkar.

Pilkada Kabupaten Kuansing yang tak lagi diikuti calon *incumbent*, mendorong banyak figur maju. Salah satu diantaranya tokoh muda Indra Putra, ST, MT. Menariknya, meski usia terbilang muda, tapi anggota DPRD Riau ini cukup gesit mempersiapkan diri bertarung. Termasuk dalam urusan lobi melobi ke partai politik. Indra dikabarkan, telah memenuhi ambang syarat pencalonan, dan siap mendaftarkan diri menjadi calon Bupati Kuansing ke KPU.

Kepada **AZAM** Indra mengaku kepastian maju ditentukan oleh perahu dari partai politik sebagai partai pendukung, dan jelang tahap pendaftaran dukungan yang diperoleh sudah melebihi 20 persen dari perolehan kursi di DPRD Kuansing.

“*Insya Allah* saya maju, dukungan parpol sudah terpenuhi. Diantaranya PAN, Nasdem, Hanura, Demokrat, PKS dan Golkar,” kata Indra Putra. Soal putusan MK, bagi Indra itu tidak jadi masalah. Karena setiap orang yang maju tentu yakin dan optimis akan menang, termasuk saya,” tegas Indra lagi.

Indra memastikan kalau basis dukungannya di masyarakat cukup luas. Namun demikian ia tidak mengkotak-kotakan lapisan masyarakat, mana basis dan mana yang tidak. Sebab dirinya maju untuk kepentingan seluruh masyarakat. Bukan untuk kelompok-kelompok tertentu. “Basis kekuatan saya hampir merata di 15 kecamatan di Kabupaten Kuansing,” jelas Indra.

Soal calon pesaing di Pilkada Kuansing, menurut Indra belum bisa dipastikan, sebab masing-masing pihak mengklaim memiliki dukungan. Kepastian siapa-siapa saja pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada Kuansing dapat dilihat tanggal 26-28 Juli depan. Diantara rentang waktu itu akan ketahuan siapa-siapa saja yang mendaftar dan siapa yang tidak.

Keputusannya nanti 24 Agustus saat KPU menetapkan pasangan calon. "Sekarang kan belum bisa dipastiin, siapa yang menjadi pasangan calon dan ikut bertarung. Bagi saya tidak penting siapa yang menjadi lawan," tuturnya.

Ia hanya ingin memastikan bahwa dukungan dari partai politik kepada dirinya sudah sah dan resmi melalui surat DPP masing-masing partai politik. "Saya siap bertarung dengan siapa saja, dan saya tidak pernah melihat siapa yang menjadi pesaing saya. *Insyallah*, Senin, 27 Juli saya mendaftar ke KPU. Sebelumnya akan dilakukan dulu deklarasi pasangan calon," tukas Indra.

Terkait putusan MK yang mengharuskan dirinya mundur dari anggota DPRD Riau, Indra menilai bahwa MK sudah memberi putusan yang adil. Atas dasar putusan MK itu, setiap anggota DPRD yang hendak maju pasti berfikir beneran.

"Melalui putusan MK tidak ada lagi anggota dewan yang main-main atau sekedar coba-coba untuk maju sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepada daerah. Orang yang coba-coba akan merugikan partai politik saja. Jadi dengan putusan itu orang betul-betul berniat bulat untuk maju. Mundur dari jabatan sebagai anggota DPRD merupakan konsekuensi politik yang harus diterima.*

Niat Saya Tulus Membangun Rokan Hulu

Koalisi PDIP dan PAN siap mendaftarkan duet Syafaruddin Poti dan Erizal bertarung di Pilkada Rokan Hulu. Poti mengaku niatnya tulus dan ikhlas membangun ‘Negeri Suluk’.

Duet Syafaruddin Poti dan Erizal di Rokan Hulu mulai disosialisasikan. Diusung koalisi PDI Perjuangan dan PAN, Poti mengaku telah siap memasuki arena pemilukada. Bahkan, jauh-jauh hari lelaki yang pernah menjadi anggota DPRD Rohul ini mengaku sudah mempersiapkan diri. “Insya Allah saya siap maju dan bertarung. Dukungan sudah tidak ada masalah, PDIP enam kursi, PAN empat kursi,” kata lelaki yang akrab disapa Poti ini.

Kepada **AZAM** di Kantor DPD PDI Perjuangan Riau, Poti memastikan maju di Rohul bukan karena sebuah nafsu, tetapi disebabkan sudah tiga periode menjadi anggota DPRD Rokan Hulu. Ia ingin bersama-sama membangun ‘Negeri Suluk’ akibat ketidak-merataan pembangunan.

Yang namanya hidup, sebut Poti, semuanya punya konsekuensi. Kalau memang aturannya harus mundur dari anggota DPRD Riau, wajib hukum baginya mundur. Ini tentu dengan pertimbangan sejauhmana bisa berbuat sebagai anggota dewan dan sejauhmana pula dapat berbuat untuk kepentingan rakyat sebagai bupati. “Konsep saya adalah membangun kebersamaan dan menepis semua kesenjangan di Rohul,” tuturnya.

Perlu diketahui, lanjut Sekretaris Umum DPD PDIP Riau ini, Rohul milik semua masyarakat. Walaupun kabupaten ini banyak dihuni beragam agama dan suku (Batak, Minang, Melayu, Bugis, Mandailing) keragaman ini harus dimanfaatkan untuk membangun Rohul. Dan Poti yakin ia mampu menyatukan keberagaman puak itu.

Dari 156 desa di 16 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Rohul, menurut Poti, pembangunan di bagian perkotaan memang terasa geliatnya dan wajah Pasir Pengarayan terlihat indah. Akan tapi coba perhatikan desa-desa, semuanya belum tersentuh oleh pembangunan. Itulah sebabnya banyak harapan digantungkan masyarakat kepada dirinya.

“Kita tak bisa berbuat penuh karena kita bukan pengambil kebijakan. PDI Perjuangan yang lahir dari rakyat, karenanya program-program partai harus diorientasikan untuk kepentingan rakyat,” jelas Poti lagi.

Ke depan, bersama pasangannya Erizal, Poti bertekad memajukan Rokan Hulu dengan melengkapi semua infrastruktur. Di bidang ekonomi, tidak boleh ada lagi masyarakat yang tidak makan, yang tidak sehat, dan pelayanan kepada warga harus prima. Tidak boleh lagi ada warga Rokan Hulu yang tidak bersekolah. Bila kebutuhan ini sudah terpenuhi maka kesejahteraan akan dapat tercapai.

Setelah urusan ekonomi, kesehatan dan pendidikan ini terwujud, Poti akan menggali potensi ekonomi kerakyatan. PDI Perjuangan menawarkan Tri Sakti, yakni kita berdaulat di daerah sendiri. “Anda tahu kan sebagian besar warga Rokan Hulu menggantungkan kehidupan dari perkebunan kelapa sawit. Saat terjadi kesenjangan ekonomi diantara petani sawit, kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena kita bukan pengambil kebijakan. Itulah salah satu penyebab saya terpanggil maju menjadi Bupati Rokan Hulu dengan konsekuensi menanggalkan jabatan sebagai anggota dewan. Mudah-mudahan niat saya yang tulus dan ikhlas ini mendapat ridho Allah SWT dan Insya Allah rakyat akan memberikan amanah ini kepada saya dan Erizal,” ungkap Poti.*

Nasrun Berhenti dari Ketua DPRD

Tanpa ragu. Nasrul Hadi segera melepas jabatan ketua DPRD Rokan Hulu dan keanggotaannya di dewan. Ia memilih menjadi calon wakil bupati berpasangan dengan Hafith Sukri.

Ketua DPRD Rohul Nasrul Hadi mengaku siap mundur dari jabatannya karena mengikuti Pemilukada Rokan Hulu, 9 Desember depan. “Putusan MK itu konstitusional dan semua kita harus mematuhi, termasuk saya. Jika nanti pasangan kami (Hafith-Nasrul) resmi terdaftar sebagai pasangan calon di KPUD Rohul, saya wajib mengundurkan diri sebagai anggota dewan. Itu sudah ketentuan yang berlaku,” tegas Nasrul Hadi.

Bagi Nasrun, sikap politik maju ke arena pilkada harus ia ambil dengan segala konsekuensinya. Dan, tak ada alasan mundur dari pencalonan wakil bupati. Pencalonan ini sudah diputuskan oleh partai. “Saya bekerja sesuai petunjuk partai. Partai meminta saya maju di pilkada, saya harus patuh dengan keputusan itu,” ujar Nasrun Hadi.

Dijelaskan ketua DPRD Rokan Hulu ini, begitu Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa calon yang berasal dari anggota DPRD harus mundur dari jabatan, ia langsung berkoordinasi dengan partai. Partai kemudian tetap mendorongnya maju. Atas dasar itu pula, tekan Nasrul, dirinya bertekad bulat maju.

“Sikap ini sekaligus bentuk penghormatan dan loyalitasnya kepada partai, serta dukungan masyarakat yang cukup besar yang menginginkan pasangan kami memimpin Rokan Hulu ke depan. Dukungan tersebut datang silih berganti baik kepadanya maupun disampaikan melalui Hafith Syukri, langsung ataupun tidak langsung,” katanya.

Tekad itu cukup berdasar. “Kami tidak mau mengecewakan masyarakat. Apapun resiko atas pencalonan ini, saya siap, termasuk harus mundur sebagai ketua dan anggota dewan,” jelasnya.

Tak sampai disitu. Nasrun juga berkali-kali menyampaikan tekadnya itu kepada masyarakat. Misalnya ketika bersosialisasi di desa Kepenuhan yang dihadiri ribuan orang, di sana ia kembali mengukuhkan komitmennya maju berpasangan dengan wakil bupati Hafith Syukri, yang sekarang naik kelas menjadi calon bupati.

Adapun mundur menjadi anggota dewan, menurut Nasrul Hadi, merupakan bentuk dari tanggungjawab moral kepada masyarakat, yang sudah memilihnya menjadi wakil rakyat pada Pemilihan Umum 2014. Ia pun berkeyakinan, niat baiknya maju ke pilkada akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat Rokan Hulu.

Pemilihan kepala daerah, ditafsirkan Nasrun Hadi, tidak saja peristiwa bersejarah namun juga moment penting bagi dirinya masuk ke jajaran eksekutif Lewat eksekutif, ia akan memiliki kewenangan lebih besar membangun ‘Negeri Suluk’ itu. Melanjutkan dan meningkatkan pembangunan yang sudah dicapai oleh Bupati Achmad sekaligus membawa Rokan Hulu lebih maju lagi.

“Kita sudah lihat buah tangan Pak Achmad. Rokan Hulu berkembang pesat, perekonomiannya membaik, pelayanan kesehatan dan kualitas pendidikan juga meningkat. Apa yang sudah dicapai ini kita pertahankan dan kita tingkatkan supaya lebih baik lagi. Kami berharap, masyarakat menentukan pilihan secara tepat saat pencoblosan nanti. Yakni kepada pasangan Hafith Syukri dan Nasrun Hadi,” ungkapnyanya kepada **AZAM**.*

Aturan Ini Jadi Ajang Uji Nyali

Anggota dewan yang bertarung di pilkada harus siap dengan resiko kehilangan jabatan. Aturan ini sekaligus menjadi ajang uji nyali bagi legislator.

Mantan anggota KPU Kota Pekanbaru, Fachri Yasin menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan anggota DPR, DPD, dan DPRD mundur bila ingin maju sebagai calon kepala daerah. Ia menilai putusan itu sangat tepat.

Menurut Fachri, jika seorang anggota legislatif ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah ataupun wakil kepala daerah, sama artinya adanya perpindahan seseorang dari lembaga legislatif ke lembaga eksekutif. Dan melepas jabatan anggota dewan merupakan konsekuensi politik yang harus dijalani.

“Ketika seorang anggota dewan memutuskan maju menjadi calon kepala daerah, itu kan sama artinya pindah dari lembaga legislatif ke eksekutif. Jadi jabatan sebagai anggota dewan sudah tidak lagi melekat pada dirinya. Ini adalah sebuah konsekuensi politik yang harus mereka jalani,” kata Fachri kepada **AZAM** pekan silam.

Ia menilai, putusan MK merupakan sebuah kemajuan dalam konstitusi negara. Aturan ini akan menjadi ajang uji nyali bagi anggota dewan. Apakah berani menanggalkan status anggota dewan alias meninggalkan kursi legislatif lalu beralih meraih kursi eksekutif.

Semuanya sangat bergantung pada niat dan kalkulasi politik. Jika niatnya benar-benar mengabdikan untuk memberi yang terbaik, sebut Fachri, pasti mereka akan menerima segala konsekuensi meskipun harus rela

kehilangan jabatan sebagai anggota dewan. Sebab tujuan utamanya bukan jabatan. Jadi apapun resiko pasti akan diterima.

“Yang benar-benar ingin mengabdikan lewat jalur eksekutif dan yakin dengan kemampuan yang dimiliki, pasti mau dan bersedia melepaskan jabatan sebagai anggota dewan. Namun bila hanya sekedar coba-coba dan belum yakin dengan kemampuan yang dimiliki, ia pasti lebih mempertimbangkan jabatan sebagai anggota dewan. Ketika dia memilih untuk maju, ya harus konsisten. Kalah atau menang itu resiko politik. Jadi, tidak hanya sekedar uji nyali,” ujarnya.

Dosen Pascasarjana UIR ini yakin, dengan adanya putusan MK membuat anggota dewan yang berniat maju di pilkada melontar kritik habis-habisan. Bahkan ada yang menganggap putusan ini tidak adil karena merasa dihalangi untuk maju. Fachri menilai, justru putusan MK telah memberi rasa keadilan bagi seluruh lembaga yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Rasa keadilanlah yang menjadi pertimbangan MK mengeluarkan putusan tersebut. Selama ini, lanjut Fachri, setiap anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah tidak perlu mundur. Mereka hanya memberitahukan kepada pimpinan. Namun, tidak demikian bagi pegawai negeri sipil yang diharuskan mundur dari jabatannya sejak jadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Jadi dengan putusan MK itu, siapapun orangnya dan dari manapun mereka berasal, tetap harus melepas jabatannya bila hendak maju menjadi calon kepala daerah. Fachri menghimbau semua pihak menghormati putusan ini. Dan, jangan sampai putusan ini mengundang polemik serta kegaduhan politik yang lebih luas sehingga dapat mengganggu persiapan pilkada serentak yang saat ini sedang berjalan.

“Diharapkan proses pilkada serentak dapat menghasilkan pasangan kepala daerah yang lebih baik dan berkualitas untuk memperbaiki negeri ini,” tambah Fachri Yasin.*

Mereka Pasti Berfikir Ulang Maju ke Pilkada

Karena diharuskan mundur, peta politik jelang pilkada serentak sedikit berubah. Figur dari kalangan DPRD berpikir ulang maju menjadi calon bupati dan calon wakil bupati.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan setiap anggota DPR, DPD, dan DPRD mundur dari jabatannya sebagai wakil rakyat ketika mencalonkan diri dan ditetapkan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepada daerah, dinilai pengamat politik Riau, Drs Andi Yusran, MSi, sudah sangat tepat.

Menurut Andi Yusran, selain memenuhi rasa keadilan, putusan tersebut menjadikan anggota DPR, DPD dan DPRD benar-benar mempersiapkan diri dari semua aspek untuk bertarung dalam pemilu. Hal penting lainnya, mereka tidak bisa menggunakan fasilitas negara ataupun kekuasaan yang dimiliki untuk bermain diluar aturan yang ditetapkan.

Andi berpendapat, dihapuskannya hak istimewa para wakil rakyat ini memang cukup mengejutkan. Sebab selama ini, figur calon kepala daerah dari unsur DPRD kabupaten dan kota, DPRD Provinsi, DPD hingga DPR RI tak perlu mengundurkan diri.

Dan ketika gagal di pilkada, mereka bisa kembali menikmati posisinya sebagai wakil rakyat. Namun tidak demikian halnya dengan figur dari unsur Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri. Mereka harus rela menanggalkan jabatannya saat mendaftar ke KPU sebagai calon kepala daerah.

Bila dianalisis pasal 7 huruf s UU Nomor 8 Tahun 2015 memang terkesan diskriminatif karena tak mengharuskan anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah berhenti dari

jabatannya. Tapi setelah dikaji MK, Mahkamah kemudian berkesimpulan, legislator harus mundur dari jabatannya.

“Ini sudah memenuhi unsur keadilan. Setiap orang yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah harus mundur dari jabatannya. Jadi tak peduli lagi dari lembaga mana ia berasal,” kata Andi Yusran kepada **AZAM** pekan silam.

Seharusnya, jelas Andi Yusran, sejak awal undang-undang itu sudah bisa diterapkan, hanya saja UU Pemilu itu digodok di DPR yang *notabene* diisi oleh orang-orang partai, maka kepentingan partai lebih dominan. *Nah*, ketika putusan MK keluar, tidak ada lagi perbedaan calon yang berasal dari PNS, TNI, Polri dan juga anggota dewan.

Andi menilai, terbitnya putusan MK itu sekaligus merubah peta politik jelang pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember mendatang. Anggota dewan yang sebelumnya berancang-ancang akan maju kembali berfikir ulang. Mereka akan mengukur diri dan manakar sejauhmana kekuatannya jika ibertarung dalam pemilukada. Mereka tentu membutuhkan pertimbangan yang matang tanpa harus menuruti ‘syahwat’ politik.

“Jelas dengan putusan MK itu, membuat peta politik jelang pilkada serentak mengalami sedikit pergesaran. Calon dari kalangan anggota dewan akan jauh berkurang. Karena mereka pasti berfikir ulang untuk maju, sebab jabatan sebagai anggota dewan mereka peroleh dengan susah payah, dan usianya belum genap satu tahun,” terangnya.

“Sudah menjadi rahasia umum setiap pejabat publik yang bertarung di pilkada pasti akan menggerakkan berbagai kekuatan dan potensi yang mereka miliki. Ini pula yang menjadi pertimbangan MK mengharuskan seluruh pejabat publik mundur jika maju menjadi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah di pilkada,” tambah Andi Yusran.*

Kata Syamsul: Politik itu Strategi *Bung*

Syamsul Rakan Chaniago menyarankan, anggota DPRD yang mencalonkan diri maju ke pilkada hendaknya berhitung terlebih dahulu sebelum menyatakan mundur dari dewan.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan legislator mundur dari jabatannya mengundang pro dan kontra terutama dikalangan legislator. Yang kontra beralasan, putusan tersebut telah menghalangi hak-hak konstitusional mereka sebagai warga negara. “Sebenarnya itu aturan cukup menyulitkan anggota DPR dan DPRD,” kata anggota DPRD Riau, Makhmun Solikhin kepada **AZAM** pekan lalu.

Ini berbeda dengan putusan MK yang menghalalkan politik dinasti. Kata Makhmun, bila logika yang digunakan *linier* dengan politik dinasti, maka seharusnya tak ada ketentuan mundur bagi anggota DPR atau DPRD. Sebab logika yang dipakai dalam putusan itu adalah tidak boleh ada diskriminasi terhadap para calon, dan bahkan dalam proses demokrasi pilkada harus sebanyak mungkin melibatkan calon. Bila penghapusan larangan politik dinasti bertujuan menghilangkan diskriminasi calon dan memperbanyak kontestan, maka hal tersebut juga berlaku untuk calon dari DPR. “Namun demikian karena ini sudah menjadi putusan MK maka semua pihak harus menghormatinya,” tambah Sekjen DPD PDIP Riau ini.

Pengamat hukum yang juga tokoh masyarakat Riau, H Syamsul Rakan Chaniago SH MH, menilai, putusan MK dapat mendorong lahirnya kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkualitas.

“Itu dampak positifnya. Bila terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, mantan anggota legislatif itu diharapkan lebih baik,”

katanya.

Menurut SRC--sapaan akrabnya, anggota legislatif yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah di Riau maupun wilayah lain harus bekerja keras. Tanpa kerja keras dan strategi politik yang kuat mereka tidak akan dapat memenangkan pilkada. "Mereka kan sudah dapat mengukur kekuatan politiknya pada saat Pemilu Legislatif 2015. Tanpa kerja keras, membuat program yang disukai rakyat dan mendekati masyarakat, mereka tidak akan mampu meraih suara terbanyak," ujarnya.

Syamsul mengemukakan, putusan Mahkamah Konstitusi selain berdampak positif juga berdampak negatif. Calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang melepaskan jabatan sebagai anggota legislatif berpotensi menghalalkan berbagai cara memenangkan pilkada. Jika itu terjadi, suhu politik akan memanas, kondisi daerah pun tidak kondusif. "Sementara dampak negatifnya, masing-masing calon akan berjuang mati-matian memperebutkan kursi kepala daerah," ulas Syamsul Rakan.

Syamsul memprediksi, cukup besar peluang terjadinya konflik antarcalon dan antarpendukung karena calon yang kalah tidak mungkin duduk lagi sebagai anggota dewan maupun jabatan lain sebelumnya.

"Putusan MK yang mengharuskan anggota DPR, DPD, DPRD mundur karena maju pilkada serentak 9 Desember 2015 tentu di luar dugaan para politisi. Ada yang siap ada juga yang tidak. Yang siap, biasanya siap menjalankan putusan tersebut dan siap pula menang atau kalah di pilkada. Kalau kalah ia kehilangan jabatan di dewan, sementara yang tidak siap mengurungkan niat maju di pilkada lantaran tidak siap mundur dari jabatan anggota DPRD," ungkap Syamsul Rakan yang juga hakim tipikor ad hock di Mahkamah Agung ini.

Syamsul menyarankan, siapapun anggota dewan yang maju di pilkada hendaknya menghitung betul langkah politiknya sebelum memutuskan diri ikut ke pilkada. "Politik itu penuh taktik dan strategi bung," tukas Syamsul, *ha...ha...ha.**

Andaikan itu Saya, Lebih Baik tak Usah Ikut Pilkada

Politisi senior PPP Riau, H. Nurbay Juss menilai, putusan MK yang mengharuskan legislator mundur saat mencalonkan diri jadi kepala daerah, dinilai tidak tepat. Tapi apa nyana, untuk melawan tak ada daya. Lebih baik tidak usah ikut pemilukada.

“Saya tak habis pikir, atas dasar apa putusan ini ditetapkan MK. Jika saya punya kekuasaan, saya pasti melawannya. Tapi apa daya, kita tak akan bisa lagi menentang putusan ini,” tegas mantan anggota DPRD Riau ini.

Nurbay Juss mengaku dirinya bukan orang yang berlatar belakang pendidikan hukum. Baginya anggota dewan dipilih oleh rakyat dan bukan jabatan karir seperti di PNS.

“Biarkan rakyat yang menentukan. Jika dia tidak terpilih menjadi kepala daerah, seharusnya dia bisa kembali menjadi wakil rakyat. Tetapi dengan adanya putusan MK ini, maka seorang wakil rakyat yang telah mundur, tak mungkin lagi menjadi anggota dewan bila tidak terpilih menjadi kepala daerah dan atau wakil kepala daerah,” kata menjawab **AZAM** pecan lalu.

Ia menyarankan kepada wakil rakyat terutama anggota dewan dari PPP yang berniat mencalonkan diri menjadi bupati atau walikota agar berpikir benar-benar. Jangan karena mengharap menjadi bupati atau walikota yang belum tentu dapat, jabatan anggota DPRD menjadi taruhannya.

“Andaikan itu saya, maka saya tak akan maju menjadi kepala daerah. Untuk apa mempertaruhkan amanah sebagai wakil rakyat, sementara jabatan bupati atau walikota belum tentu kita dapatkan,” tegas Nurbay

Juss lagi.

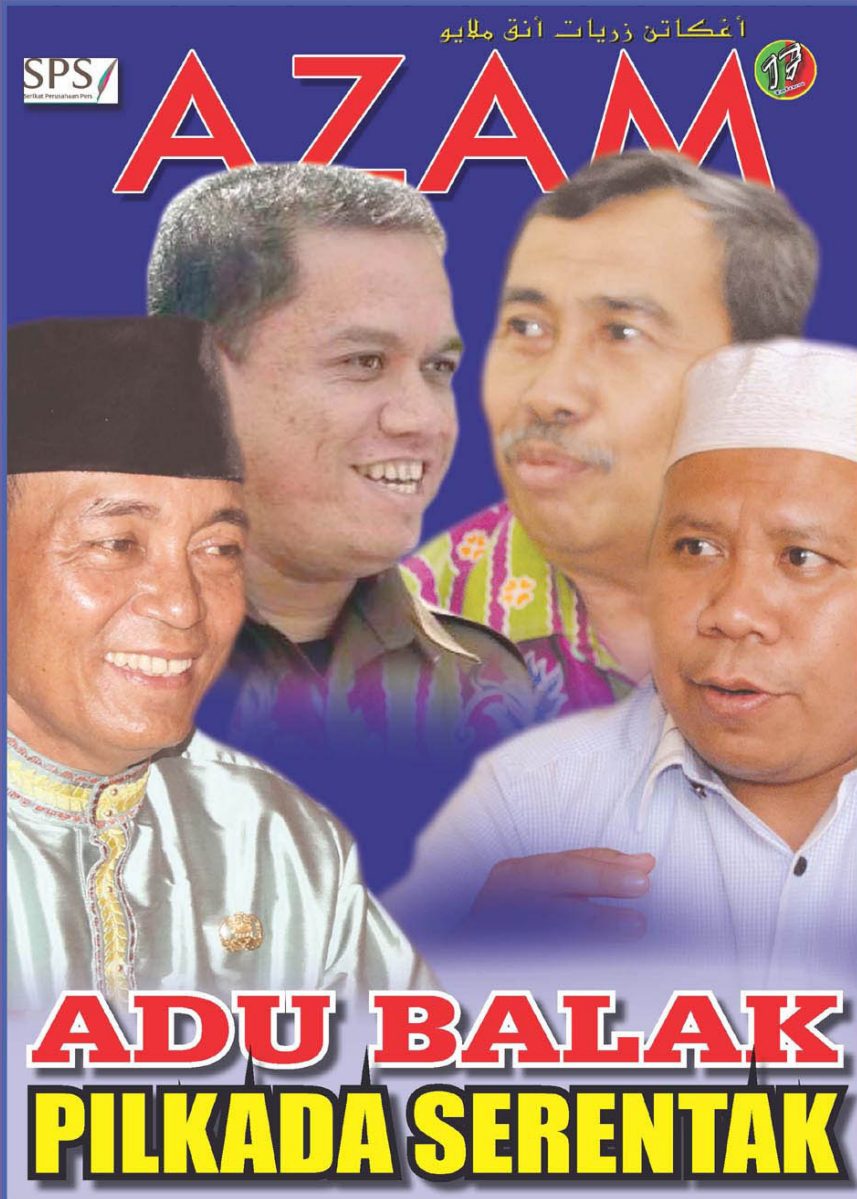
Kondisi ini makin diperparah bila melihat sistem pemilukada yang tengah berlangsung sekarang. Semuanya serba tidak jelas dan sulit diprediksi. Bisa saja calon yang diunggulkan, justru tidak menang. Sebaliknya, calon yang tak diperhitungkan meraih dukungan besar dari rakyat.

Masyarakat sebagai pemilih juga sulit dipegang. Belum tentu calon yang telah memberi bantuan yang akan mereka pilih. Atas asumsi ini, Nurbay Juss menghimbau figur yang berasal dari kalangan anggota dewan supaya bersiap-siap dengan segala kemungkinan. Termasuk finansial. Dana yang dipersiapkan untuk biaya politik di pemilukada bisa lenyap begitu saja. Jumlahnya tidak sedikit mencapai miliaran rupiah.

Jadi, sebaiknya berfikir ulang untuk maju. Di PPP ada sejumlah kader yang kini duduk sebagai anggota DPRD Riau, dan akan bertarung di pilkada. Antara lain, Mursini untuk Kuantan Singingi. Lalu ada Tengku Nazlah dan lain-lain.

“Kepada mereka saya berharap kiranya berpikir lebih dalam lagi apakah rencana untuk maju menjadi bupati atau wakil bupati sudah dihitung secara matang atau belum. Jangan seperti kata sebuah peribahasa, gara-gara ingin menangkap burung terbang punai di tangan dilepaskan. Jangan karena ingin jadi kepala daerah, jabatan anggota dewan dilepas,” saran Nurbay Juss.*

BAGIAN IX



Adu Balak Pilkada Serentak

Komisi Pemilihan Umum di sembilan kabupaten dan kota menerima pendaftaran bakal calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Empat daerah, akan adu 'balak' karena hanya diikuti dua pasang calon. Yakni Indragiri Hulu, Siak, Kepulauan Meranti dan Pelalawan. Seru!

Gong Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), atau Pilkada, sudah ditabuh KPU. Masing-masing partai politik telah mendaftarkan bakal calon pada 26-28 Juli. Dan, KPU kini sedang melakukan verifikasi dukungan parpol untuk selanjutnya ditetapkan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Hari 'H' pencoblosan pilkada serentak dilaksanakan 9 Desember 2015.

Ada hal unik terjadi pada Pilkada Serentak 2015 ini. Yakni minimnya dukungan Partai Golkar dan PPP untuk pasangan calon. Dua partai warisan Orde Baru ini, pertama dalam sejarah tak penuh berpartisipasi di pilkada. Itu karena konflik internal kedua partai itu hingga pembukaan sampul pendaftaran tak jua kunjung usai. Golkar, misalnya, dibalut kepengurusan ganda: Golkar versi Munas Bali pimpinan Aburizal Bakri dengan Golkar Munas Ancol yang diketuai Agung Laksono.

Begitu pun PPP. Ada kubu Romahurmuziy, terdapat kubu Djan Faridz. Kedua ketua partai berlambang kakbah ini sama-sama mengklaim diri sebagai ketua umum yang sah. Baik Golkar maupun PPP kini sedang berjuang di pengadilan untuk mendapat kepastian hukum asas legalitas kepengurusan mereka. Itulah sebab, Golkar dan PPP tak penuh memberi dukungan kepada peserta pilkada.

Bakal calon yang sukses mendapat dukungan dari kedua kubu, dapat mendaftar ke KPU. Sementara pasangan yang hanya beroleh salah satu kubu, ditolak oleh KPU. Di Pilkada Serentak kabupaten/kota di Riau hanya beberapa daerah saja yang pasangannya berasal dari Golkar dan PPP. Yakni Muhammad Ikhsan yang berpasangan dengan Yanti Komala di Kota Dumai.

Suparman-Sukiman (Golkar) di Rokan Hulu. Irwan Nasir-Said Hasyim (Golkar, PPP) di Kepulauan Meranti), Indra Putra-Komperensi (Golkar), Mursini-Halim (PPP) di Kuantan Singingi, Suhartono-Syahrul (PPP), Syamsuar-Alfedri (Golkar) di Siak Sri Indrapura, Suyatno-Jamiludin (PPP) dan Wan Syamsir Yus-Helmi Yasid (Golkar) di Rokan Hilir. Tentang keabsahan dukungan kedua partai politik itu masih harus menunggu verifikasi KPU di masing-masing kabupaten/kota.

Adu Balak

Selain figur baru, balon dari *incumbent* masih turut meramaikan Pilkada Serentak 2015. Mereka adalah Yopi Arianto (Bupati Indragiri Hulu), Agus Widayat (Wakil Walikota Dumai), Hafith Syukri (Wakil Bupati Rokan Hulu), Herliyan Saleh (Bupati Bengkalis), Irwan Nasir (Bupati Kepulauan Meranti), Syamsuar dan Alfedri (Bupati dan Wakil Bupati Siak Sri Indrapura), HM Harris (Bupati Pelalawan) dan Suyatno (Bupati Rokan Hilir).

Pilkada Serentak 2015 relatif lebih sedikit jumlah pesertanya dibanding lima tahun lalu. Ini selain disebabkan konflik internal di tubuh Partai Golkar dan PPP juga adanya kecenderungan *incumbent* memborong partai untuk memperkecil ruang gerak lawan memasuki arena pilkada. Dulu, Golkar termasuk PPP, menjadi motor penggerak di setiap pilkada bahkan partai berlambang pohon beringin itu menjadi incaran setiap figur karena kadernya yang militan dan basis massanya yang luas. Faktor lain, putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan legislator, pegawai negeri sipil, TNI dan Polri mundur dari jabatan bila ingin ikut pilkada.

Akibat ketiga faktor itu, adu balak antara *incumbent* dengan *new comer* tak bisa dihindari. Misalnya di Kabupaten Siak Sri Indrapura duet Syamsuar-Alfredri yang diusung Golkar, PAN, Hanura, PKS, Nasden dan PKPI berhadapan dengan pasangan Suhartono-Syahrul yang diunggulkan oleh PDIP, Gerindra, PBB, PKB, dan Demokrat. Begitu pun dengan Yopi Arianto- Khairizal (PDIP, PKS, PKPI, PAN), ia harus berhadapan dengan Tengku Mukhtarudin-Aminah Susilo (Demokrat, Gerindra, Hanura). Kemudian Irwan Nasir-Said Mustafa (PAN, Demokrat, Gerindra, PKB, PBB, PKS melawan Tengku Mustafa-Amyurlis (PDIP, Hanura) di Kepulauan Meranti. Serta HM Harris-Zardewan (PAN, PKB, PKS, Nasdem, PBB, Gerindra) melawan Zukri Misran-Anas Badrun (PDIP, Demokrat, Hanura).

Bakal Seru

Pertarungan seru berlangsung di Pelalawan dan Indragiru Hulu. Yakni antara HM Harris versus Zukri Misran dan Yopi Arianto dengan Tengku Mukhtaruddin. Sementara di Siak, banyak pihak meramal Syamsuar akan mendulang suara dan kembali memimpin kabupaten ‘milik’ Sultan itu. Kondisi sama juga terjadi di Meranti, menurut analisis Irwan Nasir bakal mulus melenggang ke kursi kekuasaannya. Ia sepertinya masih dipercaya warga Meranti melanjutkan pembangunan di periode kedua.

Hal serupa juga terjadi pada Yopi Arianto. Yopi yang berpasangan dengan Khairizal bersama PDIP, PKS, PKPI, PAN berhadapan dengan Tengku Mukhtaruddin yang kini masih menjabat Bupati Anambas, Kepulauan Riau. Walau Mukhtaruddin tak sepopuler Yopi tapi tak mudah bagi anak mendiang Sugianto itu mengalahkan Mukhtaruddin. Maklum, selain sudah berpengalaman di arena pilkada, Mukhtaruddin tentu siap bertanding uang dengan Yopi. Ditambah lagi dukungan sebagian tokoh-tokoh Inhu Pekanbaru yang kecewa dengan Yopi karena bertempramen tinggi. Adu balak yang benar-benar seru! []syf

**BALON KEPALA DAERAH DAN BALON WAKIL KEPALA DAERAH
DUKUNGAN PARPOL PILKADA SERENTAK 2015**

Kabupaten/ Kota	Bupati/Walikota	Wabup/ Wawako	Parpol Pengusung
Dumai	Abdul Kasim	Nuraini	PAN, PKB, PKPI
	Zulkifli AS	Eko Suharto	Nasdem, Demokrat, PKB, Gerindra
	Agus Widayat	Maman Sufriyadi	PDIP, Hanura
	Muhammad Ikhsan	Yanti Komala	Golkar, PKS
	Amris	Sakti	Independent
Indragiri Hulu	Yopi Arianto	Khairizal	PDIP, PKS, PKPI, PAN
	Tengku Mukhtaruddin	Aminah Susilo	Demokrat, Gerindra, Hanura
Rokan Hulu	Hafith Syukri	Nasrul Hadi	Demokrat, PKS, PKB
	Syafuruddin Poti	Erizal	PDIP, PAN
	Suparman	Sukiman	Gerindra, Hanura, Nasdem, Golkar
Bengkalis	Amril Mukminin	Muhammad	PKS, PKPI, PKB, PBB, Nasdem
	Sulaiman Zakaria	Charis Putra	PDIP, Demokrat
	Herliyan Saleh	Riza Fahlefi	PAN, Gerindra, Hanura
Kepulauan Meranti	Tengku Mustafa	Amyurlis	PDIP, Hanura
	Irwan Nasir	Said Hasyim	PPP, PAN, Demokrat, PKS, Gerindra, PKB, PBB,
Kuantan Singingi	Mursini	Halim	PPP, Gerindra, PDIP
	Indra Putra	Komperensi	Nasdem, PAN, Demokrat, Hanura, PKS
	Mardjan Ustha	Muslim	PBB, PKB, PKPI

Siak	Suhartono	Syahrul	PDIP, Gerindra, PBB, PKB, Demokrat
	Syamsuar	Alfedri	Golkar, PAN, Hanura, PKS, Nasdem, PKPI
Pelalawan	HM. Harris	Zardewan	PAN, PKB, Nasdem, PBB, Gerindra, PKS
	Zukri Misran	Anas Badrun	PDIP, Demokrat, Hanura
Rokan Hilir	Suyatno	Jamiludin	PDIP, PKPI, Hanura, PBB, Nasdem
	Wan Syamsir Yus	Helmi Yasid	Golkar
	Herman Sani	Taem Pratama	PKB, PAN, PKS
	Syafrudin	Ridwan	Gerindra, Demokrat

KPU Verifikasi Berkas Pendaftaran

26 Pasangan bakal calon kepala daerah dan balon wakil kepala daerah di sembilan daerah resmi mendaftar. Sebelum ditetapkan menjadi calon, KPU memverifikasi berkas pendaftaran.

Dua tahapan penting sudah dilalui KPU dalam Pilkada Serentak 9 Desember depan. Yakni pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan pasangan balon. Ketua Provinsi Riau, DR. H Nurhamin, S.Pt. MH, menyebut saat pasangan balon mendaftar, masing-masing KPU kabupaten dan kota telah menerima semua berkas pasangan balon. Berkas-berkas itu, akan diperiksa atau diverifikasi lanjutan sesuai undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi, misalnya surat pemberhentian definitif dari anggota DPRD dan PNS, sampai ke pemeriksaan ijazah pasangan bakal calon.

“Dari sembilan kabupaten dan kota, ada 26 pasangan calon yang mendaftar. Setelah diverifikasi berkas pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan, tanggal 24 Agustus, baru ditetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati, calon wali kota dan wakil wali kota,” kata Nurhamin kepada **AZAM** pekan silam.

Terkait persyaratan dukungan dari partai politik dan calon perseorangan, persyaratan administrasi lainnya, dijelaskan Nurhamin, sudah diteliti dan diperiksa ketika pasangan balon mendaftar ke KPU. Saat itu KPU langsung meneliti berkas, apakah ada dukungan ganda, atau menyangkut keabsahan dukungan.

“Pemeriksaan lanjutan yang akan kita lakukan adalah terkait surat pengunduran diri definitif jika balon berasal dari legislatif dan PNS,

TNI atau Polri hingga ke pemeriksaan ijazah yang sudah diterima KPU,” ujarnya.

Khusus dukungan Partai Golkar dan PPP yang memiliki dualisme kepengurusan, kata Nurhamin, sesuai PKPU No 12, pihaknya hanya menerima pendaftaran pasangan calon yang mendapat rekomendasi dari dua kubu. Jadi, kalau ada pasangan calon yang mendaftar tetapi ditolak KPU, itu disebabkan yang bersangkutan hanya mengantongi rekomendasi dari satu kubu saja.

Seperti terjadi di Kabupaten Meranti, Pelalawan dan Kuansing, KPU terpaksa menolak pendaftaran pasangan bakal calon atas nama Masrul Kasmy yang mengantongi SK dukungan Partai Golkar kubu Agung Laksono. Juga pasangan Zulnurmali-Tarmizi lantaran tidak melampirkan dukungan resmi dan sah dari PPP dan Golkar. Lainnya yang ditolak adalah Imran-Mukhlisin (Kuansing) yang cuma melampirkan SK dukungan Partai Golkar kubu Agung Laksono. Kemudian pasangan Sufian Hanim-Abdul Nasib, mereka kekurangan dukungan, sebab dukungan dari Partai Golkar terpaksa dibatalkan karena kedua kubu memberi dukungan berbeda. Kubu ARB mendukung pasangan HM Harris-Zardewan, sementara Agung Laksono merekomendasikan Sufian-Abdul Nasib.

Nurhamin menegaskan, pihaknya siap jika sewaktu-waktu mereka yang ditolak itu menggugat KPU ke jalur hukum. Apakah gugatan itu dapat menghambat tahapan yang sudah dijadualkan, menurut Nurhamin, itu tergantung putusan pengadilan. Jika putusan pengadilan bersifat normatif, tentu tidak mengganggu tahapan yang telah disusun. Sebaliknya jika putusan pengadilan bersifat substantif, jelas dapat mengganggu tahapan.

“Pastinya KPU siap sewaktu-waktu digugat, dan untuk menghadapi gugatan itu kami akan melaporkan serta berkoordinasi dengan KPU Pusat,” tambah Nurhamin.*

Pelalawan: Siapa Pemenang Siapa Pecundang?

HM. Harris-Zardewan dan Zukri Misran-Anas Badrun boleh dibilang sama-sama populer di Pelalawan. Keduanya akan ‘adu gerobak’ dalam pilkada. Boleh jadi inilah pertarungan paling sengit dan alot diantara sembilan daerah di Riau.

Hari kedua pendaftaran (27/7). Pagi hari pukul 11.00 wib pasangan Zukri-Anas mendaftar ke KPU. Tak berapa lama kemudian, pukul 13.00 wib, giliran pasangan bupati *incumbent* HM Harris-Zardewan (HaZa) datang ke KPU. HM Harris-Zardewan diantar ribuan masa pendukung termasuk pengurus partai pengusung. Yakni Golkar, PAN, PKS, Nasdem, PKB, Gerindra, PPP versi Romihormuzi dan PBB.

Kedatangan HaZa disambut langsung Ketua KPU Pelalawan. Sebelum tiba di KPU, HaZa terlebih dahulu mendeklarasikan diri di Pangkalan Kerinci. Usai mendaftar, Harris mengatakan, dirinya maju di periode kedua karena amanah masyarakat Pelalawan agar ia kembali melanjutkan program lama. Menjalankan tujuh program strategis yang digagasnya bersama Marwan Ibrahim. Program tersebut sudah berjalan baik namun belum optimal. “Saya bersama Zardewan ingin memaksimalkan pencapaian program itu. Kareanya saya minta doa restu masyarakat Pelalawan,” kata Harris berharap.

Minus Golkar-PPP

Meski tanpa dukungan Golkar dan PPP, Ketua Tim Pemenangan Harris-Zardewan, Nasarudin menyebutkan, pasangan ini tetap solid.

Pencoretan dua parpol oleh KPU Pelalawan tidak mengurangi simpatisan Golkar dan PPP mengusung dan mendukung HaZa . “Walau Golkar dan PPP dicoret, kita tetap solid,” ujar Nasarudin kepada **AZAM**.

Setakad ini, katanya, kawan-kawan dalam tim koalisi tidak terpengaruh atas pencoretan itu. “Justru pencoretan makin membuat kawan-kawan pengusung dan tim inti kian solid dan bersemangat memenangkan pasangan Harris-Zardewan,” tegasnya.

Ia mengakui, tanpa dua partai itu Harris-Zardewan masih memiliki 12 kursi pengusung. Dan ambang ini masih melebihi syarat pencalonan dari KPU. Yakni Gerindra 4 kursi, PAN 4 kursi, PKS, PBB, Nasdem dan PKB masing masing satu kursi.

Sementara itu, *duet* Zukri Misran-Abdul Anas Badrun yang didukung PDIP, Demokrat dan Hanura dapat dipastikan menjadi batu sandungan bagi Harris-Zardewan. Sebelum mendaftar ke KPU, ZA juga berdeklarasi terlebih dahulu di kediaman Zukri, di Jalan Lintas Timur, Pangkalan Kerinci, dan diikuti oleh ribuan pendukung Zukri-Anas. Mereka memadati pekarangan rumah hingga meluber ke badan jalan lintas. “Dari sini kita bersama-sama ke KPU untuk mendaftar. *Insyallah* Pelalawan memiliki bupati yang muda usia,” ujar Zukri dalam pidato politiknya.

Deklarasi Zukri-Anas (ZA) yang disebut dengan deklarasi *On the Road*, sempat menarik perhatian warga karena ribuan pendukung ZA berkeliling Pelalawan menggunakan mobil yang dilengkapi spanduk dan baliho. Mereka berpawai dengan beragam model atribut partai politik dan relawan pendukung ZA. Dengan memakai sepeda motor, becak, mobil dan *truck* para pendukung bergerak kilonan meter menuju kantor KPU sambil menyanyikan lagu ‘*Zukri Bupatiku*’. Zukri-Anas akan *head to head* dengan Harris-Zardewan untuk merebut suara rakyat.

Tergantung Strategi

Diamati dari dukungan politik masing-masing pasangan, Harris-Zardewan terlihat lebih unggul dari Zukri-Anas. Dari 12 parpol, 6

diantaranya (minus Golkar dan PPP) mengusung duet HaZa. Sementara, Zukri-Anas hanya bermodal 'biduk' kecil yang muatannya pas-pasan. Yakni PDIP, Hanura dan Demokrat. Akan tetapi, dalam banyak kasus pilkada, kekuatan partai politik tidak jadi jaminan bagi seseorang mendapat dukungan rakyat. Siapa yang merakyat, dia yang akan mendapat dukungan signifikan. "Saya kira dukungan partai belum menjamin pasangan bisa menang. Sebab, banyak indikator lain yang menentukan. Besarpun dukungan parpol kalau sang figur tidak merakyat, ia juga tidak akan dipilih rakyat. Jadi, siapa yang berhasil merebut hati rakyat, dialah yang keluar sebagai pemenang," ucap pengamat politik Riau, Andi Yusran kepada **AZAM** pekan lalu.

Andi mengatakan, relevansi antara posisi parpol dengan dukungan rakyat itu tidak terlalu signifikan. Yang berpengaruh adalah personal dengan pemilih, bukan parpol dengan *voter* (pemilih, *red*). Berdasarkan hasil pilkada sebelumnya, biasanya *incumbent* akan mendapat perlawanan cukup berat dari rivalnya. Apalagi kalau sampai terjadi "*head to head*" (satu lawan satu, *red*). "Sebab posisi rival diuntungkan oleh dukungan kelompok yang tidak pro kepada *incumbent*. Kalaupun kelompok ini tak sepaham dengan rival *incumbent*, mereka cenderung memilih untuk tidak menggunakan haknya. Jadi, yang diuntungkan dalam *head to head* itu adalah pihak penantang," ulas Andi lagi.

Terkait kecenderungan pemilih yang melihat hasil kerja ketimbang yang belum memperlihatkan bukti, Andi berpendapat tetap ada. Namun, kecenderungan masyarakat memilih yang baru juga cukup tinggi. "Disinilah nanti terjadi tarik menarik. Perilaku *voter* yang merasa puas dengan kepemimpinan *incumbent* tetap akan menguntungkan *incumbent*. Sementara yang tidak puas cenderung mengalihkan dukungan ke rival *incumbent*," pungkasnya.

Tokoh masyarakat Riau asal Pelalawan, Tengku Lukman Jaafar menilai, kans besar untuk menang itu tetap di tangan *incumbent*. Tapi, semuanya kembali ke masyarakat Pelalawan. Merekalah yang bisa menilai kinerja Harris selama lima tahun kebelakang.

Dari pengalaman sebelumnya, peluang *incumbent* menang sangat besar. Kecuali jika ada ketidaksenangan masyarakat karena kampanye negatif. Artinya, dalam lima tahun masyarakat sudah bisa menilai keberhasilan-keberhasilan Harris. “Untuk mencari pemimpin ideal yang memiliki kemampuan dan tahu masalah pokok Pelalawan sangat sulit. Namun setidaknya Harris telah berbuat memajukan Pelalawan,” ucap Lukman Jaafar.

Tengku Lukman tak sepaham kalau *incumbent* akan tumbang jika persaingan itu hanya berjalan dua pasang. Menurutnya, banyak pasangan atau sedikit pasangan yang maju, itu tidak berpengaruh terhadap peluang *incumbent*. “Bedanya hanya pada hasil pilkada saja. Kalau *head to head* langsung diketahui hasil pemenangnya, sementara kalau banyak bisa saja terjadi dua putaran. Itu saja saya kira. Jadi, *head to head* tak akan mempengaruhi posisi *incumbent*,” kata Pak TL si ‘degil’ dari Pelalawan ini.

Menurut TL, di setiap kurun waktu, persaingan selalu menghadapkan generasi tua dengan munculnya generasi muda. Akan tetapi yang dipersoalkan itu bukan pengalaman calonnya, melainkan kemampuan masing-masing pihak mempopulerkan diri ke masyarakat. “Siapa yang dikenal dan dekat dengan pemilih, dia yang menang. Untuk dikenal dan dekat tentu bermacam cara dapat dilakukan, antara lain sosialisasi. Aktivitas sosialisasi memerlukan dukungan orang-orang tertentu termasuk parpol (jika mesin politiknya bergerak) dan dana,” tutup Tengku Lukman. Ayo, siapa pemenang, siapa pecundang?*

Meranti: Irwan Terpopuler, Mustafa Kurang Populis

Bakal calon Bupati Irwan Nasir dan calon Wakil Bupati, Said Hasyim, Selasa (28/7), mendaftar ke KPU Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebelum mendaftar, pasangan ini dilepas oleh mantan Bupati Bengkalis, H Syamsurizal.

Sebelum mendatangi Kantor KPU, pasangan dengan jargon Pro Bisa (Pro Bang Irwan Said Hasyim) ini terlebih dahulu melaksanakan sholat sunat duha di Masjid Al-Muawanah, Jalan Dorak, Desa Banglas. Setelah gelar sholat bersama dan sambutan pelepasan dari mantan Bupati Bengkalis, Syamsurizal, pukul 9.30 WIB, Pro Bisa diarak menuju Kantor KPU, diiringi kumandang azan dari Politisi PPP, Edy Masyhudi.

Ikut bersama dalam pendaftaran ini, selain seluruh ketua partai pengusung dan simpatisan, juga sejumlah tokoh serta ketua paguyuban dan organisasi. Kandidat kuat calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti ini didukung 8 partai politik dengan 80 persen kursi di DPRD. Masing-masing PPP (4 kursi), PAN (5 kursi), Demokrat (4 kursi), Gerindra (4 kursi), Golkar (3 kursi), PKB (2 kursi), PBB (1 kursi) dan PKS (1 kursi).

Sebelum sampai di Kantor KPU, pasangan ini disambut pencak silat dan kompiang penuh warna warni baju partai pengusung dan pendukung pun terlihat memadati Kantor KPU. Ribuan rombongan yang mengantar Irwan-Said Hasim tiba di depan Kantor Bupati Meranti pukul 10:05 wib. Sesampai di depan Masjid Al-Muawanah, Irwan yang sebelumnya dibawa menggunakan becak tiba-tiba turun. Lalu diarak pakai kompiang menuju Kantor KPU berjarak lebih kurang 200 meter.

Beberapa meter sebelum sampai ke pintu masuk Kantor KPU, tiba-tiba masyarakat padat luar biasa mendukung *incumbent*. Langkah rombongan ini pun terlihat mantap, meski berjalan kaki bersama dan berpanas mereka tetap setia menunggu balonbup idaman ini.

Tiba di KPU, rombongan langsung disambut kelima komisioner KPU Meranti, Sekdakab Drs Iqaruddin MSi, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Zahwani Pandra Arsyad SH MSi, Danramil 04 Tebing Tinggi Bismi Tambunan, Komisioner Panwaslu Meranti dan beberapa elemen lainnya.

Kepada wartawan, Irwan menyatakan kesiapannya maju di Pilkada Meranti. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Meranti. “Terimakasih atas kebersamaan kita sehingga kita bisa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan masyarakat daerah lain. Jika ada janji-janji saya belum ditepati, saya mohon diikhhlaskan. Dan bila berkenan, saya ingin melanjutkan pembangunan agar janji-janji itu bisa ditunaikan,” ucap Irwan disambut ribuan pendukung.

BERMUTU Mendaftar

Sehari sebelumnya, pasangan balon bupati dan balon wakil bupati Tengku Mustafa-Amyurlis alias Ucok atau yang dijuluki dengan BERMUTU, Senin (28/7), mendaftar ke KPU dengan cara unik. Seusai melakukan deklarasi di posko tim pemenangan di Jalan Rintis Selatpanjang Timur, pasangan ini menumpang becak motor yang diiringi dengan kompiang dan pertunjukan seni Reog Ponorogo dan Barongsai. Sesampai di depan kantor bupati keduanya berjalan kaki menuju kantor KPU yang didampingi oleh tim pemenangannya, seperti HM Adil, Prof Yohanes Umar, dan Jadgev Sing.

Walau diguyur hujan deras, ratusan simpatisan terlihat antusias mendampingi jagoan mereka. Sekitar pukul 15.00 wib, pasangan Tengku Mustafa-Amyurlis tiba di kantor KPU. “Kami mohon dukungan untuk maju dalam calon bupati dan wakil bupati Kepulauan Meranti. Hari ini kami akan mendaftarkan diri,” ujar Tengku Mustafa di sela-sela kerumunan simpatisan.

Tengku Mustafa yang kini menjabat sebagai Kepala Penanaman Modal di Kota Batam ini optimis bisa menang. Dirinya juga menyebutkan, ada tiga hal yang jadi prioritas utamanya bila menang dan memimpin Meranti. “Jika saya terpilih nanti, hal utama yang akan saya kerjakan adalah jalan, listrik dan air,” ungkap Tengku Mustafa.

Karena Meranti merupakan pulau yang memanjang, menurut Tengku Mustafa, struktur jalan itu adalah berbentuk kisi-kisi. Setelah selesai yang tiga ini (jalan, listrik, air), baru menyusul yang lainnya. Program berikutnya, kata Tengku Mustafa, pembangunan bukan roro tetapi membuat penyeberangan ke Pulau Sumatra. “Roro itu memakan waktu lama untuk penyeberangan, dan investor tidak akan mau. Makanya harus dibikin jembatan,” tutupnya.

Namun apa yang ‘dijual’ Mustafa tampaknya sudah ketinggalan. Sebab, Irwan telah memulainya. Termasuk soal jembatan antarpulau hingga menyambung ke Pulau Sumatra, Irwan sudah menekan MoU dengan sejumlah kepala daerah seperti Bengkalis, Siak, Pelalawan, Dumai dan Rohil.

Bahkan di penghujung 2012, Irwan sudah mulai membangun sebuah jembatan yang merangkai pulau, yakni di Selat Rengit yang menghubungkan Pulau Tebingtinggi dengan Pulau Merbau. Menurut Irwan, prioritas Pemerintah Daerah membangun jembatan Selat Rengit karena 40 persen kemiskinan ada di Pulau Merbau.

Irwan Terpopuler

Hasil survei dari tim 9 DPD PAN Meranti menunjukan, Irwan sangat populer. Nama lain yang disurvei Masrul Khasmy, Tengku Mustafa, Muzamil, Jalela dan Effendi. Menurut Ketua DPD PAN Meranti Fauzi Hasan, dari 1.400 kuesioner yang disebar ke semua kecamatan, popularitas Irwan Nasir masih tertinggi dengan 56 persen. Disusul Masrul Kasmy 25 persen, Tengku Mustafa sendiri menempati urutan ketiga dengan 15 persen. Sedang 4 persen responden lainnya tidak menjawab pertanyaan.

Irwan juga tertinggi dalam elektabilitas. Kata Fauzi Hasan, tingkat keterpilihan Irwan mencapai 59 persen, 25 persen responden memilih Masrul Kasmy. Sementara Tengku Mustafa hanya dipilih oleh 12 persen responden, persen lain tidak menentukan pilihan. Disebutkan juga, 73 persen calon akan menang jika diusung oleh partai pemenang legislative. Cuma 15 persen yang membantah asumsi itu, 8 persen responden menyatakan ragu-ragu, dan 4 persen tidak menentukan sikap. Catatan terakhir ini menarik, karena PAN adalah partai pemenang di Meranti. Itu artinya, PAN yang kini mengusung Irwan bila didukung penuh oleh kader dan semua mesin partai bergerak, maka potensi Irwan menang sangat besar.

Pengamat politik UIR Indra Syafri, menyebut 'melawan' Irwan perlu kekuatan besar. Apalagi yang bertarung cuma dua pasangan. Kali ini Irwan mendapat lawan yang boleh dikata tak sebanding. Dari segi kepopuleran, rakyat, elektabilitas, uang, Irwan masih diatas Tengku Mustafa. "Yang saya tahu, orang Meranti belum mengenal betul Tengku Mustafa. Kalau wakilnya, lumayanlah. Tapi mereka belum bisa menandingi pasangan Irwan-Said Hasyim. Meskipun kedua wakilnya sama-sama 'petarung' kalah di pilkada 5 tahun lalu, namun masa pemilih masih melihat figur calon bupati," kata Indra.*

Siak: Ditentukan Kekuatan Figur

Dalam posisi saling berhadapan (face to face), Pilkada Siak akan seru karena kekuatan partai nyaris seimbang. Syamsuar vs Suhartono, ditentukan oleh kekuatan figur.

Bercermin dari dua kali Pilkada Siak, tahun 2006 dan 2011, pilkada tahun ini boleh dibilang sepi peminat karena hanya diikuti dua peserta. Yakni pasangan Syamsuar-Alfedri dan Suhartono-Syahrul.

Di tahun 2006, perebutan “mahkota kerajaan Siak” itu diikuti tiga pasang calon. Masing-masing pasangan Syamsuar-Endang Sukarelawan, Arwin-OK Nizami Jamil dan Agus Salim-Tengku Harun. *Duet* Arwin-OK Nizami Jamil akhirnya dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Siak pertama (2006-2011) setelah meraih dukungan tertinggi bupati pilihan rakyat.

Lima tahun kemudian, jumlah peserta pilkada bertambah menjadi empat pasang. Mereka adalah Yulizar-Said Agus, Said Muhammad-Rusdaryanto, Syamsuar-Alfedri, dan OK Fauzi Jamil-Tengku Muhazza. Dengan perolehan suara 57,254 atau 38,41 persen, *duet* Syamsuar-Alfedri keluar sebagai pemenang, dan tampuk kepemimpinan Bupati Siak pun beralih generasi dari Arwin ke Syamsuar.

Jabatan Syamsuar-Alfedri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Siak (2006-2011) baru akan berakhir 19 Juni 2016. Akan tetapi sesuai undang-undang karena sisa masa bhakti itu berada dibawah tahun 2017, Siak akhirnya masuk kategori kabupaten pertama yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah langsung.

Sebelum mendekat ke hari ‘H’ pendaftaran sejumlah nama sempat digadang-gadangkan akan maju ke arena pilkada menantang Syamsuar-

Alfredi. Namun hingga hari terakhir pendaftaran, Selasa (28/7) sore, hanya dua pasang calon yang mendaftar.

Pasangan Suhartono-Syahrul menjadi pendaftar pertama yang datang ke KPU. Usai deklarasi sebagai pasangan bakal calon di Bunut, Kampung Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang, Senin (27/7), pasangan berjudul Berkah (Bersama Kita Hebat) ini mendaftarkan diri ke KPU Siak.

BerKaH diusung oleh enam partai politik dengan total 22 kursi di DPRD Siak. Terdiri dari Partai Gerindra dan PDIP masing-masing enam kursi, Demokrat empat kursi, PKB dan PPP tiga kursi, PBB satu kursi.

Dalam acara deklarasi, Suhartono mengaku bersemangat mengikuti pesta demokrasi itu karena mendapat kepercayaan dari enam partai pendukung. “Kami telah diberi amanah oleh enam partai pengusung, dan kami akan berupaya maksimal memenangkan pemilihan ini di 9 Desember depan,” tegas Suhartono.

Keikutsertaannya di Pilkada 2015, menurut Suhartono, bertitik tolak dari aspirasi masyarakat yang datang dan memintanya untuk maju. Hal ini yang tak bisa ia tolak. Bersama Syahrul, lanjut Suhartono. Ia minta doa dan dukungan bahwa kami siap memegang amanah sebagai bupati dan wakil bupati.

PPP Ditolak KPU

Saat mendaftar, dari hasil verifikasi persyaratan oleh KPU Siak, dukungan partai pengusung Suhartono-Syahrul terpaksa dikurangi karena PPP dengan tiga kursi dinilai KPU belum memenuhi persyaratan. Menurut KPU, dukungan partai berlambang kakkah itu baru bisa dimasukkan setelah difinalisasi keabsahannya. Jadi, sementara waktu disimpan dulu sampai ada keputusan KPU Pusat.

Hari terakhir pendaftaran, Selasa (28/7), giliran pasangan Syamsuar-Alfredi datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak. Sebelum mendaftar, pasangan dengan jargon SUARA ini terlebih dahu

melakukan deklarasi bersama enam partai pengusung di Lapangan Pertigaan Jalan Raja Kecil, Siak Sri Indrapura. Enam partai itu adalah Golkar enam kursi, PAN lima kursi, Hanura tiga kursi, PKS dua kursi, Nasdem dan PKPI masing-masing satu kursi.

Menariknya, selain dihadiri tokoh-tokoh masyarakat, deklarasi ini turut diamini dua tokoh penting, yakni Arwin AS (Bupati Siak 2001-2006-2006-2011) dan Wan Abu Bakar (mantan Gubernur Riau). Keduanya sempat menyampaikan dukungan untuk pasangan Syamsuar-Alfedri.

“Syamsuar-Alfedri sudah berpengalaman dan berkomitmen melanjutkan program-program pembangunan untuk memajukan Kabupaten Siak. Kami mendukung pasangan ini untuk melanjutkan kepemimpinannya lima tahun ke depan,” teriak Arwin AS dari mimbar kehormatan.

Merasa mendapat dukungan dari seniorinya, Syamsuar langsung mengungkapkan rasa syukur, dan berterima kasih kepada tokoh masyarakat yang mendukungnya. Sosok Arwin bagi Syamsuar adalah guru sekaligus sahabat. Ia mengaku siap melanjutkan pembangunan yang sudah dirancang saat Arwin menjabat Bupati Siak selama dua periode.

“Pak Arwin merupakan sosok guru bagi kami. Kami pernah bersama di pemerintahan ketika Pak Arwin menjabat bupati. Begitu juga dengan Alfredri. Kami akan terus berupaya melanjutkan program yang telah disusun untuk kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Siak,” tegas Syamsuar disambut tepuk tangan ribuan masyarakat yang hadir di acara deklarasi.

Usai deklarasi, Syamsuar dan Alfredri masing-masing bersama istri naik becak menuju Kantor KPU Siak. Ribuan warga dan simpatisan, termasuk kader partai pengusung, turut mengantarkan *incumbent* ini ke kantor KPU yang berjarak 2 km dari lokasi deklarasi.

Bakal Seru

Walau cuma dua peserta, Pilkada Siak tetap dikira berlangsung seru. Baik Syamsuar maupun Suhartono memiliki kekuatan berbeda.

Bila masing-masing mesin politik bergerak dinamis, *duel* keduanya akan berjalan imbang karena baik Syamsuat atau pun Suhartono boleh dibilang figur yang sama-sama disukai rakyat. Karier politik Suhartono dan Syahrul di DPRD Siak terbilang cemerlang selama ini. Ditambah mobilitas PDI Perjuangan dan Gerindra yang sama-sama dikenal sebagai partai *wong cilik*. Bukan tak mungkin dua partai ini akan membawa Megawati dan Prabowo ke Siak membantu kemenangan Suhartono-Syahrul.

Problemnya figur Syamsur terlanjur populer. Untuk urusan popularitas ini rasanya tak ada warga Siak yang tak mengenalnya. Pernah menjadi sekretaris daerah dan wakil bupati di mada kepemimpinan Arwin, dan sekarang bupati. Begitu pun Alfedri. Dua figur ini sehidup semudik menakhodai Siak sehingga bisa kembali berpasangan di periode kedua. Tidak sedikit tokoh-tokoh Siak kembali menghendaki daerah bekas kerajaan itu dipimpin lagi oleh Syamsuar yang memang dikenal sebagai figur yang *low profile* dan dekat dengan rakyat.

Kendati popularitas itu tak berbanding lurus dengan elektabilitas-nya namun banyak pihak menyakini, tak terlalu sulit bagi Syamsuar mendulang suara rakyat di pilkada 9 Desember depan apalagi *face to face* seperti sekarang.*

Indragiri Hulu: Adu Kuat *Duo* Bupati

Perebutan Inhu Satu akan memanas. Tak banyak pilihan, hanya dua pasang bakal calon, yakni Yopi Arianto-Khairizal melawan Tengku Mukhtaruddin-Aminah Susilo. Inilah adu kuat duo bupati.

Yopi Arianto adalah bupati *incumbent* dan sempat dinobatkan sebagai bupati termuda di Indonesia. Putera tokoh Riau asal Inhu, mendiang Sugianto ini dikenal dekat dengan rakyat karena rajin *road race* melewati jalan terjal dan berbukit. Lalu singgah di desa-desa sepanjang yang dilaluinya. Berpembawaan energik, Yopi juga anak muda yang pernah menjadi anggota DPRD Riau.

Sementara Tengku Mukhtaruddin merupakan Bupati Anambas Kepulauan Riau. Ia merasa terpanggil membangun kampung halamannya, Indragiri Hulu, apalagi masa jabatannya di daerah pulau sana telah berakhir. Di Inhu, Tengku Mukhtaruddin pernah menjadi camat, lalu bertugas di Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Bagi orang Inhu, ia bukan sosok asing di tengah masyarakat.

Hebatnya, Tengku Mukhtaruddin menggandeng Aminah Susilo di posisi wakil. Aminah Susilo adalah istri almahum Susilo Wandu, putra Inhu yang sukses berkarir di kepolisian. Sebelum wafat, almarhum sempat digadang-gadang akan maju menjadi Bupati Inhu. Mukhtaruddin-Aminah diusung Partai Gerindra, Hanura, PPP dan Demokrat. Pasangan ini mendaftar ke KPU Senin (27/7).

“Keduanya tidak diragukan lagi. Tengku Mukhtaruddin merupakan birokrat handal yang sukses meniti karier di pemerintahan. Sementara Aminah adalah politisi berjiwa social, menjadi anggota DPRD Inhu untuk

masa bhakti 2009-2014,” kata Suryana SE, Tim Sukses Mukhtaruddin-Aminah.

Ditegaskan Suryana, dengan dukungan 17 kursi DPRD, TM-Amin optimis mampu mengambil hati masyarakat Inhu meraih kemenangan di Pilkada Serentak 9 Desember depan. Harapan serupa juga pernah dilontar Tengku Mukhtaruddin. Kepada seluruh tim, partai pengusung, relawan, kerabat dan masyarakat Inhu, ia berpesan mari satukan visi dan misi kita untuk menang agar kita dapat bersama-sama membangun Inhu lebih baik lagi. “Sebagai putra Inhu, saya merasa bertanggung jawab memajukan kampung halaman saya, terlebih para pemuda dan tokoh-tokoh Inhu memberi dukungan ke saya,” tambah TM.

Minim Peserta

Tekad membara juga dipatri oleh pasangan Yopi Arianto-Khairizal. Usai mendaftar ke KPU, Senin (27/7), dengan diiringi beragam pertunjukan tradisional, Yopi mengaku merasa mantap melangkah ke arena pilkada. Walau menyadari tak mudah baginya berhadapan dengan Mukhtaruddin, bupati *incumbent* ini merasa lebih optimis sukses memenangkan pesta demokrasi itu. Apalagi kader-kader partai pengusungnya terkenal militan, yakni PDI Perjuangan, PKPI, PKS, dan PAN.

Tokoh Inhu, Arifin Thalib menilai, dengan hanya dua pasang calon masyarakat tidak memiliki banyak pilihan. “Kita dihadapkan kepada dua figur. Padahal jika peserta pilkada lebih dari dua, tentu lebih baik karena ada beberapa,” ujar Ketua Satker Ulama Inhu ini.

Minimnya peserta pilkada, menurut Arifin, tidak hanya dialami Indragiri Hulu, daerah-daerah seperti Siak, Kepulauan Meranti, dan Pelalawan juga bernasib sama. Ini disebabkan adanya persyaratan yang mewajibkan mundur bagi anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.

Orang-orang, kata Arifin, akan berpikir dua kali untuk maju. Itu pula yang terjadi di Inhu. Semula ada beberapa figur yang menyatakan diri

siap terjun ke arena pilkada, tetapi begitu MK memutuskan harus mundur dari jabatan, Pilkada Serentak Inhu hanya diikuti dua pasang saja.

Arifin menilai, baik Yopi maupun Mukhtaruddin sama-sama memiliki peluang menang. Apalagi keduanya mempunyai kemampuan, baik kemampuan finansial, dukungan massa maupun partai politik. Popularitas kedua pasangan ini tak perlu diragukan lagi. Begitupun pengalaman mereka memimpin daerah. Bedanya, Yopi sudah menjabat lima tahun dikenal secara luas oleh masyarakat, sementara TM putera daerah yang menjabat di Kepulauan Riau. "Popularitas Yopi tentu diatas dari Mukhtaruddin," ucap Arifin.

Masyarakat, lanjutnya, sudah melihat apa yang dilakukan Yopi, sementara Tengku Mukhtaruddin karena memimpin di Anambas eksposnya tidak sampai ke Inhu sehingga masyarakat tidak mengetahui betul seperti apa kepemimpinannya, ujar Arifin lagi. Meski demikian, lazimnya dalam sebuah kepemimpinan sebanyak orang yang suka, tentu banyak juga yang tidak. Sebanyak orang yang puas dengan kepemimpinannya, banyak pula yang tidak. Demikian halnya dengan Yopi Arianto, bisa saja lebih banyak masyarakat yang tidak puas. Atau sebaliknya banyak yang puas daripada tidak.

Menarik Diamati

Warga Inhu di Pekanbaru, Zulkarnain menyebut, Pilkada Serentak Inhu 2015 sesuatu yang menarik diamati. Pasalnya selain hanya diikuti dua pasang bahkan calon kredibilitas kedua figur juga sangat mumpuni, sebab dua-dua merupakan bupati yang sedang menjabat. *Satu incumbent*, satu lagi di Kepulauan Riau.

Ini memang unik. Dan, berbeda dengan kabupaten lain yang walau bupati *incumbent* nya berhadapan seperti Inhu, akan tetapi 'penantang' nya bukan selevel bupati juga, melainkan anggota dewan atau birokrat dan mantan birokrat. Karena itu, Zulkarnai memprediksi, rebutan Inhu Satu jauh lebih seru daripada di daerah lain. "Tidak mudah bagi masyarakat Inhu menentukan pilihan," katanya kepada **AZAM**.

“Saya menilai peluang keduanya cukup seimbang. Di atas kertas popularitas Bupati Yopi jauh lebih dikenal oleh masyarakat dibanding Mukhtaruddin. Elektabilitas sulit diprediksi karena ini sangat bergantung sejauhmana hasil-hasil pembangunan lima tahun terakhir dirasa dampaknya oleh masyarakat. Sulit bagi saya menakar siapa peraih suara terbanyak,” papar Zulkarnain.

Menurut Zulkarnain, di masa-masa kampanye nanti akan bisa terbaca siapa dari kedua tokoh itu yang memperoleh dukungan signifikan. Bisa jadi Yopi boleh juga Mukhtaruddin. Semua berpulang kepada kedua figur dan partai politik pengusung calon. Kalau mereka mampu memaksimalkan kekuatan menarik simpati masyarakat, menurut Zulkarnain, biasanya mendekat ke hari ‘H’ pencoblosan kita bisa mereka, si ‘A’ menang dan si ‘B’ kalah. Begitu sebaliknya.

Karena itu, lanjut Zulkarnain, kita tunggu hari tenang. Di hari tenang itu peta dengan mudah dapat kita ketahui, kemana arah dukungan mengalir deras.*

BAGIAN X

SPS
Unit Persebaran Yeyi

أَعْلَانُ زُرِيَاتِ أَنْقِ مَلَايُو



AZAM



HARRIS-ZARDEWAN
SEIYA SEKATA UNTUK PELALAWAN

Duduk Sama Rendah Tegak Sama Tinggi

Harris-Zardewan disebut-sebut sebagai pasangan yang taktis dan strategis untuk melanjutkan pembangunan Kabupaten Pelalawan. Tujuh program strategisnya yang kini dirasa manfaatnya oleh masyarakat, diyakini membawa ‘Negeri Seiya Sekata’ itu duduk sama rendah tegak sama tinggi dengan kabupaten lain.

Belum terasa riak Pilkada Serentak di Kabupaten Pelalawan. Walau dua pasang bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan 2015-2020 telah mendaftar ke KPU tempatan, warga tetap *adem ayem* menyambut pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Baliho dan spanduk pun tak terlalu semarak menghiasi wajah kota di Pangkalan Kerinci. Hanya beberapa spanduk yang terpasang di sudut jalan tertentu: Zukri Bupati Ku. Di lain sudut terlihat juga baliho Harris, Bupati Pelalawan.

Harris adalah *incumbent* yang kembali mencalonkan diri menjadi bupati. Dia periode kedua kepemimpinannya, pengusaha sukses ini menggandeng Zardewan, mantan Sekretaris Daerah, menjadi wakil bupati. Sementara Zukri Misran, anggota DPRD Riau, berpasangan dengan Anas Badrun, mantan Wakil Bupati. Kedua pasang bakan calon ini, Selasa (28/7), telah resmi diusung partai politik bertarung di arena Pilkada Serentak 2015.

Setakat ini ‘perang’ politik dua pasang calon belum terasa tabuhannya. Warga yang memadati Jalan Lintas Timur Pangkalan Kerinci saban waktu, seakan tak memperlihatkan ketertarikannya pada politik. “Ah. Siapa yang mau jadi bupati, terserahlah,” komentar Ujang, warga Pangkalan Kerinci di Kopi Tiam, depan Mandiri Departemen Store, Kamis malam.

Kopi Tiam di lintas Pangkalan Kerinci, termasuk tempat yang diminati banyak kalangan muda, dan orang-orang berkeluarga. Sore dan waktu malam, tempat favorite ini selalu diminati untuk berkuliner ria. Akan tetapi sebanyak orang keluar masuk di tempat itu, tak terdegas orang-orang bicara tentang politik. Mereka lebih tertarik ngobrol *ngalor ngidul* seadanya. Tapi sekelompok wartawan yang suka ngerumpi di sana, terdengar asik membahas masalah pilkada, mengkaji peluang menang dan kalah para calon di sembilan kabupaten kota.

“Dumai kebanjiran, bisa lima pasang yang mendaftar. Tapi ada beberapa daerah yang cuma diikuti dua calon. Ini bakal seru. Termasuk Pelalawan. Perlu juga terus kita ikuti perkembangan masing-masing daerah,” kata Edward kepada tandemnya dari media berbeda.

Di pasar kuliner lain, tempat banyak warga Pangkalan Kerinci berkumpul di Jalan Lintas, situasi sama juga terjadi. Tak terlalu tertarik bicara politik. Boleh jadi karena tahapan pilkada masih lama apalagi masa kampanye belum tiba. “Kalau sudah masuk kampanye, biasanya jalan-jalan di sepanjang jalan lintas ini dipenuhi baliho dan spanduk. Begitu juga di areal perkantoran bhakti praja. Sebentar lagi lah,” aku Daslir Maskar di Pangkalan Kerinci kepada **AZAM**.

Padat Jadwal

Tak terlalu sulit bertemu Bupati Harris di Pangkalan Kerinci sepanjang ia tidak sedang dinas luar. Siapapun dan dimanapun dapat dengan leluasa berjumpa dan berbincang bebas bersama Harris. Itu karena ia tipe kepala daerah yang tak terikat oleh jarak dan aturan protokoler. Lelaki kelahiran Langgam ini juga tak canggung-canggung membawa kolega atau masyarakat lain naik ke mobil dinas yang baik untuk satu urusan tertentu maupun sekedar berbual-bual.

Ia juga rajin dan merasa tak penat badan menghadiri undangan masyarakat. Atau acara-acara yang sudah terjadual sebelumnya. Bahkan boleh dikata, Harris lebih banyak di lapangan ketimbang di kantor. Menurut Harris, di lapangan ia dapat leluasa bertemu masyarakat, menyerap

aspirasi dan memeriksa langsung pekerjaan staf yang diamanahkan oleh APBD. Itu pula sebabnya jadual Harris selalu padat.

Saat **AZAM** bertandang ke Pangkalan Kerinci Kamis dan Jum'at pekan lalu, misalnya, Bupati Harris dari Bandara Sultan Syarif Qasim II bertolak ke Pangkalan Kuras menghadiri halal bi halal. Dari sana ia langsung ke Gedung Daerah Pangkalan Kerinci karena sudah ditunggu ribuan guru untuk acara serupa. Lepas maghrib Harris kembali bertolak ke Desa Gondai Kecamatan Langgam, dan sampai di kediaman mendekat dinihari. Di rumah dinas ini, Harris juga sudah ditunggu belasan tamu yang ingin bertemu dengannya. Jum'at pagi, ia melepas rombongan jemaah calon haji, dan usai shalat Jum'at Harris memberi arahan ke ribuan guru-guru di bawah kementerian agama, menghadiri paripurna DPRD, kemudian malamnya membuka pertandingan tinju Bupati Pelalawan Cup. Menurut Harris, kegiatan padat merayap seperti ini telah ia jalani setiap hari sejak ia dipercaya rakyat menjadi bupati.

Situasi Kondusif

Jelang pelaksanaan pemilihan Pilkada Serentak, situasi politik di Pelalawan terasa kondusif. Harris berharap situasi demikian dapat berlangsung sampai hari 'H' pelantikan bupati dan wakil bupati. Ia menyadari, tak mudah menjaga kondusifitas demikian. Itu karena penduduk yang menghuni kabupaten ini terdiri dari beragam suku dan agama. Heterogenitas ini, diakui Harris, sangat rentan dari gesekan-gesekan politik.

"Setiap saya turun ke masyarakat saya selalu berpesan, agar kita tidak mudah terprovokasi. Tak mudah dihasut dan diadu domba oleh pihak-pihak tertentu baik untuk kepentingan politik maupun lainnya. Pelalawan ini milik kita bersama, mari kita jaga situasi supaya selalu stabil. Kondusif. Ini penting sebab hanya dengan stabilitas kita bisa membangun, bisa mengatarkan anak-anak ke sekolah. Atau dapat bekerja. Kalau kita bertikai, gontok-gontokan yang rugi diri sendiri dan daerah kita," ungkap Harris kepada **AZAM**.

Sudah saatnya, lanjut Harris, masyarakat mengubah *mindset*, cara berfikir, bagaimana bertindak seperti jarum. Yakni mempersatukan yang sudah bercerai. Bukan seperti gunting menceraikan yang telah menyatu. Soal siapa yang akan menjadi bupati, ujar Harris, sudah tercatat di *lauh mahfudz* nya Allah. Kita cuma bisa menerima takdir yang sudah digariskan Allah.

“Sebagai bupati, saya sudah berbuat maksimal untuk kemajuan Pelalawan. Hasil dan manfaat dari pekerjaan saya itu telah pula dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Saya akui, satu periode memang tidak cukup waktu melaksanakan tujuh program strategis yang sudah tersusun rapi dalam rencana strategis pembangunan daerah. Karena itu saya kembali mencalonkan diri di periode kedua. Rakyat silakan menilai buah tangan pembangunan yang saya pimpin. Bukti sudah saya berikan, kalau masyarakat merasa bukti-bukti itu bermanfaat buat mereka, mari kita lanjutkan pembangunan ini. Itu saja,” ungkap Harris datar.

Ia optimis duet Harris-Zardewan masih dipercaya rakyat memimpin Kabupaten Pelalawan pada Pilkada 9 Desember depan. Kata Harris, ia ingin membawa Pelalawan duduk sama rendah tegak sama tinggi dengan kabupaten lain, ujar bupati berjuluk si ‘cabe rawit’ ini *

Petahana Berpeluang Menang

Peluang menang pasangan Harris-Zardewan dinilai lebih besar ketimbang pesaingnya. Sebab, tiga faktor penentu kemenangan ada digenggaman mereka.

Duel seru akan belangsung di Pilkada Kabupaten Pelalawan. *Head to head* antara pasangan calon petahana (*incumbent*), HM Harris-Zardewan dan pasangan H Zukri Misran-Anas Badrun diprediksi bakal berlangsung seru. Tapi, bicara soal peluang, sepertinya calon petahana lebih besar.

Itulah analisis yang disampaikan pengamat politik Riau Saiman Pakpahan kepada **AZAM** akhir pekan lalu. Menurut Saiman, menarik peluang *incumbent* dalam pilkada secara normatif cukup besar. Karena *incumbent* memiliki kekuatan strategis. Setidaknya ada tiga faktor penentu yang menyebabkan *incumbent* lebih unggul dibanding pesaingnya. Tiga faktor itu adalah dukungan finansial, mobilisasi aparat birokrasi, dan popularitas.

“Misalkan dalam memobilisasi birokrasi. Dia punya aparat sampai tingkat desa. Dan ini sangat gampang bagi *incumbent* untuk menggerakkan. *Incumbent* juga mempunyai cukup banyak uang. Dan ketiga, dia memiliki *networking* yang bagus dengan para pengusaha. Pengusaha manapun akan *wellcome* dengan orang yang sedang berkuasa. Keunggulan-keunggulan inilah yang tidak dimiliki calon lain,” ulas Saiman.

Menurutnya, popularitas HM Harris selaku bupati *incumbent* kian kuat dengan memilih tandem dari kalangan birokrat. Apalagi nama Zardewan sudah sangat familiar di lingkungan birokrasi. Sebagai sosok

yang pernah menjabat Sekdakab Pelalawan dan bahkan bupati selama tiga bulan, Zardewan jelas memiliki pengaruh yang lumayan bagus.

Memang diakui Saiman, tidak semua *incumbent* bisa sukses untuk kembali terpilih. Itu akibat dari tidak populer dan banyak ekspektasi yang tidak menjadi realitas dari *incumbent*. Tapi, khusus di Pelalawan, dia berpandangan sudah cukup bagus dengan apa yang dilakukan *incumbent* selama ini. Soal apakah ini akan menjadi pilihan rakyat, dia tetap mengacu pada sejauhmana keberhasilan yang dicapai Harris selaku bupati.

“Kalau dia sudah mengimplementasikan semua janji-janji politiknya, maka pemilih itu akan eksis memilih dia. Begitu juga sebaliknya, kalau banyak janji-janji politik yang belum terealisasi, maka masyarakat akan berusaha untuk mencari sosok lain. Menurut pengamatan saya, Harris punya kemampuan mengeksekusi gagasan-gagasan kampanyenya masa lalu,” bebernya.

Pilkada Pelalawan yang hanya menghadirkan dua kompetitor dikatakan Saiman, akan semakin mempermudah *incumbent* untuk menang. Meski kerinduan pemilih (*voter*) akan munculnya sosok pemimpin baru menjadi ganjalan, namun itu tidak akan terjadi di Pilkada Pelalawan. “Keinginan pemilih munculnya pemimpin baru itu disebabkan sosok yang lama tidak bisa diharapkan lagi. Tapi khusus di Pelalawan saya kira itu tidak terjadi. Apalagi pemilih kita masih sangat *parodial*, khususnya di daerah-daerah pedesaan. Budaya politik di desa itu tergantung seberapa besar mereka mengenal sosok yang muncul,” tukasnya.

Struktur pemilih yang *parodial* masih terjebak pada persoalan figur. Masyarakat akan memilih siapa yang dianggap lebih dikenal, dan siapa yang telah memberi kontribusi buat kemajuan daerah.

Dikatakan, *incumbent* hanya bisa dikalahkan oleh sosok yang memang kapasitasnya diatas. Kemudian *incumbent* memiliki cacat dalam beberapa hal sehingga muncul sosok baru yang dianggap oleh pemilih mampu mengakomodasi atau mengartikulasikan kepentingan rakyat. Jadi, dengan siapapun Harris berpasangan, asal tidak memiliki cacat politik, Saiman berpandangan tidak ada persoalan. Posisi Zardewan dari kalangan

birokrat, dinilai sangat tepat untuk mendongkrak kekuatan yang sudah dimiliki Harris. “Zardewan jelas paham betul bagaimana mengorganiz pemerintahan. Maka secara administratif, ini jauh lebih rapi. Jadi, saya kira pasangan ini sangat pas, karena ada keseimbangan antara Harris dari kalangan politik dan Zardwewan dari birokrat,” pungkas Saiman.*

Masyarakat Jangan Dipecah Belah

Tak ada yang berubah dari seorang HM. Harris sebelum dan jelang Pilkada Pelalawan. Bawaannya tetap santai dan bersahabat. Walau kegiatan hariannya padat merayap, ia tetap menyempatkan diri ngobrol dengan kolega dan mitra kerja di luar jadwal resmi. Bagi Harris pilkada bukan segala-galanya, yang lebih penting dari itu adalah masa depan Pelalawan. ‘Negeri Seiya Sekata’ ini harus kita bangun bersama. Karena itu mari terus jaga persatuan dan kesatuan. “Masyarakat jangan dikotak-kotakkan apalagi dipecah-belah hanya karena kepentingan politik praktis,” kata Harris. Di sela kesibukannya menjamu banyak tamu, Harris menyempatkan diri bertemu **Syafriadi** dari **AZAM** di Pangkalan Kerinci, berikut petikan wawancaranya:

Bagaimana persiapan Anda menghadapi pilkada?

Dari awal sebelum proses pencalonan dimulai saya sudah siap. Dan segala sesuatu yang terkait dengan administrasi juga telah kita siapkan, dari administrasi untuk dibawa ke KPU sampai ke laporan harta kekayaan. Begitupun dengan kesiapan fisik. Syukur *alhamdulillah* saya dalam kondisi sehat wal’afiat.

Tentang persiapan finansial, bagaimana?

Kita persiapkan ala kadarnya saja.

Apa pertimbangan Anda memilih Zardewan menjadi wakil bupati?

Saya sudah mengenal Zardewan sejak lama. Sejak ia aktif di pegawai negeri pada saat saya menjabat ketua DPRD Pelalawan sampai ia

menjabat eselon dua. Terakhir ia bersama saya menjadi sekretaris daerah. Bagaimana sosoknya, kinerjanya dan cara dia memimpin saya tahu. Anda kan tahu kalau Saya orang politik. Sebagai politisi yang dipercaya memangku jabatan publik, sudah barang tentu saya jarang di tempat. Kadang ke lapangan bertemu masyarakat, kadang dinas ke luar kota. *Nah*, ke depan saya ingin memantapkan kerja-kerja di birokrasi, dan kerja tersebut harus dikontrol secara rutin. Sebab sebaik apapun kita bekerja kalau kontrol lemah, bisa-bisa kita yang kena getahnya. Itulah alasan, mengapa saya memilih Zardewan. Ia birokrat tulen yang berpengalaman di pemerintahan. Saya berharap kelemahan di birokrasi dapat ditutupi oleh wakil bupati, termasuk pembinaan aparatur pemerintahan.

Mengapa politisi cenderung tak memilih sesama politisi?

Begini. Saya kan pernah menjadi ketua Asosiasi DPRD seluruh Indonesia. Hasil survey menunjukkan, yang bisa tahan berpasangan sampai ke ujung periode hanya 4,6 persen. Yang terlama 2 tahun delapan bulan, dan yang tercepat tiga bulan. Tiga bulan setelah dilantik mulailah dia minta pembagian wewenang. Membagi ini membagi itu, macam-macam lah. *Nah*, sekarang kita di Pelalawan, dari awal para pendiri kabupaten ini berjuang memekarkan daerah dengan harapan bisa dibangun. Mulai dari yang dilakukan Azmun, kebetulan saya ketua DPRD ikut mendampingi, sampai sekarang kita tak pernah berhenti membangun. Kalau pembangunan itu tidak dimanej dengan hati-hati, bisa fatal akibatnya. Sebab seperti anda ketahui juga, di awal-awal berdiri angka kemiskinan disini cukup tinggi. Bahkan boleh disebut Pelalawan kabupaten termiskin di Riau. Penduduknya heterogen, bermacam suku dan agama ada di sini. Ini yang harus selalu kita bina, kita pertahankan bahkan kita jadikan modal membangun Pelalawan.

Apa yang jadi penyebab pecahkan kongsi bupati dengan wakil dari hasil survey itu?

Ada pecah karena masalah pribadi, ada juga lantaran sesama orang partai. Niat awalnya baik tapi di perjalanan kadang timbul tekanan dari partai politik. Ini yang repot, dua-duanya sama-sama punya kemauan tampil ke depan. Ibarat sebuah kapal, kalau dikemudikan oleh dua nakhoda tentu sulit sampan itu tak akan sampai ke pulau tujuan.

Jadi pecah kongsi itu karena orientasi kekuasaan?

Benar. Karena orientasi kekuasaan. Partai jelas punya tujuan, salah satunya memelihara konstituen. Sekarang Anda bayangkan jika bupati dan wakil itu sama-sama orang partai, keduanya memelihara konstituen dengan cara yang berbeda untuk kepentingan partai yang berbeda pula.

Tentang calon yang hanya mendaftar dua pasang. Ini sesuatu yang Anda inginkan atau sebaliknya?

Semua orang tentu punya kemauan, termasuk saya. Partai juga berkemauan menempatkan kader di eksekutif. Soal dua pasang, dari awal saya hanya menunggu. Saya sudah diskusi dengan kawan-kawan yang waktu itu berpotensi maju. Kepada mereka saya sampaikan, anda mau maju silakan. Dari mana partainya lalu mana koalisinya. Gerinda misalnya, mau mengusung calon silakan, siapa koalisinya. Begitu juga PDIP. Mari kita bagi secara kekeluargaan agar kita bisa sama-sama mendaftar ke KPU. Soal siapa menang dan siapa yang kalah, itu urusan rakyat. Rakyat yang menentukan siapa pemimpin mereka.

Jadi Anda lebih senang dua pasang calon yang maju?

Soal senang, kalau dapat kita langsung jadi, tak dipilih lagi, *hahahaha....* musyawarah mufakat saja. Tapi karena ada ketentuan yang diatur undang-undang kan tidak mungkin dimusyawarahkan.

Di mata Anda Zukri itu, lawan atau kawan?

Saya menilainya tetap kawan, bukan lawan.

Ada ramalan, dari empat kabupaten yang calonnya *head to head* (Pelalawan, Siak, Inhu dan Meranti), medan pertempuran terberat ada di Pelalawan, apa tanggapan anda?

Saya tak pernah memandang lawan itu berat atau ringan. Siapapun yang menjadi rival politik kita ia tetap berat dihadapi. Kita juga tak bisa menilai begitu saja suara rakyat, apalagi mengukurnya dari kekuatan bicara. Masyarakat sekarang sudah cerdas, mereka sangat paham menjatuhkan pilihan mana yang terbaik. Rakyat juga tahu mana retorika alias jual kecap mana bukti. Jadi tak bisa kita menghitung sesuatu dari atas kertas, di lapangan berbeda hasilnya.

Setelah satu periode jadi bupati dan sering turun ke lapangan, bagaimana Anda menilai popularitas Anda, berbanding luruskan dengan elektabilitas?

Tingkat pengenalan itu tak bisa kita ukur secara matematis apalagi penduduk di Pelalawan ini heterogen, ada yang datang ada pula yang pergi. Yang berhak memberi penilaian tentu masyarakat, kita hanya bisa bekerja dan berbuat untuk kepentingan masyarakat. Jadi, kalau Anda tanya soal ini, silakan tanya ke masyarakat.

Target Anda menang berapa persen?

Semua calon pasti punya target, termasuk saya. Sama juga dengan Zukri, targetnya menang. Kalau ada orang maju tapi tidak punya target menang buat apa maju. Dari target ini kemudian timbul perlawanan.

Situasi politik Pelalawan jelang pilkada terasa kondusif. Diharapkan situasi terjaga paling tidak sampai bupati dan wakil bupati terpilih dilantik. Apa langkah-langkah yang Anda ambil?

Kita terus mensosialisasikan ke masyarakat supaya tetap menjaga kondusifitas. Calon juga kita minta tidak mengadu domba masyarakat. Saya sendiri setiap berjumpa masyarakat, termasuk saat turun ke

lapangan, selalu berpesan mari kita jaga kesatuan dan persatuan. Sebab kalau situasi ini tidak terjaga, misalnya, timbul anarkisme, yang rugi kita juga. Lihatlah daerah-daerah yang situasi pilkadanya mencekam, rakyat menjadi tidak nyaman, masyarakat susah beraktivitas dan bekerja, anak-anak terlantar ke sekolah. Siapa yang rugi? Jadi, lebih baik kita sama-sama menjaga negeri ini jangan karena pilkada kita saling berantuk.

Dalam pertarungan *head to head* gesekan dan pembunuhan karakter sangat berpotensi terjadi, apakah Anda sudah mengantisipasinya?

Makanya kita ingatkan masyarakat jangan terpancing oleh isu-isu negatif yang dapat memecah belah kita. Jangan bentuk opini calon 'A' begini, calon 'B' begini. Kalau masyarakat merasa ada sesuatu yang diragukan atas kredibilitas calon, baiknya langsung saja tanya ke yang bersangkutan apakah ke Zukri-Anas atau ke Harris-Zardewan. Kita terbuka saja agar masyarakat aman. Jangan sebar cerita ke cerita karena itu dapat menimbulkan fitnah. Ini yang bikin daerah menjadi tidak kondusif.

Harris-Zardewan, Zukri Anas. Kalau Anda disuruh memilih, Anda pilih siapa?

Tentu memilih Harris Zardewan.....*hahahaha....**

Harris-Zardewan, Seiya Sekata Membangun Pelalawan

Duet Harris-Zardewan akan menjadi pasangan yang seiya sekata, sehilir semudik untuk melanjutkan pembangunan Kabupaten Pelalawan. Di tangan kedua tokoh itu Pelalawan menjadi lebih Cerdas, Sehat, Lancar, Terang, Makmur, Eksotis dan Teknopolit. Lanjutkan!

Siapa tak kenal HM. Harris. Putera kelahiran Langgam yang kini menjabat Bupati Pelalawan itu, namanya memang sudah dikenal luas masyarakat. Bertubuh kecil, berpembawaan sederhana, tak banyak bicara, Harris lebih senang tampil apa adanya. Tapi soal politik jangan ditanya. Ia nyaris tak pernah kalah.

Tengoklah kariernya. Lelaki yang banyak belajar secara otodidak dan tak pernah duduk di bangku kuliah ini, dua periode terpilih menjadi ketua DPRD Pelalawan. Setelah itu menjadi wakil bupati, dan kini bupati. Di tangan dingin lelaki lincah ini, Partai Golkar tak terkalahlah di negeri kelahirannya. Setiap pemilu, 'Pohon Beringin' selalu bertengger di kursi ketua dewan.

Kepemimpinan Harris di kursi bupati pun berbeda dengan kebanyakan kepala daerah lain. Ia lebih suka berada di tengah-tengah warga, turun ke desa-desa, bertemu masyarakat, melihat langsung kondisi lapangan. Lalu menyerap aspirasi warga. Menurut Harris, metode ini lebih ampuh untuk menyusun sebuah perencanaan pembangunan.

"Keinginan masyarakat itu sederhana. Atasi kemiskinan yang mereka hadapi, berikan pelayanan maksimal terhadap kesehatan, ciptakan lapangan kerja, pendidikan murah dan berkualitas, dan bangun infrastruktur yang mereka butuhkan. Selesai," kata Harris kepada **AZAM** di Pangkalan Kerinci.

Dalam mendengar suara rakyat, lanjut Harris, kita tak boleh ego. Harus demokratis. Sikap demokratisasi bagi Harris sudah menjadi prinsip hidupnya dalam berpolitik. Itu karena, di samping ia memang berusaha menghargai setiap pandangan dan pemikiran orang lain, demokratisasi menjadi kata kunci membangun daerah yang ia pimpin.

“Masyarakat berhak menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah termasuk masa depan mereka. Karenanya, saya senang berada di tengah-tengah warga. Dari sana saya paham apa yang dimaui masyarakat, dan dari kemauannya itu pula kita merumuskan langkah-langkah strategis pembangunan Kabupaten Pelalawan,” papar Harris.

Harris berkomitmen, menjadikan Pelalawan negeri yang maju, yang tak lagi dipandang sebelah mata oleh pihak luar. Dan, untuk keperluan itu ia tiada lelah berfikir mencari terobosan, melobi pihak-pihak terkait di Pusat agar APBN ikut mendanai ‘Negeri Bekas Kerajaan Pelalawan’ itu. Tak cuma sampai disitu, ia juga menggedor pintu-pintu swasta supaya berinvestasi sebanyak mungkin di Pelalawan. Hasilnya, satu per satu problem yang dihadapi kabupaten ini terselesaikan di tangan Harris.

Listrik misalnya. Melalui Langgam Power Pelalawan mampu menerangi desa-desa yang selama ini gelap gulita. Begitu pun dengan pendidikan dan kesehatan, ekonomi kerakyatan, semua berjalan menurut rencana pembangunan yang telah ia gagas.

Menurut Ratna Mainar, istri Harris, awalnya ia mengaku tak setuju Harris terjun ke politik. Itu karena sebagai seorang guru ia tak paham dengan seluk beluk politik. Namun tanpa sepengetahuan dirinya Harris tiba-tiba mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Pelalawan 1999-2004. “Waktu Pelalawan dimekarkan dari Kabupaten Kampar tahun 1999, Ratna sempat bingung karena Harris minta dido’akan supaya terpilih sebagai Anggota DPRD. *Alhamdulillah*, do’a kita diijabah Allah, bapak terpilih menjadi anggota dari Partai Golkar hingga kemudian menduduki kursi Ketua DPRD.” Kenang Ratna.

Sejak menjabat ketua dewan, Harris lebih banyak menghabiskan waktu untuk urusan politik. Dan, dari sini kariernya terus menanjak.

Ditunjuk menjadi Ketua Umum Adkasi (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia) dan Ketua Partai Golkar Pelalawan. Lalu menjadi wakil bupati dan kini Bupati Pelalawan.

Next? Kepiawaian Harris di dunia politik kembali diuji. Setelah sukses memimpin Kabupaten Pelalawan di periode pertama, 'si kecil cabe rawit' ini bertekad melanjutkan kepemimpinannya di periode kedua setelah beruji nyali di pilkada serentak Desember depan. "Tak ada persiapan khusus. Saya hanya menjalani pilkada seperti air mengalir. Yang penting lima tahun di kursi bupati, saya sudah berusaha maksimal berbuat yang terbaik untuk kemajuan Pelalawan. Ke depan, saya ingin Pelalawan lebih baik lagi. Tujuh program strategis yang sudah kita rancang dimaksudkan untuk menjawab problem rakyat. Jika rakyat merasakan dampaknya, tugas saya berikutnya adalah menuntaskan pencapaian ketujuh program itu di periode kedua," papar Harris.

Lebih dari itu, lanjutnya, semua kita serahkan kepada Allah. Yang Maha Kuasa telah menentukan perjalanan hidup seorang hamba. "Kita hanya bisa berikhtiar dan berdoa semoga yang kita inginkan diridhoi Allah," ucap lelaki cerdas ini.

Zardewan, Birokrat Tulen

Sejak pensiun dari pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan, Drs H Zardewan tak serta merta terjun ke dunia politik seperti *dilakoni* kebanyakan pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) lain. Sebaliknya Zardewan lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Bahkan, ia tak pernah menduga jika di Pilkada Serentak 2015, dirinya akan digandeng Harris menjadi wakil bupati.

Semasa masih aktif menjadi ASN, lelaki kelahiran Pelalawan ini pernah dipercaya atasan menjabat sejumlah jabatan. Antara lain Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Inspektorat, Asisiten II Bidang Ekonomi Pembangunan, Plt Sekda, Pelaksana tugas Bupati Pelalawan, kemudian ditunjuk menjadi Sekda. Posisi terakhir ini ia jalani selama tiga sebelum akhirnya Zardewan dipensiunkan oleh negara sebagai ASN. Agaknya

setelah memperhatikan kinerja dan pengalaman Zardewan inilah yang bikin Harris ‘jatuh cinta’ , lalu memutuskan diri ‘meminang’ mantan Camat di Kabupaten Rokan Hulu ini berpasangan di pilkada.

Sebagai pamong karier tentu tak mudah bagi Zardewan mengikuti gendang dan irama musik politiknya Harris memenangkan pilkada. Di samping dunia politik masih tabu bagi Zardewan, langkah kaki dan ayunan tangan politisi berbeda dengan orang-orang birokrat. Belum lagi gerak mulut dan lidahnya. Akan tetapi karena perjalanan karier birokasinya juga ia habiskan di tanah kelahiran, maka tak terlalu susah bagi Zardewan beradaptasi. Ia pernah berbupati dengan Tengku Azmun Jaafar selama dua periode bertugas, dan beberapa kali jabatan berbatasan dengan Harris.

“Tujuh program strategis yang digagas Pak Harris sudah sangat tepat. Adapun hasil-hasilnya telah pula dirasa manfaatnya oleh masyarakat. Pelalawan hari ini jauh lebih maju dari yang sudah-sudah. Ini patut kita syukuri,” komentar Zardewan.

Zardewan menyebut, dalam membantu Bupati Harris mempercepat pelaksanaan tujuh program strategis itu, dirinya tak canggung-canggung beriya sekata dengan Harris. Berlayar satu biduk untuk kemajuan Kabupaten Pelalawan. “Ketika saya memutuskan untuk menjadi pegawai negeri sipil, saya menyadari bahwa hidup saya adalah sebuah pengabdian. Dan, kini saya dipanggil lagi untuk mengabdikan. *Insyallah* akan saya lanjutkan pengabdian itu bersama Pak Harris,” tutur lelaki berpembawaan lembut dan tenang.*

HAZAR

Kerahkan Semua Kekuatan

Tim Sukses Harris-Zardewan yang tergabung dalam Koalisi Amanah Rakyat Pelalawan Bersatu akan mengerahkan semua kekuatan memenangkan HaZar di Pilkada Serentak, 9 Desember depan.

Menurut Nasaruddin SH MH, Ketua Harian Partai Golkar Kabupaten Pelalawan, partai politik pendukung sudah menyamakan persepsi memenangkan HaZar. “Sebelum kita mengantarkan pasangan Pak Harris dan Pak Zardewan ke KPU untuk mendaftar, kita terlebih dahulu mendeklarasikan dukungan buat pasangan ini,” kata Nasaruddin kepada Asnol dari **AZAM** di Pangkalan Kerinci.

Awalnya, tersedia delapan partai yang akan bergabung dalam koalisi ini. Masing-masing Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PKB, PBB, Nasdem dan PPP. Akan tetapi disebabkan adanya konflik internal di Partai Golkar dan PPP, Komisi Pemilihan Umum hanya mencatat enam partai yang resmi mendukung HaZar. Yakni diluar Golkar dan PPP.

Walau kedua partai warisan Orde Baru ini dianulir KPU, syarat pencalonan HaZar masih di atas ambang batas yang ditetapkan undang-undang. Atau memenuhi quota 20 persen akumulasi kursi DPRD Pelalawan. “Jadi, tak masalah. Harris dan Zardewan masih bisa menjadi peserta pilkada, dan ini sudah kita antisipasi jauh-jauh hari,” tandas Nasaruddin yang juga Ketua DPRD Pelalawan.

Dilanjutkan Nasar, salah satu alasan mengapa pasangan ini pantas didukung dan dimenangkan adalah karena apa yang dilakukan Harris dalam masa kepemimpinannya, telah menunjukkan bukti nyata. Harris selalu bertekad memperjuangkan pembangunan dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat di ‘Negeri Seiya Sekata’ itu. “Masyarakat dapat melihat dan merasakan sendiri apa yang dilakukan Pak Harris. Tujuh program strategis Pemkab Pelalawan menjadi bukti buah dari perjuangan Pak Harris untuk Kabupaten Pelalawan,” tegas Nasar. Ketujuh program itu meliputi Pelalawan Cerdas, Pelalawan Sehat, Pelalawan Lancar, Pelalawan Terang, Pelalawan Makmur, Pelalawan Eksotis dan Teknopolitan.

Di bawah kepemimpinan Harris, semua persoalan yang dihadapi masyarakat satu persatu juga diurai Pemkab Pelalawan, seperti biaya sekolah yang mahal, susah mengakses pelayanan kesehatan, infrastruktur yang tidak memadai di seluruh wilayah kabupaten, serta tidak tersentuhnya penerangan listrik yang ujungnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Begitu pun dengan program PPIDK dimana satu desa diberi dana pembangunan antara Rp 400-500 juta.

Nasar juga memuji kebijakan Harris di bidang pendidikan, dimana 25% APBD dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Angka ini lebih tinggi dari batas yang ditetapkan undang-undang yang hanya mewajibkan alokasi dana pendidikan sebesar 20%. “Ini bukti nyata bahwa Harris sangat serius meningkatkan mutu pendidikan anak-anak kita,” tegas Nasar sambil melontar pujian.

Energi Positif

Figur Drs. H. Zardewan yang menjadi *tandem* Harris diyakini menjadi energi positif dalam pembangunan Pelalawan ke depan. Pasalnya, Zardewan adalah seorang pamong berpengalaman mengelola pemerintahan. Sebelum pensiun di Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan, Zardewan sempat menjadi sekretaris daerah. Ia juga dikenal figur tenang dan rendah hati.

Zardewan sangat cocok mendampingi Harris yang berlatar belakang politisi. Duet politisi-birokrat menata pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dinilai Nasar, akan membawa Pelalawan lebih maju dari kondisi hari ini. “Saya menghimbau masyarakat mensukseskan pasangan

ini, dan tidak ragu-ragu menjatuhkan pilihan kepada Harris-Zardewan. Keduanya sudah menunjukkan bukti memajukan Pelalawan,” tandas Nasar.

Hal senada diungkap oleh Tengku Zulmizan Assegaff. Politisi Partai Amanat Nasional ini mengaku, tak hendak jumawa. Ia bersama tim pendukung lain malah memposisikan diri sebagai *underdog*. “Tujuannya supaya tim semangat bekerja. Kita juga tidak ingin terbuai oleh kekuatan partai yang jumlahnya mencapai 25 kursi di DPRD. Memang di atas kertas kita diunggulkan, namun asumsi itu tak membuat kita terlena. Bagaimanapun kompetitor kita sekarang sangat berat. Karenanya tim tidak boleh lengah dan bersantai ria,” ucap Zulmizan.

Zulmizan mengaku, ia dan kawan-kawan sudah punya strategi sendiri. Namun demikian, langkah penting yang harus dilakukan adalah konsolidasi internal. “Kita akan menginventarisir semua kekuatan. Baik kekuatan partai pengusung maupun kekuatan diluar partai. Sayap-sayap dan relawan semua kita inventarisir untuk kemudian dibagi-dibagi tugas. Pokoknya, tiada hari tanpa penggalangan,” tegasnya.

Sebagai orang yang dipercaya memimpin tim, Zulmizan tiada henti menghimbau semua pihak khususnya partai pengusung untuk menyatukan langkah. “Karena ini adalah pertarungan kita bersama, dan bukan calon semata, maka kita harus *full power*,” katanya lagi.

Soal target, Zulmizan menegaskan menang. Tak peduli menang mutlak atau menang tipis, yang penting menang. Ia juga optimis keenam partai pengusung akan optimal menjalankan mesin parpol. “Kedepan, kita akan mencermati apapun masalah politik yang terjadi. Entah itu serangan atau *black campaign*. Kita sudah punya strategi sendiri mengatasinya,” tegas Zulmizan.*

Program Harris Cukup Bagus

Kabupaten Pelalawan memang kian menjadi magnet bagi banyak pihak khususnya para pendatang. Bahkan sebagai kabupaten pemekaran, Pelalawan dianggap telah berhasil dalam membangun daerah.

Pemekaran daerah memang dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

Keinginan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal, penyerapan pegawai pemerintahan, serta peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah juga menjadi alasan bagi tokoh tokoh masyarakat di empat kecamatan di Kabupaten Kampar yakni Kecamatan Langgam, Kecamatan Bunut, Kecamatan Pangkalan Kuras dan Kecamatan Kuala Kampar untuk menjadi daerah otonomi baru.

Dengan luas 13.924, 94 km², dengan berbagai potensi dan kekayaan alam yang dimiliki, harapan yang sangat besar dari pemekaran daerah adalah tercapainya tujuan-tujuan yang telah dirumuskan oleh para tokoh yang menginginkan adanya daerah otonomi. Agar terwujud Kabupaten Pelalawan yang maju dan sejahtera melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh pertanian yang unggul dan industri yang tangguh dalam masyarakat yang beradab, beriman, bertaqwa dan kebudayaan melayu tahun 2030.

Demikian dijelaskan tokoh masyarakat yang ikut berjuang dalam pembentukan Kabupaten Pelalawan, Tengku Dahril. Menurutnya, dahulu negeri ini cuma dipandang sebelah mata. Rentang kendali pemerintahan jauh. Perkembangan pembangunan lambat. Tingkat kemiskinan tinggi. Infrastruktur jalan tak memadai.

Hasilnya boleh dilihat saat ini. Semua orang berdecak kagum. Geliat pembangunan sejak dipimpin Azmun Jaafar hingga HM Harris sekarang begitu terlihat. “Sebagai orang yang ikut berjuang bersama tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Pelalawan lainnya, kami merasa pembangunan Pelalawan terus mengalami peningkatan. Meskipun dirasa masih ada kelemahan-kelemahan disana-sini namun kita percaya itu bisa diatasi. Yang paling penting jangan lupa jasa-jasa para pejuang pembentukan kabupaten ini,” katanya.

Kepiawaian dalam menata sistem pemerintahan dan berkat kerjasama dengan semua pihak wajah Kabupaten Pelalawan kini bak seorang gadis yang lagi mekar-mekarnya.

Penerangan listrik di rumah rumah warga yang dulunya hanya sebatas mimpi bagi sebagian besar masyarakat Kabupaten Pelalawan sekarang telah dapat melampaui imajinasi mereka sebelumnya. Bola-bola kristal menyala di langit langit rumah warga, barang barang elektronik tak asing lagi bagi rumah tangga-rumah tangga karena adanya aliran listrik.

“Kalau kita punya keinginan, tidak ada yang tidak mungkin, kita punya potensi sumber daya gas alam yang melimpah, kenapa tidak dikelola secara maksimal. Kita cari investornya. Program-program Pak Haris cukup bagus untuk menjawab itu semua. Kekurangan-kekurangan beliau pasti ada tapi bila dilakukan bersama-sama dan juga melibatkan sumbang fikiran tokoh-tokoh pejuang negeri ini, maka Kabupaten Pelalawan akan makin molekul,” ucap mantan Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau ini.

Dia menambahkan, program-program Pemerintah Propinsi Riau dan Pusat harus dapat disinergikan dengan program pemerintah daerah. Harapannya pembangunan yang tepat sasaran dan cepat manfaat dapat

dilaksanakan. Yang pada akhirnya tujuan dan cita-cita pendiri Kabupaten Pelalawan dapat terwujud.

Namun catatan sejarah tentang keberhasilan Kabupaten Pelalawan meraih mimpi anak negeri ini tentunya harus menjadikan masyarakat Kabupaten Pelalawan mensyukuri apa yang telah dirasakan saat ini. Bahwa Pelalawan sudah berubah 180 derajat dengan Pelalawan 15 tahun silam. Walaupun belum bisa dikatakan selesai, namun sudah sangat layak dikatakan sempurna untuk ukuran daerah otonom tingkat II. “Semoga prestasi ini dapat dipertahankan dan selalu ada perbaikan untuk Kabupaten Pelalawan yang lebih baik,” pesannya.*

BAGIAN XI

SPS
Sistem Perencanaan Peta

اڻڳاٽن ذريعات اٽق ملايو



AZAM



MURSINI-HALIM BERJALAN SEIRING UNTUK KUANSING

H Mursini

H Halim

'Perang Baliho' Pilkada Kuansing

Perang baliho semakin nyata di sepanjang Jalan menuju Taluk Kuantan. Tim sukses menganggap, baliho masih efektif mensosialisasikan figur calon ke masyarakat. Pilkada Kuansing Seru!

Seperti daerah lain yang tengah menghadapi pesta demokrasi, di Kabupaten Kuansing juga bertabur pemasangan baliho kandidat. Memasuki Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, kita akan dihadapkan dengan beberapa baliho calon kepala daerah. Perang baliho, semakin nyata manakala kita terus ke arah Kebun Lado, Kecamatan Singingi.

Jumlahnya lumayan banyak. Dan terlihat berimbang diantara masing-masing calon. Baliho meski ukurannya lebih kecil dibanding baliho calon lain, baliho Mursini berbaju melayu warna hijau dan biru untuk Halim, hampir merata terpasang di pinggir jalan sebelah kiri. Sama dengan Indra Putra-Komprensi (IKO) banyak dijumpai di sebelah kanan jalan menuju Kota Taluk Kuantan. Di gambar, Indra terlihat tersenyum dengan pasangannya Komprensi.

Berbeda dengan baliho Mursini-Halim yang terpasang di pohon atau terpanjang dengan tonggak kayu, baliho IKO terpasang lebih kokoh dengan tonggak besi. Sementara Mardjan Ustha-Muslim juga tak mau kalah. Baliho pasangan ini menghiasi berbagai sudut jalan menuju Taluk Kuantan.

Perang baliho memang sudah lama dimulai. Tapi semakin memanas sebelum dan setelah pasangan calon mendaftar ke KPU. Tak terkecuali Imron-Mukhlis, yang balihonya masih terlihat. Meski dinyatakan gagal

mendaftar ke KPU, pasangan ini tetap berjuang mendapatkan hak sebagai pasangan calon.

Genderang perang antarbalon memang sudah lama ditabuh. Persaingan bukan lagi soal baliho. Termasuk upaya jegal menjegal. Mursini-Halim, misalnya, nyaris tak mendapat perahu dan gagal mendaftar ke KPU. Kepastiannya berangkat ke KPU ada di *injuri time*. Kabarnya, saat ini pun, Mursini-Halim masih terancam digugurkan karena kurang syarat. Partai PPP yang mendukungnya, ternyata juga mendukung pasangan lain. Keabsahan informasi ini tentu ada di KPU yang sedang memverifikasi dukungan partai politik balon, dan mengumumkan ketetapanannya 24 Agustus depan.

Masalahnya, sebagian masyarakat Kuansing terlanjur mencap demokrasi di Kuantan Singingi seakan berjalan kurang sehat. Peristiwa lima tahun lalu tetap membekas bagi masyarakat, dimana pilkada berujung pada aksi anarkis karena dugaan praktek kecurangan.

Wakil Bupati Kuantan Singingi Zulkifli mengharapkan, Pemilukada Kuantan Singingi berjalan sebaik-baiknya. “Harapan saya, pemilukada dapat membawa kecerdasan bagi masyarakat. Bukan sebaliknya, pembodohan elite politik kepada warganya,” ujar Zulkifli kepada **AZAM** di Taluk Kuantan.

Positif Bagi Warga

Soal perang baliho di berbagai sudut jalan, menurut Zulkifli, itu hal wajar. Selagi tidak mengganggu pengguna jalan dan tak menyalahi aturan KPU, tidak ada masalah. Bahkan baliho-baliho itu memiliki nilai positif karena masyarakat bisa mengenal wajah calon pemimpin mereka. Yang tidak baik itu, katanya, bila perang baliho disertai aksi perusakan terhadap baliho yang tidak disukai.

Zulkifli mengakui, pelaksanaan demokrasi di Kuantan Singingi belum berjalan secara baik. Momentum pilkada saat ini, ujarnya, hendaknya dijadikan ajang pencerdasan. Siapapun yang menang dan dilantik menjadi bupati dan wakil bupati, mesti mendorong terciptanya demokrasi yang

sehat.

Harapan Zulkifli, tentu harapan semua masyarakat Kuantan Singingi. Zulfahri, salah seorang tokoh Kuantan Singingi yang dijumpai **AZAM** di Mesjid Aljihad di tepian Sungai Kuantan, juga berpendapat sama.

Pemilukada Serentak 2015, taambahnya, hendaknya berjalan lancar. Jangan ada lagi kecurangan baik dilakukan tim sukses, pasangan maupun penyelenggara. Soal perang baliho, menurut pensiunan PNS ini, adalah hal wajar. Ia mengatakan, pemilukada tidak ramai bila tidak ada pemasangan baliho. Sepanjang tidak mengganggu pengguna jalan, tidak dilarang oleh KPU dan pemkab, pemasangan baliho tentu tak ada masalah.

Baliho terbesar yang dijumpai wartawan **AZAM** ketika berkunjung ke Taluk Kuantan pekan lalu, terpasang di Markas Besar Mursini-Halim, dekat taman air di jantung Kota Taluk Kuantan. Di sana, **AZAM** bertemu Chaidir dan Skedar Sihura. Keduanya adalah tim sukses pasangan Mursini-Halim.

Kedua tokoh itu mengatakan, baliho masih menjadi pilihan untuk mensosialisasikan kandidat. “Kalau Pak Mursini mungkin sudah banyak yang mengenalnya. Tapi Pak Haji Halim, mungkin banyak juga yang belum mengenali wajahnya. Dengan memasang baliho, target sosialisasi diharapkan tercapai,” ujar Chaidir.

Ditanya soal strategi tim sukses memenangkan jagoannya, Chaidir dengan tegas mengatakan, gaya blusukan masih menjadi andalan tim Mursini-Halim. Masyarakat, tegasnya, perlu disapa, diyakinkan bahwa kita punya komitmen membawa daerah ini ke arah yang lebih baik. Pihaknya menargetkan memenangkan pertarungan lebih dari 30 persen jumlah suara pemilih. Perhitungan ini, kata dia, tidak muluk-muluk akan tetapi berdasarkan hasil survei.

“Target kami, memenangkan pilkada sesuai angka di hasil survei yang dilakukan LDSI,” ujar Chaidir.

Mursini memang paling populer. Maklum, politisi Partai Persatuan Pembangunan itu adalah mantan Wakil Bupati Kuantan Singingi yang kini menjadi anggota DPRDRiau. Nama Mursini kian melambung di

Pemilukada 2010. Dia yang waktu itu menjadi wakil Sukarmis, maju mencalonkan diri melawan Sukarmis secara *head to head*. Mursini menggandeng Gumpita, tokoh muda dari Partai Golkar, sementara Sukarmis berpasangan dengan Zulkifli yang waktu itu menjadi Sekda Kuansing.

Pribadi yang Religius

Mursini merupakan sosok sederhana. *Low profile*, penuh empati dan bersahaja. Meski sudah menjadi pejabat, ia tetap seperti layaknya masyarakat biasa. Gaya hidupnya tak berubah sedikit pun meski sudah mendapatkan limpahan rezeki. Ia juga pribadi yang religius. Menurut orang-orang yang pernah dekat, termasuk salah seorang mantan ajudannya, Mursini selalu menjalankan perintah agama, terutama sholat diawal waktu. Bahkan ia sering diminta menjadi khatib Jum'at.

Di pilkada tahun ini Mursini menggandeng seorang pengusaha keturunan Tionghua, H Halim. Pemilik taman dan kolam renang di pusat Kota Taluk Kuantan serta berbagai jenis usaha di Kuansing itu, dianggapnya sebagai partner yang tepat memajukan Kuansing. Haji Halim, kata Mursini, meski berdarah Tionghua, tetapi ia beragama Islam dan beristrikan pribumi. Keislamannya tak bisa diragukan lagi. Selain sudah bergelar haji, Halim sering terlihat menjadi jemaah di mesjid yang terletak tak jauh dari kediamannya di Kota Taluk Kuantan.

Menurut sejumlah tokoh, sosok Halim adalah figur yang dermawan, dan pengusaha sukses punya *track record* yang baik. Belum pernah terdengar kisah miring baik dalam menjalankan usaha maupun menjalani kehidupan di masyarakat. Bahkan, pria berkumis tipis ini dianggap pribadi dermawan yang suka membantu pembangunan mesjid. Bantuan-bantuan yang diberikan Halim, bukan saat pilkada saja, tapi jauh sebelum pesta demokrasi dimulai.

Apa yang mendorong Halim tertarik berpolitik? Menurut penuturannya, dirinya maju bukan untuk kepentingan pribadi. "Semua

fasilitas sudah saya miliki. Kepentingan yang akan saya bawa hanya kepentingan masyarakat, bagaimana Kuansing maju sesuai semboyannya,” ujar Halim yang akrab disapa Aliang itu. Niat itu, tambah Halim, datang dari lubuk hatinya yang paling dalam. Yaitu membantu masyarakat. “Jika mau mencari uang, lebih baik saya fokus dengan pekerjaan sekarang, bekerja di swasta,” tegas Halim.

Halim menjelaskan, perekonomian masyarakat bisa berjalan lancar jika infrastruktur seperti jalan bagus. Begitupun sebaliknya. Karena itu, bila nanti ia terpilih bersama Mursini, mereka akan fokus pada kepentingan rakyat. “Ketika infrastruktur sudah bagus, kita bisa menghidupkan sektor lainnya,” tukas Halim.*

Mursini-Halim Makin Menguat

Kuansing butuh sosok birokrat yang mampu membawa perubahan di struktur pemerintahan dan sosok bisnis yang membuat daerah ini maju dan berkembang. Duet Mursini-Halim, bisa seperti Jokowi dan Ahok di Jakarta.

Pilkada di Kabupaten Kuantan Singingi cukup menarik disimak. Pasalnya, bupati negeri pacu jalur itu tidak dapat ikut bertarung karena terganjal aturan. Sukarmis, sang bupati sudah dua periode memerintah daerah tersebut.

Namun Sukarmis tampaknya tak ingin melepaskan begitu saja kuku-kuku kekuasaannya. Melalui kader dan orang dekatnya, ia ingin melanggengkan kekuatannya. Indra Putra dan Komperensi menjadi pilihan. Kedua orang ini merupakan kader Partai Golkar yang cukup punya massa banyak di dapil masing-masing. Bahkan Indra Putra, disebut-sebut sebagai “putra mahkota”.

Tapi menurut pengamat politik Riau, DR Hasanuddin MSi, jalan menuju kekuasaan bagi Indra takkan mulus karena ada faktor Mursini. Pada Pilkada Kuansing 2011, Mursini yang berpasangan dengan Gumpita berhasil mendulang suara besar. Berdasarkan hasil penghitungan sejumlah lembaga survei dan KPU, Mursini-Gumpita mampu unggul dari pasangan Sukarmis-Zulkifli. Namun, pada saat KPU mengumumkan hasil penghitungan suara secara final, Sukarmis-Zulkifli dinyatakan menang. “Hasil itu sama-sama kita ketahui, Mursini-Gumpita membawanya ke Mahkamah Konstitusi karena diduga ada kecurangan. Tapi MK akhirnya menguatkan keputusan KPU Kuansing memenangkan kubu Sukarmis-Zulkifli,” katanya.

Kekuatan Indra tentu berbeda dengan Sukarmis, kata pengajar di Universitas Riau ini. Walaupun Sukarmis masih menjabat bupati hingga 2016 tapi dia takkan mampu menggerakkan semua sumber dayanya dengan maksimal. Sebab, masyarakat sudah mengetahui bahwa yang dipilih bukan Sukarmis tapi Indra. "Namun saya memprediksi yang bakal bertarung sengit itu ya antara pasangan Indra Putra-Komperensi (IKO) dan Mursini-Halim (Mudha)," ujarnya.

Prediksi Hasanuddin ini juga diamini Drs Asripilyadi SE MM. Dosen salah satu perguruan tinggi di Riau ini mengatakan, pasangan Indra Putra-Komperensi dan Mursini-Halim belakangan jadi pembicaraan hangat kalangan akar rumput. Dan diprediksi sebagai paket yang akan bertarung habis-habisan memperebutkan dukungan konstituen, guna memenangkan pilkada Kuansing.

Sementara itu paket Mardjan Ustha-Muslim (MAS), diprediksi akan jadi kuda hitam dan penghadang kedua paket diatas. Katanya, akhir-akhir ini di beberapa pelosok daerah di Kuansing, kebesaran paket IKO tidak disangsikan lagi, untuk meraup massa akar rumput. Paket Mursini-Halim juga secara perlahan namun pasti mulai tumbuh dan berkembang meluaskan sayapnya demi meraup dukungan warga.

Menurut dia, perbincangan kalangan akar rumput terkait persaingan paket dalam pilkada Kuansing tahun ini cukup menghangat. Kata dia, meskipun dirinya bukan tim sukses salah satu figur tetapi ia sering mengamati pembicaraan warga, bahwa saat ini paket yang lagi bersaing di akar rumput adalah Paket IKO dan MUDHA. Namun, katanya, belakangan paket MUDHA mulai menguat dan jadi pembicaraan hangat masyarakat di pasar-pasar dan diprediksi bisa jadi jawara pada 9 Desember mendatang.

"Kita lihat saja karena ini fenomena arus bawah dan silahkan paket dan timsus menerjemahkan sendiri fenomena itu termasuk cara memenangkan kedua figur tersebut. Semua punya peluang dan siapa yang bekerja baik, pandai merangkul massa dialah yang berpeluang memenangkan pertarungan," bebernya.

“Pasangan Mursini-Halim mendapat respon dan dukungan besar dari warga karena mereka santun. Ramah peduli dan ingin memajukan daerah,” ucap salah satu pengurus dewan pendidikan di Riau ini menjelaskan. Mursini dikenal secara luas sejak puluhan tahun lalu. Sementara Halim, sosok yang tegas dan pebisnis. “Akan terjadi perubahan besar di Kuansing ke depannya,” terangnya. Kuansing butuh sosok birokrat yang mampu membawa perubahan di struktur pemerintahan dan sosok bisnis yang membuat daerah ini maju dan berkembang. “Pasangan Mursini dan Halim, bisa seperti Jokowi dan Ahok,” katanya.*

USAHA, Jadikan Kuansing Unggul

Meski belum ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), hampir dapat dipastikan pasangan Mursini-Halim akan menjadi satu dari tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati yang bertarung di Pilkada Kabupaten Kuantan Singingi, 9 Desember mendatang.

Bagi Mursini, bertarung di pilkada bukan barang baru. Karena sebelumnya ia menjadi Wakil Bupati Kuansing 2006-2011, dan kembali mencalonkan diri sebagai calon bupati tahun 2011. Pada Pilkada tahun ini Mursini-Halim diusung tiga partai politik: PPP, Gerindra dan PDIP.

Apa yang membuat Mursini kembali ikut bertarung memperebutkan kursi Bupati Kuansing 2016-2021. Saat ditemui Endrizal Yusten dan Beni Hendra dari **AZAM** di kediamannya Pekanbaru, Mursini menyampaikan alasannya maju dan bertarung di Pilkada Kuansing 2015. Berikut petikannya.

Apa yang mendorong Anda maju di Pilkada Kuansing tahun ini?

Maju pada Pilkada Kuansing sebenarnya atas dorongan dan diminta masyarakat. Atas dorongan itulah saya kembali maju tahun ini. Kalau saya tidak merespon keinginan masyarakat, agak sombong juga kita rasanya.

Bagaimana cara masyarakat meminta Anda?

Bermacam-macam. Ada tokoh-tokoh masyarakat yang langsung datang ke rumah dan meminta saya untuk mencalonkan kembali pada pilkada mendatang. Ada juga yang menyampaikannya saat ketemu dalam suatu acara. Jadi permintaan sering disampaikan kepada saya.

Apa sebenarnya yang diinginkan masyarakat Kuansing?

Menurut masyarakat yang datang ke saya, jika seandainya diberi amanah memimpin Kuansing lima tahun ke depan, masyarakat ingin saya bisa membangun Kuansing lebih baik dan lebih maju lagi. Dan mereka berharap supaya pembangunan di Kuansing dapat lebih optimal, baik dibidang pelayanan pemerintahan maupun di berbagai bidang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Bagaimana pandangan Anda tentang potensi yang ada di Kuansing?

Kuansing memiliki banyak potensi, baik potensi di bidang perkebunan, pertanian, pertambangan dan juga pariwisata. Disamping letak geografisnya yang sangat strategis, berbatasan langsung dengan beberapa provinsi seperti Sumatera Barat dan Provinsi Jambi, serta beberapa kabupaten seperti Kabupaten Tebo di Jambi, Sijunjung dan Damas Raya di Sumatera Barat, sementara untuk wilayah Provinsi Riau berbatasan langsung dengan Kampar, Pelalawan dan Inhu. Dengan letaknya yang strategis ini kita mempunyai keyakinan bahwa Kabupaten Kuansing bisa lebih maju lagi dan bisa lebih unggul dari kabupaten lain di Riau, walaupun Kuansing tidak memiliki sumber daya alam migas, tapi potensi lainnya akan mampu memberi kontribusi lebih besar kalau dikelola secara sungguh-sungguh. Potensi lain adalah pariwisata alam.

Apakah semua potensi itu sudah dikelola baik sehingga memberi kontribusi bagi masyarakat Kuansing?

Sejauh ini berbagai potensi tersebut belum terkelola optimal, seperti kelapa sawit secara umum memang perkebunan sawit sangat banyak di Kuansing, tapi perkebunan yang ada saat ini lebih banyak dimiliki perusahaan. Sementara perkebunan sawit milik masyarakat masih sangat sedikit jumlahnya. Padahal jika seandainya setiap warga memiliki dua hektare saja kebun sawit tentu ceritanya akan lain. Pasti tingkat perekonomian masyarakat akan jauh berbeda dengan sekarang. Makanya

saya katakan bahwa peluang itu sesungguhnya ada. Setakat ini Pemkab Kuansing baru memberi bantuan bibit sawit dan bibit karet. Tapi sangat disayangkan bantuan tersebut bukan dalam bentuk bibit unggul, sehingga kualitas yang dihasilkan pun kurang memadai.

Anda mebyeutkan pengembangan wisata bisa memberi konstribusi bagi perekonomian masyarakat, seperti apa konsepnya?

Jadi di Kuansing banyak sekali objek wisata yang bisa dikembangkan. Mulai dari wisata alam, budaya dan lain sebagainya. Jika objek wisata ini mampu kita kelola dengan baik dan lebih maksimal lagi tentu akan membawa *multiplayer effect* kepada perekonomian masyarakat. Ada beberapa potensi wisata yang akan kita kembangkan nanti diantaranya, air terjun Guruh Temurai di Bukit Batabuh, air tujuh tingkat di Desa Lubuk Ambacang dan ada lagi sumur air panas.

Bagaimana dengan infrastruktur?

Kalau infrastrutur program dasar yang sifatnya wajib, kita juga akan fokus kesana nantinya. Karena saat ini masih banyak sarana dan prasarana jalan khususnya di pedesaan yang masih belum bagus. Ini akan menjadi fokus perhatian kita supaya masyarakat di pedesaan tidak lagi kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil pertanian dan perkebunan mereka.

Bagaimana persiapan Anda menghadapi pilkada agar memperoleh hasil maksimal?

Yang jelas saya bersama Pak Haji Halim persiapkan mental. Artinya kita harus siap menerima berbagai risiko yang terjadi nantinya. Dalam sebuah pertarungan tentu akan ada pihak yang menang dan kalah. Disamping itu juga persiapan financial, harus sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Saya pribadi sudah ditempa dan sudah pernah mengalami proses tersebut, jadi saya tidak lagi merasa canggung. Selain mental dan finansial yang tidak kalah penting lagi adalah strategi. Dari pengalaman lalu, saya belajar banyak supaya kesalahan strategi tidak terjadi lagi.

Selain figur, faktor yang menjadi penentu seseorang sukses di pilkada adalah finansial. Bisa Anda jelaskan seperti apa persiapan finansial Anda?

Finansial jelas sangat diperlukan dalam perjuangan ini, makanya kita sudah siapkan, dan *alhamdulillah* Pak Halim memiliki kemampuan di bidang finansial. Disamping itu beliau juga memiliki pengalaman di bidang ekonomi khususnya perkebunan dan properti.

Bagaimana dengan strategi?

Kalau strategi tentu tidak akan kita sampaikan secara rinci. Ibarat sebuah perang kalau strategi kita diketahui lawan, itu sama artinya bunuh diri. Tapi yang jelas kita sudah mempersiapkan dengan matang dan sebaik mungkin strategi untuk menang. Karena dulunya kita sudah pernah berperang dan kita kalah, kita tahu betul dimana letak kekalahan kita saat itu. Artinya pengalaman tersebut akan kita jadikan bahan pelajaran pada pilkada tahun ini.

Kalau boleh tahu, di kawasan mana saja yang menjadi basis kekuatan MudHa?

Yang jelas basis-basis yang diyakini sebagai kekuatan kami sudah kami petakan, dan strategi tersebut tentu sesuai dengan apa yang telah dipetakan. Namun dimana saja letaknya, tentu tidak bisa kita sampaikan, karena ini salah satu bentuk strategi kita.

Jika dipersentasekan berapa kira-kira kekuatan masyarakat yang telah Anda petakan itu?

Dari 15 kecamatan di Kuansing, setidaknya lebih dari 50 persen dukungan masyarakat sudah kita dapati, tapi kecamatan mana saja tidak usahlah saya sebutkan.

Apa program unggulan yang Anda sampaikan sehingga Anda mampu menarik simpati masyarakat?

Program yang kita sampaikan kepada masyarakat pastinya program pembangunan yang benar-benar bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat dan kebutuhan masyarakat. Kita akan membangun perekonomian masyarakat dengan mengembangkan potensi perkebunan sawit dan karet. Artinya kita akan memanfaatkan potensi Kuansing untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Hampir dapat dipastikan, ada tiga pasang yang bertarung di Pilkada Kuansing. Apakah Anda siap bersaing secara sehat?

Pasti kami siap, kami akan bersaing secara jujur dan *fair*. Makanya saya sering menyampaikan kepada tim supaya jangan menjelek-jelekan lawan atau istilahnya *black campaign*. Kita tidak akan melakukan itu, Kita akan menyampaikan program-program yang kita tawarkan. Makanya visi kita kita singkat dengan USAHA (Unggul, Sejahtera, Agamais dan Harmonis), artinya kita ingin jadikan Kuansing unggul diberbagai bidang, membuat masyarakatnya sejahtera yang agamais yang bebas menjalankan agama yang dianutnya dan dapat hidup harmonis.

Apakah Anda sudah merasakan adanya *black campaign*?

Ada memang, dan kita sudah merasakan itu, namun kita tidak pernah menghiraukan dan semua itu kita *counter* dengan program dan visi kita ke depan.

Apa harapan Anda kepada masyarakat menyikapi *black campaign* yang diarahkan kepada Anda dan pasangan?

Harapan kami masyarakat tidak terpengaruh dengan isu yang dilontarkan dalam bentuk *black campaign* tersebut. Kami berharap masyarakat dapat berfikir positif dan lebih jernih.*

Seiring Jalan Majukan 'Negeri Jalur'

Kebersamaan antara Mursini dan Halim bukan terbuhul saat keduanya berpasangan di Pilkada Kuansing saja. Jauh sebelum moment politik ini berlangsung mereka sudah seiring sejalan. Bila dipercaya rakyat menjadi bupati dan wakil bupati, mereka akan fokus pada program-program pro rakyat.

Nama Drs H Mursini, MSi, sangat familiar bagi masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Selain memang anak jati 'Negeri Jalur', Mursini sempat berada di puncak kekuasaan pemerintahan kabupaten walau hanya menjadi nomor kedua. Atau Wakil Bupati Kuansing masa bhakti 2006-2011.

Siapa Mursini? Mengapa ia begitu diidolakan masyarakatnya? Laki-laki kelahiran Gunung Kuantan Singingi, 28 Desember 1958 ini adalah sosok sederhana, lembut, penuh empati dan bersahaja. Meski sudah bertitel pejabat, ia tetap seperti layaknya orang biasa. Gaya hidupnya tak berubah sedikit pun kendati sudah mendapat limpahan rezeki berlebih.

Mursini juga dikenal sosok yang religious karena disiplin mendirikan sholat diawal waktu. Dalam waktu-waktu tertentu, tak jarang ia didaulat jemaah masjid untuk berkhotbah di hari Jum'at. Kelebihan ini menjadi nilai tambah Mursini dimata masyarakat Kuansing. Warga bergelayut harapan kepada politisi PPP ini untuk membangun sekaligus memajukan Kuansing.

Karier politik suami Dra Hj Emi Safitri ini terbilang cemerlang. Sebelum menjadi Wakil Bupati, ia sudah duduk dipercaya menjadi anggota DPRD Riau masa tugas 1999-2004. Pada periode itu, ayah dari Ghina Syofiah dan Muhammad Rizqi Mahdiyyah ini, sempat dipercaya sebagai Sekretaris

Komisi Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Riau 1999-2002, dan Ketua Komisi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup DPRD Riau 2002-2004. Ia juga menjadi Sekretaris Fraksi PPP DPRD Riau.

Karir politiknya terus berlanjut. Pemilu 2004 ia kembali terpilih sebagai legislator. Namun di paroh jalan, kesederhanaan dan kebersahajaannya itu membuat Sukarmis 'jatuh hati'. Lalu 'meminangnya menjadi wakil bupati. Al kisah *duet* Sukarmis-Mursini terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kuansing 2006-2011.

Setelah duduk di kursi wakil bupati, Mursini dengan gayanya yang sederhana mencoba mengadu keberuntungan, 'beradu balak' dengan Sukarmis pada Pilkada 2011 setelah diminta maju dan mencalonkan diri oleh tetua masyarakat. Sayang, dewi fortuna belum berpihak kepadanya. Gagal di pilkada tak membuat karir politik Mursini, atau namanya hilang dari peredaran. Masyarakat tetap berempati kepadanya karena menganggap ia dizolimi. Maka, saat mencalonkan diri jadi anggota DPRD Riau pada Pemilu 2014, Mursini dengan mudah mendulang suara. Lalu terpilih sebagai anggota DPRD Riau untuk kali ketiga.

Gandeng Halim

Ketika KPU menabuh genderang pilkada serentak, banyak pihak meminta Mursini maju dan mencalonkan diri. Tak ingin mengecewakan permintaan masyarakat, ia pun berupaya mendapatkan dukungan parpol sebagai perahu agar bertarung. Dan, usahanya itu tak sia-sia. Tiga parpol: PPP, Gerindra dan PDIP akhirnya mengusung Mursini-Halim ke KPU sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati.

"Pak Halim seorang pengusaha yang bergerak dibidang perkebunan dan property. Dengan latar belakang sebagai pengusaha diharapkan kami mampu memberi kontribusi meningkatkan perekonomian masyarakat. Ini yang menjadi pertimbangan saya, sehingga kami berpasangan," kata Mursini tentang Halim kepada **AZAM** pekan silam.

Mursini mengaku, sudah cukup lama mengenal Halim. Mereka sering bersama atau seiring sejalan dalam banyak bidang. “Saya mengenal Pak Halim bukan sekarang ini. Tapi sudah lama. Bermula Pak Halim bersama keluarga dulunya sering main ke rumah mertua saya, dan kebetulan mertua saya tak memiliki anak laki-laki. Dari situ mereka sangat dekat dan menyayangi Pak Halim berikut saudara-saudaranya,” aku Mursini.

Kemunculan Halim dikancah politik Kuansing, apalagi masuk ke ranah pilkada, menjadi fenomena baru dibelantika politik Riau. Siapa sesungguhnya Halim? Mursini memastikan, meski pasangannya itu berdarah Tionghua, tetapi Halim beragama Islam dan beristrikan pribumi. Keislamannya tak bisa diragukan lagi. Selain sudah pernah menunaikan ibadah haji, Halim terbilang muslim yang taat. Lelaki kelahiran Taluk Kuantan, 16 Februari 1965 ini, dianggap sosok dermawan yang suka membantu pembangunan masjid di Kuansing. Bantuan-bantuan itu diberikan bukan saat jelang pilkada semata, tetapi jauh sebelum helat politik berlangsung.

Begini pun dengan Halim. Suami Hj Yuni Wartti, perempuan asal Peranap, ini menyebutkan niatnya maju dan bertarung di pilkada datang dari lubuk hati yang paling dalam, yakni membantu masyarakat Kuansing. “Jika mau mencari uang, lebih baik saya fokus dengan pekerjaan sekarang,” katanya kepada **AZAM**.

Mursini Dimata Halim

Ketika ditanya mengapa ia bersedia mendampingi Mursini, ayah dari Roni Juliansyah, Seli Harnova dan Sandi Yuda ini memastikan bahwa Mursini sangat layak menjadi bupati karena ia memiliki keinginan, kemauan juga tekad membawa perubahan ke arah yang lebih baik di Kabupaten Kuansing.

Ia mengakui, dunia politik baru baginya. Namun dia banyak belajar dari pengalaman hidup yang dijalaninya. “Perjalanan hidup telah menempa saya. Tujuan saya maju adalah bagaimana saya bermanfaat bagi

orang banyak. Dalam dunia usia keberhasilan itu akan mendatangkan kepuasan tersendiri. Begitu juga jika saya bisa bermanfaat dan berguna bagi masyarakat banyak. Saya akan merasa puas,” tuturnya.

Direktur PT Sandi Prima ini berpendapat, Kuansing memiliki potensi yang sangat banyak. Hanya saja belum terkelola secara baik. Kalau pemimpin Kuansing mampu mengelola sumberdaya alam itu, ia yakin mampu memberi keuntungan bagi daerah dan masyarakat. Halim menilai, seorang pemimpin harus mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat sehingga tercipta suasana yang lebih kondusif. Dengan suasana kondusif itu investor berdatangan, dan ini jelas membawa keuntungan bagi daerah. Kondisi tersebut, yang menurut Halim kini belum tercipta. “Jangankan investor dari luar, kita yang dari dalam saja sulit bisa masuk,” kata Ketua Bidang Ekonomi dan Kerakyatan Muhammadiyah Kuansing ini.

Lain dari itu, lanjutnya, perekonomian masyarakat akan bisa berjalan lancar bila infrastruktur seperti jalan bagus. Sebaliknya, kalau infrastruktur tidak bagus, jangan harap perekonomian bergerak dinamis. Kalau nanti masyarakat mempercayainya, ia dan Mursini akan fokus pada kepentingan rakyat.

“Saat infrastruktur sudah bagus, kita bisa menghidupkan sektor lainnya supaya bergerak secara simultan,” ucap Halim.*

Serasa Nyaman Dekat Mursini

Banyak warga idolakan sosok Mursini. Anggota DPRD Riau ini dianggap dapat membawa ketenangan, kenyamanan dan kemajuan bagi Kuantan Singingi.

Dewan Sepuh atau lebih dikenal dengan sebutan Penasehat Persatuan Jawa Kuansing (Perjasing), Imam Suroyo menyatakan, dirinya cukup lama mengenal sosok Mursini. Sejak kenal dekat, ia menaruh harapan kepada Mursini untuk dapat menjadi orang nomor satu di Kabupaten Kuantan Singingi.

“Sayang dulu beliau kalah. Waktu itu saya sudah menjadi pendukungnya,” ujar pria yang sehari-hari menjalani profesi sebagai petani itu.

Menurut Imam Suroyo, dukungan yang diberikannya kepada Mursini bukan untuk maksud-maksud tertentu. Akan tetapi murni karena kecintaannya kepada Kuantan Singingi agar kabupaten ini lebih maju dipimpin oleh sosok yang ia sukai.

“Saya tak punya kepentingan apa-apa. Saya Cuma seorang petani yang tak ingin menjadi apa pun. Dukungan saya ke Mursini murni karena saya tau bahwa dia itu memang sosok pemimpin yang akan membawa kemajuan bagi Kuansing,” ujar Imam lagi.

Mursini, dimata Imam, merupakan sosok yang memiliki kriteria pemimpin ideal. “Mursini memiliki kepribadian yang sangat baik. Pembawaannya tenang, tutur katanya sopan dan perilakunya layak dicontoh,” ujarnya lagi.

Bila ada masalah, kata Imam Suroyo, Mursini menyikapinya dengan arif dan bijaksana. “Tidak *grasa-grusu* apa lagi arogan. Mursini jauh dari

sifat yang seperti itu. Dia selalu mengambil keputusan berdasarkan kepentingan orang banyak, bukan karena kepentingan pribadinya,” tegas Imam Suroyo.

Yang menambah kecintaannya terhadap Mursini karena Mursini sosok merakyat. Meski sudah menjadi pejabat, dia tetap bisa berkumpul dengan siapa saja. Berkomunikasi dengan siapa pun. “Dia juga sosok yang pandai berkomunikasi, rasa empatinya sangat tinggi. Berada di dekatnya orang akan merasa nyaman,” tegas Imam Suroyo lagi.

Kendati belum lama mengenal sosok Halim, dia yakin pendamping Mursini itu juga memiliki sifat yang mudah akrab seperti Mursini. Imam berharap pasangan ini dapat membawa perubahan untuk masyarakat Kuantan Singingi.

Yang paling penting dilakukan, katanya, adalah pemerataan pembangunan. Pembangunan, jelas dia, jangan tertuju pada satu daerah saja melainkan untuk seluruh pelosok desa di Kuansing. Infrastruktur jalan mesti dibangun dengan baik di setiap desa. Dia mencontohkan, hasil panen petani tidak akan bernilai tinggi jika akses jalan menuju pasar sulit dilalui. Selain pemerataan, yang tak kalah penting dilakukan pemimpin Kuansing ke depan adalah memberi rasa aman kepada setiap pegawai yang bertugas di Kuansing dengan menempatkan mereka sesuai keahliannya.

Imam Suroyo juga mengatakan, jika merujuk kepada hasil survei, sosok Mursini memang paling diminati. Tetapi, para pendukung Mursini-Halim jangan terlena dengan itu. Sebab semuanya bisa berubah. Ia berharap, tim sukses Mursini-Halim lebih giat merebut simpati masyarakat.*

Masyarakat Bergelayut Harapan Kepada MudHa

Masyarakat Kuantan Singingi bergelayut harapan kepada Mursini-Halim. Duet politisi-pengusaha ini diharapkan dapat membuat Kuansing bergerak lebih dinamis dari kondisi sekarang.

Sosok Mursini-Halim memang tengah menjadi pusat perhatian dan buah bibir masyarakat Kuantan Singingi. Sebagai Wakil Bupati Periode 2006-2011, Mursini dikenal dekat dengan siapa saja. Sosoknya yang bersahaja, ramah dan memiliki banyak pengalaman, dinilai sejumlah kalangan pantas menjadi orang pertama menggantikan Sukarmis pada Pilkada Serentak 9 Desember depan.

Menurut Ketua Muhammdiyah Kuansing, DR. Yusri Rasul, SPd, ST, MT, Mursini pantas menjadi rujukan masyarakat dalam menentukan calon pemimpin yang layak bagi Kabupaten Kuansing.

“Kalau bicara tentang sosok Mursini, saya sudah cukup lama mengenal beliau. Dia merupakan figur pemimpin yang merakyat. Selain itu dikenal sebagai seorang yang agamis. Juga figur yang ramah. Masih banyak lagi titel lain yang patut disandangkan kepada Mursini,” kata Yusri kepada **AZAM** pekan lalu.

Yusri memastikan, sebagai mantan wakil bupati, Mursini memiliki banyak pengalaman. Tidak hanya di bidang pemerintahan tetapi bidang sosial dan kemasyarakatan. Begitupun visinya. Bagi saya, sangat relevan menjawab kebutuhan Kuansing hari ini, serta dibutuhkan oleh masyarakat.

Dimata Yusri, selain seorang visioner, Mursini juga seorang pekerja ulet, tekun dan pantang menyerah. Sosoknya sangat bersahaja, penuh kesederhanaan, beretika dan bertatakrama. Siapapun yang kenal dan dekat dengan beliau seakan tidak berjarak. Artinya Mursini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan masyarakat.

Yusri menyebut, Mursini tidak pernah menyinggung perasaan siapapun, baik itu lawan politik maupun pihak-pihak yang belum mengenal dirinya. Ia menganggap semua lawan politik bukanlah lawan sejati. Tetapi menilainya bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Kuansing.

Mursini figur yang betul-betul paham tentang keberadaan masyarakat Kuansing yang heterogen. Sehingga ia tidak pernah memandang dan membedakan asal muasal serta suku. "Beliau memiliki komitmen yang tinggi terhadap kemajuan daerah. Figur seperti inilah yang diharapkan masyarakat bisa menjadi pemimpin sekaligus imam. Mudah diterima semua kalangan mana saja, dan mudah bergaul dengan lapisan manapun. Kesederhanaan Mursini selalu melekat dalam kesehariannya," papar Yusri memuji Mursini.

Begitu juga Halim, pasangan Mursini di Pilkada Kuansing. Ia memiliki kepedulian sangat tinggi terhadap masyarakat. "Bukan bermaksud ingin menyanjung seseorang, jujur apa yang saya sampaikan ini sangat objektif. Halim itu figur yang memiliki komitmen tinggi untuk perubahan. Apalagi kedermawanan dan kepeduliaannya terhadap Kuansing, ini benar-benar sudah teruji," tuturnya.

Halim juga figur yang cukup berhasil di bidang usaha. Diharapkan, keberhasilannya ini mampu membangkitkan dan memberi motivasi tersendiri bagi masyarakat Kuansing. Apalagi perhatiannya terhadap pendidikan. Ia banyak memberikan ilmu serta bantuan bagi para mahasiswa yang ingin membuka usaha. Sekaligus memotivasi mahasiswa agar tidak berorientasi kepada pekerjaan menjadi pegawai negeri.

"Dengan potensi sumberdaya alam melimpah, ditopang sumberdaya manusia yang handal, dan komitmen pemerintah daerah mengelola

potensi tersebut, saya berkeyakinan Kuantan Singingi akan lebih maju. Tak salah bila masyarakat bergelayut harapan kepada Mursini-Halim. Saya optimis Mursini-Halim (MudHa) mampu menggerakkan berbagai potensi untuk perubahan,” tambah Yusri lagi.* []dri/ziz/ben

Kami Siap Bersaing Secara Jujur

Meski lebih berpengalaman dari pesaing lainnya, tapi MudHa siap bersaing secara jujur, sehat dan elegan.

Tiga pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi siap bertarung pada Pilkada Serentak, 9 Desember depan. Masing-masing pasangan pun sudah mulai menyusun strategi, termasuk membentuk tim pemenangan yang akan bergerak mencari dukungan ke kantong-kantong suara yang dianggap potensial.

Ditemui **AZAM** di Posko Pemenangan, Ketua Tim Pemenangan Mursini-Halim, Drs H Chaidir Arifin mengatakan, tim yang telah dibentuk jauh-jauh hari sudah bekerja untuk memenangkan pasangan dengan jargon MudHa ini. Berbagai persiapan telah dilakukan, termasuk membentuk tim-tim pemenangan di tingkat dusun, desa, kelurahan hingga ke kecamatan.

Tujuan dibentuknya tim pemenangan MudHa, kata Chaidir, tak lain tak bukan supaya masyarakat lebih mengetahui apa-apa saja program dan visi ke depan pasangan Mursini dan Halim. “Jauh-jauh hari kita sudah melakukan berbagai persiapan. Setelah tim pemenangan tingkat kabupaten terbentuk, kita lanjutkan membentuk tim pemenangan di setiap desa hingga kecamatan. Tujuannya memberi penjelasan secara detail kepada masyarakat apa-apa saja program dan visi pasangan MudHa,” ujarnya.

Chaidir mengaku, tim yang ada sekarang bersifat lebih komprehensif karena melibatkan seluruh unsur, mulai dari partai pendukung (PDIP, Gerindra dan PPP) sampai kepada tokoh-tokoh masyarakat berpengaruh di Kuansing. Tim wanita akan bergerak khusus ke kaum wanita.

Soal strategi yang dijalankan, Chaidir enggan membeberkan secara rinci. Namun yang pasti, tim akan bekerja sesuai dengan arahan dan tidak

akan melakukan tindakan-tindakan diluar batas kewajaran. Ataupun tindakan melawan hukum yang dapat mencederai demokrasi, dan berdampak buruk kepada pasangan MudHa.

“Kalau strategi, mohon maaf saya tidak bisa beberkan, karena ini sudah menjadi bahagian dari strategi kami. Kalau kita kasih tahu, pergerakan kita akan terbaca oleh lawan. Yang jelas kami tidak akan melakukan hal-hal yang diluar batas kewajaran apalagi yang namanya *black champion*. Kami siap bersaing secara jujur, sehat dan elegan,” ungkap Chaidir.

Caranya, jelas Chaidir, dengan menjual apa-apa saja program serta visi ke depan pasangan MudHa. Jika tim melakukan perbuatan-perbuatan ataupun tindakan yang sifatnya merusak atau melawan hukum, pasti tindakan ini akan berimbas kepada calon yang akan didukung. “Makanya kami berusaha agar tim pemenang selalu menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat supaya citra masyarakat terhadap Mursini-Halim tetap terjaga dengan baik,” tuturnya.

Chaidir memastikan, *black champion* hanya akan merugikan pasangan yang diusung. Makanya tim pemenang Mursini-Halim tidak akan melakukan tindakan yang dapat merusak citra MudHa. Kami hanya akan bekerja sesuai ketentuan dan koridor yang berlaku. Nilai plus pasangan ini, kata Chaidir, terletak pada kemampuan dan pengalaman Mursini yang berada di atas rata-rata pesaing lainnya. Yakni, pernah menjabat wakil bupati, dan beberapa periode menjadi anggota DPRD Riau. Pembawaannya tenang dan bersikap *low profil*.

Dengan pengalaman ini, ulas Chaidir, Mursini diharapkan mampu menggerakkan potensi Kabupaten Kuansing. Asumsinya, jika berbagai potensi itu bisa dikelola secara lebih baik, maka ini akan memberi keuntungan bagi masyarakat.

Dan orang yang mampu menggerakkan serta mengelola potensi tersebut, menurut Chaidir, adalah pasangan Mursini-Halim. Chaidir mengajak masyarakat berfikir lebih jernih, lebih positif lagi dalam memilih dan menentukan pemimpin lima tahun ke depan. Salah dalam memilih pemimpin, lima tahun kita menderita.*

BAGIAN XII



Siak Adem Ayem Songsong Pilkada

Meski pemilukada sudah di depan mata, suasana di Siak masih adem ayem. Sepintas, tak ada tanda-tanda kalau daerah ini akan melangsungkan helat akbar. Pilkada Serentak.

Kabupaten Siak merupakan satu diantara sembilan daerah yang akan melaksanakan pemilukada serentak. Semua tahapan sudah berjalan seperti biasa. Hari pemungutan suara, ditetapkan secara nasional pada 9 Desember 2015.

Di Siak, hanya dua bakal pasangan calon yang mendaftar ke KPU. Mereka segera ditetapkan menjadi calon dan mendapatkan nomor urut. Kedua pasang calon itu adalah Syamsuar-Alfedri dan Suhartono-Syahrul.

Sejak awal, suasana pilkada di Siak, memang tergolong sepi. Tak banyak baliho, banner atau spanduk bakal calon kepala daerah yang terpasang. Rabu (20/08), **AZAM** sempat berkunjung ke 'Negeri Sultan' tersebut. Dari Kota Pekanbaru menuju Kabupaten Siak, tak satu pun tanda-tanda adanya pemilukada di daerah ini yang kami jumpai.

Baik berupa baliho, spanduk atau banner pasangan calon maupun atribut pilkada yang dipajang KPU Siak. Di persimpangan Jalan Meridan-Perawang, sempat terlihat foto Syamsuar-Alfedri, namun baliho tersebut bukan foto untuk pemilukada melainkan milik Badan Amil Zakat. "2.5 persen harta kita milik orang lain," begitu kata yang tertulis di baliho yang bergambar Syamsuar-Alfedri itu.

Dari situ, hingga ke simpang Lubuk Dalam, sepanjang jalan lurus itu, yang terlihat hanya lahan kosong dan kebun sawit yang terbentang. Dipinggir jalan terpasang dengan kokoh pipa minyak milik perusahaan

pengeboran minyak Chevron. Sedangkan baliho, banner atau pun spanduk soal pemilukada tak juga ditemukan.

Dari Lubuk Dalam hingga jembatan Siak yang terkenal dengan kemegahannya itu, **AZAM** kembali tidak menemukan tanda-tanda pemilukada. Foto Syamsuar-Alfedri yang terpasang di beberapa baliho, yang terdapat di jantung kota Siak, ternyata juga bukan berkaitan dengan pemilukada, melainkan milik salah satu dinas di Pemerintahan Kabupaten Siak.

Satu-satunya baliho Syamsuar-Alfedri sebagai pasangan bakal calon bupati-wakil bupati, terdapat di salah satu ruko berlantai dua. Baliho besar itu, hampir menutupi bagian depan Ruko tersebut. Ternyata ruko ini adalah Posko Pemenangan Koalisi Partai Pengusung SUARA alias Syamsuar-Alfedri.

Bila **AZAM** sudah menjumpai Posko SUARA, namun tak demikian dengan rival Syamsuar-Alfedri. Baliho pasangan bakal calon Suhartono-Syahrul belum juga tampak. Baik baliho biasa maupun yang terpasang di Posko. Meski demikian, berkeliling di Kota Siak cukup menyenangkan. Selain jalannya mulus, juga tidak ada kemacetan di jalan seperti kita temukan di Pekanbaru, apatahlagi Jakarta.

Awam Pilkada

Bagaimana dengan masyarakatnya? Warga di akar rumput, sepertinya tidak mengerti betul dengan pemilukada. Buktinya, salah seorang warga Siak bernama Yuni, pemilik warung tempat **AZAM** istirahat minum, mengaku tak mengetahui adanya pilkada di Siak. Pengetahuannya, sangat minim tentang pilkada, terutama saat **AZAM** menanyakan calon-calon yang maju ke gelanggang pilkada.

Mengapa Siak miskin baliho? Minimnya atribut pilkada diakui Indra Gunawan, Ketua Tim Sukses pasangan Syamsuar-Alfedri. Menurut dia, memasang baliho pada masa menjelang penetapan pasangan calon tidak efektif. Sebab, ketika ditetapkan atau sudah resmi menjadi pasangan calon, peserta pemilukada harus taat aturan KPU.

“Soal atribut, akan diatur oleh KPU. Bukan hanya soal letaknya, pendanaannya juga diatur KPU,” ujar Indra Gunawan, yang juga Ketua DPRD Kabupaten Siak.

Indra Gunawan mengatakan, pihaknya akan selalu taat pada aturan main yang ditetapkan KPU. Diakuinya, pemasangan baliho itu adalah penting. Disamping menunjukkan adanya kemeriahan pemilukada, juga menjadi ajang sosialisasi kepada masyarakat tentang calon pemimpin.

Meski demikian, jika aturannya diperketat, pasangan SUARA, kata Indra Gunawan tidak akan merasa dirugikan. Sebab, tidak ada yang berubah dari pasangan ini. Syamsuar-Alfedri sudah berpasangan sejak lima tahun yang lalu. Kini, mereka ingin melanjutkan kembali kepemimpinan di Siak.

“Sebagai *incumbent* pasangan SUARA sudah tersosialisasi sejak lama. Bagi kami soal pembatasan pemasangan baliho tidak menjadi masalah,” ujar Indra lagi.

Indra Gunawan memang benar. Yang dirugikan dari adanya pembatasan baliho, justru penantang *incumbent*. Sarana bersosialisasi telah dibatasi dengan adanya ketentuan KPU. Tapi, kekuatan penantang SUARA tak bisa dianggap enteng. Suhartono-Syahrul adalah anggota dewan, yang *notabene* memiliki masa yang jelas ketika di pemilu legislatif lalu.

Keduanya berani maju karena merasa mampu menyaingi keperkasaan SUARA. Suhartono-Syahrul mempertaruhkan jabatannya sebagai anggota dewan. Keduanya harus mundur menjadi wakil rakyat, karena meyakini bisa memenangkan pertarungan di pilkada. “Jika tidak menang di pilkada, mereka kembali menjadi rakyat biasa. Sebab, mundur dari anggota dewan itu bersifat permanen,” ujar Juanda Iyong, salah seorang warga Sungai Apit.

Minim Calon

Juanda Iyong juga mengakui, pemilukada di Siak terasa kurang *greget*. Hal itu menurut dia bukan semata karena adanya pembatasan

pemasangan baliho, tetapi karena minimnya pasangan calon yang ikut di pemilukada. “Pasangan calon yang maju kan hanya dua. Jadi, sosialisasinya juga kurang ramai,” kata dia.

Dia melanjutkan, meski sosialisasi dalam bentuk baliho tidak ramai, itu bukan berarti pasangan calon dan tim sukses masing-masing pasangan calon tidak bergerak. Menurut pantauan pria yang juga aktif di Jaring Pamantau Kewenangan ini, hampir di setiap desa masing-masing bakal calon telah memiliki relawan atau tim sukses.

Dengan demikian, kata pria yang juga menjadi Ketua RT di tempat tinggalnya ini, kekuatan masing-masing calon juga menjadi seimbang. Sebab, kekuatan pasangan calon terletak pada tim sukses mereka. “Jika tim pandai menarik simpati masyarakat, maka pasangan calon akan mudah mendapatkan suara nantinya,” ujarnya.

Saat diminta komentarnya tentang figur calon, pria ini justru balik bertanya. Tapi setelah didesak, ia menyatakan, secara pribadi dia tidak mengenal lebih dekat figur-fugur yang maju.

Dia hanya berharap, pemimpin Siak masa akan datang hendaknya dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat. “Infrastruktur sudah membaik dan sudah kami rasakan. Yang perlu ditingkatkan adalah ekonomi masyarakat miskin,” ujarnya.

Juanda Iyong berharap, pemerintah memiliki program peningkatan ekonomi rakyat miskin yang benar-benar tepat sasaran. Pelaksanaannya, kata dia, mesti diawasi dan diarahkan hingga penerima program betul-betul berhasil dan dapat berubah taraf hidupnya.

Sosok Syamsuar-Alfredri, kata Juanda Iyong, telah berusaha melakukan yang terbaik bagi masyarakatnya. Jika pasangan ini kembali terpilih, Juanda berharap, keduanya dapat memilih kepala dinas atau pembantu yang tepat. “Yang menjadi kunci sukses pembangunan adalah SKPD. Saya berharap, bupati mendatang menempatkan orang-orang yang pas di posisinya,” tegas Juanda Iyong.*

Tak Elok Sebutkan Target Kemenangan

Ketua tim sukses pasangan Syamsuar-Alfedri Indra Gunawan yakin, pasangan yang didukungnya akan keluar menjadi pemenang pilkada. Menurutny, Syamuar-Alfedri sudah teruji dan terbukti bawa kemajuan Siak.

Hal itu dikatakannya saat berbincang-bincang dengan **AZAM** Rabu silam di Siak Sri Indrapura. Meski demikian, pria yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD Siak ini tidak mau menyebutkan berapa persen target angka kemenangan yang akan diraih tim suksesnya. “Rasanya tak elok menyebutkan berapa persen target angka kemenangan. Kita yakin, **SUARA** akan keluar jadi pemenang,” ujar Indra Gunawan dengan senyuman khasnya.

Pasangan Syamsuar-Alfedri, kata Indra, hingga saat ini dinilai masih layak untuk melanjutkan tampuk kekuasaan di Siak. Kinerja keduanya dalam membangun Kabupaten Siak tak bisa diragukan lagi.

Pencapaian pembangunan selama keduanya menjadi *leader*, sudah bisa dirasakan dan dinikmati oleh seluruh warga Siak. Untuk itu, masyarakat pun banyak yang mengidolakan pemimpin mereka. Syamsuar dan Alfredri adalah sosok yang merakyat. Keduanya, sejak masa awal kepemimpinan di Siak, sudah sering turun ke masyarakat. Dengan demikian, popularitas mereka sudah cukup tinggi di tengah masyarakat.

Popularitas keduanya juga didukung oleh program yang sudah berhasil dilaksanakan. Mereka bukan sekedar blusukan, akan tetapi telah berbuat dan sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Sejumlah program pembangunan, seperti jalan poros di desa-desa, pendidikan dan kesehatan gratis telah dirasakan oleh masyarakat,” ujar Indra.

Yang juga menjadi nilai tambah bagi Syamsuar-Alfedri, lanjut Indra Gunawan, adalah kekompakan dan keharmonisan antara bupati dan wakilnya. Tak pernah terdengar mereka berselisih baik karena masalah pribadi maupun soal kewenangan dalam bekerja. Keharmonisan itu pula yang membuat mereka kembali berpasangan untuk kedua kali. Kejadian seperti ini jarang dilihat pada kepala daerah lain di Tanah Air. Kebanyakan pasangan kepala daerah, akan berpisah di tengah jalan. Saat pemilukada dimulai lagi mereka justru saling berlawanan.

Keharmonisan Syamsuar-Alfedri, tambah Indra, bisa dinilai bahwa pasangan ini memang memiliki kepribadian dan karakter yang cocok dan sama-sama baik. Mereka merupakan sosok yang perlu menjadi contoh dan ditauladani oleh masyarakat.

Indra optimis, pasangan SUARA akan menang di pilkada. Dari berkali-kali survey, pasangan SUARA tetap menempati rangking teratas, makanya tak sulit bagi Syamsuar-Alfedri mendapatkan partai politik sebagai perahu.

Dijelaskan Indra Gunawan, pasangan ini juga didukung banyak tim sukses atau relawan yang tersebar di setiap desa, kecamatan dan kabupaten. Tim sudah mulai bekerja untuk memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa kepemimpinan di Siak sebaiknya dilanjutkan satu periode lagi.

Duet SUARA adalah pemimpin yang berasal dari birokrat yang mengerti dengan birokrasi dan perencanaan pembangunan. Mereka birokrat senior yang berpengalaman menjalankan program pemerintah. Manajemen pemerintahan pun sudah mereka kuasai, karena mereka memang berpendidikan seperti itu. "Masyarakat menyadari hal itu. Jadi, lima tahun ke depan, kita masih butuh pemimpin ideal seperti sosok Syamsuar-Alfedri," pungkask Indra Gunawan.*

Syamsuar-Alfedri, Banyak Kesamaan

Karena memiliki banyak kesamaan, membuat Syamsuar-Alfedri tetap kompak. Keduanya sepakat kembali berpasangan. Apa kunci keharmonisan mereka?

Tak banyak pasangan kepala daerah yang bisa kompak dalam jangka waktu lama, apalagi kembali berpasangan di pilkada periode berikutnya. Hasil Survey Kemendagri ketika dipimpin Gamawan Fauzi, diketahui 95 persen pasangan kepala daerah di Indonesia pecah kongsi. Hanya lima persen yang tetap harmonis hingga jabatan berakhir.

Jika merujuk ke data kemendagri, maka dalam lima persen itu termasuklah pasangan Bupati dan Wakil Bupati Siak 2011-2016, Drs H Syamsuar, MSi dengan Drs H Alfredri, MSi. Apa yang membuat keduanya bisa kompak?

Salah satu sebabnya, kedua tokoh itu punya banyak kesamaan. Mulai dari jalur pendidikan, karir di pemerintahan, penampilan yang sama-sama *low profile*, sama-sama dekat dengan masyarakat, sampai kepada semangat dalam menjalankan tugas sebagai bupati dan wakil bupati yang sama-sama mengedepankan kepentingan rakyat. Tak sedikit masyarakat 'Negeri Istana' yang mengakui kehebatan gaya kepemimpinan Syamsuar-Alfedri, itu lantaran keduanya dinilai sangat merespon keluhan masyarakat. Jika ada keluhan dari masyarakat, terutama menyangkut pelayanan, mereka merespon dengan cepat.

Dalam jalur pendidikan, Syamsuar-Alfedri sama-sama ditempa di Akademi Pendidikan Dalam Negeri Pekanbaru, dan hanya beda angkatan. Syamsuar angkatan 1987 sedang Alfredri angkatan 1989. Lalu sama-sama mengikuti pendidikan S2 di Pascasarjana Universitas Riau.

Begitu juga karir di pemerintahan. Mereka birokrat tulen yang merintis karir di Kabupaten Bengkalis, tapi bertugas di kawasan yang kini masuk dalam wilayah Kabupaten Siak. Syamsuar pernah menjadi Sekwilcam Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis tahun 1991-1994. Sementara Alfredri menjadi Pjs Kaur Kemasyarakatan Setwilcam Sungai Apit, Kantor Camat Sungai Apit, Bengkalis tahun 1990-1992.

Menariknya, Syamsuar-Alfredri juga sama-sama bertugas sejak awal Siak berdiri sebagai kabupaten yang berpisah dari Bengkalis. Syamsuar sebagai Asisten Tata Praja, 16-6-2000 hingga 25-8-2000. Alfredri Kepala Bagian Pemerintahan Desa tahun 2000. Jadi yang berbeda dari keduanya hanya jabatannya saja. Syamsuar memulai karir dengan jabatan Kepala Sub Bagian Protokol Setdakab Bengkalis, tahun 1987-1990. Dari situ, lelaki kelahiran Jumrah, 1 Juni 1954 ini, dipindahkan sebagai Kasubag Rumah Tangga merangkap ajudan Bupati Bengkalis saat itu, Djohan Syarifudin.

Setahun di posisi itu, tahun 1990-1991, anak dari pasangan H Wahi Abdullah dan Rahimah ini ditugaskan sebagai Sekretaris Kecamatan Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis. Kepada **AZAM** beberapa waktu lalu, Syamsuar mengaku itulah awalnya ia mengenal kabupaten yang sekarang dipimpinnya. “Dari jabatan sekcab itulah saya mengenal Siak, apalagi setelah itu saya juga dipercaya menjadi Camat Siak dan Camat Siak Barat. Mungkin karena cukup lama bertugas, Siak sudah tidak asing lagi bagi saya. Saya juga dekat dengan masyarakat,” ungkap Syamsuar.

Tiga tahun bertugas sebagai camat (1996-1999), dan jelang Siak resmi berdiri, ia sempat bertugas di Kepri dengan jabatan Camat Tanjung Pinang Barat. Tak lama di sana, ia kembali ke Siak dengan jabatan Asisten Tata Praja atau Asisten I Setdakab Siak. Setelah itu berbagai jabatan eselon dua dipegang ayah dari Muhammad Andri, Muhammad Rizki Saputra dan Muhammad Zikri Bintani ini. Namanya pun kian populer. Maka ketika genderang Pilkada Siak pertama ditabuh, ia pun masuk dalam bursa bupati dan wakil bupati.

Melalui proses panjang dengan jalan berliku, ia pun berpasangan dengan H Arwin AS yang saat itu berstatus Plt Sekdakab Siak. Hasilnya

pasangan ini sukses menjadi pemenang dan kemudian dilantik sebagai sebagai Bupati dan Wakil Bupati Siak pertama periode 2001-2006.

Sayangnya, di pilkada langsung pertama tahun 2006, Arwin dan Syamsuar memilih jalan masing-masing, alias tidak berada dalam satu perahu. Keduanya sama-sama maju sebagai calon bupati. Dan, ternyata dewi fortuna lebih berpihak kepada Arwin. Syamsuar yang kalah berkarir di Pemprov Riau dengan jabatan Wakil Kepala Dinas Kehutanan Riau. Lalu dari sana, ia dimutasi sebagai Sekretaris KPU Riau, seterusnya Kepala Inspektorat Riau. Saat memenangkan jabatan inilah, Syamsuar sempat ditugaskan menjadi Plt Bupati Kepulauan Meranti yang baru berpisah dari Kabupaten Bengkalis.

Meski tak bertugas di Siak, tapi nama Syamsuar masih melekat di hati masyarakat. Terbukti, jelang berakhirnya kepemimpinan Arwin AS, nama lelaki dengan motto ‘bekerja bagian dari ibadah’ ini langsung melambung sebagai calon kuat, dan diprediksi terpilih menjadi bupati. Prediksi itu ternyata jadi kenyataan.

Sama Prinsip

Banyak pertanyaan apa yang membuat pasangan ini tetap kompak, seiring sejalan, seiya sekata dalam memimpin Kabupaten Siak. Apa pula yang membuat Alfredri tak ‘merasa besar kepala’ sehingga kembali bersedia dipinang sebagai calon wakil bupati tahun ini? Saat ditemui **AZAM** di rumah dinasnya, Rabu (19/8), Alfredri mengaku kesediannya itu karena merasa memiliki banyak kesamaan dengan Syamsuar, dan yang paling menonjol adalah persamaan prinsip menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

Selain itu, Alfredri juga mengaku memiliki kesamaan dalam karir di pemerintahan. “Dari zaman susah dulu kami bersama-sama mengabdikan Siak. Memang kami memiliki kesamaan karir. Saya kenal Pak Syamsuar sejak di APDN. Beliau senior saya. Selain itu, Pak Syamsuar bagi saya adalah guru dan saya banyak belajar dari beliau,” ujarnya.

Meski sejak kecil bercita-cita ingin jadi insinyur perikanan, tapi sebenarnya karir Alfredri di pemerintahan terbelang mentereng. Setamat APDN, ia langsung ditempatkan di Sungai Apit, sebagai Pjs Kaur Kemasyarakatan Setwilcam Sungai Apit, Kantor Camat Sungai Apit, tahun 1990-1992. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan ke Institut Pemerintahan hingga tahun 1995. Setamat IP, dia dikembalikan ke Bengkalis. Kalau biasanya setelah tamat IP tugas yang menanti adalah sekcama, tapi disebabkan jabatan sekcama tak ada yang kosong, Alfredri ditunjuk menjadi Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Sungai Apit. "Saat satu tahun di IP Jakarta, saya menikah dan kebetulan istri saya seorang guru di Sungai Apit. Jadi karena memang istri bertugas di Sungai Apit dan kebetulan ada job yang kosong di sana, saya pun ditempatkan di Sungai Apit," jelas suami Dra Hj Rasidah ini.

Setahun di Sungai Apit, Alfredri mendapat tugas baru sebagai Sekcam Minas (1996-2000). Dan tak lama setelah Siak menjadi kabupaten, tahun 2000, ayah dari Zahratul Ahya ini dimutasi ke Setdakab Siak sebagai Kabag Pemdes. Tapi, empat bulan kemudian Penjabat Bupati Siak, Tengku Rafian, memindahkan Alfredri ke Kabag Penyusunan Program. Tugas ini dipegangnya sampai tahun 2002.

Memilih Wakil Bupati

Tahun 2002, Alfredri ditugaskan kembali ke Minas dengan jabatan Camat Minas. Dua tahun di sana, ia dilantik sebagai Camat Tualang hingga tahun 2005. Dan 2005 akhir, ia dimutasi menjadi Kabag Keuangan (2009). Karir Alfredri terus meningkat, dari Kabag Keuangan, ia menjadi Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Siak. Jabatan ini diembannya hingga tahun 2011, karena mencalonkan diri menjadi wakil bupati yang mengharuskan ia mundur dari jabatan fungsional.

Keputusannya mundur dan bertarung ternyata sangat tepat. Berpasangan dengan Syamsuar, Alfredri sukses melangkah ke kursi Wakil

Bupati Siak 2011. “Jabatan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya, apalagi cita-cita saya hanya ingin jadi insinyur perikanan,” kata Alfredri. Keinginan menjadi insinyur perikanan juga tak lepas dari kehidupan keluarganya. “Dikampung orang tua saya hanya sebagai petani, berkebun, dan memiliki kolam ikan. Sejak kelas 4 SD saya sudah membantu orangtua bekerja di sawah, di kebun dan di kolam, malamnya mengaji,” tuturnya.

Meski karir di birokrat terbilang mentereng, tak banyak yang berubah dari Alfredri. Ia tetap bersahaja dan bergaul dengan siapa saja. Walau sudah jadi wakil bupati, ia tak meninggalkan aktivitas rutinnya. Kalau ada tawaran main bola pantang ditolaknya. Ia juga pejabat yang memilih bekerja di belakang meja daripada banyak bicara.*

Kata Arwin, SUARA Berpengalaman

Bupati Kabupaten Siak 2001-2006 dan 2006-2011, Arwin AS menyebut, pasangan Syamsuar-Alfredri punya pengalaman di birokrasi dan parpol. Sudah banyak asam garam dalam membangun Siak. Mereka juga berkomitmen meneruskan program-program pemimpin terdahulu.

Arwin AS mengingatkan masyarakat Kabupaten Siak agar menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan Pilkada, 9 Desember 2015. Sebab, masa depan Kabupaten Siak sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat dalam menyalurkan hak suaranya saat pilkada berlangsung. “Saya ingatkan warga Siak agar menggunakan hak pilihnya di pilkada nanti. Jangan sampai tak memilih, gunakan hati nurani untuk menentukan masa depan Siak,” kata Arwin kepada **AZAM**, Rabu (19/8) yang mengaku tengah bersama tokoh masyarakat saat menggelar silaturahmi dengan warga Kampung Rawang Kao, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak.

Menurut Arwin, keberhasilan pelaksanaan pilkada di suatu daerah, ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya. “Kalau yang milih banyak, tentu demokrasi berjalan. KPU dan pihak lainnya harus terus melakukan sosialisasi. Jangan sampai masyarakat tak memilih, karena tak tahu ada pilkada,” jelasnya.

Arwin juga mengingatkan masyarakat Siak agar tidak terpancing dengan isu-isu negatif yang bisa memecah belah warga selama pilkada berlangsung. “Saya dengar mulai ada isu yang mengatasnamakan suku, agama dan etnis menjelang pilkada. Itu tak baik. Selama saya jadi bupati, isu seperti itu tak pernah ada. Mari kita tetap menjaga persatuan dan

kesatuan di ‘Negeri Istana’ ini selama helat pilkada,” pesan Arwin.

Menurut Arwin, perkembangan pembangunan Kabupaten Siak lima tahun terakhir, cukup menggembirakan. Bukan saja pada pembangunan fisik terutama infrastruktur jalan tapi non fisik juga berjalan dengan baik. Nama Siak juga semakin dikenal orang, baik secara nasional maupun internasional lewat iven-ivennya.

Soal dukungan dirinya kepada pasangan *incumbent* Syamsuar-Alfredri pada Pilkada Siak, dia menyampaikan beberapa alasan. Pasangan dengan jorgan SUARA ini dinilai Arwin, sudah berpengalaman baik di bidang partai politik maupun birokrasi. “Keduanya punya pengalaman birokrasi dan parpol. Sudah banyak asam garam membangun Siak, tentu ke depan akan menjadi lebih baik,” kata Arwin.

Arwin mengaku, dalam kepemimpinan tentu ada kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, ke depan pasangan Koalisi Rakyat Bersatu ini menggunakan kelebihan menyempurnakan pembangunan di Kabupaten Siak. Selain itu, tambahnya, hubungan harmonis antara Syamsuar dan Alfredri sebagai bupati Siak dan wakil Bupati Siak menjadi modal yang sangat berharga. Keduanya jelas akan bersinergi dan solid agar bisa membawa kemakmuran bagi masyarakat di Kabupaten Siak. “Harmonisasi keduanya (Syamsuar-Alfredri-red) diharapkan pada lima tahun ke depan menjadi lebih baik lagi,” harap Arwin.

Selain itu diungkapkannya bahwa pasangan ini berkomitmen untuk melanjutkan program-program yang telah disusun Bupati Siak terdahulu. “Mereka sudah berpengalaman, dan berkomitmen melanjutkan program-program pembangunan memajukan Siak. Karenanya saya mendukung pasangan ini untuk melanjutkan kepemimpinannya,” ungkap Arwin.*

Terasa Lebih Indah Dipimpin Syamsuar-Alfedri

Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Siak Wan Anwar mengatakan, Syamsuar-Alfedri adalah sosok yang tepat memimpin Siak. Kabupaten ini terasa indah dibawah kendali keduanya.

“**D**alam suatu rapat, salah seorang peserta yang juga pengurus LAM di tingkat kecamatan mengusulkan agar LAM Siak mendukung bupati dan wakil bupati agar kembali terpilih,” ujar Ketua LAM Siak Wan Anwar kepada **AZAM** yang bertandang ke rumahnya di Siak Sri Indrapura.

Mendengar usulan yang dilontarkan dalam rapat itu, Wan Anwar mengaku menjadi kaget. Kaget, lantaran LAM bukan didirikan untuk kepentingan politik. Melainkan untuk tujuan yang berkaitan dengan adat dan istiadat Melayu. Soal kekaguman yang kemudian menyatakan dukungan terhadap seorang pemimpin, itu adalah hal yang wajar. Namun, hal itu cukup dibuktikan dengan dukungan pribadi, bukan mengatasnamakan lembaga atau organisasi.

Wan Anwar mengakui, anggota LAM baik tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan, merasakan hubungan yang begitu baik dengan pemimpinnya, Syamsuar dan Alfredri. Kedua tokoh ini, kata Wan Anwar sudah dekat di hati masyarakat. Tiap turun ke warga, mereka tidak lupa menyapa dan menyertakan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh adat.

Sosok Syamsuar, adalah pribadi yang religius. Sebelum istilah blusukan ngetop oleh Jokowi, Syamsuar sudah mempraktekkan cara seperti itu di Siak. Tiap Jumat, dia turun ke desa bergabung dengan warga. Sholat jumat bersama, serta membahas masalah pembangunan serta hal-hal yang dibutuhkan masyarakat setempat. “Sayangnya, apa

yang dilakukan Syamsuar di Siak tidak mendapat perhatian dari media massa. Tidak seperti Jokowi yang melejit karirnya karena blusukan yang menaikkan citranya,” ujar mantan perwira polisi ini.

Pria yang pernah menjabat sebagai Wakapolres Siak ini mengatakan, kepemimpinan Syamsuar-Alfedri di Siak nyaris tanpa cela. Karena mereka bekerja memang dari hati. Jika ada yang tidak puas dan bernada sumbang, itu hanya orang perorang, yang mungkin keinginan pribadinya tidak terpenuhi atau tidak terpuaskan. Secara umum, segala aspek kehidupan di Siak telah menunjukkan perkembangan yang beraarti. Baik bidang ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, agama, adat dan budaya. Semuanya, termasuk bidang olahraga juga bisa dibanggakan.

Siak saat ini, sudah jauh berbeda dari sepuluh tahun lalu. Dari hanya sebuah kecamatan, kini menjelma menjadi daerah berkembang dengan pesat. APBD Siak yang lumayan besar, telah dipergunakan untuk membangun semua kebutuhan masyarakat. Lihatlah, sudah tidak ada lagi desa yang tidak punya jalan yang dibangun pemerintah. *Nah*, ini akan terus ditingkatkan oleh Syamsuar-Alfedri. Jika sebelumnya, ada semboyan pembangunan infrastruktur merangkai desa, maka kedepan ditingkatkan menjadi merangkai kampung atau dusun.

Wan Anwar dengan tegas mengatakan, Syamsuar-Alfedri mesti didukung untuk lima tahun ke depan. Pasangan ini, pantas diberi kesempatan melanjutkan program yang sudah digulirkan. Merangkai kampung, meningkatkan ekonomi masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan program-program lainnya.

“Saya sepakat dengan ungkapan seorang ustadz yang menyebutkan, menjadi bupati itu tak bisa coba-coba. Ini ada yang sudah teruji dan terbukti mampu membawa kemajuan. Untuk itu, saya mengharapkan kepada masyarakat agar memberi kesempatan kepada pasangan ini lima tahun ke depan,” ujarnya. Perbedaan dukungan di tengah masyarakat hendaknya tidak menjadikan perbantahan. Perbedaan itu hal biasa yang menjadi bukti bahwa negara kita berasaskan demokrasi. Setiap orang diberi kesempatan memilih sesuai pilihan masing-masing.

Kita hanya bisa berharap, dalam menentukan pilihan, masyarakat hendaknya benar-benar menggunakan hati nurani. Pilihlah pemimpin yang akan membawa kemajuan bagi negeri ini lima tahun ke depan.*

Kader PAN yang *Mbalelo* Ditindak Tegas

PAN Siak bekerja ekstra keras memenangkan Syamsuar-Alfedri. Kader yang *mbalelo* akan ditindak tegas.

“Dari Pekanbaru ke Buatan, singgah di jalan membeli buah, lanjutkan pimpinan yang berpengalaman, untuk Negeri Istana yang berrmarwah”. Pantun dari Ketua DPD PAN Siak, Fairus Ramli ini sebagai bukti keseriusan PAN Siak mendukung pasangan Syamsuar-Alfedri pada Pilkada Siak, 9 Desember 2015.

Serius, kata Fairus, karena boleh dikatakan partai besutan Amin Rais ini menjadi pengusung utama. Karena memiliki lima kursi di DPRD Siak, atau yang terbanyak dari empat partai politik lainnya. Dengan status itu, partai yang dipimpinnya akan bekerja ekstra keras memenangkan pasangan dengan jargon SUARA ini. “Karena menjadi motor dari koalisi, makanya kami akan bekerja ekstra keras memenangkan pasangan yang kita usung,” kata Fairus kepada **AZAM** pekan silam.

Menurut Fairus, keputusan PAN Siak mengusung Syamsuar-Alfedri dilakukan dengan berbagai pertimbangan. *Pertama*, karena pasangan ini merupakan pasangan yang sangat serasi, terbukti masih tetap bersama dan ini merupakan hal langka dan jarang terjadi di Indonesia.

“Banyak pasangan kepala daerah di Indonesia mengalami keretakan hubungan. Namun itu tidak terjadi pada Syamsuar-Alfedri, bahkan keduanya kembali berpasangan untuk yang kedua kali. Ini menandakan bahwa Syamsuar-Alfedri memiliki keserasian dan kecocokan,” ujarnya.

Kedua, kata Fairus, karena pasangan ini berpengalaman, dan sama-sama memulai titian karir dari bawah sampai ke puncak seperti sekarang. Pertimbangan lainnya karena kedua tokoh itu nasionalis, buktinya

program-program yang sangat menyentuh masyarakat diberikan tanpa pernah memandang suku, etnis serta asal masyarakat. “Salah satu program yang betul-betul terasa dan sangat menyentuh masyarakat adalah pengobatan gratis melalui Jamkesda. Jamkesda merupakan program yang sangat bagus, pengobatannya bisa tuntas, program nasional BPJS saja belum bisa mengalahkan Jamkesda Kabupaten Siak,” ungkapnya.

Selain itu, ada program akte kelahiran gratis bagi anak yang baru lahir. Fairus berpendapat walaupun biaya pembuatan akte kelahiran tak mahal, tapi program tersebut sangat menyentuh masyarakat. Belum lagi pendidikan gratis 12 tahun. Kemudian dibidang pengembangan keagamaan juga demikian. Semua imam dan gharim masjid mendapat bantuan dari Pemkab Siak.

“Kalau masalah pembangunan menurut saya sudah sangat bagus. Sekarang ini program prioritas adalah membangun jalan penghubung dari kampung ke kampung. Jadi pada akhirnya nanti tidak akan ada lagi desa yang terisolir di Kabupaten Siak. Semua masyarakat Siak akan bisa menikmati jalan yang sudah beraspal bahkan sampai ke kebun-kebun. Masih banyak lagi hal-ha lain! kenapa PAN mendukung Syamsuar-Alfedri,” sebutnya.

Fairus mengaku PAN Siak sudah memiliki strategi jitu memenangkan Syamsuar-Alfedri. Sebagai modal PAN Siak sudah memiliki hampir 24 ribu suara. Strategi itu dijalankan dengan langkah awal membentuk tim di internal PAN dengan nama KPPD, dan tim ini sudah bekerja. Selanjut membentuk tim koalisi daerah mulai dari kabupaten, kecamatan hingga ke desa-desa dan didalamnya ada tim koalisi, serta relawan. Tim koalisi terdiri dari partai pengusung PAN, PKS, Hanura, Nasdem dan PKPI. Sedang relawan merupakan tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, perempuan dan tokoh lintas agama.

Fairus menegaskan semua kader PAN dikerahkan memback-up pasangan ini. Jika nanti ada anggota DPRD dari PAN yang coba-coba tidak mendukung Syamsuar-Alfedri, maka sanksinya adalah PAW. “Dalam kesempatan ini saya tegaskan, seluruh kader PAN Siak harus taat

dan patuh pada keputusan partai, yakni mendukung dan memenangkan pasangan Syamsuar-Alfedri. Jika terbukti ada kader yang coba-coba *mbalelo*, akan kita beri sanksi tegas. Karena ini marwah partai, PAN akan berusaha sekuat tenaga memenangkan pasangan ini,” ungkapnya.*



أغكاتن ذريات أنق ملايو



AZAM



SEMBILAN kabupaten dan kota di Riau, akan menggelar Pilkada Serentak. Yakni Bengkalis, Dumai, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu dan Siak. Pesta demokrasi di tingkat lokal ini bertujuan memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan jadi pemimpin di masing-masing daerah. Seperti pengalaman pemilu, baik di Riau atau di provinsi lain, pilkada rawan konflik politik. Ada konflik yang bersumber dari pasangan calon, tim sukses, kader partai, relawan termasuk masyarakat. Dalam banyak kasus, tak jarang konflik juga berujung pada tindakan anarkhis. Di Pilkada Serentak, konflik akan muncul secara serempak (bersamaan) di beberapa kabupaten dengan modus yang sama.

Bagaimana kesiapan Polda Riau mengamankan jalannya pelaksanaan pilkada? Kapolda Brigjen Pol Dolly Bambang Hermawan melalui Kepala Bidang Humas, AKBP Guntur Aryo Tejo, SIK menyebutkan, pihaknya sudah mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi, termasuk memetakan daerah-daerah mana saja yang rawan konflik. "Alhamdulillah dari informasi intelijen situasi Riau sangat kondusif," kata Guntur kepada Endrizal Yusten dan Beni Hendra dari AZAM. Baca petikan wawancaranya di halaman. 12.

KONFLIK SEREMPAK DI PILKADA SERENTAK

AKBP Guntur Aryo Tejo, SIK

Riau Rawan Konflik Pilkada

Mengantisipasi pelanggaran Pilkada 9 Desember, Bawaslu meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2015. “Bawaslu berusaha memberi panduan berbasis research dan data di lapangan yang disajikan dalam angka potensi,” kata Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron pada acara peluncuran IKP di Jakarta Pusat, Selasa (1/9). Bagaimana di Riau?

Berbicara di depan Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) dari setiap daerah yang mengikuti pilkada, Daniel berharap peluncuran IKP menjadi arahan untuk pencegahan. Artinya, Bawaslu tidak menunggu permasalahan muncul.

“Bawaslu tidak boleh menunggu peristiwa di hadapan mereka. Pelanggaran banyak terjadi di tahap pemungutan dan perhitungan suara. Semoga hari ini semua sudah diurai,” ujarnya.

IKP 2015 terdiri dari lima aspek yang dianggap paling potensial memunculkan kerawanan pelanggaran dalam Pilkada Serentak 2015. Kelima aspek itu ialah profesionalitas penyelenggara, politik uang, akses pengawasan, partisipasi masyarakat, dan kondisi keamanan.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad juga menyatakan potensi terjadinya konflik pada Pilkada Serentak diperkirakan lebih besar dibanding dengan Pilpres 2014. Muhammad, saat menjadi narasumber dalam diskusi di Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, Jakarta, belum lama ini menegaskan, “Potensi konflik tiga kali lebih besar dari pilpres. Soalnya pilkada serentak melibatkan elite, kelas menengah, hingga akar rumput. Semua lapisan menghadiri kegiatan apapun yang dilaksanakan dalam rangka pilkada.” Pilkada serentak itu

akan menggunakan sistem satu putaran. “Satu angka menentukan orang jadi kepala daerah. Sudah pasti mereka akan *all out*, dan potensi konfliknya tinggi” tambah Muhammad.

Terkait kerawanan Pilkada Serentak, Anggota Komisi III DPR RI Dwi Ria Latifa meminta kepolisian mengantisipasi. “Dengan pelaksanaan serentak pasti ada dampak dari sisi keamanan. Ini yang harus segera diantisipasi oleh kepolisian khususnya jajaran polda hingga tingkat bawah,” kata Dwi beberapa waktu lalu kepada wartawan di Jakarta.

Agar suasana kondusif menjelang, saat, dan pasca pilkada, kata dia, polisi harus segera mengidentifikasi titik-titik dan potensi kerawanan pada masing-masing wilayah. “Harus segera ada antisipasi agar potensi yang ada tidak menjadi ancaman saat pilkada. Polisi harus memastikan pilkada tetap kondusif,” kata anggota DPR Dapil Provinsi Kepulauan Riau itu.

Ria juga menekankan pentingnya netralitas seluruh aparat termasuk polri dalam pilkada sehingga fokus pada fungsinya sebagai pihak yang memastikan keamanan tetap terjaga. “Yang tidak kalah penting adalah netralitas termasuk dari kepolisian agar pilkada berjalan lancar,” kata Ria.

Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengakui tingkat kerawanan dalam pelaksanaan Pilkada 2015 cukup tinggi yang disebabkan oleh berbagai macam faktor. “Terkait pilkada, saya merasa akan terjadi kerawanan cukup tinggi, karena berbagai faktor. Karena itu kita sudah memetakan kerawanan di setiap wilayah,” kata Kapolri saat melakukan rapat kerja dengan Komisi III DPR di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Kapolri mengatakan pemetaan masing-masing wilayah rawan itu meliputi kelengkapan perangkat penyelenggara, sejarah konflik pemilu, konflik parpol, potensi konflik oleh calon yang akan maju, karakter masyarakat, dan potensi konflik di masing-masing wilayah. “Semua sudah kami petakan, mana daerah yang rawan, mana daerah sangat rawan dan mana daerah yang aman,” jelas dia.

Menurut Badrodin, pihak kepolisian akan menempatkan personel dengan kekuatan cukup di wilayah-wilayah yang masuk kategori rawan dan sangat rawan konflik pilkada. Polri, menurutnya, juga telah mengantisipasi pengamanan pilkada dalam kondisi apa pun.

Tak Sependapat

Mengkonfirmasi IKP (Index Kerawanan Pemilu) yang telah dirilis Bawaslu Pusat, Ketua Bawaslu Riau Edy Syarifuddin tak sependapat terhadap munculnya potensi konflik Pilkada di Riau. Dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), potensi disharmoni dan konflik sosial pasti ada. Tapi, rawan atau tidak munculnya konflik, itu tergantung bagaimana mengelola kegiatan tersebut dengan baik dan benar.

“Sekarang ini bagaimana pihak penyelenggara (KPU, red) menjalankan tugas dan fungsinya. Bagaimana peserta, tim kampanye, panwaslu atau yang terlibat di dalamnya taat aturan. Begitu juga dengan pemerintah harus bersikap netral sesuai dengan aturan yang sudah digariskan. Jadi, potensi konflik itu bukan masalah pilkada serentak,” terang Edy kepada **AZAM** pekan lalu.

Dikatakan Edy, banyak hal yang memicu munculnya konflik dalam helat pilkada. Diantaranya, terkait dengan masalah penerapan aturan. KPU mesti merinci secara detail soal aturan pilkada tersebut. Sebab, peserta juga terkadang tak banyak tahu dengan aturan itu. Apalagi setiap pilkada selalu memunculkan undang-undang dan regulasi berbeda.

“Misalnya soal aturan kegiatan kampanye yang hanya bisa dilakukan oleh KPU dan pasangan calon. Kegiatan yang diinisiasi diluar dua kelompok itu, dilarang. Jika ada masyarakat yang membuat pesta rakyat dengan mendatangkan pasangan calon, itu dilarang. Yang bisa memediasi itu KPU dan pasangan calon, bukan timses atau masyarakat. Yang kita inginkan semua itu teratur dengan baik. Ya, kebanyakan kan kita tidak tau aturan,” ujarnya.

Edy juga menyebutkan, jumlah pasangan calon tidak menjadi patokan potensi munculnya konflik. Semua daerah dikatakannya sama saja peluang munculnya disharmonis. Entah itu di daerah yang hanya memunculkan dua pasangan calon, atau daerah yang memunculkan banyak pasangan calon.

“Tidak bisa kita katakan daerah yang hanya memunculkan dua pasangan calon lebih besar peluang munculnya konflik. Begitu juga sebaliknya. Menurut saya, semua daerah berpotensi memunculkan konflik. Konflik itu muncul disebabkan pihak penyelenggara, pasangan calon, atau tim sukses yang tidak siap. Mungkin saja dari sisi amunisi mereka siap, sementara disisi lainnya, seperti penerapan aturan tidak siap,” kata Edy.

Ditanya daerah mana saja di Riau ini yang rawan konflik, Edy mengatakan sulit untuk dipetakan. Dirinya cenderung melihat dari sisi positif saja, tak ada daerah yang rawan konflik, semua biasa-biasa saja. “Konflik itu muncul ketika ada yang menghendaki. Tapi saya yakin, masyarakat kita sudah cerdas dalam berpolitik,” tukasnya.

Petakan Daerah Konflik

Terpisah, mantan Ketua Panitia Pemilihan Daerah (PPD) I Riau--sekarang KPU, H Syamsul Rakan Chaniago ketika diminta analisisnya mengatakan kondisi dan situasi sudah berbeda. “Dulu saya *strick* pada aturan, setiap ada regulasi baru dari PPI Jakarta, bahkan surat yang berisi petunjuk teknis, saya sosialisasikan ke bawah melalui rapat-rapat dengan PPD II sehingga waktu itu orang-orang dari kabupaten *apreciate* sekali. Kemudian peraturan itu disosialisasi terus ke bawah sampai tingkat kecamatan, desa bahkan KPPS,” kata Syamsul Rakan, mantan Ketua Panitia Pemilihan Daerah Provinsi Riau.

Praktisi hukum yang kini berkiprah di Mahkamah Agung ini berpendapat, bentrok (konflik) itu terjadi karena adanya perbedaan sudut pandang. “Melalui pertemuan, rapat-rapat rutin dan insidentil

kita samakan tafsir, pemahaman, dan sudut pandang penyelenggara di bawah, dan petugas bawah di *training* supaya mereka menguasai aturan,” pungkas tokoh masyarakat Riau yang rajin mengkritisi kebijakan Pemerintah Provinsi Riau.

Jadi potensi konflik di Riau pasti ada. “Makanya semua pihak termasuk aparat kepolisian harus mengantisipasi dini dan memetakan daerah mana saja yang memungkinkan terjadinya kerusuhan pilkada,” tambah Syamsul Rakan.*

Sulit Petakan Daerah Mana Rawan Konflik

Kata Ketua Bawaslu Riau, Edy Syarifuddin, tidak pun pilkada serentak potensi munculnya konflik akan tetap ada. Semua pihak harus menyikapinya dengan bijak dan bertanggung jawab.

Dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), potensi disharmoni dan konflik sosial pasti ada. Tapi, rawan atau tidak munculnya konflik, itu tergantung bagaimana mengelola kegiatan tersebut dengan baik dan benar.

Tersebab itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau, Edy Syarifuddin, tidak sependapat kalau Pilkada Serentak dinilai berpotensi memunculkan konflik.

“Sekarang ini bagaimana pihak penyelenggara (KPU, red) menjalankan tugas dan fungsinya. Bagaimana peserta, tim kampanye, panwaslu atau yang terlibat di dalamnya taat aturan. Begitu juga dengan pemerintah harus bersikap netral sesuai dengan aturan yang sudah digariskan. Jadi, potensi konflik itu bukan masalah pilkada serentaknya,” terang Edy kepada **AZAM** pekan lalu.

Dikatakan Edy, banyak hal yang memicu munculnya konflik dalam helat pilkada. Diantaranya, terkait dengan masalah penerapan aturan. KPU mesti merinci secara detail soal aturan pilkada tersebut. Sebab, peserta juga terkadang tak banyak tahu dengan aturan itu. Apalagi setiap pilkada selalu memunculkan undang-undang dan regulasi berbeda.

“Misalnya soal aturan kegiatan kampanye yang hanya bisa dilakukan oleh KPU dan pasangan calon. Kegiatan yang diinisiasi diluar dua kelompok itu, dilarang. Jika ada masyarakat yang membuat pesta rakyat dengan mendatangkan pasangan calon, itu dilarang. Yang bisa memediasi

itu KPU dan pasangan calon, bukan timses atau masyarakat. Yang kita inginkan semua itu teratur dengan baik. Ya, kebanyakan kan kita tidak tahu aturan,” ujarnya.

Edy juga menyebutkan, jumlah pasangan calon tidak menjadi patokan potensi munculnya konflik. Semua daerah dikatakannya sama saja peluang munculnya disharmonis. Entah itu di daerah yang hanya memunculkan dua pasangan calon, atau daerah yang memunculkan banyak pasangan calon.

“Tidak bisa kita katakan daerah yang hanya memunculkan dua pasangan calon lebih besar peluang munculnya konflik. Begitu juga sebaliknya. Menurut saya, semua daerah berpotensi memunculkan konflik. Konflik itu muncul disebabkan pihak penyelenggara, pasangan calon, atau tim sukses yang tidak siap. Mungkin saja dari sisi amunisi mereka siap, sementara disisi lain, seperti penerapan aturan tidak siap,” kata Edy.

Ditanya daerah mana saja di Riau ini yang rawan konflik, Edy mengatakan sulit untuk dipetakan. Dirinya cenderung melihat dari sisi positif saja, tak ada daerah yang rawan konflik, semua biasa-biasa saja. “Konflik itu muncul ketika ada yang menghendaki. Tapi saya yakin, masyarakat kita sudah cerdas dalam berpolitik,” tukasnya.

Pihak penyelenggara mesti tahu aturan dan menterjemahkannya untuk kemudian diimplementasikan dalam menjalankan tugasnya. Bagaimana mereka membahasakan aturan itu untuk kemudian diterapkan di pilkada. Ini menjadi kewenangan mereka untuk membuat aturan dan menyampaikannya kepada semua pihak.

“Panwas sudah minta, tapi KPU nya saja yang lelet. Nanti kalau ‘bola panas’ itu kita lempar ke dia, baru tahu. Kita pertanyakan saja apa yang mereka lakukan dan tanggung jawabnya sebagai pihak penyelenggara, pusing mereka. Itu baru satu pertanyaan, belum lagi soal penetapan jadwal, masalah kampanye, penetapan jadwal rapat umum, dan lain sebagainya. Semua itu peraturan yang mereka buat sendiri dan mesti dijalankan dengan baik dan benar. Bawaslu hanya mengunci saja semua

ketetapan yang mereka buat,” pungkask Edy.

Meski sedikit pesimis akan terciptanya pilkada yang kondusif tanpa memunculkan konflik, Edy tetap berharap kepada pasangan calon dan timnya untuk bisa taat aturan. Kalau memang ada yang tidak paham, undang pihak-pihak yang berkompeten. Masyarakat juga harus cerdas, jangan gampang terprovokasi. KPU harus profesional mengelola penyelenggaraan pilkada ini sesuai dengan aturan.

Yang jelas, Bawaslu Riau tetap berupaya meminimalisir terjadinya konflik. Proses administrasi secara tertulis tetap ditembuskan ke pihak kepolisian. Dan dalam bentuk komunikasi langsung mengenai perijinan kampanye misalnya, tetap ditempuh sesuai protap kepolisian. Standar pengamanan lain sepanjang sesuai aturan Pilkada dapat diatur oleh pihak kepolisian.*

Kita Akan Lakukan Tindakan Tegas dan Terukur

Sembilan kabupaten dan kota di Riau, akan menggelar Pilkada Serentak. Yakni Bengkalis, Dumai, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu dan Siak. Pesta demokrasi lokal ini bertujuan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan menakhodai daerah masing-masing.

Seperti pengalaman pilkada lima tahun lalu, baik di Riau maupun di provinsi lain, pilkada terbilang rawan konflik politik. Ada yang bersumber dari pasangan calon, tim sukses, kader partai politik, relawan tak terkecuali masyarakat. Dalam banyak kasus, konflik juga memancing tindakan anarkhis yang disamping merugikan daerah juga masyarakat.

Bagaimana kesiapan Polda Riau mengamankan jalannya pelaksanaan pilkada? Kapolda Brigjen Pol Dolly Bambang Hermawan melalui Kepala Bidang Humas, AKBP Guntur Aryo Tejo, SIK menyebutkan, pihaknya sudah mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi, termasuk memetakan daerah-daerah mana saja yang rawan konflik. Juga telah menggelar perkara pelaksanaan pilkada. “*Alhamdulillah* dari informasi intelijen situasi Riau pada umumnya sangat kondusif,” kata Guntur kepada **Endrizal Yusten** dan **Beni Hendra** dari **AZAM** yang mewawancarainya, Kamis siang di Polda Riau. Berikut petikannya.

Pilkada Serentak di sembilan kabupaten dan kota di Riau dikabarkan rawan konflik. Seperti apa aparat kepolisian melihat ancaman itu?

Kita sudah melakukan pemetaan tentang kerawanan-kerawanan konflik yang nantinya akan kita bahas dalam rapat di internal kepolisian.

Kita juga akan melakukan rapat koordinasi lintas sektoral. Nanti akan kita cari solusinya. Juga kita akan buat semacam buku panduan kepada personil-personil yang bertugas di lapangan. Panduan itu berisi cara bertindak saat berdinamika di setiap tahapan. Mulai dari tahapan pendaftaran bakal calon, kemudian penetapan calon, kampanye, sampai ke pelantikan kepala daerah terpilih.

Apakah Polda Riau sudah mengetahui konflik apa saja yang rawan muncul?

Konflik tersebut banyak ragamnya, dan itu kita yang memprediksikan sendiri. Misalkan pada saat kampanye, sebelum dimulainya tahapan kampanye pasangan calon sudah mulai kampanye duluan, atau melakukan kampanye di tempat-tempat yang dilarang oleh aturan berlaku. *Nah*, hal-hal seperti ini tentu kita koordinasikan dengan panwaslu. Jika panwaslu menyatakan ada unsur tindak pidana dan itu dilimpahkan kepada kepolisian, kepolisian akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Jika konflik itu nanti menimbulkan perbuatan anarkis, kita juga telah mempersiapkan personil. Secara keseluruhan 2/3 kekuatan personil baik di polda maupun di masing-masing polres. Yang 1/3 personil lagi kita berdayakan untuk memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Tadi Anda sebutkan sudah ada pemetaan, dimana saja titik-titik rawan konflik itu?

Kita tidak mengkhususkan daerah atau lokasi tertentu. Yang jelas kita tidak boleh *underestimat* dan juga *overestimat*. Banyak sekali sebenarnya. Namun yang pasti kita sudah siapkan semuanya mulai dari personil maupun kesiapan personil itu sendiri.

Tahapan mana saja dalam Pilkada Serentak menurut Anda yang memiliki potensi konflik?

Hampir setiap tahapan memiliki kerawanan. Dan itu prediksi kita, setelah bercermin dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Juga dari perkembangan laporan informasi intelijen tentang situasi dan kondisi terkini.

Seperti apa koordinasi polda dengan polres dalam pengamanan Pilkada Serentak?

Yang jelas kegiatan pengamanan di wilayah-wilayah tersebut langsung di bawah kendali kapolres setempat dan di *back up* Polda Riau.

Bisa Anda rinci teknisnya di lapangan?

Posko keamanan ada di masing-masing polres, tapi sifatnya bukan pos tetap. Misalkan ketika pengamanan saat pemungutan suara, maka di setiap TPS sudah ada personil polisi yang di-*standby*-kan. Barangkali kerawanan yang mungkin terjadi ada di lima desa perbatasan Kampar dengan Rohul yang kini masih jadi polemik. Dan ini sudah kita baca dan kita antisipasi. Kalaupun nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti tindakan anarkis tentu kita akan mengambil tindakan tegas dan terukur. Kita juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, termasuk Pemerintah Provinsi Riau terutama terkait legalitas hukum wilayah.

Tahapan atau proses Pilkada Serentak sedang berjalan, dan 9 Desember depan merupakan hari pemungutan suara. Bagaimana kesiapan pengamanan oleh Polda Riau?

Apa yang saya sampaikan tadi, kita sudah melakukan *mapping*, menyiapkan peralatan, personil, dan melakukan gelar peralatan. Dari segi peralatan sudah tak ada persoalan, semua telah kita siapkan. Kita juga meminta bantuan menggunakan peralatan milik pemda, misalkan kendaraan dalam rangka pergeseran pasukan. Kalau peralatan seperti senjata dan peralatan khusus kepolisian kita masih lengkap semuanya.

Kita juga menggelar personil, dan setelah kita cek semua sudah lengkap, tidak ada persoalan lagi. Kemudian kita juga sudah melakukan pelatihan-pelatihan, atau pelatihan yang disimulasikan dalam bentuk disikusi, gladi, serta praktek di lapangan. Termasuk pelatihan kehumasan, dan pengamanan pengawalan pribadi pasangan calon. Untuk pengawalan pasangan calon kita menunggu koordinasi dari daerah yang bersangkutan. Personilnya kita siapkan dari polda, utamanya dari brimob.

Apakah sudah ada laporan munculnya riak atau konflik?

Alhamdulillah dari informasi intelijen situasi Riau pada umumnya sangat kondusif.

Berdasarkan pengalaman pilkada sebelumnya, konflik seperti apa yang sering muncul?

Biasanya riak muncul dari tindakan-tindakan kecil, karena itu kita berupaya mengedepankan tindakan-tindakan mediasi dan sosialisasi.

Konflik biasanya muncul dari pasangan calon, kader partai pengusung dan masyarakat. Apa himbuan Anda terhadap ketiga komponen tersebut?

Harapan kita masyarakat yang cerdas memiliki kredibilitas, ini tentu akan menghasilkan kualitas pilkada. Kalau memang ada persoalan atau sengketa, serahkan saja ke aparat hukum. Bukan sebaliknya melakukan perbuatan melawan hokum. Kalau memang ditemukan ada unsur pelanggaran sampaikan ke pihak-pihak terkait seperti panwas, dan bilamana panwas menemukan ada unsur pidana atas pelanggaran itu laporkan ke kepolisian, kita akan tindak lanjuti.

Apa harapan kepolisian kepada penyelenggara pilkada mulai dari KPU, PPK, PPS hingga ke KPPS?

Saya yakin semua sudah profesional. Jadi tinggal tunjukkan saja kepada masyarakat bahwa tindakan-tindakan yang mereka lakukan adalah benar

menurut aturan berlaku, benar menurut UU. Kita juga mengimbau pihak penyelenggara supaya bekerja secara profesional, kalau tidak masyarakat tidak percaya, akan timbul opini, dan akhirnya terjadi gesekan. Tindakan pihak penyelenggara bisa menimbulkan berpotensi konflik, tapi saya yakin bahwa penyelenggara mampu bekerja secara profesional, sesuai aturan dan mekanisme yang sudah ditetapkan, sebab mereka sudah dibekali sama halnya dengan kepolisian. Saya berharap mari sama-sama kita jaga situasi keamanan agar tetap kondusif. Kepada semua unsur yang terlibat baik itu calon, penyelenggara maupun masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat memancing timbulnya konflik. Dengan suasana yang aman, kita dapat menghasilkan pilkada yang berkualitas dan pemimpin yang terpilih juga berkualitas.*

Konflik tak Terjadi Bila Paslon Taat Aturan

Sepanjang elite memberikan contoh yang santun, maka tidak perlu ada kekuatiran konflik akan terjadi.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak akhir tahun ini dianggap potensial menimbulkan konflik. Terutama daerah yang hanya memiliki dua pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Pendapat itu dilontarkan pengamat politik Universitas Islam Riau (UIR), Dr. Maxasai Indra.

Menurut Maxasai, daerah yang memiliki dua pasangan calon, sangat berpotensi terjadinya konflik. Sebab, konsentrasi psikologi masyarakat hanya terbelah di dua kubu saja. Sehingga tingkat emosional politik masyarakat akan sangat tinggi.

Maxasai menilai, untuk di Riau ada empat daerah yang memiliki potensi konflik cukup tinggi jika dibandingkan lima daerah lainnya. Ke empat daerah itu adalah Kabupaten Siak, Meranti, Inhu dan Pelalawan. “Daerah yang memiliki dua pasangan calon kecendrungan potensi konfliknya agak lumayan besar. Sebab masyarakat hanya terbagi dua kubu saja. Sehingga tingkat konsentrasi emosional masyarakat juga akan tinggi,” ujarnya.

Selain itu, potensi konflik juga bisa datang dari peserta pilkada, yakni pasangan calon. Peserta bisa menjadi aktor intelektual dalam konflik, karena ketidakpuasan atas kekalahan. Biasanya menggunakan cara apapun agar bisa membatalkan pemenang.

“Sebenarnya hal ini bisa diredam kalau elite menjunjung tinggi asas pemilu yang luber dan jurdil. Sepanjang pasangan calon (paslon) atau peserta masih mengikuti aturan dan berada dalam koridor aturan yang

ada, maka konflik-konflik tersebut tidak akan terjadi,” kata Maxasai kepada **AZAM** pekan silam.

Maxasai menuturkan, dalam pengamatannya kultur politik di banyak daerah di Indonesia masih sangat minim, tak terkecuali di Riau. Dimana masih banyak politisi yang tidak siap menerima kekalahan. Buntutnya, para calon kepala daerah yang kalah akan melakukan cara apapun untuk memenangkan pilkada.

Karena alasan itulah, Maxasai menyarankan penyelenggara pilkada serentak dapat memetakan daerah yang rawan konflik. “Perlu pemetaan potensi terjadinya konflik,” jelas Maxasai.

Dia menilai, peran partai politik juga sangat diperlukan guna meminimalisir terjadinya potensi konflik. Partai politik harus benar-benar mempersiapkan pasangan calon dalam segala hal. Mulai dari kualitas hingga persiapan mental dan sikap *fairplay*.

Maxasai memastikan mempersiapkan calon-calon yang sudah siap berkompetisi secara sehat, mempunyai komitmen untuk berkompetisi secara jujur, menjauhi politik uang, dan menjauhi perbuatan curang merupakan salah satu tugas penting partai pengusung.

“Sepanjang elite memberikan contoh yang santun, maka tidak perlu ada kekuatiran konflik akan terjadi. Pasangan calon, partai pendukung, dan tim pemenang harus mampu memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Tentu saja caranya harus mentaati segala aturan yang ada dan tidak melakukan provokasi kepada masyarakat. Dengan demikian potensi konflik dapat diminimalisir,” ungkapnya.

Karena kesiapan pengamanan menjadi tanggung jawab utama pihak kepolisian, ujar Maxasai, maka polri harus sudah menyiapkan skema pengamanan di lapangan, misalnya pihak kepolisian harus sudah memetakan daerah rawan konflik yang disebabkan masyarakat yang memang beragam pemahaman keagamaannya, suku dan kedaerahan.

Polda Riau juga bisa belajar dari pengalaman pilkada sebelumnya. Dimana lima desa yang ada di perbatasan Kampar dan Rohul merupakan

salah satu daerah yang sering kali terjadi konflik. Pihak kepolisian harus mengantisipasi ini sejak awal.

“Kita berharap pihak kepolisian benar-benar bekerja secara optimal dan memetakan daerah-daerah yang selama ini dianggap memiliki potensi konflik, sehingga pelaksanaan pilkada berjalan sukses, dan konflik dapat diatasi dengan baik pula,” tambah Maxasai.*

Partai Yakin Pilkada Aman

Kordias menyebut karekater masyarakat Provinsi Riau berbeda dengan masyarakat provinsi lain. Masyarakat Riau lebih santun menyikapi perbedaan-perbedaan yang terjadi selama pelaksanaan pilkada.

Kepolisian Daerah Riau telah merilis setidaknya ada beberapa titik-titik rawan yang harus diwaspadai polisi di polres dan polsek seluruh Riau. Beberapa titik rawan itu, di antaranya sejarah konflik di wilayah tersebut, kepengurusan ganda di dalam partai politik, adanya potensi konflik dibawa calon sebagai pribadi. Selain itu, potensi konflik bersumber dari karakter masyarakatnya.

Kalau ada penyelenggara pemilu yang berpihak atau tidak adil, ini akan menjadi faktor pemicu konflik. Konflik bersumber dari pribadi, kelompok partai maupun daerah. Itu sebab, polri mengingatkan kepada seluruh jajaran kepolisian dan berbagai masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan jelang dimulainya tahapan Pemilukada Serentak 2015 di beberapa daerah. Dan sesuai dengan arahan kapolri, agar jajaran Kepolisian RI dan semua pihak mewaspadaikan sumber-sumber konflik yang berpotensi terjadi pada Pilkada Serentak ini.

Namun untuk wilayah Riau, setelah beberapa kali pelaksanaan pilkada secara langsung hampir semuanya berjalan aman. Potensi konflik yang sebenarnya ada tetap bisa di minimalisir dan diatasi. "Itulah yang membedakan Riau dengan daerah lain. Saya nilai semua *stakeholder* dan masyarakat Riau selama ini sudah dewasa dan arif menjalankan pesta demokrasi. Meskipun ada perbedaan pilihan namun setelah semuanya selesai dapat menerima hasil tanpa anarkis," jelas Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Riau, Kordias Pasaribu, beberapa waktu lalu.

Kordias yang kini duduk sebagai anggota DPRD Riau ini hakkul yakin semua potensi konflik Pilkada Serentak di Riau dapat diantisipasi dengan baik. Ini menurutnya, karena karakter masyarakat Riau berbeda dengan masyarakat provinsi lain. Masyarakat Riau lebih santun dalam menyikapi semua perbedaan yang terjadi selama pelaksanaan pilkada.

Dan sebagai partai pengusung paslon di beberapa kabupaten/kota di Riau, PDI Perjuangan telah menghimbau seluruh kader, simpatisan dan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan anarkis dalam menyikapi perbedaan di pelaksanaan pilkada.

Pria berperawakan tinggi besar ini juga menghimbau pemerintah agar segera menyelesaikan daerah perbatasan yang bisa memicu konflik. Seperti diantaranya konflik lima desa di Rohul-Kampar hampir disetiap *event* pemilihan kepala daerah dan legislator berujung bentrok. Yang terakhir itu, konflik kedua daerah untuk lima desa bersengketa terjadi aksi bentrok antara masyarakat dan Satpol PP kedua daerah.

Sementara itu banyak pula daerah-daerah di Riau yang daerah perbatasannya masih bermasalah. Diantaranya Dumai-Rohil di Kecamatan Sembilan-Sinaboi. Kemudian ada Inhu-Pelalawan di Kecamatan Lirik-Ukui. Kampar-Siak di perbatasan Libo area kilometer 41. Pelalawan-Kampar di Kecamatan Langgam-Kampar Kiri. Bengkalis-Siak untuk wilayah Kecamatan Kandis, Siak Kecil dan Bunga Raya. Selanjutnya perbatasan Rohul-Siak. Kuansing-Inhu di Kecamatan Batang Peranap-Cerenti.

Kemudian batas antara Riau dengan Provinsi tetangga, yakni Kabupaten Rohul-Padang Lawas dan Rohul-Labuhan Batu Selatan. “Ini yang harus diselesaikan oleh kepala daerah masing-masing. Karena akan berpotensi konflik jelang Pilkada Serentak,” kata Kordias. Meski demikian Kordias percaya bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak pertama kali di Riau akan berjalan aman, lancar dan sukses.*

Validasi Pemilih Titik Rawan Utama

70 Persen pelaksanaan Pilkada Serentak di Riau berada dalam suasananya kondusif. Sementara 30 persen lain harus diwaspadai sebagai titik rawan, kata Ketua KPU Riau, Dr. H. Nurhamin.

Jangan anggap remeh soal validasi data pemilih. Dalam beberapa kali pelaksanaan pemilihan umum (pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan gubernur, bupati dan walikota), soal data pemilih sering mengundang masalah. Tak terkecuali menimbulkan konflik. Di Mahkamah Konstitusi sekalipun, masalah yang satu ini juga sering menjadi perdebatan. KPU dinilai, tidak memiliki data yang akurat terkait jumlah pemilih, jumlah warga yang datang ke TPS, jumlah golput alias yang tak memilih. Belum lagi soal tumpang tindak pendistribusian kertas suara.

Ketua KPU Riau, Dr. H. Nurhamin mengakui, validasi data pemilih itu menjadi titik rawan utama dalam pelaksanaan pilkada. Ia berharap, masalah ini dapat diatasi dan tidak menjadi potensi titik rawan. “Kami sudah turun ke beberapa daerah terutama daerah-daerah perbatasan seperti Rokan Hilir dengan Sumatera Utara untuk memvalidasi data pemilih,” kata Nurhamin menjawab **AZAM** pekan lalu.

Selain validasi data, titik rawan lain menurut Nurhamin terkait dengan regulasi. Yakni regulasi yang belum jelas atau berubah-ubah. Umpamanya, sengketa lima desa di Rokan Hulu dengan Kabupaten Kampar. Dikatakan mantan Ketua KPU Kampar ini, pihaknya sudah membuat telaah hukum ke KPU Pusat, lalu merekomendasikan beberapa hal. “Keputusan akhir ada di KPU Pusat. Kalau terdapat perubahan tentang pelaksanaan pilkada di lima desa itu, kita laksanakan sesuai petunjuk teknis KPU RI,” tambah Nurhamin.

KPU Riau, lanjut Nurhamin, tidak menginginkan ada eskalasi atau tuduhan berbuat curang yang dialamatkan ke penyelenggara pemilukada terkait penetapan status lima desa. Sebab, semua sudah dilakukan sesuai telaah hukum dan rekomendasi, yang kemudian ditetapkan oleh KPU RI. “Dasar hukumnya sudah benar. Konstruksi hukumnya juga sudah benar, demikian juga hirarkinya. Dalam hal ini tidak ada yang melawan hukum. KPU tidak ada kepentingan, mau masuk kemana lima desa itu semuanya dipulangkan ke KPU Pusat,” tegas Nurhamin.

Pria yang sering diundang menjadi pembicara dalam seminar tentang politik di luar negeri ini mengatakan, kunci keberhasilan utama pelaksanaan pilkada berjalan kondusif terletak pada penyelenggara yang bekerja sesuai aturan, integritas terjaga, data yang valid dari pemerintah daerah. Ia juga menghimbau peserta dan pengawas agar memiliki kepentingan yang sama, yakni mengamankan pelaksanaan pilkada, kemudian bersama-sama dengan KPU menjadikan Pilkada Serentak berjalan sesuai aturan.

Kalau ada masalah, lanjut Nurhamin, baik temuan kecurangan atau pun menyangkut ketentuan yang belum bisa dipahami, mari kita lakukan *focus discussion group*. “Apa pun masalahnya, kita fokuskan, didiskusikan lalu dibuat kesimpulan. Kalau tidak kita temukan regulasinya, kita buat kebijakan yang tidak bertentangan dengan undang-undang,” ujarnya.

Tentang kesiapan penyelenggara, Nurhamin mengatakan, yang perlu mendapat perhatian itu adalah penyelenggara ditingkat *ad hoc*. Sebab mereka hanya diberikan bimbingan teknis dua kali. Dan, ini tentu masih kurang. Sementara integritas penyelenggara di semua tingkatan dikawal oleh panwas dan masyarakat.

“Saksi-saksi kita himbau agar dapat menjaga integritasnya untuk tidak *bersubhat* dengan salah satu pasangan calon. Kalau saksi sudah begini, siapa lagi yang akan melapor,” tukasnya. Nurhamin optimis, Pilkada Serentak akan berjalan sukses dan lancar. Riau sudah berpengalaman mengikuti dan melaksanakan pilkada, dan dari pengalaman itu KPU yakin Pilkada Serentak akan terlaksana sesuai tahapan. Termasuk tahapan di hari ‘H’ pencoblosan.*

Indra Gunawan: Mari Saling Menjaga

Benih-benih konflik yang timbul jelang pelaksanaan pilkada masih dalam tahap wajar. Diharapkan masyarakat jangan mudah terprovokasi.

Siak merupakan satu dari sembilan kabupaten dan kota di Riau yang akan menggelar Pilkada Serentak, 9 Desember depan. Dan, dua pasang calon bupati dan wakil bupati akan bertarung memperebutkan suara masyarakat Siak. Yakni pasangan Suamsuar-Alfredri dan Suhartono-Syahrul. Menurut Pengamat Politik, Dr. Maxasai Indra, potensi konflik di daerah yang pelaksanaan pilkada diikuti dua pasang calon lebih besar dibandingkan kabupaten lain.

Benarkah? Indra Gunawan, Ketua Timses Pasangan Syamsuar-Alfredri tak sependapat dengan asumsi itu. Kepada **AZAM** Indra menyakinkan, pilkada di Siak akan berjalan aman, nyaman dan kondusif.

Ia mengatakan, kedua pasangan calon sudah melaksanakan deklarasi damai. Harapannya semua tim bisa mentaati aturan main, karena semua persiapan dan pelaksanaan sudah diatur oleh KPU, baik menyangkut pemasangan alat peraga kampanye, seperti baliho, spanduk, maupun jumlah alat peraga yang dapat dipasang.

“Mari sama-sama menjaga rumah tangga masing-masing sehingga pelaksanaan pilkada dapat berjalan baik, aman, lancar dan mudah-mudahan saja kabupaten Siak akan dapat menjadi kabupaten percontohan di Riau,” ujar Indra yang juga Ketua DPRD Siak ini.

Terkait adanya kekuatiran Maxasai Indra, politisi dari Partai Golkar ini kembali mengingatkan, semua pihak berkewajiban menjaga agar pilkada sukses. Kader partai, pendukung pasangan calon, relawan

dan masyarakat punya tanggung jawab yang sama untuk menciptakan harmonisasi selama pilkada berlangsung. Kita, lanjut Indra Gunawan, boleh-boleh saja fanatik dengan salah satu pasangan calon, atau berbeda pandangan dalam menentukan pilihan, tapi jangan sampai dukungan yang fanatik dan pilihan yang berbeda itu membuat kita terpecah.

“Yang rugi bukan siapa-siapa, yah kita sendiri termasuk Kabupaten Siak. Karena itu berdemokrasilah secara santun,” Indra berpesan.

Indra berharap, masyarakat dapat selalu menjaga keamanan dan kekompakan. Walau dalam politik kita berbeda dukungan, namun kita harus tetap berada dalam satu bingkai persatuan dan kesatuan.

Kepada aparat kepolisian dan penyelenggara pilkada, ia juga berpesan supaya maksimal menjalankan tugas. Mengedepankan profesionalisme dan bertindak sebagai wasit yang netral. Kalau selama pelaksanaan pilkada ditemukan ada pelanggaran terhadap peraturan KPU, ataupun aturan perundang-undangan lainnya, selesaikan dengan aturan yang berlaku tanpa merugikan pihak manapun. “Penyelenggara dan polisi harus mampu tegak kedua belah pihak secara netral,” tegas Indra.

Mari sama-sama kita sukseskan pilkada. Masyarakat juga diminta tidak mudah terpancing atau terprovokasi oleh isu-isu yang dapat menciderai semangat berdemokrasi. Jadikan pilkada sarana untuk mencari pemimpin yang berkualitas di Kabupaten Siak. Juga mampu membawa Siak lebih maju dari kondisi hari ini.*

BAGIAN XIV



Adu (Tim) Sukses Pilkada Bengkalis

Pilkada Kabupaten Bengkalis diprediksi berlangsung seru. Pemenangnya ditentukan oleh taktik dan strategi tim sukses di lapangan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis telah menetapkan tiga pasang calon bupati dan wakil bupati. Sesuai nomor urut mereka adalah Amril Mukminin-Muhammad, Herliyan Saleh-Riza Pahlevi dan Sulaiman Zakaria-Noor Charis Putra. Sejak 27 Agustus lalu, ketiga pasang calon itu telah memulai tahapan kampanye untuk mengambil empati masyarakat. Masa kampanye berakhir tiga hari jelang hari 'H' pemilihan, yakni 6 Desember 2015.

Ada yang berbeda dari Pilkada Serentak tahun ini dibanding pilkada lima tahun lalu. Salah satunya, soal alat peraga kampanye. Pasangan calon tak seleluasa dahulu mencetak dan memasang alat peraga. Bila lima tahun lalu calon dan tim sukses dapat memasang sebanyak mungkin baliho dan spanduk, sekarang tidak. Alat-alat peraga itu sudah diambil alih KPU. Calon tidak dibenarkan mencetak dan memasang di tempat-tempat yang mereka suka.

Pengambil-alihan alat peraga itu membuat *cost politic* sang calon jauh berkurang. Suasana pilkada juga tak terlalu heboh. Tengoklah ke lapangan. Ketika wartawan AZAM berkunjung ke Bengkalis, Senin-Rabu (21-23/9), suasana sepi mewarnai pesta demokrasi di kabupaten berjuluk 'Negeri Junjungan' itu.

Tak terasa halo-halo pilkada. Sepi. Apalagi KPU belum memasang baliho para calon yang bertarung di Pilkada Serentak. Kota Bengkalis

hanya semarak oleh baliho Pj Bengkalis, Ahmad Syah Harroffie, yang terpasang di banyak sudut kota. Bahkan di setiap kantor SKPD sedikitnya terdapat dua baliho bergambar Ahmad Syah dalam ukuran besar. Ada ucapan Selamat Idul Adha, ada ajakan “Ayo Kerja” yang menjadi jargon peringatan 70 tahun Indonesia Merdeka. Baliho-baliho itu membuat posisi Penjabat Bupati seakan ‘lebih populer’ dibanding para calon.

Kalaupun ada atribut pilkada, itupun dalam jumlah yang terbatas. Hanya terpasang di masing-masing Posko Tim Pemenangan. Di posko inilah, masyarakat dapat tahu, siapa-siapa saja calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis 2015-2020 yang akan mereka pilih nanti di tanggal 9 Desember 2015.

Pegawai Harus Netral

Ditemui **AZAM** di rumah jabatan Bupati Bengkalis, Achmad Syah menjelaskan tentang tugas dan fungsi penjabat bupati. Menurutnya, ada tiga tugas yang kini sedang ia emban. Dua diantaranya terkait langsung dengan pilkada. Seperti memfasilitasi penyelenggaraan pilkada, dan menjaga netralitas birokrasi. “Saya dilantik Plt Gubernur Riau pada 5 Agustus silam. Pada saat itu, saya membacakan sebuah fakta integritas. Salah satunya berbunyi siap menjaga netralitas birokrasi atau aparatur sipil negara di Kabupaten Bengklais. Kalau saya tidak netral ada sanksinya pada poin terakhir, yakni siap menerima segala risiko atau konsekuensi apabila tidak netral,” katanya.

Dan, seluruh ASN juga sudah menanda-tangani fakta yang sama. Mulai dari sekdakab, kepala badan, kepala dinas, staf ahli, camat, lurah, sampai ke struktur pemerintahan terbawah. Inti dari fakta integritas itu menjaga netralitas birokrasi. Tak sampai di situ, kata Achamsyah, kepada pengguna APBD, misalnya pendamping desa, juga tidak diperkenankan terlibat dalam politik praktis selama proses pilkada serentak berlangsung. “Kalau ada yang masuk ke dalam salah satu pasangan calon silakan mengundurkan diri,” tegas sarjana hukum tamatan UII Yogyakarta ii.

Achmad Syah mengaku, selalu menyampaikan masalah netralitas ANS ini di berbagai kesempatan. Termasuk saat pencabutan nomor urut dan deklarasi damai oleh KPU. Kata Asisten Bidang Pemerintahan Pemprov Riau ini, silakan mengajak dan merebut hati rakyat dengan santun dan terhormat. Yakinkan masyarakat dengan program, visi dan misi tanpa harus menjelekkan program orang lain. “Istilahnya hidupkan lampu kita seterang-terangnya, tapi jangan berupaya mematikan lampu orang lain,” ungkapnya.

Sebagai anak jati Bengkalis dalam arti ‘rumah besar’, Achmad Syah menegaskan, tidak memiliki kepentingan politik dalam pilkada Bengkalis. “Kepentingan pribadi saya hanya ingin mengantarkan pilkada sebaik-baiknya, berjalan secara demokratis. Saya pernah diberi kehormatan oleh Bengkalis sebagai Ketua KNPI Riau, dan pernah pula menjadi anggota DPRD Riau dari Dapil Bengkalis. Dua kehormatan itu akan saya balas dengan memberi yang terbaik untuk kabupaten ini semasa saja menjabat penjabat bupati,” sebut Achmad Syah.

Adu Taktik

Meski sedikit ‘ternoda’ oleh lambatnya KPU menyiapkan alat peraga pasangan calon, tahapan Pilkada Bengkalis berjalan lancar, setidaknya sampai memasuki masa kampanye. Yang agak sendat adalah gerak pasangan calon. Mereka hanya dibolehkan berkampanye dialogis dengan jumlah peserta yang terbatas. Sementara kampanye terbuka menurut pada jadwal KPU.

Dengan ketentuan itu, keberadaan tim kemenangan atau tim koalisi partai menjadi sangat penting. Masing-masing calon harus membentuk tim kemenangan sampai ke level terbawah. Kemudian membuat jadwal sosialisasi yang terukur sehingga dukungan untuk calon dapat bergetrak dinamis dari waktu ke waktu.

Tak hayal. Luasnya wilayah Bengkalis dan terbatasnya gerak calon, membuat masing-masing tim harus bekerja ekstra. Memperkenalkan

jagoannya ke masyarakat dan mensosialisasikan visi, misi dan program kerja tahunan biar masyarakat menjatuhkan pilihan ke sang calon. Selain itu, menjanjikan pembangunan jangka pendek bila diberi amanah oleh rakyat memimpin Kabupaten Bengkalis. Di luar itu, tim juga harus adu taktik dan strategi. Taktik boleh sama, strategi berlainan. Dan, biasanya, tim yang selalu menangani 'proyek' pilkada sudah paham strategi apa yang harus mereka buat untuk memenangkan calonnya.

Di Pilkada Serentak Bengkalis terdapat tiga pasang calon. Yakni Amril Mukminin-Muhammad. Herliyan Saleh-Riza Pahlevi, dan Sulaiman Zakaria-Noor Charis Putra. Figur ketiga pasang calon punya kelemahan dan kelebihan. Mereka juga populer di tengah masyarakat, dan selalu di elu-elukan masyarakatnya. Memiliki basis pendukung yang berbeda pula. Celah dan peluang inilah yang harus dimanfaatkan tim sukses untuk 'menjual' dan menyakinkan pemilih, agar menjatuhkan pilihan ke sang favorit di tanggal 9 Desember depan.*

KPU *Ogah* Diwawancarai

Meski pelaksanaan pemilukada di Bengkalis sudah memasuki tahapan kampanye, namun Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon, belum juga terlihat.

Pilkada serentak tahun ini, sedikit berbeda dengan pilkada sebelumnya. Terutama soal pemasangan atribut atau alat peraga kampanye. Bila sebelumnya, berbagai sudut kota dan desa dipenuhi baliho, tanda gambar dan alat peraga kampanye, tahun ini tidak demikian. APK sangat minim. Semuanya diatur, dicetak dan dipasang oleh KPU menggunakan APBD sesuai ketentuan.

Tujuan penerapan aturan ini, biar ada keseragaman. Tidak ada perang baliho atau tanda gambar. Pasangan calon yang kuat secara finansial tak bisa mendominasi pemasangan baliho atau tanda gambar. Pengambilalihan alat peraga ini tentu berdampak positif. Namun juga berefek negatif terutama soal kemeriahan berpilkada. Sosialisasi pasangan calon menjadi tidak maksimal.

Uniknya, hingga lebih sebulan kampanye dimulai, KPU belum juga memasang APK. Padahal masalah pendanaan sudah kelar. Menurut Pj Bupati Bengkalis, Ahmad Syah Harrofie, dana untuk KPU Bengkalis tergolong besar dibanding KPU daerah lain. Sayangnya, ketika soal keterlambatan APK dikonfirmasi **AZAM** ke KPU Bengkalis, KPU enggan memberi keterangan. Ketua KPU, Defitri Akbar, tak berada di kantor saat **AZAM** berkunjung Selasa pekan kemaren. Nomor telepon selulernya aktif tetapi tak pernah diangkat.

KPU Bengkalis memang terkesan tertutup. Salah seorang staf KPU menyebut, Defitri Akbar memang jarang mau mengangkat telepon jika nomor yang masuk tidak ia kenal. Meskipun telah di SMS, bahwa **AZAM**

ingin konfirmasi, yang bersangkutan tetap tak mau mengangkat telepon dan menjawab SMS. Beberapa kali dihubungi setelah di SMS ia tetap tidak mengangkat telepon genggamnya.

Karena tak jua menjawab, **AZAM** menghubungi Ketua KPU Provinsi Riau, Dr Nurhamin. Menurut Nurhamin, belum adanya APK di Bengkalis mungkin disebabkan desain percetakan, atau pelelangan. Bisa juga karena ada kesepakatan antara KPU, Panwas dan Paslon untuk pemasangan APK secara serentak.

Bila Ketua KPU Bengkalis terkesan tertutup dengan wartawan, lain lagi dengan Panwas Bengkalis, Jon Kanedi. Meski mau ditemui wartawan untuk wawancara, Jon meminta **AZAM** memperlihatkan kartu pers.

Menurut Jon, Pilkada Bengkalis relatif aman. Belum ada satu pun laporan resmi diterima Panwas untuk dibahas. “Yang banyak justru yang melapor via telepon. Laporan seperti ini kan sulit ditindaklanjuti,” ujarnya. Ia juga mengatakan, Panitia Pengawas Lapangan (PPL) yang dibentuk di setiap desa dan kelurahan hingga kini tidak menemukan ada pelanggaran. Sehingga tak laporan masuk ke Panwas Kabupaten.

Jon Kanedi mengakui, untuk mengawasi jalannya tahapan pilkada, pihaknya mengalami kesulitan karena kurangnya personil. Dia meminta peran serta masyarakat melaporkan jika ada kecurangan di setiap tahapan. Namun pernyataan Jon bertolak belakang dengan apa yang dilakukan LMND (Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi).

LMND mengaku telah melapor kepada panwas pelanggaran oleh salah satu pasangan calon. Bahkan LMND meminta panwas bekerja secara profesional. Tidak hanya menunggu adanya laporan, tetapi juga jemput bola dalam pengawasan pilkada.*

MANTAP

Jauhi Politik Transaksional

Tim Pemenangan AM MANTAP yakin mampu meraup simpati masyarakat. Tim menilai pasangan ini ideal memimpin Bengkalis karena memiliki pengalaman dan profesional. Jauhi politik transaksional.

Banyak yang berpendapat, figur berlatar politisi dengan birokrat merupakan pasangan serasi dan ideal memimpin pemerintahan. Pendapat itu lahir karena keduanya diyakini dapat saling mengisi dalam menjalankan roda pemerintahan. Itulah yang tergambar dari sosok Amril Mukminin-Muhammad (AM). Amril politisi tulen, sementara Muhammad birokrat. Kelebihan itu pula yang dimanfaatkan pasangan usungan PKS, PKB, PBB, PKPI dan Nasdem ini.

Riza Zuhelmy, Sekretaris Tim Pemenangan AM menjelaskan, dalam memperkenalkan sosok dan program MANTAP (Amanah-Taqwa-Profesional), tim lebih menonjolkan kemampuan mendengar pasangan.

Menurut Riza, kemampuan mendengar aspirasi masyarakat akan lebih ditonjolkan. Dan itu telah dibuktikan oleh calon Amril Mukminin saat menjabat kepala desa selama satu periode dan tiga periode menjadi anggota DPRD Bengkalis.

“Kita lebih menonjolkan kemampuan mendengar. Artinya pasangan ini mampu mendengar aspirasi masyarakat. Didukung pula calon wakil bupati dari birokrat yang *notabene* nya tak pernah bermasalah. Ia juga memiliki koneksi sebagai mantan pejabat provinsi di tingkat nasional sehingga sangat membantu AM MANTAP jika diberi amanah,” katanya.

Dari sisi profil, urai Riza, pasangan nomor urut 1 merupakan pasangan ideal untuk memimpin Bengkalis lima tahun ke depan. Dari segi

pengalaman, keduanya memiliki pengalaman yang sangat kaya. Pernah jadi kepala desa yang tentunya lebih paham dan mengetahui masalah dan kebutuhan masyarakat di pedesaan. Ditambah pengabdianya di DPRD Bengkalis.

Riza memastikan, tim pemenang telah melakukan berbagai persiapan guna memenangkan AM MANTAP. Mulai dari konsolidasi di internal koalisi partai sampai membentuk tim-tim yang bergerak di kabupaten, kecamatan dan desa. Tujuannya supaya masyarakat dapat mengenal sosok pasangan serta program yang diusung MANTAP.

“Secara programatik kita memprioritas empat sektor dengan slogan Mantap Pendidikan Rakyatnya, Mantap Kesehatan Rakyatnya, Mantap Infrastruktur untuk Kesejahteraan Rakyatnya dan Mantap Pembangunan Desanya,” tukasnya.

Selain konsolidasi internal, sebut Riza, tim juga merespon antusias masyarakat untuk membentuk jaringan relawan. “*Alhamdulillah* sejauh ini antusias masyarakat bergabung dengan pasangan nomor urut 1 sangat tinggi,” ujarnya.

Untuk memperkenalkan MANTAP kepada masyarakat, Riza mengaku komunikasi yang dibangun tidak jauh beda dengan pasangan calon lain. Yakni menggelar berbagai pertemuan dengan masyarakat dari kecamatan ke kecamatan lain, dari satu kampung ke kampung lain. Melalui pertemuan ini, pihaknya dapat memperkenalkan pasangan calon kepada warga. Dan, mengingat banyaknya permintaan masyarakat bertemu dengan pasangan calon, pihaknya memisahkan calon bupati dan calon wakil dalam setiap kunjungan. “Misalkan, hari ini calon bupati berkampanye dialogis di Rupat, calon wakil melakukan hal yang sama di Mandau. Kemudian, di hari lain kami *rolling* daerahnya sehingga calon bupati dan calon wakil dapat bertatap muka langsung dengan masyarakat,” tegas Riza.

Dalam melakukan kampanye, tim pemenang tidak mengkhususkan daerah tertentu yang dianggap menjadi lumbung suara. Kita tidak mengkhususkan daerah tertentu untuk dijadikan lumbung suara. Kalau persoalan basis mungkin pandangan kita sedikit berbeda. Kita

memandang ada potensi dukungan yang kuat di beberapa wilayah karena ikatan emosional dan itu akan kita kelola melalui potensi yang ada, jelas Riza. Bila ada wilayah yang berpotensi memberi dukungan ke pasangan yang lain, ujar Riza, tim pemenangan akan mengelola dengan cara-cara tertentu. “Jadi tidak ada dikotomi apakah ini basis atau tidak, semua daerah tetap kita prioritaskan dan kita kelola secara maksimal,” ulasnya.

Riza optimis pasangan ini mampu meraup simpati masyarakat. Sejauh ini, tambahnya, respon masyarakat sangat positif dan mereka antusias untuk bergabung. Riza berharap seluruh pasangan calon dapat menguasai diri dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan berlaku.

“Mari kita taat aturan dan tidak melakukan politik transaksional. Politik transaksional hanya akan membuat pemimpin bermasalah di mata hukum,” tambah Riza lagi.*

Hidupkan Lampu Kita Jangan Matikan Lampu Orang

Harus diakui, tim pasangan nomor urut 3, Herliyan Saleh-Reza Pahlevi, merupakan tim yang cukup solid dan kuat. Di Bengkalis, setidaknya terdapat dua markas besar yang dimiliki pasangan ini. *Pertama*, posko bersama partai koalisi yaitu Hanura, Gerindra dan PAN dan *kedua*, posko yang terdapat di markas PAN Bengkalis.

Pantauan **AZAM** selama berada di Bengkalis, Senin-Rabu (21-23/9), aktivitas di kedua posko cukup dinamis. Selalu terlihat orang keluar masuk ke rumah yang dijadikan markas Herliyan-Reza itu. Bahkan markas PAN, partai pendukung utama Herliyan-Reza, terlihat lebih semarak. Banyak orang berkumpul di gedung berhalaman luas itu.

Sejumlah kendaraan terparkir rapi. Salah satunya mobil milik Heru Wahyudi, Ketua PAN Bengkalis, Ketua DPRD Bengkalis yang juga ketua tim kemenangan Herliyan-Reza. Wartawan **AZAM** yang telah membuat janji bertemu dan melakukan wawancara pun ikut memarkirkan kendaraan tak jauh dari mobil Heru.

Di kantor PAN, rombongan **AZAM** disambut oleh Heru Wahyudi dan Syaukani El Karim, sekretaris tim yang juga sekretaris PAN Bengkalis. Keduanya terlihat antusias menerima kedatangan **AZAM**, dan meladeni wawancara. Pertanyaan-pertanyaan yang menjurus ke arah strategi kemenangan pasangan calon, enggan mereka ungkap.

“Itu hanya konsumsi internal kami dan tak boleh kami sampaikan. Jika terbaca oleh lawan, strategi kami bisa bahaya,” ujar Heru Wahyudi dengan nada bercanda. Syaukani pun mengamini.

Yang pasti, menurut Heru, tim yang telah dibentuk oleh pasangan Herliyan-Reza terus bergerak memenangkan jagoan mereka. Tim ini, kata Heru, jumlahnya cukup banyak. Dan tersebar mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga ke desa dan kelurahan. 153 Desa dan kelurahan di Bengkalis, sudah terbentuk tim atau relawan sebagai ujung tombak Herliyan-Reza.

Heru Wahyudi menyebutkan, dengan aturan baru KPU tentang kampanye yang membatasi pengerahan massa, dan memperbanyak pertemuan terbatas, maka strategi tim pun harus mengikuti irama KPU. Ia mengakui, dengan peraturan tersebut membuat keberadaan tim sukses sangat diperlukan. Maklum, pasangan calon tak mampu mendatangi 153 desa di Bengkalis selama tiga bulan.

Juru kampanye dan tim sukses diperlukan untuk menggantikan pasangan calon ketika berhadapan dengan masyarakat. Pihaknya, lanjut Heru, telah merekrut orang-orang yang dapat menambah simpati masyarakat kepada pasangan calon. Bukan sebaliknya, masyarakat justru menjauh ketika yang bergabung di tim adalah mereka yang memiliki *track record* yang tidak baik.

Heru Wahyudi menambahkan, waktu kampanye untuk pasangan calon cukup panjang. Dan karena wilayah Bengkalis sangat luas, tim sukses harus jeli membuat skenario agar tujuan kampanye bisa tercapai. Seandainya pasangan calon tak bisa dihadirkan, pihaknya akan mengirim jurkam terbaik sebagai pengganti.

“Sejauh ini tanggapan masyarakat cukup baik meski yang turun ikut tim, bukan pasangan calon,” ujar Heru Wahyudi.

Ia mengatakan, tim Herliyan-Reza sedikit lebih diuntungkan karena pasangan yang mereka usung sudah dikenal luas oleh masyarakat. Herliyan adalah Bupati Bengkalis yang baru saja habis masa jabatannya. Sedangkan Reza Pahlevi, tokoh yang pernah menjadi Ketua DPRD Bengkalis.

Dengan popularitas itu, tim tak perlu lagi berkoar-koar memperkenalkan jagoan mereka. Yang perlu disampaikan, kata Heru,

apa yang telah dilakukan serta apa saja yang akan diperbuat lima tahun ke depan jika pasangan ini terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis. “Masyarakat bisa merasakan, menikmati dan melihat apa saja yang telah dilakukan Herliyan Saleh lima tahun menjabat Bupati Bengkalis,” ujar Heru Wahyudi.

Menurut Heru, inilah yang menjadi kata kunci bagi tim mendekati hati masyarakat. Sebab, hampir semua kepentingan masyarakat sudah disentuh Pemkab Bengkalis selama lima tahun terakhir. Program Herliyan mesti dilanjutkan agar terjadi kesinambungan pembangunan. “Yang lain baru akan melakukan, sementara kita sudah berbuat. Kita bertekad terus membawa kemajuan bagi daerah ini,” ujarnya.

Tentang status tersangka Herliyan Saleh, menurut Heru Wahyudi dan Syaukani El Karim, status itu tidak menghalanginya untuk mencalonkan diri dan kembali maju menjadi bupati. Lagi pula, kata Heru, kita harus menghormati asas pra duga tak bersalah. Dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. “Status itu belum final, proses hukum masih berlangsung. Jadi mari kita hormati,” kata dia.

Heru mengaku telah berpesan kepada tim sukses agar pandai-pandai menyampaikan status Herliyan kepada masyarakat. Sebab hal ini menjadi bahan bagi pihak lawan menjatuhkan pasangan yang mereka usung. Tim sukses Herliyan-Reza, kata Heru Wahyudi, sangat ditekankan pentingnya sopan santun berpolitik. “Jangan gara-gara nila setitik, rusak susu sebelanga. Jangan gara-gara satu orang berbuat tidak baik, semua kerja tim menjadi sia-sia,” ujar Heru lagi.

“Saya selalu ingat ungkapan Pj Bupati Bengkalis, Ahmad Syah Harrofie, hidupkan lampu kita, jangan matikan lampu orang lain,” ujar Heru Wahyudi.*

SNI Hebat Ajak Hindari Kampanye Hitam

Tak hanya didukung tim koalisi, pasangan Sulaiman Zakaria-Noor Charis Putra juga mendapatkan tambahan kekuatan dari tim independen.

Tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Bengkalis yang menjadi peserta Pilkada Serentak tahun 2015, tengah berjuang merebut simpati masyarakat. Ketiganya saling beradu taktik dan strategi untuk bisa memenangkan pertarungan.

Dari tiga pasangan calon itu, kekuatan pasangan calon nomor urut tiga, H Sulaiman Zakaria-Noor Charis Putra, tak bisa dipandang sebelah mata. Karena pasangan dengan jargon SNI (Sulaiman-Noor-Ideal) ini unggul dalam tim pemenangan. Pasalnya, dengan sistem kampanye yang diatur KPU, tim pemenangan akan sangat menentukan.

Selain ada Tim Pemenangan yang terdaftar di KPU Kabupaten Bengkalis (terdiri dari koalisi partai pengusung, PDIP dan Demokrat), pasangan dengan slogan HEBAT (Harmonis, Ekonomi Bangkit, Berbudaya, Agamis, Tepat Sasaran) ini juga memiliki tim pemenangan independen yang tidak dimiliki dua pasangan lainnya.

Lebih hebat lagi, tim independen ini dikomandoi seorang pengusaha yang sangat disegani dan berpengaruh di Kabupaten Bengkalis, Masuri, SH. Lelaki yang senang disapa Bagong ini, memiliki basis massa cukup kokoh, karena memimpin beberapa organisasi yang bersentuhan langsung dengan berbagai lapisan masyarakat.

Bagong adalah Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bengkalis, wadah berhimpunnya pelaku usaha dari berbagai jenis usaha.

Ia juga memimpin serikat pekerja (Serikat Pekerja Transportasi Indonesia) Kabupaten Bengkalis. Lain dari itu, Bagong juga Ketua Paguyuban Masyarakat Jawa Kabupaten Bengkalis, Penasehat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Bengkalis. Serta Penasehat Tim Koalisi dan juru kampanye pasangan SNI HEBAT. Karena itu, kehadiran Bagong di pasangan nomor urut 3, diyakini dapat memberi warna dan pengaruh pada kekuatan SNI HEBAT.

Ditemui AZAM di Kantor Kadin Bengkalis, Selasa (22/9) siang, Bagong menuturkan, fungsi dan tugas tim independen adalah mem-back-up seluruh jaringan yang sudah dibentuk tim koalisi dan memberi masukan kepada tim koalisi. Atau berjuang bersama memenangkan pasangan nomor urut 3.

Dia memastikan, tim independen lahir dari semangat bersama menginginkan perubahan yang sangat berarti di Negeri Junjungan. Di lapangan tim independen dan tim koalisi mengajak, menghimbau dan menawarkan program pasangan nomor urut tiga kepada masyarakat. "Tim Independen dibentuk dari semangat perubahan. Tugasnya mem-back-up seluruh jaringan yang telah dibentuk tim koalisi. Salah satu program pasangan nomor urut tiga yang disampaikan ke masyarakat desa adalah soal ekonomi bangkit, dengan harapan ekonomi desa itu betul-betul bisa termanfaatkan secara baik dan dapat tumbuh serta tergali dengan baik pula," ujarnya.

Menurut Bagong, tim independen sudah bekerja seperti halnya tim koalisi. Di lapangan, tim koalisi dan tim independen akan menyaring data. Misalnya, dalam satu desa terdapat 400 pemilih, yang sudah terdata oleh tim koalisi baru 100. Itu artinya masih ada 300 pemilih lagi yang diperebutkan. "Nah, disinilah tugas tim atau relawan independen mengejar yang 300 pemilih. Tim melibatkan tokoh masyarakat, tokoh pemuda di Kabupaten Bengkalis, terutama mereka yang menginginkan perubahan," tutur Bagong.

Diakui, selama kampanye jumlah tim independen dan relawan dalam SNI HEBAT terus bertambah. "Kebetulan saya memimpin sebuah

federasi pekerja di Kabupaten Bengkalis yang memiliki ratusan anggota. *Alhamdulillah* sebagian besar dari mereka ikut menawarkan diri bergabung bersama kita. Saya tidak pernah memaksa mereka untuk bergabung akan tetapi mereka datang dengan kesadaran, ini hak setiap orang menentukan pilihan,” ungkap Bagong.

Begitu pun di paguyuban masyarakat Jawa, Bagong mengaku tidak pernah memaksa mereka harus ikut dirinya. Ia selalu menjunjung asas berdemokrasi yang baik. “Hanya saja ketika mereka bertanya kepada saya, saya menjawab dengan memberi alasan-alasan mengapa saya mendukung Sulaiman Zakaria-Noor Charis Putra,” akunya.

Mengingat luasnya Kabupaten Bengkalis dan pasangan calon tak mungkin dapat hadir menemui masyarakat, lanjut Bagong, tim independen bersama koalisi mensiasati dengan cara turun langsung ke warga untuk menggantikan pasangan calon menyampaikan visi, misi dan program pasangan jika nanti terpilih sebagai bupati dan wakil bupati.

Diantara visi, misi dan program itu adalah membangun ekonomi kerakyatan dengan menjadikan desa sebagai penyangga pembangunan. Itu pula, kata Bagong, salah satu alasan ia memutuskan bergabung dengan SNI HEBAT. Visi, misi dan program itu sama dengan tugas dan fungsi Kadin.

“Terus terang saya orangnya anti politik dan tidak pernah bersentuhan langsung dengan partai politik, namun untuk kali ini saya langsung turun, karena diantara ketiga pasangan, saya melihat pasangan nomor urut lebih memiliki program dan visi misi yang akan mampu terimplementasi ke bawah. Dan programnya akan membangun ekonomi kerakyatan, dengan menjadikan desa sebagai penyangga pembangunan secara keseluruhan,” ujarnya.

Sebagai Ketua Kadin Bengkalis, ia menilai pasangan SNI HEBAT memiliki visi misi serta program yang sama dengan tugas dan fungsi Kadin, yakni meningkatkan ekonomi kerakyatan yang merupakan jantungnya perekonomian di sebuah daerah. “Atas dasar itulah, saya memutuskan diri bergabung dan memperjuangkan pasangan ini, karena

program-programnya sangat dibutuhkan di Kabupaten Bengkalis saat ini,” tegasnya.

Mahasiswa S2 Universitas Riau ini menilai, pasangan SNI HEBAT juga memiliki pengalaman yang tidak perlu diragukan lagi. Sulaiman Zakaria pernah menjabat Sekdakab Bengkalis sehingga pemahaman tentang tata kelola pemerintahan yang baik, tak perlu diragukan. Sementara itu, Noor Charis Putra merupakan sosok muda nan enerjik yang diharapkan mampu memberi spirit baru bagi kabupaten ini. Sebagai putra asal Rohil, sang wakil diharapkan mampu merangkul masyarakat Rohil di Kabupaten Bengkalis. “Makanya pasangan ini menjadi sangat serasi, baik secara figur maupun program yang dijalankan,” tambahnya.

Bagong menyebut, program bantuan desa sebesar Rp1 miliar, belum mampu menjadikan masyarakat desa hidup lebih sejahtera. Ini karena bantuan itu tidak tepat sasaran sehingga masyarakat desa tak dapat menikmatinya. Bagong berharap tim pemenang ketiga pasangan calon dapat bersaing secara elegan, jujur tanpa melakukan kampanye hitam.*

Sulaiman-Noor Makin Hebat

Tim koalisi terus bekerja. Sementara waktu pasangan Sulaiman Zakaria-Noor Charis Putra direspon positif oleh masyarakat.

Di Pilkada Serentak 2015, Sulaiman Zakaria-Noor Charis Putra, diusung oleh dua partai politik. Yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat. PDIP dan Demokrat sama-sama meraih empat kursi pada Pemilu Legislatif, tahun lalu.

Dengan aturan baru KPU yang hanya memberi satu kali kepada pasangan calon untuk kampanye terbuka, Koalisi SNI HEBAT--(Sulaiman-Noor-Ideal)--(Harmonis, Ekonomi Bangkit, Berbudaya, Agamis, Tepat Sasaran) menyadari, pentingnya kedudukan dan peran tim untuk memenangkan Sulaiman-Noor Charis Putra. Dan, untuk mencapai target menang, tim menerapkan manajemen terbuka dengan merekrut sebanyak mungkin masyarakat.

Wakil Ketua Koalisi Tim SNI HEBAT Muhammad Kusmayadi menyebutkan, pada prinsip koalisi membuka seluas-luasnya kepada masyarakat yang ingin bergabung dengan SNI HEBAT sehingga Bengkalis menjadi lebih baik, hebat dan bermartabat. Ia memastikan tim koalisi bersama partai dan kader terus melakukan sosialisasi agar masyarakat menjatuhkan pilihan kepada duet SNI HEBAT di 9 Desember depan. “*Alhamdulillah* hari demi hari relawan dari berbagai elemen masyarakat dengan hati yang tulus dan ikhlas, terus berdatangan mendukung SNI HEBAT,” ungkap politisi Partai Demokrat ini.

Kusmayadi memastikan partai pendukung SNI HEBAT, Partai Demokrat dan PDIP, tetap solid dan terus bekerja memperkuat struktur partai baik di tingkat DPD, PAC, Ranting maupun desa. “Kita terus berkonsolidasi di semua tingkatan untuk memperkokoh jagoan PDI

Perjuangan dan Demokrat. *Alhamdulillah* SNI HEBAT direspon positif oleh masyarakat Kabupaten Bengkalis. Kami hakkul yakin bila pasangan ini dipercata masyarakat, keduanya bisa amanah, mengayomi dan melindungi masyarakat,” kata Kusmayadi yang juga seorang ustadz ini.

Kusmayadi memastikan konsolidasi dalam partai pengusung, akan membuahkan hasil positif. Di lapangan, kader dari kedua partai bahu membahu mencari dukungan. Dan, kebersamaan ini juga tak lepas dari figur calon bupati dan calon wakil bupati yang memang hebat dan diterima luas masyarakat.

“Kalau soal popularitas, terutama figur Sulaiman Zakaria, tak kalah dibanding calon lain. Sebagai seorang birokrat tulen, Pak Sulaiman pernah menduduki jabatan tertinggi di pemerintahan, yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis. Itu artinya, masyarakat tak meragukan lagi kemampuan Pak Sulaiman memimpin Bengkalis,” tambahnya.

Di tangan Sulaiman-Noor Charis Putra, tegas Kusmayadi, pembangunan Kabupaten Bengkalis akan menggeliat. Baik fisik maupun nonfisik. “Kita merasa, pembangunan daerah ini jauh tertinggal dibanding kabupaten lain, sementara APBD Bengkalis terbesar di Indonesia bersama Kutai Kartanegara. Tetapi, hasil-hasil pembangunan yang kita rasakan, belum sebanding dengan besarnya dana yang kita miliki. “Itulah salah satu tugas Pak Sulaiman, pemerataan pembangunan dan mendorong berkembangnya ekonomi masyarakat di pedesaan,” ucap Kusmayadi.*

BAGIAN XV



اشكاتن ذريات أنق ملايو



AZAM

GAYA kepemimpinan Bupati Kampar, H Jefry Noer SH, selalu menarik perhatian. Itu karena kebijakannya yang kadang mengundang kontroversi. Termasuk pendirian Pusat Pelatihan Pertanian Terpadu (P4S) Kubang, tempat yang dijadikan Jefry basis peningkatan ekonomi warga miskin. Bagi Jefry, angka kemiskinan di negeri berjuluk 'Serambi Mekah' itu harus turun drastis. Dengan cara memberi pendidikan dan pelatihan. Juga modal bekerja.

Selain itu membangun jalan dan jembatan. Jalan yang bagus dan mulus dapat meningkatkan mobilitas ekonomi rakyat. Sehingga produk pertanian, perikanan dan peternakan yang menjadi topan hidup warga desa dapat mendatangkan kesejahteraan bagi warga tempatan. Jefry berpandangan, ketiga sektor itu sangat berpotensi menjadikan Kabupaten Kampar maju.

Pada 11 Desember 2016, masa tugas Jefry Noer akan berakhir setelah dua periode duduk di kursi 'empuk' bupati. Dan, tampuk kekuasaan akan beralih generasi ke pendatang baru hasil pilihan rakyat melalui Pilkada Serentak, Februari 2017. Seperti apa figur Bupati Kampar mendatang di mata Jefry? "Saya mengharapkan orang yang cocok dan pantas menjadi bupati adalah figur yang memiliki kepedulian dan mempunyai hati. Ia harus peduli dengan orang miskin dan peduli dengan masyarakat yang pendidikannya masih terbelakang," kata Jefry kepada Endrizal Yusen dan Beni Hendra dari AZAM. Apa pula tanggapannya dengan baliho dan spanduk figur yang kini terpasang di banyak tempat? Baca wawancaranya di hal. 13.*



JEFRY SIAPKAN BUPATI YANG PEDULI DAN PUNYA HATI

Jefry Noer

'Perang' Baliho (Jelang) Pilkada Kampar

'Perang' baliho dan spanduk mewarnai pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kampar tahun 2017. Padahal waktu efektif pelaksanaannya masih setahun lagi. Mengisi ruang demokrasi atau nafsu politik?

Ada benarnya orang menyebut, “kalau mau berpolitik belajarliah ke Kampar”. Negeri berjuluk ‘Serambi Mekkah’ itu sejak dahulu memang dikenal daerah yang melahirkan sumberdaya manusia handal. Utamanya politisi dan akademisi. Tak sedikit politisi dan guru besar datang dan pergi dari tanah Ocu ini. Bahkan dalam sejarah, dua Gubernur Riau pernah dijabat oleh bupati asal Kabupaten Kampar. Yakni Raden Subrantas Siswanto (1978-1980) dan Saleh Djasit (1998-2003).

Kampar juga sering disebut sebagai barometer politiknya Provinsi Riau. Itu karena dinamika politik di sana berkembang dinamis dari waktu ke waktu. Utamanya saat Pemilu Legislatif dan Pemilu Kepala Daerah. Tak percaya? Telusurilah jalan-jalan lintas yang melewati wilayah Kabupaten Kampar.

Saat sembilan kabupaten dan kota di Riau sedang menggelar Pilkada Serentak 2015, semarak baliho dan spanduk di negeri itu terasa lebih hidup. Padahal, jadwal pilkada serentak di Kampar, Februari 2017. Baliho dan spanduk-spanduk itu bertaburan tak hanya di jalan protokol di Kota Bangkinang, termasuk jalan-jalan di kecamatan. Ada baliho spanduk yang khusus dipasang menyongsong pilkada, ada juga baliho karena memanfaatkan moment hari besar, seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Gambar figur yang di baliho dan spanduk itu terlihat lebih menonjol dalam beragam ukuran. Mulai dari ukuran kecil, menengah sampai ke yang paling besar sekalipun. Thema juga macam-macam.

Figur Pengusaha, H. Nasri Haroen Ergen, SH yang akrab disapa Eri Gendeng, misalnya, terang-terangan mengisyaratkan sebagai bakal calon Bupati Kampar 2017-2022 dengan *tagline*, “Kampar Bangkit” alias “Kampar Bangun Negeri Kita”. Jumlah baliho Ergen agaknya paling banyak dari baliho figur lain, bahkan ikut pula ditempelkan logo Partai Nasdem. Begitu pun dengan H.A. Rachman, SE. Pengusaha yang kini bermustautin di Kota Jambi itu terang-terang mencantumkan tulisan di spanduknya, ‘Untuk Bupati Kampar 2017-2022’.

Lain dengan Amir Lutfi, Rahmat Jevary Juniardo alias Ardo. Atau Alfi Syahri, H. Zulkifli ST, H. Zainal Abidin ST MT serta Prof. Dr. H. Ilyas Husti. Deretan baliho-baliho raksasa dengan latar kain berwarna putih, cenderung dipasang dengan memanfaatkan momen tertentu. Tetapi, karena materi baliho lebih mengedepankan unsur ketokohan si pemiliknya, mudah ditebak, kalau baliho itu bernuansa politis. Yakni untuk tujuan pilkada.

Sasarannya di samping mensosialisasikan figur yang tertera di baliho itu, sekaligus mengundang empati masyarakat. Diantara baliho ‘malu-malu kucing’ itu, ada satu dua yang memberi isyarat agak terang menuju pilkada. Antara lain menuliskan kata, “Membangun Kampar Lebih Cemerlang”. Kata ini, umpamanya terdapat pada baliho atas nama Amir Lutfi. Begitu pun baliho raksasa atas nama Rahmat Jevary Juniardo. Putera Bupati Jefry Noer yang sekarang menjadi anggota DPRD Kampar ini, menampilkan tulisan bertajuk, “Pemimpin Muda untuk Kampar”. Ada juga baliho menyertakan tulisan, ‘Jujur, Santun dan Amanah’ sebagai pengantar potret diri sang pemilik baliho. Seperti terdapat pada baliho Zainal Abidin. Atau sekedar pemberitahuan penerimaan mahasiswa baru untuk S2 dan S3 pada baliho Ilyas Husti.

Dialog dan Sosialisasi

Baliho yang tak terlihat terpasang di sudut-sudut jalan hanya baliho Drs. H. Zulher MS, Prof Dr. H. Zulfadil dan baliho sejumlah ketua partai politik, antara lain Ahmad Fikri (ketua Partai Golkar), H. Aziz Zainal SH (ketua PPP Riau), H. Yurjani Moga (ketua PAN) dan Syamsul Moh. Kamal

SAg. Mereka termasuk tokoh-tokoh yang mumpuni, dan memiliki kans untuk dicalonkan oleh partai politik menjadi calon bupati dan calon wakil bupati.

Zulher dan Zulfadil lebih memilih bertemu langsung dengan masyarakat ketimbang berbalih. Pertemuan dengan sejumlah tokoh, dilakukan mantan Kadis Kehutanan Riau itu baik di kediamannya di Bangkinang maupun dengan cara menghadiri undangan masyarakat. Maklum, putera kelahiran Air Tiris itu sudah kenyang bermain politik di arena pilkada. Cuma suratan takdir belum mengantarkannya duduk di kursi bupati. Jika tak ada aral melintang, Pilkada Serentak 2017, merupakan yang ketiga kali bagi mantan sekretaris daerah Kabupaten Kampar itu. Ia juga birokrat karier yang lama menghabiskan usia kepegawaian di bumi Serambi Mekkah. Jadi, popularitasnya tak diragukan karena sudah dikenal luas masyarakat.

Beda dengan Zulfadil. Akademisi Universitas Riau yang kini dipercaya menjabat Kepala Dinas Pendidikan Pekanbaru ini, belum pernah bertapak karier di Kampar. Namun niatnya maju membangun Kampar seakan sudah 'dipaku' Zulfadil dengan sering mengundang tokoh-tokoh masyarakat ke kediamannya di Pekanbaru. Seakan seayun langkah dengan Zulher, Zulfadil cenderung bersosialisasi, berdialog menyampaikan ide dan gagasan tentang Kampar ke depan daripada berbalih.

Lampu politik yang belum nyala, justru datang Ahmad Fikri, Aziz Zainal dan Syamsul Moh. Kamal. Ketiga politisi Kampar ini seakan tersenyum memandang potret diri para figur yang tak satupun dapat memastikan dapat perahu atau tidak di tahapan pencalonan nanti. Namun demikian, ketiganya mengapresiasi kemunculan banyak tokoh seperti tergambar pada baliho dan spanduk itu. "Saya memandang dinamika politik kita jauh lebih dinamis daripada di kabupaten lain. Menurut saya, kawan-kawan sedang memanfaatkan ruang demokrasi menyongsong pelaksanaan pilkada," kata Fikri yang akrab disapa Ongah menjawab **AZAM** di Bangkinang pekan lalu.

Soal maju ke arena pilkada, Ongah mengaku belum berfikir ke arah itu. Ini, bukan berarti syahwat poliitik saya mengendur, Ongah berkilah. “Ada tugas lebih berat yang membuat saya harus fokus, yakni jabatan saya selaku ketua DPRD Kampar,” tegas Ongah.

Sedayung dengan Ongah adalah Syamsul Moh. Kamal. Ketua Partai Nasdem ini mengaku memberi laluan kepada figur manapun yang ingin bergabung dengan Nasdem asal popularitasnya teruji. “Baliho dan spanduk itu dalam rangka sosialisasi figur dan meningkatkan popularitas,” tegas Kamal menjawab **AZAM**. Ia tak sepandapat bila disebut, memasang baliho sama dengan mengencangkan nafsu politik.

“Itu bukan nafsu. Saya kira wajar, dalam era demokrasi sekarang siapapun memiliki hak politik yang sama. Partai justru tertolong dengan kehadiran baliho-baliho itu karena otomatis beban partai dalam mempopulerkan sang calon menjadi lebih ringan,” kata Kamal. Tak cuma di baliho, di jejaring sosial pun efektif juga. Misalnya yang dilakukan oleh Aprizal, Ketua PWI Kampar.

“Salut juga saya, apapun peristiwa kesehariannya di lapangan mampu ia teropong melalui kamera *handphone*, kemudian di *upload* ke *facebook*. Banyak juga simpati berdatangan ke adinda saya itu,” ujar Kamal. Jadi, semua sosialisasi yang dilakukan para figur, tambah Kamal, semata-mata mengisi ruang demokrasi. Bukan karena ambisi.*

Itu Strategi Memancing Figur Lain

Dimata pengamat M. Saeri, baliho menjadi salah satu strategi untuk bersosialisasi dan memancing bakal calon lain muncul ke panggung politik.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kampar baru akan dilangsungkan Februari 2017. Namun permainan politik sudah mulai memanaskan, dan aroma pertarungan seakan mulai terasa kini. Setidaknya itu tersimpulkan dari pemunculan baliho dan spanduk yang memamerkan foto figur-figur yang seakan ingin ikut serta dalam pilkada.

Baliho dan spanduk dalam beragam ukuran itu, kini menghiasi hampir di setiap sudut jalan dan tempat-tempat strategis wilayah Kabupaten Kampar. Melihat fenomena ini, Pengamat Politik Universitas Riau (UR), Drs M Saeri MSi menilai, setidaknya kondisi ini menggambarkan bahwa sekarang sudah mulai muncul para kandidat yang berkeinginan kuat bisa bersaing dalam Pilkada Kampar nanti. Meskipun yang muncul sekarang dianggap para partisan namun mereka bisa memancing kandidat lain juga turun gunung.

Saeri berpendapat, persoalan apakah kandidat yang telah tebar pesona itu pasti maju, sangat tergantung pada dinamika politik yang berkembang di Kampar. Bisa jadi, kata Saeri, baliho dan spanduk tersebut hanya sekedar memancing calon lain supaya mereka muncul ke permukaan. Sebab, dengan tampil sebelum gelanggang dibuka, dapat membuat aktor lain ikut terpancing.

Selain itu, juga salah satu strategi melakukan sosialisasi diri sehingga ketika muncul kandidat lain yang dianggap benar-benar memiliki kans besar, maka mereka pun berharap dipinang menjadi calon wakil bupati.

Atau jadi calon bupati. “Di samping memancing kandidat lain sekaligus wadah bagi para figur bersosialisasi jelang gong pilkada ditabuh KPU,” kata Dosen Fisipol UR ini.

Soal peluang figur, Saeri menilai belum juga bisa dipastikan. Semua sangat tergantung pada dinamika politik yang berkembang nanti. Sebab, syarat bisa maju ke pilkada tak cukup dengan mengantongi populer semata, namun ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Mulai dari dukungan partai atau jumlah dukungan pemilih yang dibuktikan dengan KTP untuk calon independen sampai kepada kekuatan finansial untuk menggerakkan mesin politik.

Dalam kacamata ilmu politik, siapapun dapat melakukan beragam strategi. Antara lain, memperbanyak baliho dan spanduk. Atau bertemu dan berdialog langsung dengan masyarakat. Dapat juga dengan memulainya melalui survey, dan dari hasil survey itu dilakukan pemetaan kekuatan dan kelebihan yang dimiliki oleh figur bersangkutan. Tak kalah pentingnya, melalui media massa. “Pers tidak dapat tidak harus dimanfaatkan oleh siapapun untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya,” tegas Saeri.

Saeri memandang, Pilkada Kampar memang beda dengan kabupaten lain. Dinamika politik negeri berjuluk ‘Serambi Mekkah’ ini terasa lebih dinamis dengan pemasangan baliho-baliho para figur. Padahak tahapan pelaksanaan pilkada masih jauh. Menurut Saeri, dinamika yang dinamis ini ada baiknya juga, karena rakyat sejak dini diperkenalkan dengan tokoh-tokoh yang bakal maju. Tinggal para figurnya, apakah hanya sampai di baliho, atau *wani* bertemu langsung dengan rakyat, tegas Saeri.*

Baliho Minus Ketua Partai

Sedang terjadi perang spanduk dan baliho dari mereka yang katanya, bakal calon bupati dan bakal wakil bupati Kampar. Uniknya, diantara nama-nama yang terpasang di baliho itu belum terasah ketokohnya. Atau sedang menjabat sebagai ketua partai politik.

Jika anda menelusuri jalanan lintas di Kabupaten Kampar, pastilah akan menemukan sejumlah baliho atau spanduk untuk tujuan Pemilu 2017. Ukurannya pun beragam. Ada yang besar, ada pula berukuran kecil.

Ada yang sekedar memasang foto wajah ukuran besar dengan kata-kata ucapan selamat hari raya, ada yang menyebut langsung bahwa dirinya calon pemimpin Kabupaten Kampar di 2017. Misalnya, “Pemimpin Muda Kampar,” demikian bunyi baliho Rahmat Jevary Juni Ardo. “Untuk Kampar 2017,” di spanduk A Rahman. Atau “Kampar Bangkit” yang menjadi *tagline* Nasri Haroen alias Eri Gendeng.

Cukup menarik perhatian. Perang baliho di Kampar terlihat semakin nyata ketika kita masuk Desa Tambang. Tepatnya di pasar dan jembatan Danaubingkuang. Hampir semua kandidat memasang baliho dan spanduk di situ. Termasuk Prof. Dr Ilyas Husti, putera Kampar yang kini menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar.

Yang tak kalah menarik dari pantauan **AZAM** pekan kemarin, diantara kandidat yang memasang baliho dan spanduk, tak satu pun terlihat tokoh partai. Semua kalangan profesional dengan latar belakang beragam: pengusaha, akademisi, PNS, mantan PNS dan lain-lain.

Kemana ketua partai? Sejumlah pimpinan partai yang dihubungi **AZAM** secara terpisah, memberikan jawaban yang hampir sama. Katanya, partai tidak melarang kadernya bersosialisasi. Namun, apa yang dilakukan kader menyangkut Pilkada 2017 belum berarti itu menjadi sikap partai. Jelasnya, partai memiliki mekanisme dalam menentukan calon

yang diusung. Jarang sekali mekanisme itu keluar di awal tahapan pilkada. Melainkan, selalu ditentukan di akhir pendaftaran calon ke KPU.

Atas asumsi Itu, kader enggan ikut terlibat perang baliho. Faktor lain, menurut Akmam Adiputra, tokoh masyarakat Kampar, tak banyak pula kader partai yang mapan secara ekonomi. Mereka akan berpikir dua kali membelanjakan uang hanya untuk keperluan spanduk atau baliho. Pertimbangan lain, orang partai lebih memilih *wait and see*. Atau terkesan menunggu pinangan ketimbang maju langsung ke gelanggang. Ketua Partai Amanat Nasional Kampar, Yurjani Moga, mengakui strategi itu.

Meski dalam rapat pengurus PAN Kampar ia sudah diputuskan maju di pilkada, namun anggota DPRD Riau itu belum bisa gambar-gembor. Selain terikat dengan mekanisme partai yang harus mendapat persetujuan pusat, PAN juga memperhatikan potensi lain di luar partai yang mungkin lebih strategis untuk memenangkan pilkada. Soal perang baliho, Moga menilai itu hal wajar. “Kampar kan barometer politik Riau, jadi mengapa heran kalau dinamikanya lebih menggeliat,” ujarnya.

Disebutkan mantan Pimpinan DPRD Kampar ini, sosialisasi dalam bentuk baliho yang terpasang sekarang, bertujuan meningkatkan popularitas. Ini, kata Moga, bagus untuk partai karena bila popularitas itu meningkat, pihaknya tinggal melirik siapa dari mereka yang diusung partai.

Moga mengaku, pihaknya sudah mulai berkomunikasi dengan sejumlah tokoh yang berminat memakai perahu PAN. “Setidaknya ada enam tokoh yang menjalin komunikasi dengan kita. Siapa orangnya, terlalu dini disebutkan,” ujar pria yang terpilih menjadi Sekretaris PAN Riau ini. Tak tertutup kemungkinan PAN mengambil posisi orang kedua (calon wakil bupati).

Sikap PDIP

Menurut Herianto Arbi dari PDI Perjuangan Kampar, maraknya balon calon yang bersosialisasi disebabkan karena dalam kalkulasi politik mereka belum ada calon yang menonjol dan mendominasi arena pilkada.

Sehingga mereka berani mengadu nasib dan mencari panggung untuk menaikkan popularitas.

Disamping itu, kata Arbi, diantara yang muncul belum ada yang memiliki dan menawarkan gagasan konkret untuk membangun Kampar ke depan. Bahkan banyak yang hanya menonjolkan nama besar keluarga atau kekuatan materi. Padahal, menjadi seorang pemimpin persyaratan yang ditonjolkan itu tidak prioritas utama.

Arbi menjelaskan, membaca Kampar jangan melihat Bangkinang semata. Tetapi tengoklah 21 kecamatan. Ia menyebut salah satu pemasang baliho atas nama Yusmardi Amran. Arbi mengaku simpati dengan tokoh ini karena dalam berbagai kesempatan selalu mengemukakan bahwa Kampar itu tidak bisa hanya dilihat dari Bangkinang saja tapi telusurilah 21 Kecamatan. "Yusmardi Amran itu pemimpin bervisi besar dan memiliki gagasan besar pula untuk menata Kampar berkualitas dan berdaya saing," ucap Arbi seakan memuji.

Soal sikap PDI Perjuangan, Herianto Arbi menegaskan, biasanya figur yang diusung itu adalah kader murni partai. Itu karena PDI Perjuangan melihat pilkada bukan pada menang atau kalah, akan tapi uji soliditas mesin partai. Dan upaya membangun politik yang berkeadaban dalam membumikan ajaran Tri Sakti Bung Karno di Kampar.

Makanya, lanjut Arbi, DPP sebagai pemilik otoritas tertinggi partai tidak mengedepankan kekuatan materi atau popularitas seorang calon semata tetapi lebih pada ideologi politik sang calon, khususnya calon dari internal yang berdedikasi, loyalitas dan pengorbanannya terhadap partai sudah teruji. "Saya yakin DPP akan memutuskan calon dari internal atau kader murni partai," tegas anak muda ini.

Tentang siapa figurnya, DPP punya mekanisme sendiri apalagi pusat sudah memiliki sekolah kader partai untuk menguatkan ideologi kader sekaligus menguji ideologi mereka yang maju dalam pilkada. Kader partai ideologis dan biologis yang lahir dari rahim partai itu pasti yang akan diusung. "Jadi, kalau ada figur non kader yang berharap mendapat perahu PDIP siap siap-siap saja gigit jari," ujarnya.*

Pengganti Saya Nanti yang Punya Hati

Gaya kepemimpinan Bupati Kampar, H Jefry Noer, selalu menarik perhatian banyak pihak. Itu karena kebijakannya yang kadang mengundang kontroversi. Termasuk pendirian Pusat Pelatihan Pertanian Terpadu (P4S) Kubang yang dijadikan Jefry basis peningkatan ekonomi mikro bagi warga miskin di Kabupaten Kampar. Bagi Jefry Noer, angka kemiskinan di negeri berjudul ‘Serambi Mekah’ itu harus turun drastis. Dengan cara memberi pendidikan dan pelatihan, serta modal bekerja.

Selain itu membangun infrastruktur jalan dan jembatan. Karena jalan yang bagus dapat meningkatkan mobilitas ekonomi rakyat. Sehingga produk pertanian, perikanan dan peternakan yang selama ini menjadi topangan hidup warga pedesaan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat tempatan. Jefry berpandangan, ketiga sektor itu sangat berpotensi menjadikan Kabupaten Kampar maju.

11 Desember 2016. Masa tugas Jefry Noer sebagai Bupati Kampar akan berakhir setelah dua periode menjabat. Kursi bupati akan beralih generasi ke pendatang baru yang dipilih rakyat melalui Pilkada Serentak Februari 2017. Jefri berkomitmen, mengakhiri sisa jabatan dengan menuntaskan berbagai program yang telah ia susun dan rencanakan sejak awal menjadi bupati. Termasuk mensukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Bagaimana ia menyikapi ramainya tokoh-tokoh muda tampil sebagai pemimpin? **Endrizal Yusten** dan **Beni Hendra** dari **AZAM menemui Jefry Noer** di P4S, Kubang Raya, Selasa (6/10) sore. Berikut petikan wawancaranya.

Kapan jabatan Anda sebagai Bupati Kampar berakhir?

Pada 11 Desember 2016. Artinya masih ada sisa jabatan saya sekitar satu tahun lebih lagi. *Nah*, disisa waktu ini, saya akan berusaha menuntaskan berbagai program yang telah disusun dan direncanakan sebelumnya.

Periode kedua Anda sebagai bupati sudah berjalan hampir empat tahun. Menurut Anda bagaimana kondisi Kampar sekarang, baik aspek ekonomi, kesejahteraan maupun pembangunan infrastruktur?

Kalau infrastruktur boleh sama-sama kita lihatlah. Artinya, Kabupaten Kampar sudah bagus. Sekarang ini saya lebih menitik-beratkan sisi ekonomi. Saya melihat ekonomi Kampar dari data statistik, masyarakat miskinnya pada tahun 2011, tujuh persen. Saat saya *mapping* awal 2012, ditemukan justru 22,48 persen. Bukan berarti pendataan statistik tidak betul, hanya tolak ukurnya saja yang berbeda. Yakni, pendapatan rata-rata 2 dollar perhari. Sementara tolak ukur yang kita buat adalah menghitung penghasilan masyarakat dengan dua orang anak rata-rata berkisar Rp1,3-1,5 juta perbulan, itu yang kita kategorikan masyarakat miskin.

Saat Anda temukan data itu, apa langkah yang Anda lakukan?

Dari hasil *mapping*, kita membuat berbagai pelatihan pertanian terpadu yang meliputi pertanian, perternakan dan perikanan. Pesertanya adalah masyarakat pedesaan. *Alhamdulillah*, setelah mendapat bekal pelatihan, kita *mapping* lagi di awal tahun 2013, ternyata angka kemiskinan berkurang sebesar tiga persen.

Pelatihan yang Anda lakukan itu konsepnya seperti apa?

Setiap tahun kita adakan pelatihan. Konsepnya kita membuat semacam program dimana satu orang yang kita latih dan terampil, kemudian satu orang ini akan melatih lagi 10 orang di lingkungannya. Lalu kita pinjamkan dana bergulir. Artinya, disamping ilmu yang kita berikan, dana juga kita pinjamkan. Dulu, untuk pertanian besaran dana

yang dipinjamkan Rp30 juta perorang dengan bunga enam persen. Untuk perikanan Rp60 juta perorang, dan peternakan Rp100 juta perorang. Setelah berjalan, tahun 2014 kita mapping lagi, angka kemiskinan sudah berkurang 6,7 persen. Sekarang angka kemiskinan di Kabupaten Kampar berkisar 12 persen.

Sebelum program ini dijalankan, kabarnya Anda punya istilah ATM. Apa maksudnya?

Memang benar saya punya istilah ATM. Ini muncul karena pada tahun 2015 saya melihat beberapa daerah ada sektor yang menonjol. Seperti di Jawa Timur peternakan sapi-sapinya menonjol, Jawa Tengah dan Boyolali, menonjol di ikan lele, Kalau di Jambi, ayam lokalnya, kemudian di Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah pertanian bawangnya sangat luar biasa, sementara di Bogor ada gas. *Nah*, dari hasil Amati, Tiru dan Modifikasi (ATM), makanya sekarang kita buat Rumah Tangga Mandiri Pangan Energi (RTMPE). Dari luas 100 meter bisa berpenghasilan Rp10-25 juta perbulan, dan itu di luar tabungan anak sapi. Saya lihat ini sangat menjanjikan. Saya sangat yakin kalau program ini terus dikembangkan dan disinergikan dengan dinas-dinas terkait serta pihak perusahaan, akan mambantu perekonomian masyarakat. Dan ini sudah kita mulai di beberapa desa. Insya Allah tahun ini sapinya akan kita bagi kepada 1.200 kepala keluarga. Hingga akhir masa jabatan, akan saya usahakan sebanyak 5.000 kepala keluarga. Kalau ini mampu terwujud, maka Kampar sudah berswasembada bawang, cabe, sayur mayur, telur, ikan dan lain sebagainya.

Mengapa sektor ini yang menjadi fokus Anda. Apakah karena Kampar memiliki potensi pertanian, peternakan dan perikanan?

Ya memang benar. Kenapa saya terobsesi mengembangkan bidang pertanian, karena di Riau ini berbagai produk pertanian 95 persen berasal dari luar. Begitu jalan lintas sumatra putus, kita kalang kabut,

semuanya menjadi mahal. Makanya saya fokus ke bidang pertanian dan peternakan khususnya sapi. Kenapa Sapi? Untuk qurban tahun ini saja, Riau kekurangan 30 ribu ekor sapi, belum lagi daging. Kalau program ini berhasil akan sangat dahsyat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan memenuhi kebutuhan lokal minimal di Kabupaten Kampar.

Itu soal ekonomi kerakyatan. Bagaimana dengan persiapan Pilkada Kampar?

Di sisa akhir masa jabatan, saya juga mempersiapkan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kampar bersama *stakeholder* terkait. Mulai dari penyelenggara (KPU dan Bawaslu) sampai penganggaran yang harus dikoordinasikan dengan DPRD.

Dari informasi yang Anda terima, kapan Pilkada Kampar dilaksanakan?

Kalau saya tidak salah 9 Februari 2017.

Masih satu tahun lagi. Tapi, sejak beberapa bulan belakangan baliho dan spanduk terkait pilkada sudah bertebaran di banyak tempat. Bagaimana Anda menilainya?

Ya itulah Kampar. Kampar itu suhu politiknya selalu tinggi. Walaupun foto-foto yang terpampang di baliho-baliho tersebut belum tentu akan maju, tapi mereka ikut meramaikan pesta demokrasi. Dengan ada baliho itu, saya menilai demokrasi di Kampar terasa hidup. Terkait banyaknya orang yang mengatakan bahwa ini hanya sebuah bentuk “nafsu politik” belaka, itu terserah yang menilai. Tapi inilah kenyataannya, suhu politik di Kampar selalu tinggi. Tak salah banyak yang mengatakan, jika berhasil memimpin Kampar, ia berhasil pula memimpin Riau. Jadi ada plus dan ada minusnya juga. Minusnya, orang akan menilai ini sebagai bentuk “nafsu politik”, karena waktunya masih lama. Tapi dari sisi demokrasi ini bagus.

Selaku bupati, apa persiapan pilkada yang telah Anda lakukan?

Sesuai koordinasi saya dengan KPU Kampar, untuk langkah awal adalah memperbaharui Daftar Pemilih Tetap (DPT). Artinya DPT betul-betul akurat. Jangan sampai nanti namanya ada, tapi orangnya tidak ada, sebaliknya orangnya ada, namanya tidak keluar. Makanya saya menghimbau kepada seluruh camat dan kepala desa supaya betul-betul mendata warganya sampai namanya dapat dipastikan terdaftar dalam DPT.

Lantas bagaimana dengan Anda, apakah kembali ikut pilkada?

Kalau saya tidak maju lagi, karena aturannya memang begitu. Sudah dua periode. Meski demikian, saya tetap berupaya Pilkada Kampar berjalan lancar, aman dan sukses.

Menurut Anda, figur seperti apa yang tepat menggantikan Anda?

Saya mengharapkan orang yang cocok dan pantas menjadi Bupati Kampar mendatang adalah figur yang memiliki kepedulian dan mempunyai hati. Artinya, ia harus peduli dengan orang miskin, peduli dengan masyarakat yang pendidikannya masih terbelakang. Saya tidak mengatakan saya hebat, tapi pada zaman sayalah Pemerintah Kabupaten Kampar memberikan pakaian seragam sekolah buat anak-anak miskin. Tahun 2012, 1.000 murid dan tahun 2013 sebanyak 2.000 murid mendapat seragam gratis. Jadi, program saya itu ‘membangun desa menata kota’. Kenapa dimulai dari desa? Karena lumbung-lumbung kemiskinan dan kebodohan ada di desa. Itulah sebabnya saya memprioritaskan desa. Kalau desa sudah terbangun *insya* Allah kota lebih gampang menatanya. Karena itu saya memang sedang mencari dan mempersiapkan pengganti untuk melanjutkan program saya, khususnya RTMPE. Program ini sangat cocok dengan potensi Kampar karena tidak memerlukan lahan yang luas. Hanya 1.000 meter saja.

Dari baliho yang terpasang, adakah figur yang Anda maksud?

Insy Allah yang mendekati keinginan saya, ada. Makanya saya juga mempersiapkan orang. Walau saya tidak bisa lagi maju tapi keluarga saya masih bisa ambil bagian pada pilkada. Kenapa keluarga saya persiapan? Karena yang gampang saya kasih saran dan masukan adalah keluarga, seperti istri dan juga anak-anak saya. Itu kalau mampu dan diterima masyarakat. Yang jelas dari pihak keluarga tetap kita persiapan, jika tidak diterima masyarakat, kita siapkan lapis kedua. Tujuannya bukan untuk kekuasaan atau membangun dinasti politik, tetapi untuk melanjutkan program saya yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Kampar. Kalau pribadi, *Alhamdulillah*, saya sudah lebih dari cukup. Nanti kita lihat dinamika politik. Misalkan, jika anak atau istri saya tidak mampu menjadi orang nomor satu, nomor dua juga jadilah. Asalkan yang nomor satu benar-benar orang yang punya hati. Ibarat komputer, *chip* atau otaknya terletak pada hati.*

Dinamis di Negeri yang Agamis

Dinamisnya politik menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak Februari 2017 oleh baliho dan spanduk figur, dinilai Ahmad Fikri, pertanda demokrasi dinamis di

Menurut Ahmad Fikri, kemunculan baliho dan spanduk itu hal yang positif untuk masa depan demokrasi di negeri ini. Ia memuji inisiatif dan langkah politik para figur bersosialisasi dengan masyarakat. “Semakin banyak yang memasang baliho dan spanduk, semakin tahu masyarakat dengan figur pemimpin Kampar masa mendatang,” kata Ketua DPD Golkar Kampar ini.

Soal siapa yang nanti benar-benar mendapat perahu dan masuk ke gelanggang pertarungan, menurut Fikri, itu urusan belakang. Yang pasti, sekarang mereka sudah berkompetisi meningkatkan popularitas di tengah masyarakat. Sosialisasi melalui baliho atau spanduk, kata Ongah, masih tergolong. Terutama bagi mereka yang belum pernah terjun di politik atau jabatan publik lainnya. Sehingga wajah dan nama mereka perlu diperkenalkan ke masyarakat.

Tentu tak sampai disitu. Setelah memperkenalkan diri, masyarakat pun ingin bertatap muka langsung. Mendengarkan visi dan misi sang bakal calon. *Nah*, nantinya, kata Fikri, akan ada seleksi alam. Mereka yang benar-benar mampu dari berbagai segi, akan tetap bertahan mensosialisasikan diri. Sebaliknya, yang hanya setengah hati, dan tak mampu bertahan hingga pendaftaran calon, dengan sendirinya akan mundur.

Ahmad Fikri menegaskan, banyaknya tokoh muda atau pun kalangan tua berminat memimpin Kabupaten Kampar, perlu diapresiasi.

Sebab mereka semua memiliki keinginan baik, yaitu ingin membangun Kabupaten Kampar. “Kita bersyukur banyak tokoh yang peduli terhadap negerinya. Mereka sama-sama ingin membangun tanah kelahirannya,” ujar Ketua DPRD Kampar itu.

Tentang dirinya, apakah tidak ikut maju? Dengan tenang dan diplomatis Fikri menjawab, dirinya belum berpikir ke arah itu. Saat ini, lanjutnya ia masih fokus ke pekerjaannya sebagai Ketua DPRD Kampar. “Saya ucapkan terima kasih jika ada yang mengatakan saya pantas maju menjadi Bupati Kampar. Tetapi untuk sekarang, saya belum berpikir ke arah sana,” tegasnya.

Ongah menjelaskan, dengan kondisi Partai Golkar yang terbelah membuat ia berpikir lebih dalam menjawab pertanyaan masyarakat seputar pilkada. “Saya harus tahu diri, selain merasa belum pantas menjadi bupati, saat ini Golkar dalam keadaan terpecah,” ujar Ongah.

Itulah salah satu sebab, mengapa dirinya lebih memilih fokus ke pekerjaan daripada berfikir tentang pilkada. Sebagai ketua dewan, Fikri mengaku harus menjalankan tugas dan fungsi dewan semaksimal mungkin, baik di bidang pengawasan, legislasi maupun penganggaran. Sehingga pemerintahan dan pembangunan berjalan sesuai rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang.

Fikri berharap, setiap tokoh yang ingin maju menjadi bakal calon bupati dan calon wakil bupati hendaknya menjaga stabilitas daerah. Memperhatikan juga keindahan kota terutama dalam memasang baliho dan spanduk. “Memang tidak ada larangan memasang spanduk atau baliho, tapi kita sama-sama punya kewajiban menata kota dan menjaga keindahannya,” ujarnya menghibau.

Kepada masyarakat pun Fikri meminta supaya menjadikan momentum pilkada sebagai ajang memilih pemimpin yang berkualitas. Makin banyak figur memasang baliho, semakin banyak referensi masyarakat mengetahui bakal calon. Lihat juga visi dan misi mereka. Jangan cuma yang dilihat itu tampaknya *doank*,” kata Ongah dengan logat gaul anak Jakarta.* [Ziz

Banyak Figur Uji Keberuntungan Nasib

Akibat longgarnya kriteria dan syarat menjadi kepala daerah, banyak figur menguji keberuntungan nasib di pilkada, kata tokoh masyarakat Kampar Akmam Adipoetra.

Akmam mengulas, untuk menjadi seorang pemimpin, tidak hanya cukup dengan modal finansial yang kuat dan pendukung yang banyak. Ajan tetapi, seorang pemimpin yang baik dan berguna bagi masyarakat harus memenuhi beberapa persyaratan. Antara lain, latar belakang disiplin ilmu termasuk pengalaman. Dengan modal itu roda pemerintahan diharapkan berjalan secara terukur dan terarah.

“Terkadang ini menjadi sebuah dilema. Dimana kita semua mengharapkan pilkada dapat menghasilkan pemimpin atau kepala daerah yang berkualitas, namun disatu sisi aturan atau persyaratan menjadi kepala daerah terlalu longgar,” kata Akmam kepada **AZAM** di Bangkinang pecan lalu. Akmam adalah birokrat senior di Pemprov Riau yang sudah purna bhakti.

Misalkan, jelas Akmam, dari segi ilmu pendidikan, seorang yang hanya tamatan SMA bisa maju mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah asalkan diusung oleh partai politik sesuai persyaratan undang-undang. Tingkat pendidikan jelas dapat mempengaruhi kinerja yang bersangkutan di pemerintahan.

Soal motivasi untuk maju, menurut Akmam, tergantung *nawaitu* masing-masing orang. Ada yang memang berniat tulus untuk membangun negeri, ada juga karena faktor diluar itu. Akmam tak menafikan, jelang pelaksanaan pilkada serentak tahun depan di Kabupaten Kampar, telah bermunculan banyak figur yang mengindikasikan berminat untuk maju

ke gelanggang pilkada. Menurut Akmam, kesemaran ini pertanda demokrasi di Kabupaten Kampar sudah mulai mekar, sehingga semua orang ingin menggunakan hak demokrasi. "Saya kira seperti itu, tanda demokrasi di Kampar sudah mulai mekar

Mereka, lanjut Akmam, adalah putera terbaik Kampar yang di samping dikenal luas oleh masyarakat, juga berhasil di bidangnya. Hanya saja, beberapa diantara mereka dinilai Akmam masih terbilang usia muda. Padahal untuk menjadi seorang kepala daerah pengalaman sangatlah dipentingkan. "Sebagian dari mereka saya nilai belum memiliki pengalaman yang cukup menjadi kepala daerah," tegas Akmam.

Apalagi, patut juga disadari bahwa yang menjadi juri atau penentu dari pesta demokrasi adalah rakyat. Itulah sebabnya siapa yang pandai mengambil hati rakyat, dialah yang dipilih. Mengambil hati rakyat, bukan perkara gampang sebab masyarakat sudah makin cerdas memberi penilaian.

Soal figur yang tampil melalui baliho dan spanduk yang gambarnya bertaburan di Kabupaten Kampar, Akmam menilai sejauh ini belum tampak sosok yang ideal menjadi Bupati Kampar mendatang. Entahlah, kalau nanti muncul sosok atau figur yang benar-benar bisa melanjutkan pembangunan di negeri Serambi Mekkah ini.

Akmam berharap, calon Bupati Kampar ke depan hendaknya fugur yang benar-benar memiliki kemampuan, terutama kemampuan manajerial di bidang pemerintahan. Selain itu, mempunyai komitmen tinggi membangun daerah supaya Kampar lebih maju, dan masyarakatnya hidup lebih sejahtera.

"Yang pasti siapapun nanti yang diberi amanah memimpin negeri ini, haruslah orang yang benar-benar paham bagaimana menjalankan roda pemerintahan yang baik, jujur, memiliki komitmen tinggi membangun supaya Kampar lebih maju dan masyarakatnya hidup lebih sejahtera lagi," tutur Akmam Adipoetra.*

BAGIAN XVI



Negeri 'Kubah' Jauh Berubah

Suyatno-Erianda tak mengubah skala prioritas pembangunan pendahulunya. Keduanya tetap melanjutkan program pembangunan yang dirancang Annas Maamun.

Rokan Hilir, satu dari enam kabupaten pemekaran di Provinsi Riau. Berdiri menurut Undang Undang Nomor 53 tahun 1999 pada 4 Oktober 1999. Sejak berdiri hingga usia 16 tahun, Rohil telah dipimpin tiga bupati dan wakil bupati defenitif. Yakni Wan Thamrin Hasyim-Ilyas RB (2001-2006), H Annas Maamun-H Suyatno, Amp (2006-2011, 2011-2016). Kemudian H Suyatno-Erianda.

Menariknya, pertama kali terjadi Riau, pasangan bupati dan wakil bupati *incumbert* bertarung di pilkada langsung, dan menang. Peristiwa itu terjadi pada pilkada langsung Rohil 2011. Pasangan Annas Maamun-Suyatno terpilih untuk periode kedua. Sukses Annas Makmun terus berlanjut. Sebuah prestasi besar ditoreh meski belum sempat menghabiskan masa jabatan sebagai bupati, Anas ikut bertarung di Pilgubri 2013. Dan, hasilnya luar biasa Annas yang berpasangan dengan H Arsydajuliandi Rachman terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau.

Dari situlah, struktur pemerintahan Rohil berubah. Suyatno yang sebelumnya wakil bupati, 'naik kelas' menjadi bupati. Jabatan itu diembannya sejak 24 Maret 2014 setelah dilantik Gubernur Annas Maamun dalam paripurna DPRD Rohil, Bagansiapiapi. Suyatno ditetapkan sebagai bupati antarwaktu sampai 2016. Sementara, kursi wakil bupati yang kosong 'milik' Suyatno, dipercayakan kepada Erianda.

Erianda terpilih secara aklamasi melalui paripurna DPRD Rohil yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Muhammad Ridwan, dan disaksikan Bupati Suyatno. Sejak itu, resmilah *duet* Suyatno-Erianda memimpin Rokan Hilir.

Suyatno-Erianda bertekad menjadikan kabupaten berjuluk Negeri 'Seribu Kubah' itu maju dan masyarakatnya hidup sejahtera. Tekad itu mereka balut dalam kebijakan bersifat strategis, terutama program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Dan hasilnya, dari angka-angka ekonomi Rohil yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi dari 7,68 persen menjadi 7,77 persen. Begitu pun pendapatan perkapita masyarakat, dari Rp33,99 juta per tahun menjadi Rp44,47 juta per tahun, atau naik 11,20 persen.

Meski angka-angka ekonomi cenderung meningkat, taklah membuat Suyatno-Erianda puas dan berbesar hati. Sebab peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat itu masih bersifat kuantitatif. Yang mereka inginkan adalah pertumbuhan ekonomi secara kualitatif. Artinya meratanya pertumbuhan perekonomian antarwilayah, baik di daratan maupun kawasan pesisir, yang meliputi desa-desa di Kecamatan Sinaboi, Bangko, Pekaitan, Kubu, Kubu Babussalam dan Pasir Limau Kapas, yang saat ini masih menjadi kantong kemiskinan.

Peningkatan Infrastruktur

Memang tak mudah mengatasi kemiskinan di enam kecamatan itu. Untuk itulah, Suyatno-Erianda, tetap fokus pada peningkatan infrastruktur untuk membuka isolasi antar daerah. Selain telah dibangunnya Jembatan Pedamaran I dan II, ruas jalan lintas pesisir juga menjadi skala prioritas.

Seperti jalan yang menghubungkan Desa Panipahan dengan Desa Teluk Piyai sepanjang 60 km, ruas jalan dari Teluk Piyai ke Desa Pedamaran 23 Km, ruas jalan dari Pedamaran ke Bagansiapiapi sepanjang 17 km. Disamping itu, Bupati Suyatno secara intens membangun komunikasi dengan Pemprov Riau dan pemerintah pusat melalui departemen terkait.

Komunikasi yang dibangun Bupati Suyatno pun berbuah hasil, sehingga program pembangunan yang berorientasi pada upaya

peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, seperti peningkatan jalan lintas pesisir yang mendapat alokasi dana sebesar Rp45 miliar dari APBN 2015.

Pendidikan dan Kesehatan

Sukses dan keberhasilan kepala daerah tidak saja diukur dari pesatnya pembangunan fisik belaka, namun hal lain yang tidak bisa diabaikan adalah pembangunan sumber daya manusia. Karena suatu daerah memiliki SDM yang baik, maka itu akan menjadi aset bagi pembangunan daerah ke depan.

Sebagaimana diketahui sarana pendidikan yang ada di Rohil saat ini berjumlah 901 sekolah, terdiri 217 TK, 402 SD, 177 SMP dan 105 SMA. Sedangkan tenaga pengajar berjumlah 10.423 orang guru yang tersebar di 18 kecamatan.

Dalam menunjang program peningkatan SDM, Pemkab Rohil dibawah arahan Suyatno-Erianda lebih berorientasi kepada meningkatkan mutu pendidikan, baik melakukan perbaikan dan renovasi gedung sekolah yang ada, melakukan pembangunan ruang kelas baru, menciptakan suasana belajar yang nyaman, mengadakan buku-buku perpustakaan serta melengkapi fasilitas laboratorium.

Selain dari program tersebut diatas, upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat juga masih merupakan program prioritas dan menjadi fokus perhatian Suyatno-Erianda. Kabupaten Rohil saat ini terdapat empat unit rumah sakit, 15 unit Puskesmas, 73 unit Puskesmas Pembantu dan sejumlah Polindes.

Meski pada dua tahun belakangan ini tidak dilaksanakan pembangunan baru unit pelayanan kesehatan, namun terkait dengan pelayanan kesehatan masyarakat, Suyatno-Erianda membuat kebijakan meningkatkan status beberapa unit Puskesmas pembantu menjadi Puskesmas, dan Puskesmas biasa ditingkatkan pelayanannya menjadi Puskesmas rawat inap.

Penguatan Aparatur

Guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan ekonomis, dan menumbuhkan kreatifitas serta tanggungjawab secara berjenjang, Suyatno-Erianda telah menyerahkan berbagai kewenangannya kepada Kepala SKPD. Langkah ini sebagai upaya penguatan terhadap aparatur pemerintahan.

Dengan dilimpahkan berbagai kewenangan tersebut, hendaknya tidak dimaknai memperbesar kewenangan yang telah dimiliki semata, akan tetapi Bupati Suyatno berharap kepada masing-masing Kepala SKPD dapat meningkatkan kepedulian dan mempertebal panggilan moral untuk senantiasa berbuat dan memberikan pengabdian terbaik untuk masyarakat dan Kabupaten Rohil.

Sebagai mantan wakil bupati sejak tahun 2011, membuat Suyatno hapal betul dengan kondisi Rohil dan program apa yang cocok untuk dijalankan. Tanpa membuat motto, namun program pembangunan yang dijalankan memiliki tujuan yang sangat jelas.

“Kita tidak membuat motto khusus. Yang lebih penting, tujuan akhir kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya, apapun yang kita lakukan, baik pembangunan fisik dan yang lainnya, tujuannya adalah untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Rohil,” kata Suyatno kepada AZAM, pekan silam.*

Masih Fokus di Tiga Program Strategis

APBD Rohil boleh dikurangi, tapi Suyatno-Erianda masih tetap fokus dengan tiga program prioritas.

Rokan Hilir termasuk kabupaten kaya di Provinsi Riau. Itu dibuktikan, besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rohil. Yakni Rp2,738 triliun lebih, dan bertambah Rp54 miliar lebih di APBD Perubahan sehingga total anggaran tahun 2015 tercatat Rp2,793 triliun lebih.

Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Rohil, Drs H Surya Arfan, MSi, memastikan dari tahun ke tahun APBD selalu meningkat. Bahkan, dua tahun terakhir peningkatannya rata-rata mencapai 2,6 hingga 2,7 persen.

Dari besarnya APBD, sejatinya banyak yang bisa dilakukan oleh bupati, wakil bupati dan perangkat daerah. Dan, itu sudah dilakukan pemimpin Rokan Hilir, mulai dari Wan Thamrin Hasyim-Ilyas RB, Annas Maamun-Suyatno. Dan, *duet* Suyatno-Erianda. Sehingga Rokan Hilir yang dulunya sebuah kecamatan di Kabupaten Bengkalis, kini berkembang menjadi daerah otonom. Lihatlah hasil-hasil pembangunannya. Sangat pesat.

Menurut Surya Arfan, 2015 merupakan tahun politik dimana digelarnya pilkada langsung. Selain itu regulasi terkait penggunaan dana APBD, juga berpengaruh terhadap realisasi APBD. "Hingga September, realisasi APBD masih pada kisaran 35 persen," kata Surya Arfan kepada **AZAM** pekan silam.

Surya benar.. Pasalnya, setiap tahun politik tiba dapat dipastikan perhatian akan tercurah untuk mengurus soal-soal yang terkait dengan

pendanaan. Meski tahapan Pilkada Rohil baru berjalan mendekati pertengahan tahun ini, tapi riaknya sudah berlangsung sejak lama.

Soal serapan APBD, Surya Arfan menerangkan yang terbesar masih urusan rutin di satuan kerja, serta kegiatan-kegiatan pelatihan oleh satker-satker dalam upaya meningkatkan kemampuan ASN. Soal pembangunan fisik masih dalam proses pelaksanaan. “Kalau untuk peningkatan kemampuan ASN melalui pelatihan sudah tuntas, sedangkan kegiatan fisik kan masih dalam proses,” ujarnya.

Dijelaskan, realisasi APBD 2015 akan menjadi rujukan pada APBD 2016. Artinya, kemampuan satker menyerap APBD tahun ini, akan berpengaruh di tahun berikutnya. Jika serapannya rendah, di tahun depan anggarannya dikurangi. “Ini sudah kita sampaikan kepada seluruh satker,” katanya.

Seperti daerah lain, Surya Arfan mengatakan APBD Rohil tahun ini yang bersumber dari dana bagi hasil, juga dikurangi sebesar Rp500 miliar lebih. Dengan kondisi itu, maka kegiatan yang telah disusun dalam APBD disesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada. Hanya saja, khusus terhadap program prioritas tetap dijalankan seperti biasanya.

“DBH kita dipotong lebih dari Rp500 miliar. Beberapa kegiatan di satker terpaksa dihapus karena menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Tapi anggaran untuk program prioritas tidak diganggu. Artinya, titik fokus masih di tiga program prioritas, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan,” tutur Surya Arfan.

Terkait terget serapan APBD, Surya tidak mau berandai-andai berapa persen. Hanya saja, satker dapat memanfaatkan waktu yang tersisa mengejar ketertinggalan. Caranya bekerja lebih fokus dan tidak menunggu perintah. “Kalau dihitung hari, tahun anggaran 2015 hanya tersisa lebih kurang 60 hari, yang bisa dimaksimalkan lebih kurang 45 hari lagi. Dari itulah, satker harus bekerja ekstra. Jika tidak serapan pasti rendah, dan ini menjadi ukuran di tahun depan,” tambah Surya Arfan lagi.*

Semua yang Kita Lakukan untuk Masyarakat

Masyarakat Rokan Hilir sudah merasakan ‘buah’ otonomi. Setelah Rohil dimekarkan dari Kabupaten Bengkalis, daerah itu maju dan berkembang pesat. Padahal dulu, sebagian besar wilayah Rohil masuk dalam kategori daerah terisolir.

Pasalnya, saat masih seinduk dengan Bengkalis, masyarakat Rohil hanya mengandalkan transportasi air. Sebab sebagian besar wilayahnya ada di pinggir Sungai Rokan, dan nyaris tak tersentuh oleh jalan darat. Kini, paska pemekaran semua keteringgalan itu sirna.

Di awal otonomi daerah bekas Kewedanan Bagansiapi-siapi itu hanya terdiri dari lima kecamatan. Yakni Kecamatan Tanah Putih, Kubu dan Bangko, ditambah Kecamatan Rimba Melintang dan Bagan Sinembah. Kini, Rohil ‘dihuni’ 18 kecamatan. Dan telah dipimpin tiga bupati defenitif. Masing-masing Wan Thamrin Hasyim-Ilyas RB, Annas Maamun-Suyatno, dan Suyatno-Erianda.

Suyatno sendiri, sebelumnya menjadi wakil bupati. Disebabkan Bupati Annas Maamun terpilih sebagai Gubernur Riau, kepemimpinan Rokan Hilir pun berpindah tangan ke Suyatno. Karena hanya melanjutkan periode, Suyatno berusaha berjalan di rel yang benar alias tak mau berbuat macam-macam. Artinya, Suyatno tetap melanjutkan program yang sudah dijalankan sebelumnya karena dianggap baik.

Ditemui **Endrizal Yusten, Zainul Aziz** dan **Beni Hendra** dari **AZAM** di kediamannya, Bagan Siapi-apai, Kamis (29/10) pagi jelang siang, H Suyatno, AMp, berkisah banyak tentang perkembangan Rokan Hilir. Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana perkembangan Rohil sekarang?

Rohil hari ini seperti yang kita lihat bersama, berbagai sarana dan prasarana sudah tertata sedemikian rupa. Sehingga jika dulu Rohil masuk dalam kategori daerah terisolir, kini sudah tidak lagi. Itu berkat pembangunan yang dilaksanakan dan buah dari pemekaran.

Apa upaya Anda mempertahankan yang sudah dan meningkatkan bidang lain?

Upaya kita adalah beberapa program yang menjadi andalan kita membangun Rohil, terus dioptimalkan. Terutama tiga program prioritas, yakni infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Untuk sektor pendidikan, saat ini di Rohil sudah banyak berdiri sekolah dari berbagai tingkatan. Mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SLTA dan juga sekolah tinggi lanjutan lainnya. Untuk ini kita terus berupaya melengkapi berbagai fasilitas serta sarana dan prasarananya. Karena keberadaan sekolah adalah sarana untuk menciptakan SDM yang bagus, kalau kondisi tempat menimba ilmu para siswa sangat tidak layak, bagaimana bisa melahirkan SDM berkualitas.

Itu soal fisik. Bagaimana non-fisik. Apakah Pemkab menganggarkan beasiswa untuk anak berprestasi?

Setiap tahun ada program beasiswa bagi anak yang berprestasi orang tuanya tidak mampu. Anak berprestasi itu kita sekolahkan bekerjasama dengan UGM, IPB, ITB, Fakultas Kedokteran UR, termasuk universitas di Kairo, Mesir. Dan ini setiap tahunnya berjalan. Dan kalau mereka masih berusia muda, kita beri peluang untuk melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi. Anak-anak Rohil yang sudah menjadi dokter, kita biayai untuk mengambil spesialis.

Dengan bidang kesehatan dan infrastruktur?

Untuk bidang kesehatan ini, fokus kita adalah bagaimana pelayanan bisa terus ditingkatkan. Program kita disetiap kecamatan ada puskesmas

rawat inap. Jadi masyarakat tidak perlu lagi harus berbondong-bondong datang ke Bagansiapiapi hanya untuk berobat. Tentunya kita harus tingkatkan sarana dan prasarana kesehatan yang dibutuhkan setiap Puskesmas rawat inap. Dua tahun terakhir ini sudah ada beberapa puskesmas rawat inap yang dibangun, seperti di Simpang Kanan, Rimba Melintang.

Infrastruktur masih menjadi program prioritas kita. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Rohil saat ini memang sudah banyak tersedia jalan. Dikarenakan Rohil sebagai salah satu daerah penghasil perkebunan dengan andalan kelapa sawit, sayangnya kendaraan pengangkut sawit tonasenya ada yang mencapai 40 ton, mengakibatkan hancurnya jalan-jalan yang ada. Sementara itu, penghasilan masyarakat juga berasal dari hasil perkebunan sawit. Nah, sekarang bagaimana kita menciptakan supaya infrastruktur yang ada tersebut tidak hancur. Maka program kita kedepan pembangunan jalan harus menggunakan sistem rigid. Makanya jalan tunggal mulai masuk dari Ujung Tanjung ke Bagansiapiapi sudah kita usulkan menjadi jalan nasional yang selama ini statusnya merupakan jalan provinsi. Dan sekarang ini jalan dari Ujung Tanjung ke Bagansiapiapi sudah di rigid, dan sasaran kita akan sampai ke Bagansiapiapi. Selain itu, jalan lintas yang menghubungkan Bagansiapiapi, Kubu, dan Panipahan, pengerjaannya tengah dalam proses. Kalau jalan ini sudah selesai, saya pikir Rohil tidak akan jadi sebuah daerah yang terisolir lagi. Kalau infrastruktur sudah bagus dan orang akan lebih gampang masuk ke Rohil, maka investor akan berdatangan.

Bagaimana pula dengan infrastruktur di pedesaan?

Di setiap kecamatan kita juga punya program strategis, dan disetiap kecamatan kita bangun jalan dua jalur. Dan setiap Musrenbang tingkat kecamatan maupun desa, masyarakat selalu mengusulkan soal infrastruktur. Jalan-jalan yang ada di kampung-kampung akan kita gesa. Apalagi saat ini setiap desa sudah mendapatkan dana ADD. Itu sangat membantu Pemkab Rohil dalam membuat program untuk kepentingan

masyarakat banyak. Dengan adanya ADD itu, juga membantu Pemkab dalam meningkatkan roda ekonomi dimasing-masing kecamatan. Ke depan jalan-jalan yang ada disetiap kecamatan akan kita semenisasi. Kesemuanya ini memerlukan waktu, kesemuanya itu perlu kerjasama, kesemuanya itu harus saling koordinasi mulai dari perangkat paling bawah sampai keatas.

Kalau urusan peningkatan ekonomi masyarakat, programnya seperti apa?

Kabupaten Rohil memiliki catatan sejarah menghasilkan ikan terbesar nomor dua di dunia setelah Norwegia, dan ini hanya tinggal kenangan. Nah, bagaimana kita membangkitkan kenangan masa lalu tersebut. Makanya setiap tahun kita punya program bantuan kepada para nelayan, mulai dari bantuan boat, jaring, dan peralatan nelayan lainnya. Untuk tahun ini kita sudah memberikan bantuan sebanyak 30 unit kapal untuk nelayan. Intinya sejauh ini perhatian Pemkab terhadap para nelayan sudah cukup baik, dan mereka setiap tahun kita tidak hanya membatu peralatan, tapi juga bibit ikan bagi para petani budidaya ikan air tawar.

Bagaimana perhatian terhadap sektor pertanian?

Rohil dulunya punya lahan untuk tanaman padi lebih kurang 29 ribu hektar, namun sekarang hanya tinggal 12 ribu hektar saja. Kenapa bisa terjadi, ini disebabkan adanya alih fungsi lahan. Makanya kita melarang para petani untuk tidak melakukan alih fungsi lahan. Ketika masih menjadi bagian dari Kabupaten Bengkalis, Rohil terkenal dengan lumbung padinya, seperti di Kecamatan Rimba Melintang, Kubu, Batu Hampar dan Sinaboi. Sebetulnya sektor pertanian kita sangat menjanjikan. Makanya tahun depan program kita akan fokus pada pertanian, kita coba cari dana melalui APBN. Makanya program Presiden Jokowi untuk meningkatkan ketahanan pangan, harus kita dukung. Dan target kita bagaimana Rohil bisa swasembada beras. Pembinaan terus kita lakukan secara kontinue kepada PPL yang ada.

Anda menggantikan posisi Annas Maamun. Lazimnya ketika terjadi pergantian kepemimpinan, program juga ikut diganti. Bagaimana dengan Anda?

Saya saat ini tetap melanjutkan program-program yang lama, karena sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Nah, RPJMD itulah yang menjadi “kiblat”, karena itu yang kita paparkan dihadapan publik pada Pilkada 2011 lalu. Jadi program hingga 2016 nanti, tetap sama.

Program bagus tak akan berjalan baik bila pelaksanaannya tidak dijalankan secara baik. Bagaimana kesiapan satker menjalankan program yang telah disusun?

Semuanya tergantung dari niat baik dan ketulusan hati dalam bekerja. Makanya kabinet Presiden Jokowi “Ayo Kerja”, tujuannya jangan kita bermalas-malasan. Saat ini orang bersaing untuk maju. Untuk bisa memajukan daerah bukan dilakukan dengan bersantai-santai dan bermalas-malasan, melainkan harus berjuang. Satker yang memiliki potensi mereka harus kejar dan jemput bola baik ke provinsi maupun ke pusat. Dan saat ini itu sudah mulai dilaksanakan, makanya kita sudah mendapatkan kucuran dana pusat sekitar Rp80 miliar. Tapi, karena dibatasi waktu, dan tidak mungkin rasanya, maka diambilah 30 persen saja, dan itulah kita tuangkan dalam bentuk infrastruktur.

Apa sanksi yang Anda berikan bila ada satker yang tidak sungguh-sungguh bekerja?

Kalau seandainya hari ini bisa melakukan mutasi, maka saya sudah lakukan, tapi tentunya kita harus patuh kepada UU No 5 tentang ASN. Makanya kita sudah bentuk tim assesment dan sudah ada beberapa rekomendasi saya untuk benar-benar menyeleksi para pejabat eselon dengan profesional, dan mencari pejabat yang lebih berkualitas.

Apa harapan Anda kepada masyarakat agar program yang sudah dirancang berjalan baik?

Saya berharap masyarakat bisa memahami kondisi ekonomi saat ini. Dikarenakan nilai tukar rupiah anjlok, program provinsi dan program pemerintah pusat stagnan. Kemudian, uang tidak bergerak karena aturan yang terlalu rumit, sehingga kita sebagai pelaksana di daerah kebingungan. Saya berharap masyarakat tidak terpengaruh dengan situasi itu, tapi terus bekerja disektor masing-masing. Dan yang pasti masyarakat terus kita dorong untuk terus bekerja, bekerja, dan bekerja.

Ketika Rohil dipimpin Annas Maamun, banyak pembangunan fenomenal. Sekarang Anda yang menggantikannya, apakah Anda tak merasa berat melanjutkannya?

Tidak terasa beratlah, karena ketika Pak Annas menyusun program tersebut saya kan ada didalamnya, jadi ketika estafet kepemimpinan ini saya lanjutkan, maka saya tinggal menjalankan program yang sudah ada yang tertuang dalam RPJMD tersebut. Jadi saya tidak mungkin merubah konsep yang sudah ada sebelumnya. Jadi konsep yang sudah ada inilah yang kita jalankan saat ini sampai akhir masa jabatan saya nantinya.

Sebagian besar kantor pemerintahan sudah dibangun, tapi belum difungsikan. Apakah ada keinginan Anda memfungsikannya?

Pasti akan kita fungsikan, percuma saja dibangun kalau tidak kita fungsikan. Tapi ini kan masih dalam proses, karena masih ada beberapa fasilitas yang belum tersedia seperti listrik, air, dan diperlukan beberapa pembenahan lainnya.

Apa motto pembangunan yang Anda jalankan sekarang?

Kita tidak membuat motto khusus. Yang lebih penting dari itu, tujuan akhir kita adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya, apapun yang kita lakukan, baik pembangunan fisik dan yang

lainnya, tujuannya adalah untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Rohil.

Rohil juga melaksanakan pilkada serentak. Apa harapan Anda kepada masyarakat?

Kita berharap kepada penyelenggara hendaknya benar-benar dapat bekerja secara maksimal, dan profesional menggelar pilkada serentak. Kepada masyarakat saya mengajak dan menghimbau pada tanggal 9 Desember mendatang datanglah ke TPS-TPS yang sudah disediakan, gunakan hak pilih sesuai dengan hati nurani. Jangan pernah berfikir untuk golput, karena ini merupakan hak politik masing-masing masyarakat yang sudah diatur undang-undang.*

Bupati dan Wabup Berjalan Seiring Langkah

Keberhasilan pembangunan di Rokan Hilir tak lepas dari saling lanjut antara program yang dirancang bupati terdahulu dengan bupati sekarang.

Di usia 16 tahun, Rokan Hilir terus berbenah diri. Berbagai kemajuan yang diraih, tak bisa pisah dari sinergi dan saling lanjut program antara bupati terdahulu dengan bupati sekarang sebagai pelanjut pembangunan.

Menurut Erianda, sudah empat orang bupati yang memimpin Rohil, hingga hari ini program pembangunan yang dilakukan terus berjalan secara berkesinambungan sehingga hasilnya bisa dilihat sekarang.

“Infrastruktur sudah sangat baik. Jalan, jembatan, sarana dan prasarana lainnya untuk masyarakat sudah terpenuhi. Bahkan, Rohil memiliki bangunan yang menjadi ikon daerah, yakni jembatan Padamaran dan pusat pemerintahan di kilometer 6,” ujar Wakil Bupati Rohil, Erianda, kepada **AZAM** di ruang kerjanya, Bagan Siapi-api, Rabu (28/10).

Semua pembangunan yang tersedia bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Rohil, kata Erianda, terus berupaya memberi yang terbaik bagi masyarakat. Caranya membangun berbagai fasilitas dan infrastruktur.

“Rohil hari ini boleh sama-sama kita lihat. Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan dan perbaikan berbagai sarana dan infrastruktur. Tujuan kami adalah bagaimana Rohil bisa lebih maju dan masyarakatnya hidup layak dan sejahtera,” jelas anak mantan Bupati Rohil dua periode, Annas Maamun ini.

Erianda mengaku, selama ini ia telah bekerja sesuai tugas pokok dan kewenangannya. Dan lebih dari satu tahun bertugas, hubungannya dengan Bupati Suyatno berjalan sangat baik. Ini dibuktikan dengan adanya pembagian serta distribusi tugas yang jelas antara bupati dengan wakil bupati.

Erianda menerangkan, wakil bupati bertugas membantu bupati menjalankan program pembangunan yang sudah disusun. Karena itulah, ia sering mendapat tugas di luar tugas-tugas pokoknya sebagai seorang wakil bupati. Ini pertanda bahwa terjalinnya hubungan yang baik dan harmonis antara kedua pemimpin. *Output* yang dihasilkan adalah prestasi dan kinerja yang baik.

“Peran saya selaku wakil bupati dalam membantu bupati, tentu sesuai dengan tugas serta kewenangan saya. Kami tetap bekerjasama dan saling berkoordinasi. Diluar tugas pokok saya sebagai wakil bupati, ada juga tugas-tugas lain yang dilimpahkan kepada saya. Ketika bupati sedang tidak di tempat atau bepergian ke luar daerah, saya yang ditugasi menggantikan beliau. Dan, setelah beliau kembali saya melaporkan apa yang sudah saya kerjakan,” jelasnya.

Dua tahun belakangan, Erianda memastikan program pembangunan terus berjalan dengan baik hingga menyentuh pedesaan. Diakui, memang belum semua program tercover, dan yang belum terlaksana itu akan dilakukan secara bertahap. Kami juga kerjasama dengan berbagai unsur masyarakat membangun Rokan Hilir.

Soal hubungan eksekutif dan legislatif, menurut Erianda, sejauh ini berjalan baik. Kedua lembaga ini selalu berkoordinasi, terutama menyangkut program pembangunan yang berasal dari usulan masyarakat yang disampaikan kepada anggota dewan saat reses. Di sisa masa jabatan yang tak sampai setahun lagi, Erianda menegaskan tetap menjalankan program-program prioritas, dan program unggulan. “Kami berusaha bagaimana program prioritas dapat terselesaikan secara maksimal. Termasuk program unggulannya lain,,” tambah Erianda lagi.*

Kami Bangga Jadi Warga Rokan Hilir

Kamis malam pekan silam, sejumlah orang berbaju hitam berpeci khas Bugis tengah berbaris menunggu kedatangan Bupati Rokan Hilir Suyatno. Malam itu adalah pelantikan pengurus Persatuan Masyarakat Bugis yang ada di Rokan Hilir. Di baris terdepan ada Jumadi, ketua terpilih yang akan segera dilantik dan disebelahnya terlihat Ketua Masyarakat Bugis Provinsi Riau, Alimuddin.

Mereka terlihat antusias menunggu kedatangan orang nomor satu di Rokan Hilir itu, dan sudah tak sabar menyaksikan pelantikan pengurus paguyuban masyarakat Bugis di Rohil. Menurut Ketua Masyarakat Bugis Rokan Hilir Jumadi, jumlah warga Bugis di daerah itu ada sekitar seribu kepala keluarga. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya yang terdiri dari berbagai etnis yang ada di Rohil. Profesi mereka pun beragam. Ada yang menjadi pedagang, petani, pengusaha, pegawai pemerintah nelayan dan sebagainya.

Disela-sela acara malam itu, kepada AZAM Jumadi mengatakan, warga Bugis sudah sejak lama ada di Rokan Hilir. Mereka ikut berpartisipasi dalam rangka membangun kabupaten pemekaran dari Bengkalis itu. Warga Bugis, kata Jumadi, sudah menyaksikan banyak perubahan yang terjadi di Rokan Hilir.

“Saya pribadi sudah menyaksikan perubahan yang terjadi di Rokan Hilir. Banyak pencapaian yang telah diraih daerah ini. Maka wajar kiranya, warga Bugis Rohil merasa bangga menjadi bagian dari masyarakat Rohil,” ujar pria yang sehari-hari berprofesi pengusaha ini.

Bukti adanya perubahan yang terjadi di Rokan Hilir, kata Jumadi, adalah banyaknya akses jalan dan jembatan yang sudah dibangun untuk

menghubungkan satu daerah ke daerah lainnya. Dari satu desa ke desa lainnya, dari satu kampung ke kampung lainnya.

Aspek pendidikan juga begitu. Di berbagai tingkatan, bangunan sekolah di Rohil sudah dibangun dengan megah. “Anak-anak kami sudah dapat bersekolah dengan selayaknya,” ujar Jumadi.

Yang tak kalah penting kata Jumadi adalah aspek kesehatan. Hampir setiap kepenghuluan sudah dibangun Puskesmas Pembantu (Pustu). Inilah ujung tombak dalam pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Keberadaan Pustu, sangat membantu untuk melayani kesehatan warga. Sehingga, sebelum ke rumah sakit yang ada di Bagan Siapi Api, warga sudah bisa dilayani di Pustu yang tak jauh dari rumah mereka.

Ketua masyarakat Bugis Provinsi Riau Alimuddin juga berpendapat sama. Bahkan menurut pria yang pernah menjadi salah seorang pejabat di Pemprov Riau ini, masyarakat Bugis bukanlah pendatang di Riau ini. Dalam sejarahnya, Bugis dan Melayu seperti saudara yang tak bisa dipisahkan. Mereka sama-sama ikut mengusir penjajah yang memasuki wilayah nusantara.

Saat ini, warga Bugis yang ada di Riau juga seperti itu. Mereka hidup rukun dan damai bersama masyarakat dengan berbagai latar belakang etnis yang ada di Riau. Warga Bugis yang ada di Riau khususnya Rokan Hilir ikut bersama-sama membangun daerah mereka. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan keberhasilan pemimpin yang ada di negeri ini. “Pemimpin yang baik akan melibatkan semua warganya dalam rangka pembangunan negerinya. Menjaga kerukunan antar warga dengan tidak membedakan asal usul atau etnis,” ujar Alimuddin.

Sifat pemimpin seperti seperti ini, kata Alimuddin, sudah dipraktekkan oleh pemimpin di Rohil. Mulai dari masa awal Rokan Hilir menjadi kabupaten hingga hari ini Rohil dipimpin Haji Suyatno. Dengan demikian, wajar kiranya warga Rohil merasa aman dan bangga menjadi bagian dari warga Rokan Hilir.

Kenyataan seperti itu diakui Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Rokan Hilir Marzuki AR. Menurut dia, Rokan Hilir terlebih ibu kotanya Bagan Siapi Api merupakan daerah yang sudah tua yang didiami oleh berbagai etnis. Warga Tionghua dan Melayu adalah warga mayoritas. Disamping itu, masih banyak lagi etnis yang ikut mendiami daerah ini sejak dari awal. Diantaranya, warga Bugis, Minang, Jawa, Batak dan sebagainya. Mereka hidup rukun dan damai dalam bingkai persatuan yang dibangun oleh pemerintah.

Marzuki mengatakan, dirinya menjadi saksi hidup perkembangan Rokan Hilir dari dulu hingga sekarang. Betapa tidak, lahir dan besar di Bagan Siapi Api. Dia mengenal dari ujung sampai ke pangkal serta seluk beluk daerah Rohil. Nah, menurut pria ini diusianya yang ke 16 tahun ini Kabupaten Rokan Hilir tidak saja mengalami kemajuan dibidang infrastruktur, tetapi juga bidang sosial, agama dan adat dan istiadatnya.

Ditemui di kediamannya Merzuki mengatakan segala capaian dan keberhasilan yang telah diraih ini tentunya tidak terlepas dari kerjasama semua unsur yang terkait di kabupaten Rokan Hilir. Mulai dari pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, tokoh adat, dan juga tokoh agama saling bersinerji dan bahu membahu dalam membangun kabupaten Kepulauan Meranti. Dan yang kalah penting menurutnya adalah bagaimana Bupati Kepulauan Meranti sekarang mampu menggandeng dan menjadi perekat diantara berbagai suku dan adat istiadat yang ada di kepulauan Meranti ini.

“Terus terang saja sebagai masyarakat kabupaten Rokan Hilir saya sangat bangga dengan berbagai kemajuan yang sudah diraih oleh kabupaten ini. Masyarakat disini mampu hidup saling rukun, tanpa pernah ada gesekan diantara mereka meskipun diantara mereka terdapat perbedaan agama dan adat isitidat. Hal-hal seperti ini harus tetap dipertahankan demi kelancaran guna menunjang pembangunan di kabuapen Kepulauan Meranti ini,” ujarnya.

Pada tanggal 9 Desmber mendatang Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak.

Oleh karena itulah dalam kesempatan ini juga Marzuki menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat Rohil untuk sama-sama ikut mensukseskan pesta demokrasi lima tahunan ini.

Marzuki yakin masyarakat Rohil sudah sangat cerdas dalam menyikapi situasi dan perkembangan politik yang terjadi selama ini. Masyarakat Rohil, sambungnya, paham betul seperti apa sosok dan kriteria pemimpin yang menjadi harapan mereka. Masyarakat menginginkan sosok pemimpin yang mampu memberikan kesejahteraan kepada mereka. Pemimpin yang tidak hanya sekedar mengubar janji-janji manis, akan tetapi memberikan bukti nyata.

Figur pemimpin untuk Kabupaten Rokan Hilir kedepan adalah sosok yang memiliki kejujuran, berakhlakul kharimah, dan juga amanah. Figur seperti ini ada pada Irwan Nasir. Rasa hormat yang tinggi terhadap kepemimpinannya adalah sebagai bukti bahwa ia adalah seorang pemimpin dan menjadi suri tauladan bagi masyarakat di Kepulauan Meranti ini.

Lima tahun belakangan ini suasana kebatinan masyarakat di Rohil sudah sangat tenang, dan apa yang menjadi harapan masyarakat satu perasatu menurutnya sudah mulai terjawab. Nah, tinggal lagi bagaimana untuk lima tahun kedepan Kabupaten Rokan Hilir ini mampu berkembang lebih baik lagi. Makanya dalam kesempatan ini Marzuki berharap masyarakat harus lebih jeli dan lebih cerdas dalam memilih pemimpin.

Dalam menghadapi pilkada serentak mendatang Marzuki menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat di Rohil untuk tetap sama-sama menjaga kedamaian dan ketenangan. Meskipun Kabupaten Rokan Hilir ini didiami oleh berbagai suku, mulai dari suku Melayu, Jawa, Minang, Batak, dan juga Tionghoa untuk tetap selalu kompak dan tetap sama-sama menjaga keharmonisan hubungan. Jangan sampai dengan perbedaan pandangan dan dukungan kita menjadi terkotak-kotak dan terpecah belah.

“Kita semua harus tetap kompak dan selalu menjaga hubungan silaturahmi di antara sesama kita. Jangan pernah memadamkan perbedaan

suku diantara kita. Masyarakat Rohil harus bisa membuktikan bahwa perbedaan pandangan dan pilihan tak lantas membuat kita terpecah belah,” pungkasnya.

Himbauan dan semangat yang disampaikan ketua LAM ini disambut baik tokoh pemuda yang juga sekretaris KNPI Rohil Reza. Menurut dia, sesuai dengan semangat hari sumpah pemuda, rakyat Rohil harus bersatu. Perbedaan dukungan dalam Pilkada tidak akan membuat masyarakat Rohil terpecah. Sebagai warga Rohil, kata Reza, dia mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai daerah dan bangga menjadi bagian dari warga Rohil. Berbagai limpahan kelebihan yang diberikan sang pencipta terhadap daerah ini perlu disyukuri. Pemerintah daerah pun sudah banyak berbuah termasuk memberikan perhatian kepada organisasi kepemudaan yang ada di Rohil.*

Pilkada Pengaruhi Serapan Anggaran

Rohil sudah banyak berubah. Terutama bidang infrastuktur. Daerah yang dulu tak bisa ditempuh, kini bisa dijangkau dengan mudah. Namun sjalan-jalan yang sudah dibangun juga banyak yang rusak. Pilkada turut pengaruhi rendahnya serapan APBD.

Di bidang pendidikan, tak ada lagi sekolah yang tidak layak untuk menjadi tempat berlangsungnya proses belajar dan mengajar. Pemerintah daerah sudah berhasil membangun gedung sekolah diberbagai tingkatan. Namun yang menjadi perhatian kedepan adalah mutu pendidikan dan pengelolaan pendidikan itu sendiri.

Demikian juga bidang kesehatan. Pemerintah daerah telah berusaha membangun infrastruktur seperti puskesmas di setiap kecamatan dan puskesmas pembantu di tiap desa. Sehingga masyarakat tidak mesti berbondong-bondong pergi berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah di Bagan Siapi Api.

Hal itu diakui Forwedissuito, anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir kepada **AZAM** di Bagan Siapi-api pekan silam. Menurut pria asal Kecamatan Pujut ini, di usia yang telah menginjak 16 tahun, Rohil sudah bisa bersaing dengan kabupaten lain di Riau. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cenderung meningkat diupayakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Ia menambahkan, jika infrastruktur dasar sudah dibangun, maka yang perlu ditingkatkan adalah perangkat pendukungnya. Jalan yang sudah rusak mesti harus segera diperbaiki. Agar tingkat ketahanannya lebih baik, maka sekarang diupayakan dengan sistem rigit. Demikian pula di bidang pendidikan. Jika gedung sekolahnya sudah dibangun,

yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah pagar sekolah, wc, mobiler dan sebagainya.

Begitupun sektor kesehatan. Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah perlu diperhatikan pelayanannya. Pelayanan akan membaik bila ditunjang oleh tenaga yang memiliki keterampilan serta mental yang baik pula. Disamping itu, yang tak kalah penting adalah peralatan medisnya. Setiap tahun pemerintah daerah hendaknya meningkatkan hal ini demi peningkatan layanan kesehatan kepada masyarakat.

Menurut pria yang kini disebut-sebut calon kuat ketua KNPI Rohil ini, lembaga legislatif akan terus memberi dukungan kepada pemerintah daerah asalkan program yang dicanangkan adalah demi kepentingan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Rokan Hilir. "Kita memiliki komitmen yang sama. Asalkan untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan Kabupaten Rokan Hilir, program pemerintah akan kita dukung. Sesuai dengan fungsinya, dewan akan melegislasi segala peraturan daerah dan mengawasi jalannya pembangunan," ujar mantan Ketua Mahasiswa Rohil Pekanbaru ini.

Menurut Ketua DPC PPP Kecamatan Pujut ini, sejak berdiri di tahun 1999 lalu, Rohil pernah dipimpin empat kepala daerah. Mereka memiliki gaya tersendiri dalam membangun Rohil. Yang pertama sekali menjadi orang nomor satu di Rohil adalah Wan Syamsir Yus. Dia ditugaskan menjadi pejabat sementara Bupati Rohil. Wan Syamsir Yus hanya beberapa bulan saja duduk di kursi bupati, selanjutnya digantikan Wan Thamrin Hasyim. Wan Syamsir Yus ditugaskan ke Dumai dan Plt Bupati Rohil selanjutnya adalah Wan Thamrin Hasyim.

Wan Thamrin sempat beberapa lama bulan menjadi plt dan selanjutnya menjadi bupati defenitif selama lima tahun. Dialah peletak batu pertama pembangunan di Rokan Hilir. Pemimpin selanjutnya adalah H Annas Maamun yang sempat memimpin hampir selama dua periode. Pada masa kepemimpinan Annas Maamun lah pembangunan Rohil digesa. Infrastruktur, pendidikan dan kesehatan sektor lainnya mendapat perhatian yang seimbang. Sayangnya, Annas Maamun tak menyelesaikan

masa periode kedua hingga akhir jabatannya. Sebab, Annas menang dalam pertarungan di pemilihan Gubernur Riau.

Sesuai dengan undang-undang, Suyatno yang menjadi Wakil Bupati Rohil, secara otomatis naik menjadi bupati. Nah, jabatan Suyatno ini, baru satu tahun. Sehingga kata Parweddes, sulit untuk menilai keberhasilan yang diraih oleh Suyatno. Sebab, dia hanya melanjutkan program yang terdahulu lagi pula, jabatan tersebut baru satu tahun diembannya.

Senada dengan Forwedissuito, wakil rakyat dari Fraksi Hanura, H Bakhtiar SE menyebutkan, untuk mengukur keberhasilan seorang pemimpin tak bisa hanya satu tahun anggaran. Terlebih dengan adanya pemilukada serentak Desember 2015 ini, banyak elite politik di Rohil yang terpecah perhatiannya pada helat akbar ini. Ada yang maju ke medan tempur pilkada, ada pula yang menjadi tim sukses pasangan calon.

Meski demikian, menurut Bakhtiar, pembangunan di Rohil tidak terpengaruh oleh pilkada tersebut. "Pembangunan terus berjalan seperti biasa. Bupati boleh cuti untuk kampanye karena bertarung di pilkada, tetapi pembantunya di setiap SKPD terus menjalankan program yang telah dicanangkan," ujar Sekretaris Hanura Kabupaten Rohil ini.

Pria yang berasal dari Kecamatan Pasir Limau Kapas ini mengatakan, Rohil terdiri dari masyarakat yang heterogen. Meski demikian, Rohil termasuk kabupaten yang aman. Pembangunan yang dijalankan pemerintah pun berjalan dengan baik tanpa hambatan yang berarti. Pembangunan di Rohil pun sudah mulai merata hampir di setiap kecamatan. Upaya pemerintah yang membangun desa dengan mengalokasikan dana yang cukup besar ke desa, membuat pembangunan pedesaan semakin menggeliat.

Hanya saja, Bakhtiar berpesan, kedepan pemerintah daerah harus lebih fokus ke potensi yang ada di daerah. Yaitu dengan menggali potensi serta mengembangkannya menjadi sebuah prioritas dalam sebuah kawasan. "Kecamatan yang ada di Rohil memiliki potensi berbeda-beda. Untuk itu, perlu digali dan dikembangkan secara maksimal sehingga dapat menjadi sentra dimasa yang akan datang," ujar pria berpostur tinggi besar ini.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD kabupaten Rokan Hilir, Drs Jamiludin, mengatakan Kabupaten Rokan Hilir hari ini sudah mengalami kemajuan yang sangat signifikan terutama sekali dibidang infrastruktur. Berbagai sarana dan prasarana serta infrsastruktur sudah banyak yang mengalami perubahan, mulai seperti jalan dan jembatan. Selain itu juga pembangunan dibidang pendidikan dan kesehatan saat ini, katanya juga sudah semakin membaik.

Berbagai kemajuan yang sudah diraih oleh kabupaten Rokan Hilir menurutnya adalah buah dari hasil kerja keras pemerintah bersama segenap unsur yang ada di kabupaten Rokan Hilir. Program pembangunan yang ada saat ini menurutnya sudah sangat tepat karena benar-benar memberi dampak yang nyata bagi kemajuan Rokan Hilir.

“Saya memberikan apresiasi yang tinggi bagi pemerintah kabupaten Rokan Hilir yang telah bekerja memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya. Sehingga hasil dari kerja keras tersebut saat ini benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Sejauh ini, menurut Jamiludin hubungan antara kedua lembaga yakni Eksekutif dan Legislatif di kabupaten Rokan Hilir ini juga berjalan sangat harmonis, kedua lembaga yang ada ini benar-benar mampu memainkan peran serta fungsinya masing-masing sehingga hubungan timbal balik dan selaras ini mampu menciptakan kinerja yang baik pula.

Anggota DPRD yang *notabene* para wakil rakyat, sejauh ini, akunya, terus bekerja sesuai dengan tugas dan kewenangannya, sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, akan selalu diusulkan kepada pemerintah daerah untuk kemudian masuk ke dalam prioritas pembangunan.

Dibawah kepemimpinan Bupati H. Suyatno, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran (APBD) Kabupaten Rokan Hilir dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 ini APBD Rohil telah mencapai angkut 2 triliun lebih, dan ini menurutnya sebuah prestasi yang membanggakan. Artinya pemerintah daerah sejauh ini mampu menggali pendapatan daerah di berbagai sektor. “Pendapatan daerah akan meningkat jika sector-sektor yang ada mampu tumbuh dan berkembang

dengan baik, dan inilah yang terjadi di Rohil saat ini,” katanya.

Hanya saja dia mengakui anggaran yang ada saat ini ternyata belum mampu diserap secara optimal oleh berbagai SKPD yang ada. Realisasi anggaran APBD tahun 2015 yang lalu hanya mampu terserap sekitar 40 persen. Namun hal ini dapat dimaklumi, karena ada beberapa faktor yang membuat penyerapan anggaran di Rohil tidak berjalan maksimal. Salah satunya karena situasi politik dimana Rohil sedang menggelar pilkada serentak.*

BAGIAN XVII



Amril Menang Herliyan Tumbang

Pilkada Serentak di Dumai, Inhu, Kuansing, Rohil, Rohul, Bengkalis, Pelalawan, Siak dan Meranti berjalan aman dan lancar. Saling klaim kemenangan antarcalon tak bisa dihindari. Keputusan akhir tetap menunggu pleno KPU.

Rabu, 9 Desember 2015. Sembilan daerah di Riau usai melaksanakan pilkada serentak. Pesta demokrasi itu berjalan aman, tertib dan kondusif. Meski ditemukan sejumlah kecurangan dalam pelaksanaannya namun masalah di lapangan dapat diatasi. Semua pelanggaran sudah dilaporkan ke panwaslu masing-masing.

Penghitungan sementara dari sejumlah lembaga survey dan tim sukses, pilkada serentak tahun ini masih menjadi milik *incumbent* (petahana, *red*). Adapun calon petahana yang sukses meraih suara terbanyak ada di enam kabupaten. Yaitu Siak, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, Pelalawan dan Rokan Hulu. Dua daerah lain, Bengkalis dan Dumai, petahana belum menunjukkan hasil maksimal. Kuansing merupakan satu-satunya daerah yang tidak diikuti calon petahana.

Rokan Hulu dan Pelalawan, masih terjadi aksi saling klaim suara dari dua kubu yang mengaku pemenang pilkada. Di Rohul, saling klaim terjadi antara Hafith Syukri-Nasrul Hadi dan Suparman-Sukiman. Sementara di Pelalawan, aksi saling klaim dilakukan oleh pasangan Harris-Zardewan dan Zukri-Anas. Ini disebabkan karena perbedaan perolehan suara masing-masing calon yang sangat tipis.

Kondisi serupa terjadi di Dumai dan Kuantan Singingi. Persaingan ketat antara Zulkifli As-Eko Suharjo dan Abdul Kasim-Nuraini tak bisa dihindari. Hingga Sabtu (12/12), keduanya mengaku sama-sama meraih

28 % suara, hanya berbeda angka di belakang koma. Hasil ini sekaligus meninggalkan raihan suara tiga pasangan lainnya.

Sedang di Kuantan Singingi, persaingan terjadi antara Indra Putra-Komperensi yang meraih 63.136 suara atau beda tipis dengan Mursini-Halim yang meraih 62.641 suara. Sementara Mardjan Ustha-Muslim, untuk sementara meraih 33.048 suara.

Saling Klaim

Rokan Hulu. Awalnya, tim pemenangan Hafith Syukri-Nasrul Hadi menyatakan sebagai peraih suara terbanyak. Seperti dituturkan Ketua Tim Pemenangan Hafith Syukri-Nasrul Hadi, Imam Zamroni, pihaknya melakukan dua metode penghitungan suara, yakni *real count* dan *quick count*. Dari *quick count*, sudah 100% dengan sample 100 desa, selisihnya hanya dua %, dengan tingkat kepercayaan 95 %.

Hasilnya, pasangan Hafith-Nasrul meraih 43,29% sedangkan Suparman-Sukiman 41,81 % dan Syafaruddin-Erizal (Syafari) meraih 14,90%. “Kami yakin dengan data kita, *real count* masih berjalan sampai saat ini,” terangnya. Untuk *real count*, sejauh ini Hafith-Nasrul memperoleh 43,44% dengan jumlah suara 70.505, sedangkan Suparman-Sukiman 42,98% dengan jumlah suara 69.765. Safarudin-Erizal mengumpulkan 13,5% dengan jumlah suara 22.049.

Menyikapi hal itu, Hafith Syukri mengatakan kemenangan dirinya dan Nasrul Hadi tak lepas dari kerja keras tim dan relawan. “Kami dan Pak Nasrul berterima kasih kepada seluruh relawan. Kita akan melanjutkan dan kami tinggal membuktikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Hafith berharap KPU Rohul mengawal perolehan suara mereka, sebab hasil yang diraih merupakan suara rakyat yang sebenarnya. Selain KPU, pihaknya juga mengajak seluruh elemen masyarakat mengawal kotak suara hingga KPU. Sehingga hasilnya memang benar-benar bisa terjaga.

Dirinya mengajak semua pendukungnya melakukan sujud syukur. Usai sujud syukur di kediaman Bupati Rohul, Hafith dan Nasrul diarak

oleh ribuan relawan dan pendukung menuju Sungai Batang Lubuh. Seperti tradisi, keduanya mencebur ke Sungai Batang Lubuh di Dusun Nogori, Desa Babussalam, Kecamatan Rambah.

Sementara, Tim Suparman dan Sukiman, juga mengklaim pihaknya peraih suara terbanyak. Seperti dituturkan Suparman saat jumpa pers di Pondok Ayam Goreng Suharti Pekanbaru, pihaknya berhasil unggul tipis dari pasangan nomor 1. Walaupun pasangan Hafiz Sukri menyatakan mereka yang menang, tapi berdasarkan laporan formulir C1 yang kita kumpulkan, terbukti Suparman-Sukiman yang meraih suara terbanyak,” terang Suparman.

Menurut Suparman, berdasar hasil rekapitulasi sementara, pasanganurut 1 meraih 89.173 suara, nomor urut 2, 89.319 suara dan nomor urut 3 mendapat 30.183 suara. Terkait hal itu, pihaknya juga merayakan dengan menggelar mandi di Sungai Rokan.

Kondisi serupa juga terjadi di Pelalawan. Melalui *real count* di Kantor DPRD Golkar Pelalawan, tim Harris-Zardewan (HAZA) mengklaim mendulang perolehan suara sementara terbanyak, yakni 51,06%. Sedangkan Zukri-Anas (ZA) 48,94%. Menurut ketua tim pemenangan Harris-Zardean, Tengku Zulmizan F Assagaff, dari hitungan pihaknya, terdapat selisih kemenangan sekitar 2,11 % atau selisih sebanyak 2.824 suara. “Melihat selisih kemenangan ini, kemungkinan besar tidak terjadi gugatan ke MK,” ungkapnya.

Dari 12 kecamatan, kata Zulmizan, HAZA berhasil menang di tujuh kecamatan. Yakni Ukui, Kerumutan, Pangkalan Kuras, Bandar Petalangan, Langgam dan Bandar Sikijang. Sebaliknya, tim Zukri-Anas, mengklaim mendapat suara terbanyak sementara. Menurut Zukri, kemenangan yang diraihnyamemang cukup tipis, yakni satu persen dibanding pasangan Harris-Zardewan. “Itu berdasarkan penghitungan manual tim kita semenjak penghitungan surat suara di TPS-TPS,” ungkapnya *by phone* kepada **AZAM**.

Pihaknya unggul di lima kecamatan. Yaitu Kecamatan Kuala Kampar, Teluk Meranti, Pelalawan, Bunut, dan Pangkalan Kerinci. Namun meski kalah dari jumlah kecamatan, ZA unggul dalam perolehan suara di lima kecamatan. “Kita siap jika ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Karena presentasi sangat tipis dan ketat,” pungkasnya.

Satu-satunya calon *incumbent* yang tidak berhasil meraih hasil maksimal terjadi di Kabupaten Bengkalis. Sejauh ini, pasangan Amril Mukminin-Muhammad meraih 80.691 suara. Angka ini cukup jauh meninggalkan pasangan *incumbent*, Herliyan Saleh-Reza Pahlevi, yang meraih 51.495 suara. Sedangkan Sulaiman Zakaria-Noor Charis P, meraih 41.304 suara.

Menonjol

Kemenangan menonjol calon petahana, terjadi di Siak, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti dan Rokan Hilir. Di Siak, Syamsuar-Alfedri, mendulang suara terbanyak di 13 kecamatan. Sedangkan Suharton-Syahrul, hanya menang di 1 kecamatan, yakni Bungaraya. Hasil hitungan cepat versi tim sukses Syamsuar-Alfedri, pasangan nomor urut 1 ini mampu mendulang suara 75.915 atau 59,85% dari total suara yang masuk. Sementara nomor urut 2 mendulang suara 50.936 atau 40,15%.

Di Indragiri Hulu, pasangan Yopi Arianto-Khairizal, meraih suara dominan. Perhitungan sementara kedua tim kemenangan, mencatat bahwa Yopi dan Khairizal unggul rata-rata di 11 kecamatan. Sedangkan Tengku Mukhtaruddin-Aminah, menang di tiga kecamatan yakni di Rengat, Pasir Penyu dan Peranap. Namun hingga kemarin, masih banyak suara yang belum masuk ke tim dari saksi-saksi yang bertugas di setiap TPS. Meski menang sementara, calon wabup Khairizal ternyata kalah di TPS tempatnya mencoblos yakni TPS 2 Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat.

Menurut Ketua PDIP Riau Kordias Pasaribu kepada **AZAM**, Yopi-Khairizal sementara unggul dengan 59,72% dari TM-Amin yang meraih

40,28%. “Ini data yang masuk ke tim PDI Perjuangan yang mengusung nomor urut 2,” terangnya.

Ditegaskan, usaha memenangkan Yopi dan Khairizal sudah maksimal dan prosentase suara sudah sesuai dengan target tim partai dan tim relawan. Sama dengan di Kabupaten Kepulauan Meranti. *incumbent* Irwan-Said Hasyim juga unggul mencolok atas Tengku Mustafa-Amyurlis. Dari laporan tim kemenangan Pro Bisa di Afifa Centre Jalan Banglas, pasangan Pro Bisa meraih suara 51.187 atau 57,78%. Sedangkan Bermutu mendapatkan 37.398 suara atau 42,22%. Partisipasi pemilih mencapai 88 % lebih.

Di Rokan Hilir, *incumbent* Suyatno-Jamiludin juga menang di 10 kecamatan. Raihan suara pasangan ini jauh meninggalkan Syafrudin-M Ridwan, Herman Sani-Taem Pratama dan Wan Syamsir Yus-Helmi Yazid. Meski demikian, sejauh ini belum didapat keterangan pasti terkait hasil sementara perolehan suara di Rohil.*

Aman dalam Balutan Pelanggaran

Walau pilkada serentak di Provinsi Riau berjalan aman namun bawaslu masih menemukan sejumlah pelanggaran dan kecurangan.

Hingga tahap pemungutan suara 9 Desember, proses pemilihan kepala daerah di sembilan kabupaten dan kota di Riau, berjalan dengan baik. Suasana juga masih kondusif. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, Dr. H. Nurhamin SPt MH, mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah, penyelenggara di daerah maupun aparat keamanan yang telah maksimal bekerja mensukseskan pilkada serentak.

Apresiasi serupa, kata Nurhamin, juga disampaikan KPU kepada masyarakat yang sudah memberikan hak politiknya pada hari pemungutan suara. Sebab apa yang dilakukan masyarakat itu menjadi salah satu kunci suksesnya pilkada. “Selaku penyelenggara di tingkat provinsi, kami memberi apresiasi kepada jajaran pemerinah daerah, penyelenggara dan juga aparat keamanan yang telah bekerja maksimal melancarkan pilkada serentak di Riau,” kata Nurhamin kepada **AZAM** pekan silam.

Ia memastikan bahwa tanggungjawab tak hanya sampai disitu. Semua pihak harus mengawal penghitungan suara di tingkat kecamatan dan di KPU kabupaten dan kota. Jika semua proses berjalan lancar sesuai jadwal serta tahapan yang telah disusun, maka pengusulan dan pengesahan kepala daerah terpilih dapat dilakukan 23 Desember 2015. Terkait tingkat partisipasi, Nurhamin mengaku cukup bervariasi. Namun, jika dirata-rata tingkat partisipasi pemilih di sembilan kabupaten dan kota yang berpilkada, berkisar diangka 60 hingga 70 persen. Sedangkan target secara nasional berada diangka 70,5 persen.

Soal partisipasi pemilih ini, Nurhamin menegaskan tidak bisa menyalahkan KPU saja, karena angka partisipasi itu dipengaruhi banyak faktor, antara lain budaya politik, persepsi masyarakat terhadap pemerintah, termasuk masalah ekonomi. “Yang paling penting, proses ini tidak dicerai dengan *money politics* dan hal-hal di luar ketentuan undang-undang,” ujarnya.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau mencatat pelaksanaan pilkada serentak di sembilan kabupaten dan kota di Riau, masih diwarnai beberapa pelanggaran dan kecurangan. Bahkan salah seorang Ketua KPPS langsung diberhentikan, karena kedapatan membuka kotak suara. Peristiwa ini terjadi di salah satu TPS di Kecamatan Mandau.

Pelanggaran juga ditemukan di Rokan Hulu (Rohul). Sebelum pelaksanaan pemilihan atau tepatnya pada masa tenang, Panwaslu Rohul menemukan adanya pembagian uang dari tim pemenangan salah satu pasangan calon yang jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah.

“Dari laporan panwaslu di kabupaten dan kota yang menggelar pilkada, masih saja ditemukan beberapa pelanggaran dan kecurangan. Jenis pelanggarannya macam-macam. Waktunya mulai dari masa tenang sampai hari pemungutan suara. Ada indikasi yang mengarah ke pidana, dan ini sudah kita serahkan ke Gakkumdu. Ada juga yang sedang kita proses,” kata anggota Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan kepada **AZAM**.

Rusidi berharap kepada seluruh unsur, baik penyelenggara, peserta bersama tim suksesnya untuk selalu bersikap jujur. Sehingga pilkada menghasilkan pemimpin yang berkualitas. “Jika semua kita bersikap jujur, saya yakin kepercayaan masyarakat terhadap hasil pilkada, akan semakin baik. Dan kepala daerah yang terpilih pun benar-benar figur yang menjadi pilihan rakyat. Bukan pasangan yang dipilih karena curang atau melanggar ketentuan,” kata Rusidi lagi.*

Harris Sumringah dan Tak Lengah

Walau penghitungan suara oleh KPU belum dimulai, data yang dirilis Koalisi Amanah Rakyat Pelalawan Bersatu (KARPB), pasangan Haza menang tipis atas pasangan ZA. “Ini kemenangan rakyat Pelalawan,” kata Harris.

Rabu, 9 Desember 2015. Sejak matahari menampilkan wajahnya, suasana di pusat ibukota Pelalawan, Pangkalan Kerinci terlihat sepi. Tak ada tanda-tanda kalau hari itu hari ‘pesta rakyat’, pemilihan bupati dan wakil bupati. Tak cuma jalan-jalan utama yang terlihat lengang dari aktifitas, lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga sepi pengunjung. Yang ada hanya petugas KPPS yang sesekali terlihat sibuk karena ada warga yang hendak menggunakan hak pilih.

Entah kurang sosialisasi atau karena aturan pilkada yang ribet, yang terlihat pelaksanaan pilkada senyap tanpa gairah. Akan tetapi, apapun kondisinya, helat politik itu tetap dilangsungkan. Namun, suasana berbeda terlihat di TPS 9 Terusan Baru, Pangkalan Kerinci. TPS ini, sejak pagi sudah dipenuhi oleh warga yang hendak mencoblos. Apalagi HM Harris, calon petahana, juga menggunakan hak suaranya di TPS ini. Sesuai dengan perkiraan banyak orang, pasangan Harris-Zardewan sukses mendulang suara di TPS, tempat mereka mencoblos.

Siang. Usai penghitungan suara di TPS, euforia kemenangan terlihat di markas tim pemenangan pasangan Harris-Zardewan di sekretariat DPD II Partai Golkar Pelalawan, Pangkalan Kerinci. Ratusan pendukung pasangan nomor urut 1 yang hadir di sana terlihat gembira ria. Dari penghitungan suara yang mereka rekap melalui saksi-saksi di TPS, pasangan Haza sukses meraup suara terbanyak.

Data Tim Haza, dari 12 kecamatan, 7 Kecamatan dimenangkan pasangan Haza. Pasangan ini meraup suara sebesar 51,06 Persen. Saat menggelar konfrensi pers usai pencoblosan, Ketua Tim Koalisi Amanah Rakyat Pelalawan Bersatu (KARPB), Tengku Zulmizan F Assegaf, mengumumkan kemenangan Haza.

“Kita menang di 7 Kecamatan, Ukui, Langgam, Kerumutan, Pangkalan Lesung, Pangkalan Kuras, Bandar Seikijang dan Bandar Petalangan. Kita menang dengan 68.320 suara dan ZA 65.496 suara,” kata Zulmizan di Sekretariat Golkar di Pangkalan Kerinci.

Ini pula agaknya yang membuat HM Harris terlihat santai saat masuk kantor keesokan harinya, Kamis (10/12). Tak hanya Harris, suasana kantor bupati Pelalawan juga terlihat ramai. Wajah para pegawai tampak cerah dengan senyum yang selalu mengembang. Pengaruh hasil hitung cepat menjadi alasan semua itu.

Bupati Pelalawan HM Harris yang kembali ‘ngantor’ seperti biasa, terlihat bersemangat dengan wajah yang sumringah. Menggunakan seragam olahraga, raut wajah yang sehari sebelumnya terlihat tegang, pagi itu terlihat happy. Tak bisa dipungkiri, semua disebabkan oleh perhitungan perolehan suara pilkada. “*Alhamdulillah*, sekarang sudah tenang sedikit menjalankan tugas,” tutur Harris dihadapan wartawan di kantor bupati saat itu.

Harris menegaskan, dirinya telah berkomitmen menuntaskan seluruh pekerjaan di akhir periode. Sikap tegas ini kembali ia ulangi saat **AZAM** menemuinya usai Sholat Jumat di Masjid Ulul Azmi, Pangkalan Kerinci. Katanya, bila hasil pleno KPU nanti tidak berubah dari hasil yang didapat timnya, dirinya sudah mempersiapkan beberapa program pembangunan prioritas demi kemajuan Kabupaten Pelalawan.

“Seperti yang kami sampaikan saat kampanye, soal pembangunan tinggal melanjutkan program yang telah ada. Tentu ada dari program tersebut yang diprioritaskan. Ini melihat situasi dan kondisi. Mana yang dirasa perlu dan mendesak dilaksanakan, kita lakukan segera. Yang jelas, pondasinya sudah kita bangun lima tahun lalu, kita tinggal

melanjutkannya saja,” urai Harris.

Terkait hasil pilkada, Harris mengaku timnya telah mempersiapkan segala sesuatu bila terjadi gugatan sampai ke MK. Yang jelas, Harris berharap pesta demokrasi yang telah usai ini tidak memunculkan konflik di tengah masyarakat. “Dalam pertandingan itu ada pihak yang kalah dan ada yang menang. Itu hal biasa terjadi. Kami sendiri, kemenangan ini merupakan kemenangan masyarakat Kabupaten Pelalawan. Karena itu, mari kita bersatu membangun daerah ini,” tambah Harris.

Hal senada juga dilontar Zardewan. Ketika dimintai komentarnya terkait hasil pilkada, ia berharap semoga hasil ini tidak mengalami perubahan saat penghitungan ulang di KPU. “Menang tipis lebih baik dari pada kalah tipis. Kita siap kalau pihak lawan menggugat ke MK, karena jalurnya memang begitu. Pun begitu, saya mengharapkan usai pilkada kita bersatu kembali membangun pelalawan. Jangan lengah.* [Jnol/ybs

Penghitungan Suara Sementara Pilkada Kabupaten Pelalawan Versi Harris-Zardewan

Kecamatan	Haris-Zardewan	Zukri-Anas Badrun
Ukui	8.926	6.035
Langgam	7.201	3.636
Kerumutan	6.321	3.809
Pangkalan Lesung	6.851	4.663
Pangkalan Kuras	10.861	9.356
Sikijang	3.152	2.727
Bandar Petalangan	3.779	3.336
Pelalawan	2.314	3.819
Bunut	2.980	3.286
Kuala Kampar	3.214	4.860
Teluk Meranti	1.432	5.922
Pangkalan Kerinci	11.332	14.045

Syamsuar Kembali Bertapak di Siak

Duet Syamsuar-Alfredi di Siak Sri Indrapura meraih suara terbanyak di pilkada serentak. Pasangan ini mengantongi 60% suara, meninggalkan jauh rival politiknya Suhartono-Syahrul.

“Drama politik” pemilihan kepala daerah langsung Kabupaten Siak 2015, berakhir sudah, Rabu (9/12). Dua pasang calon, Drs. H. Syamsuar, MSi- Drs H Alfredri, MSi dan Suhartono-Syahrul, yang bertarung di pilkada telah mengetahui hasil perolehan suara masingmasing. Meski baru hitungan cepat, setidaknya pasangan Syamsuar unggul telak setelah meraih 60% suara dari duet Suhartono.

Ketua Tim Pemenangan Syamsuar-Alfredri, Indra Gunawan, membenarkan data sementara hasil hitung cepat itu. Ia menegaskan, dari hitung cepat pasangan SUARA meraih sekitar 60 persen suara. Sementara Suhartono-Syahrul memperoleh 40 persen suara. Angka itu berdasarkan formulir C1 yang dikumpulkan para saksi di setiap TPS, dan diyakini tidak akan jauh berbeda dengan hasil pleno KPU Siak nanti.

“Kami yakin, hasil ini tidak akan jauh berbeda dengan hasil akhir KPU. Paling margin errornya sekitar satu persen saja. Sebab dasar kita adalah C1 dari para saksi kita, dan saksi kita sudah terlatih untuk itu,” ujar Indra Gunawan.

Politisi muda Partai Golkar ini menjelaskan, dari 747 TPS di 14 kecamatan, 131 desa dan kelurahan, Syamsuar-Alfredri unggul di 13 kecamatan. Hanya di satu kecamatan pasangan ini kalah, yakni Kecamatan Sabak Auh. “Dari data yang kita peroleh hasilnya seperti itu. Kita cuma kalah di Kecamatan Sabak Auh, itupun tipis. 13 Kecamatan lain kita unggul,” jelas Indra. Lelaki yang juga Ketua DPRD Siak ini

mengaku, raihan suara Syamsuar-Alfedri, sudah sesuai dengan target yang dipetakan oleh timnya.

Bila semua proses pilkada berjalan aman dan lancar sesuai tahapan yang disusun KPU, sebut Indra, diperkirakan 16 Desember KPU Kabupaten Siak akan menggelar pleno penghitungan akhir pilkada serentak.

Indra mengaku, walau duet Syamsuar-Alfedri hampir dipastikan kembali menduduki “tahta” Siak lima tahun ke depan, itu tak lantas membuat mereka jumawa. Menurutnya, kemenangan ini bukanlah kemenangan Syamsuar-Alfedri dan timnya, akan tetapi kemenangan seluruh masyarakat Siak. Ia berharap, seluruh tim pemenangan Syamsuar-Alfedri tidak terlalu euforia apalagi hitungan cepat belum hasil final. Akan tetapi masih ada beberapa tahapan lagi yang harus dilalui. Tugas tim dan masyarakat, terus mengawal dan mengawasi proses pilkada selanjutnya.

“Apapun hasil pilkada serentak, ini merupakan sebuah proses dimana kita bersama-sama mencari pemimpin terbaik untuk Kabupaten Siak. Lepas ada pasangan yang menang dan yang kalah, itu bagian dari proses,” ungkap Indra lagi.

Kepada penyelenggara, Indra juga berharap kiranya terus mempertahankan netralitas. KPU adalah wasit dalam sebuah pertandingan. Karenanya netralitas KPU dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sangat diharapkan. Profesionalitas KPU pada akhirnya dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas demi kemajuan Kabupaten Siak.

“Penyelenggara diharapkan tetap bekerja secara profesional, dan selalu menjaga netralitas. KPU itu diibaratkan sebagai juri dalam sebuah pertandingan. Kita berharap sikap netralitas ini terus dipertahankan KPU sampai proses pilkada berakhir,” tambah Indra.

Setelah mendapat kabar kemenangan dari tim pemenangan, Syamsuar langsung sujud syukur di Masjid Syahbuddin atau Masjid Sultan di sebelah makam Raja Sultan Syarif Qasim II. “Ini saya lakukan sebagai bentuk rasa syukur karena kembali dipercaya memimpin Siak. Saya memilih Masjid Sultan lantaran ini merupakan masjid bersejarah,” ungkap Syamsuar kepada sejumlah wartawan.

Tentang kekalahannya di Kecamatan Sabak Auh, Syamsuar mengaku tak terlalu mempermasalahkannya. “Tidak menjadi masalah, sebab yang kita khawatirkan di Kecamatan Tualang dan Kandis yang menjadi basis terbesar, ternyata kita juga menang,” tuturnya.

Atas kemenangan sementara itu, Syamsuar mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Siak karena telah mempercayainya kembali memimpin pembangunan Kabupaten Siak. “Ini bukan semata kemenangan saya, tetapi kemenangan masyarakat Siak, sebab masyarakat telah memilih dirinya memimpin Siak lima tahun ke depan,” tutur Syamsuar.

Syamsuar memastikan akan melanjutkan visi dan misi yang telah diutarakan kepada masyarakat. Ia juga meminta masyarakat dan tim tetap menjaga keamanan, dan jangan merayakan kemenangan ini secara berlebihan. Selain bersyukur terhadap hasil yang diraihinya, selaku bupati *incumbent*, Syamsuar juga menyampaikan rasa syukur karena pilkada serentak Kabupaten Siak berjalan aman, lancar dan tertib. Dan masyarakat antusias datang ke TPS menyalurkan hak politiknya.

Ia tak alpa mengapresiasi seluruh pihak yang ikut terlibat dalam pelaksanaan pilkada. Baik penyelenggara, pihak keamanan maupun seluruh unsur pemerintah daerah bersama masyarakat sehingga suasana pilkada berjalan kondusif.

“Kita patut bersyukur, Pilkada Siak berjalan aman, tertib dan lancar. Masyarakat juga antusias menyalurkan hak suaranya,” tegas Syamsuar.*

Suyatno Dipercaya Lagi di Rokan Hilir

Pasangan Suyatno-Jamiludin alias Sudin dipastikan melenggang ke kursi Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir. Mereka unggul 38.82 persen dari tiga pasangan lain. Yatno kembali dipercaya masyarakat mengubah wajah negeri ‘Seribu Kubah’.

Mengikuti jejak Syamsuar-Alfedri di Siak Sri Indrapura, *incumbent* Suyatno juga meraih suara terbanyak di Kabupaten Rokan Hilir. Pada pilkada serentak yang berlangsung Rabu (9/12), Suyatno yang berpasangan dengan Jamiludin unggul atas rival politiknya, Syafruddin-Ridwan, Wan Syamsir Yus-Helmi dan Herman Sani-Taem.

Data diperoleh **AZAM**, posisi Suyatno jauh di atas pasangan lain. Disusul kemudian pasangan Herman Sani-Taem 38.487 Suara (29,61%), Syafrudin-Mohamad Ridwan 23.733 Suara (18,26%) dan Wan Syamsir Yus-Helmi Jazid 17.296 Suara (13,31%). Hingga Jumat (11/12), jumlah suara masuk ke KPU tercatat 53,60% atau 708 dari 1.321 TPS. Partisipasi pemilih di Rohil cukup tinggi, mencapai 63,12%p dari total 214.193 pemilih. Suara sah 129.617, sementara suara tidak sah 3.952.

Suyatno-Jamiluddin unggul antara lain di Kecamatan Bangko (11.721), Tanjung Medan (5.415), Kubu (3.565), Balai Jaya (6.799), Bangko Pusako (11.123), Bagansinembah Raya (4.176), Pasir Limau Kapas (4.429). Kemudian Kecamatan Kubu Babussalam (3.501), Sinaboi (3.050), Pekaitan (2.292), Pujud (4.435), Tanah Putih Tanjung Melawan (2.347) dan Simpang Kanan (4.983). Sedangkan pasangan calon Wan Syamsiryus-Helmi Yazid sukses di dua kecamatan. Masing-masing Tanah Putih (7.985) dan Rantau Kopar (1.000). Herman Sani-Taem menang di tiga kecamatan, Rimba Melintang (5.460), Bagansinembah (8.266) dan Batu Hampar (1.710).

Walau di hitungan sementara unggul, Bupati Rokan Hilir Suyatno tak serta merta jumawa. Alasannya perhitungan tersebut masih bersifat sementara. Hasil final, kata Suyatno, menunggu pleno KPU. “Saya sudah dapat informasi. Bila benar tentu kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh masyarakat Rohil telah menggunakan hak suara secara baik dan sekaligus mensukseskan pilkada serentak di Rohil,” kata Suyatno kepada wartawan di Bagansiapiapi.

Ia berharap, semua pihak dapat menjaga ketertiban, dan tetap menunggu hasil perhitungan final KPU. “Kita apresiasi KPU juga aparat kepolisian. Semoga penghitungan di KPU suasana politik tetap aman dan kodusif,” tambah Suyatno.

Harapan senada disampaikan Jamiluddin. Kepada **AZAM** akhir pekan lalu Jamiluddin mengatakan, perhitungan sekarang masih bersifat sementara. Dirinya belum bisa sesumbar pasangannya adalah pemenang Pilkada Rohil 2015. “Ini masih sifatnya sementara, sebelum ada ada keputusan KPU, kita belum dapat memastikan bahwa kami pemenang pilkada,” ujar Jamiluddin. Walau demikian, mantan anggota DPRD Rohil ini tak bisa menyembunyikan rasa senangnya. Sese kali ia tertawa lebar ketika diajak **AZAM** berbincang-bincang.

Ketika disinggung soal total perolehan suara Suyatno-Jamiluddin, ia kembali mengatakan perhitungan oleh tim Sudin masih bersifat sementara. “Sebaiknya tanya ke tim kami, saya tak pegang angka-angkanya. Lagi pula ini masih bersifat sementara. Kita tunggu saja pleno KPU,” ujar pria berkulit agak gelap ini.

Jamiludin yakin, para pesaingnya akan menerima hasil Pilkada Rohil dengan *legowo*. Sebab, selain perolehan suaranya signifikan, pelaksanaan pilkada pun relatif aman tanpa adanya kecurangan. Ia berharap tidak ada sanggahan dari pasangan lain atas hasil pemilihan kepala daerah langsung ini ke MK.

Himbauan serupa datang dari Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Nasruddin Hasan. Kata Nasruddin, hendaknya seluruh calon berlapang dada menerima hasil akhir penghitungan suara. “Yang kalah

diharapkan mendukung pasangan yang menang. Bila ada paslon yang tak puas atas hasil akhir, janganlah membawa permasalahan ini ke MK. Selain membuang energi, juga berbiaya tinggi. Namun demikian semua berpulang kepada masing-masing pasangan,” ujar politisi Partai Golkar ini. Pertarungan pilkada, lanjutnya, sudah selesai. Apa pun hasilnya, ayooo, kita dukung pemimpin kita untuk Rohil yang lebih baik lagi,” ujarnya berharap.

Sesuai Prediksi

Kemengan pasangan Sudin sudah diperkirakan sebelumnya. Banyak pihak memprediksi Suyatno kembali memimpin Rohil. Pasalnya, Suyatno adalah bupati *incumbent* yang populer di tengah masyarakat. Sampai kini ia masih memiliki catatan baik sehingga masyarakat tetap menginginkan Suyatno melanjutkan pembangunan di negeri ‘Seribu Kubah’ itu.

Suyatno juga mendapat nilai tambah karena didampingi Jamiluddin, pasangannya yang tak kalah hebat. Dengan menggandeng Jamiludin, kata Raja Jeldi, Dosen STIE Bagan Siapi-api, pasangan ini diyakini lebih banyak mendulang suara.

“Kemenangan Suyatno-Jamiludin sudah kita prediksi sebelumnya. Keunggulan mereka antara lain karena baik *incumbent* maupun calon wakil sama-sama populer,” ujar alumni Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Raja Jeldi mengatakan, Suyatno-Jamiludin diuntungkan karena pesaingnya di pilkada tak terlalu kuat. Wan Syamsir Yus, misalnya meski mantan pejabat senior di Provinsi Riau dan pernah menjadi Wali Kota Dumai, tetapi tak begitu mengkar di Rohil. Herman Sani pun begitu. Lama bertugas di Pekanbaru, Jakarta dan terakhir di Bengkalis. Warga Rohil sendiri tidak mengenal betul sosok Herman Sani. Demikian pula Syafruddin belum bisa mengalahkan popularitas dan kekuatan *incumbent*.

Raja Jeldi berharap, kemenangan pasangan Sudin hendaknya dapat diterima oleh pasangan lain. Selain selisih suara yang cukup

jauh, pelaksanaan pilkada tergolong tertib, aman dan lancar. “Demi pembangunan Rohil, lebih baik pasangan yang kalah menerima hasil pilkada,” ujarnya.*

Tak Kuasai Mandau dan Pinggir Herliyan Minggir

Duet Amril Mukminin-Muhammad menjadi satu-satunya pasangan yang berhasil menumbangkan pasangan *incumbent* di Pilkada Serentak Bengkalis. Kekalahan Herliyan karena tak kuasai suara di Kecamatan Mandau dan Pinggir.

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis, Amril Mukminin-Muhammad sedikit dapat bernafas lega. Pasalnya, dalam hitungan cepat paslon nomor urut 1 ini berada di posisi puncak dengan raihan suara berkisar pada margin 42-46%.

Kepada **AZAM** Riza Zuhelmi, Wakil Sekretaris Tim Pemenangan AM-Mantap (Amanah, Takwa dan Profesional) menjelaskan, dari inventarisasi data yang dikumpul tim, Amril Mukminin-Muhammad berada di posisi teratas. Sementara dua pasangan lainnya, bertengger di urutan yang sama yakni 27 persen. “Dari data yang terkumpul, suara pasangan kita berada di posisi 42-46%, disusul Herliyan-Reza Pahlevi 27% lebih dan Sulaiman Zakaria-Noor Charis Putra 27% lebih. Angka pastinya belum kita rilis resmi,” ujar Riza.

Sumber data hitungan suara, dijelaskan Riza, berasal dari rekapitulasi formulir C1 para saksi di tiap TPS. Walaupun ada kesalahan penulisan di formulir D1, selisihnya tidak akan jauh berbeda. “Kita ingin sekali merilis angka perolehan suara AM-Mantap, akan tetapi supaya tidak mengaburkan penghitungan KPU, kita tahan terlebih dahulu,” tegas Riza. Ia memastikan, timnya akan terus mengawal hasil pleno sampai dilaksanakannya pleno kabupaten oleh KPU.

Riza menjelaskan, AM-Mantap yang diusung PKS, PKB, PBB, PKPI dan Nasdem ini, unggul telak di dua kecamatan. Yakni Kecamatan Mandau

dan Pinggir dengan perolehan suara mencapai 52 persen lebih. Kemudian posisi ketiga di Kecamatan Bengkalis, posisi kedua di Kecamatan Bantan. Sementara di Bukit Batu berada pada posisi ketiga, di Siak Kecil posisi kedua, Rupert posisi ketiga dan Rupert Utara posisi kedua.

Sesuaiakah perolehan itu dengan target tim? Menurut Riza, target sudah terpenuhi. Sebab dari hasil *mapping* dan pemantauan tim di lapangan, AM-Mantap hanya mantargetkan cukup menang di dua kecamatan, Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir.

“Alhamdulillah sesuai harapan kita. Dari pemetaan dan pemantauan situasi di lapangan, kita hanya mentargetkan menang di Mandau dan Pinggir. Itu pun sejalan dengan elektabilitas pasangan,” jelasnya.

Riza mengakui, partisipasi pemilih pada pilkada serentak tahun ini relatif sama dengan pemilu sebelumnya. Dalam catatan tim, 40 persen pemilih tidak menggunakan hak pilih, atau berkisar 153 ribu dari 371 ribu pemilih yang terdaftar di DPT. Artinya, 200 ribu lebih pemilih datang kemudian mencoblos kertas suara di TPS.

Hal senada diungkap Penjabat Bupati Bengkalis, H Ahmadsyah Harrofie. Menurut Ahmadsyah, proses pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis berlangsung aman, nyaman, dan tertib. Dari pantauannya ke beberapa TPS di sejumlah kecamatan, seperti Kecamatan Mandau, Pinggir dan Rupert, kata Achmadsyah, masyarakat cukup antusias menyalurkan hak politiknya. Begitu juga laporan dari Sekdakab dan Dandim yang melakukan pemantauan ke TPS-TPS di Kecamatan Siak Kecil dan di Kecamatan Bengkalis.

“Rakyat bersenang-senang menggunakan hak politiknya tanpa tekanan. Apa yang dikatakan dengan pesta rakyat benar-benar tergambar dari situasi 9 Desember lalu. Tidak ada suasana mencekam. Begitu selesai pemilihan, warga kembali berduyun-duyun datang ke TPS menyaksikan penghitungan suara. Dari hasil penghitungan suara tergambar raut wajah senang dan juga sedih. Itu hal yang wajar,” ujar Achmadsyah.

Sama dengan Riza, Achmadsyah juga mengatakan bahwa partisipasi pemilih relatif sama dengan daerah lain. Yakni di atas 50 persen. Dari 371 ribu lebih pemilih yang terdaftar di DPT, warga yang datang ke TPS menggunakan hak pilihnya berkisar 200 ribu orang. Tingginya partisipasi ini karena kerja keras semua pihak. Antara lain pemerintah daerah, penyelenggara pilkada, tim sukses, tokoh masyarakat, pemuda termasuk media massa.

Diakui, memang hasil penghitungan cepat baik dari tim sukses maupun beberapa lembaga survey menempatkan pasangan nomor urut 1 berada pada urutan tertinggi dengan perolehan suara sekitar 46 persen. Disusul pasangan nomor urut 2, dan nomor urut 3 dengan persentase yang hampir sama, yakni 27 persen.

Achmadsyah mengatakan, hasil resmi penghitungan suara ada pada pleno KPU Kabupaten Bengkalis. Ia berharap kepada masyarakat dapat mengawal proses ini sampai KPU mengumumkan dan menetapkan pemenang pilkada. "Hasil sementara harus terus dikawal oleh masing-masing pihak. Pleno di tingkat kecamatan sudah dilakukan, namun untuk menentukan pemenang kita harus menunggu pleno KPU Kabupaten. Rencananya pleno tingkat kabupaten dilaksanakan 17 Desember depan," katanya.

Selaku Pj Bupati Bengkalis, Achmadsyah berharap kepada tiga pasangan calon dapat memahami bahwa pemilihan yang telah dilakukan merupakan cerminan dari kehendak rakyat. Dan melihat kesemuanya itu sebagai bentuk dari proses yang harus dilalui bersama. Pilkada bukan kemenangan paslon, bukan juga kemenangan tim sukses melainkan kemenangan seluruh masyarakat Bengkalis. Karena itu, siapapun nanti terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, ia bukanlah bupati dan wakil bupati suatu kelompok atau satu golongan saja, tetapi pemimpin seluruh masyarakat Bengkalis.*

BAGIAN XVIII

SPS
Pusat Penerbitan Press

أغكاتن ذريات أنق ملايو



AZAM



**'TAHTA' SIAK UNTUK
SYAMSUAR-ALFEDRI**

Drs. H. Syamsuar, M.Si

Drs. H. Alfredri, M.Si

'Tahta' Siak untuk Syamsuar-Alfedri

Pasangan nomor urut satu sukses meraih suara terbanyak setelah KPU mengetok palu rekapitulasi hasil penghitungan suara pilkada. 'Tahta' Siak kembali dipercayakan kepada duet petahana yang tangguh: Syamsuar-Alfedri.

Hingga berakhirnya rapat pleno, Kamis (17/12), setidaknya ada beberapa fakta menarik dari pelaksanaan Pilkada Siak 2015. Fakta itu tak ditemui di delapan pilkada serentak lain di Provinsi Riau.

Pertama, hanya di Siak satu-satunya pasangan petahana yang maju dan kembali berpasangan. Yakni calon Bupati dan Wakil Bupati, Syamsuar-Alfedri. Mereka berjaya setelah meraih suara terbanyak. *Kedua*, prosentase raihan suara Syamsuar-Alfedri adalah yang tertinggi dibanding prosentase perolehan suara di delapan pilkada lain. Hasil pleno menetapkan, Syamsuar-Alfedri meraih 59,60 persen suara, sementara Suhartono-Syahrul mendapat 40,40, atau selisih 19,20 persen.

Ketiga, Syamsuar-Alfedri satu-satunya pasangan yang nyaris menyapu bersih kemenangan di semua kecamatan. Dari 14 kecamatan di Siak, pasangan dengan jargon SUARA ini menjadi peraih suara terbanyak di 13 kecamatan. Syamsuar-Alfedri cuma kalah di satu kecamatan, yakni Kecamatan Bungaraya.

Keempat, pelaksanaan Pilkada Serentak Siak 2015 disebut-sebut sebagai pemilihan kepala daerah paling lancar, aman dan kondusif. Fakta ini terlihat mulai dari tahapan penetapan pasangan calon sampai ke pleno rekapitulasi penghitungan suara yang juga lancar, aman dan kondusif.

Memang pleno KPU sempat molor setengah jam dari jadwal, karena undangan telat datang. Menariknya, pleno yang dipimpin Ketua KPU,

Agus Salim itu, terlihat sepi. Gedung Tengku Mahratu yang sebenarnya tak begitu besar, juga tak berisi penuh. Kursi yang disediakan lebih banyak kosong. Di luar gedung suasana serupa juga sama, tak begitu ramai.

Ditemui **AZAM** di sela-sela acara, Abdul Hamid, anggota KPU Riau yang menghadiri pleno di Siak, memberi penilaian yang sama. Menurutnya, salah satu penyebab sepiunya pleno KPU lantaran besarnya perbedaan perolehan suara antarpasangan calon.

Kondisi ini, lanjut Hamid, juga dipengaruhi kesiapan aparat keamanan dalam mengamankan gedung. “Perolehan suara kan jauh, ditambah kesiapan aparat keamanan mengamankan lokasi ini. Pintu masuk ke lokasi ini ditutup sehingga yang hadir pun menjadi terbatas,” tuturnya.

Tak sekedar sepi, 14 PPK yang membacakan rekapitulasi penghitungan suara, tak sekalipun mendapat interupsi dari saksi pasangan calon. Baik dari saksi pasangan nomor urut 1 maupun nomor urut 2. Kedua saksi baru berbicara ketika diminta pendapatnya tentang hasil rekapitulasi dari PPK.

Dari 14 kecamatan, hanya dua kali saksi pasangan nomor urut 2 yang memberi pendapat, selebihnya menerima rekap penghitungan suara PPK. Pendapat yang disampaikan juga bukan menyangkut hasil penghitungan, akan tapi lebih dari pelaksanaan pilkada serentak.

Paling Kondusif

Setelah 14 PPK membacakan hasil rekapitulasi penghitungan suara, Ketua KPU Siak, Agus Salim menetapkan Syamsuar-Alfredri sebagai peraih suara terbanyak. Dan sebelum menutup pleno, Agus Salim meminta sejumlah pihak menyampaikan sambutan, termasuk Kapolres dan Dandim Siak.

Kapolres AKBP Ino Harianto SIK yang berada di podium bersama Dandim Siak mengatakan, Pilkada Serentak Siak 2015 berjalan sesuai aturan sehingga semua tahapan berlangsung aman, tertib dan lancar. Kapolres memuji, pelaksanaan Pilkada Siak paling aman dan kondusif di

Riau. “Pilkada Siak paling aman dan kondusif dibanding pilkada lain di Riau,” ujar Kapolres.

Menurut Kapolres kondisi ini dipengaruhi oleh komitmen pasangan calon yang siap dipilih dan siap untuk tidak dipilih. Kedua pasangan calon telah memegang komitmen deklarasi pilkada damai,” ungkapnya.

Unggul 31.849 Suara

Jumlah pemilih Pilkada Serentak Siak 2015 tercatat 287.400 jiwa yang berasal dari: DPT 281.444 jiwa, 991 jiwa dari Daftar Pemilih Tambahan 1 (DPTb1), 259 dari Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) dan 4.706 dari Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb2). Dari 287.400 pemilih, hanya 168.459 yang menyalurkan hak politiknya. Atau ada sekitar 40 persen lebih masyarakat Siak tidak menggunakan hak pilihnya. Dari 168.459 yang menggunakan hak pilih, suara sah tercatat 165.803, sementara suara tidak sah 2.656.

Berdasarkan rekapitulasi, Syamsuar-Alfedri yang diusung PAN, Hanura, Nasdem, PKS dan PKPI meraih 98.826 suara. Sementara Suhartono-Syahrul mendapat 66.977 suara. Atau berselisih 31.849 suara. Dari hasil tersebut, KPU menetapkan Syamsuar-Alfedri meraih suara terbanyak. Pasangan petahana ini menang di 13 kecamatan, dan kalah di Kecamatan Bungaraya. Kemenangan terbesar diraih Syamsuar dari Kecamatan Tualang dengan 24.437 suara, sedangkan Suhartono-Syahrul meraih 14.747 suara.

Adapun raihan suara masing-masing pasangan di kecamatan lain adalah Syamsuar-Alfedri: Siak 6.505, Sungai Apit 8.050, Minas 5.524, Sungai Mandau 2.827, Dayum 6.784, Kerinci Kanan 7.023, Bungaraya 5.676, Koto Gasib 5.554 dan Lubuk Dalam 4.821. Kandis 12.609, Mempura 3.811, Sabak Auh 3.089, Pusako 2.116 suara.

Sementara Suhartono-Syahrul: Siak 4.648, Sungai Apit 5.333, Minas 4.130. Sungai Mandau 909, Dayun 5.458, Kerinci Kanan 2.924. Bungaraya 6.174, Koto Gasib 3.245, Lubuk Dalam 3.247. Kandis 9.400, Mempura 3.076. Sabak Auh 2.671, Pusako 1.015 suara.*

Berita Acara Ditolak Hitungan Suara Diterima

Saksi pasangan nomor urut 2 Suhartono-Syahrul menolak meneken berita acara pleno rekapitulasi perhitungan suara Pilkada Siak oleh KPU. Tapi menyangkut perhitungan suara, mereka menyatakan menerima.

Sabar Sinaga boleh dikata menjadi ‘bintang’ pada pleno penghitungan suara KPU Siak di Gedung Maharatu, depan Istana, Kamis silam. Pria yang menjadi saksi pasangan Suhartono-Syahrul ini, kontan menjadi pusat perhatian.

Kata-kata yang keluar dari mulut Sabar didengar dan ditunggu oleh mereka yang hadir di ruangan itu. Maklum, rapat pleno penghitungan suara oleh KPU hari itu, menentukan kelangsungan pilkada dan nasib Kabupaten Siak lima tahun ke depan. *Nah*, Sabar Sinaga adalah saksi dari pasangan yang kalah, Suhartono-Syahrul.

Beberapa kali Sabar Sinaga melakukan interupsi mempertanyakan hasil perhitungan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Namun apa yang menjadi keberatan pihak Sinaga sepertinya tidak signifikan sehingga perhitungan kembali dilanjutkan untuk kecamatan lain di Siak.

“Apakah saksi pasangan nomor urut dua bisa menerima?,” tanya ketua KPU Siak Agus Salim kepada Sinaga usai mendengarkan sertifikat perhitungan suara PPK Kecamatan Sabak Auh. “Ya, bisa diterima,” jawab ujar Sinaga disambut tepuk tangan pengunjung dan peserta pleno.

Meski berada dipihak yang kalah, Sinaga terlihat tetap tenang dan santun. Kepada **AZAM** di sela-sela pleno, ia mengatakan perolehan suara yang dibacakan pada pleno KPU Siak hari itu tidak ada yang berubah

dari data yang ada pada kubu pasanganurut nomor 2. Dengan demikian, ia dapat menerima hasil perhitungan tersebut.

Hanya saja, secara keseluruhan, pihaknya belum dapat menerima hasil Pilkada Siak. Itu pula sebabnya, mengapa ia tidak ikut menekan berita acara rekapitulasi perhitungan suara di pleno KPU. “Perhitungan suara tidak ada yang berubah. Namun kami belum dapat menerima hasil pilkada karena proses pilkada di beberapa tahapan kami kira banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan,” ujarnya.

Sinaga mengatakan, kehadiran dirinya di pleno KPU memang mewakili pasanganurut 2. Namun soal langkah apa yang akan diambil terhadap hasil perhitungan suara, dia tak dapat memberi jawaban. “Saya tak dapat menjawab itu. Lebih baik tanya ke ketua tim atau langsung ke pasangan calon. Meski begitu, yang dapat saya informasikan bahwa tim sudah mempersiapkan langkah-langkah. Antara lain, mengumpulkan bukti-bukti kecurangan dan kejanggalan di setiap tahapan pilkada,” ujarnya.

Menjelang sholat Ashar, pleno rekapitulasi suara KPU Siak sudah selesai. Sinaga yang juga diberi kesempatan memberi kata sambutan di acara penutupan sore itu mengatakan, perlunya perbaikan kinerja penyelenggara pilkada. Terutama KPU di setiap tingkatan. Sebab, dirinya mendapati sejumlah lembaran C6 atau undangan untuk mencoblos kepada pemilih tidak didistribusikan dengan baik. “Ini yang kita teliti, apakah ada unsur kesengajaan dari orang-orang tertentu menahan C6 tersebut,” ujar Sinaga.

Informasi diperoleh **AZAM** di Siak, pasangan Suhartono-Syahrul sudah dapat menerima hasil Pilkada Siak. Mereka tidak akan mempermasalahkan atau tidak akan menggugat hasil pilkada karena perolehan suara yang terpaut cukup jauh. Lagi pula, menurut ketentuan Mahkamah Konstitusi, MK akan menerima keberatan dari pihak yang kalah jika perolehan suara tidak terpaut jauh. Bila lebih dari 1.5 persen selisih perolehan suara, MK tidak menerima gugatan dari pihak yang kalah.

“Pasangan calon sudah tidak mempermasalahkan. Kabarnya, tim suksesnya yang kini sedang mendorong supaya mengajukan keberatan,” ujar sumber **AZAM** di Siak yang enggan namanya disebut.

Bukti Masyarakat Masih Ingin Syamsuar-Alfredri

Pilkada Serentak 2015 di Siak Sri Indrapura menjadi bukti, masyarakat masih menginginkan Syamsuar-Alfredri kembali memimpin negeri berjudul 'Istana' itu lima tahun mendatang.

Pleno KPU yang menghitung suara Pilkada Siak, Kamis (17/12), menetapkan Drs H Syamsuar, MSi sebagai bupati dan Drs H Alfredri, MSi menjadi wakil bupati terpilih. Pasangan dengan nomor urut 1 ini unggul atas rival politiknya Suhartono-Syahrul dengan selisih raihan suara, 31.849 (98.826 atau 59,60% vs 66.977 atau 40,40%).

Kepada **AZAM** di Posko Pemenangan, Sekretaris Tim Pemenangan Syamsuar-Alfredri, Ikhsan, ST mengaku puas dengan hasil pilkada. Ini bukti masyarakat Siak masih menginginkan jagoannya kembali memimpin Kabupaten Siak lima tahun ke depan. Ikhsan menegaskan, tim telah bekerja maksimal menggunakan berbagai taktik dan cara namun tetap merujuk kepada undang-undang dan aturan berlaku. "Dari hasil pleno KPU sudah terlihat hasil kerja keras tim. Mayoritas masyarakat masih menghendaki *duet* SUARA kembali memimpin Siak," ujarnya.

Ikhsan menjelaskan, target awal tim pemenangan Syamsuar-Alfredri berkisar diangka 65 persen. Namun demikian kami tetap puas dengan perolehan suara yang dicapai karena hasil tersebut tak terlalu jauh dari target yang ditetapkan. Yang pasti target menang sudah diraih. "*Alhamdulillah* masyarakat masih memberi kepercayaan kepada Syamsuar dan Alfredri. Ini menjadi bukti tim sudah bekerja maksimal," sebut Ikhsan.

Diakui, kelemahan dan kekurangan pelaksanaan pilkada masih terbilang wajar. Apalagi pilkada serentak baru pertama kali digelar. Semua

kelemahan itu, ujar Ikhsan, hendaknya dapat menjadi sarana instropeksi dan koreksi bagi seluruh pihak terkait dalam melaksanakan pilkada serentak tahap berikutnya. “Kami mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara, terutama KPU, yang sudah bekerja keras menjalankan tahapan pilkada serentak di Siak. Tim juga mengapresiasi panwaslu, kepolisian dan seluruh masyarakat. Proses demokratisasi di Kabupaten Siak dapat berjalan secara demokratis, transparan, aman dan lancar,” tutur Ikhsan.

Meski KPU telah menetapkan pasangan Syamsuar-Alfredri peraih suara terbanyak, Ikhsan memastikan kerja Tim Pemenangan tidak berhenti sampai disitu. Tim tetap mengawal hasil dan sekaligus mengantisipasi bila ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Kami siap dengan berbagai kemungkinan yang terjadi. Kami masih tetap bekerja hingga Syamsuar-Alfredri dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Siak 2016-2021,” ungkapnya.

Ikhsan menghimbau seluruh masyarakat Siak kembali bersatu, menghilangkan segala perbedaan selama pilkada berlangsung. Kompetisi sudah usai. Wajar dalam sebuah kompetisi ada yang menang dan ada yang kalah, itu bagian dari proses demokrasi. Pembangunan di Kabupaten Siak tidak hanya bisa dilakukan Syamsuar-Alfredri, melainkan harus melibatkan semua unsur masyarakat.

Di tempat terpisah, Ketua PAN Kabupaten Siak, Fairus Ramli mengungkapkan rasa syukurnya atas kemenangan Syamsuar-Alfredri. Senada dengan Ikhsan, Fairus juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat telah berpartisipasi mensukseskan pilkada. “Sebagai ketua partai pengusung utama Syamsuar-Alfredri, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap paslon nomor urut 1 sehingga memperoleh suara terbanyak,” ujarinya kepada **AZAM** di Siak.

Fairus mengaku, ia bersama kader PAN, tak merasa kesulitan “menjual” *duet* Syamsuar-Alfredri selama proses pilkada berlangsung. Sebab pasangan ini sudah memimpin Siak hampir lima tahun. Ia berharap,

keduanya tetap memegang dan menjalankan amanah masyarakat secara baik. Lebih dari itu, merangkul pihak yang kalah. Artinya, perbedaan yang muncul selama pilkada tidak lantas membuat hubungan silaturahmi sesama menjadi terputus.

Dijelaskan, amanah yang diberi masyarakat melalui pilkada harus dijadikan modal oleh Syamsuar-Alfedri membangun Siak, menyelesaikan berbagai persoalan yang membelenggu negeri ini. Antara lain, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan dan infrastuktur. Lima tahun memimpin Siak, terang Fairus, telah cukup bagi pasangan ini untuk mempetakan beragam masalah. Dan pada periode kedua Syamsur dan Alfredri bertugas mengurai benang kusut pembangunan yang terpetakan di periode pertama.

Fairus berkeyakinan, berbekal pengalaman kepomongan duet Syamsuar-Alfedri mampu membawa Siak lebih maju dari masa kepemimpinan di periode pertama. Juga, mampu mensejajarkan negeri Siak dengan kabupaten lain di Riau yang sudah maju. "Sebagai daerah otonom yang baru dimekarkan, kami bangga dengan kemajuan yang diraih Siak dalam lima belas tahun terakhir. Dan, akan lebih bangga lagi pabila Pak Syamsuar-Alfedri, mampu membuat lompatan baru untuk kemajuan Siak," tambah Fairus.

Karena itu, Fairus berharap Syamsuar-Alfedri dapat mempersatukan kembali pertikaian politik yang terjadi selama pilkada. Lalu memposisikan diri sebagai pemimpin Siak untuk semua masyarakat. "Kemenangan Syamsuar-Alfedri di pilkada bukan kemenangan partai pengusung, tidak pula kemenangan tim sukses, atau kemenangan masyarakat yang memilihnya. Akan tetapi kemenangan seluruh masyarakat," tutur Fairus berapi-api.*

KPU Ketok Palu Panwaslu Tutup Buku

Bak bergayung bersambut. Ketok palu Komisi Pemilihan Umum Siak usai rekapitulasi penghitungan suara pilkada, disambut panwaslu dengan tutup buku. 18 Pengaduan pelanggaran selesai ditindak-lanjuti. Satu pengaduan masih menunggu bukti.

Dugaan banyak pihak, Pilkada Serentak 2015 menyisakan banyak pekerjaan rumah, tak selamanya benar. Tengoklah ke Siak Sri Indrapura, satu dari sembilan daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah di Provinsi Riau. Kabupaten berjudul ‘Negeri Sultan’ itu terbilang sukses menggelar pesta demokrasi lokal. Selain aman, partisipasi pemilih juga di atas 60 persen. Lain dari itu, pleno KPU yang merekapitulasi hasil pilkada nyaris diterima pasangan yang kalah. Setidaknya itu dibuktikan dengan diterimanya raihan suara oleh masing-masing calon.

Sukses pilkada di Siak tak lepas kinerja penyelenggara. Utamanya KPU dan Panwaslu. Dua lembaga ini dinilai sukses melaksanakan pekerjaan politik dan hukum selama tahapan pilkada berlangsung. Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu), misalnya, yang bertugas menindak-lanjuti laporan pelanggaran pilkada, mengaku menerima 19 pengaduan. Ke-19 laporan itu, 18 sudah ditindak-lanjuti, satu laporan masih menunggu alat bukti dari pelapor.

Menurut Ketua Panwaslu Siak, Aries Susanto, satu laporan itu bukan karena tak diselesaikan, akan tetapi lantaran baru masuk ke panwaslu. “Ke-18 laporan yang sudah ditindak-lanjuti, tak satupun yang memenuhi unsur pelanggaran, baik pelanggaran administrasi, sengketa maupun kemungkinan tindak pidana,” kata Aries kepada **AZAM** usai mengikuti pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara KPU Siak di Gedung Mahratu, pekan silam.

Adapun penyebab laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran, dijelaskan Aries, disebabkan beberapa hal. Antara lain tidak adanya saksi, uraian kronologi yang tidak tepat. Juga materi yang disampaikan dalam laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran. Sementara satu laporan yang masih dalam proses, menunggu kelengkapan bukti dari pelapor. "Pelapor mengajukan keberatan adanya penyalahgunaan jabatan oleh pasangan calon *incumbent*. Panwas belum merekomendasi laporan tersebut karena belum diplenokan," ujar Aries.

Aries Susanto menilai, Pilkada Siak relatif berjalan aman, lancar dan sukses. Tidak ada gejolak dan gerakan-gerakan yang membuat suasana sosial dan politik menjadi keruh. Laporan pelanggaran yang disampaikan ke panwaslu, menjadi bukti bahwa peserta pilkada mengerti hukum. Jalur yang ditempuh adalah pengaduan, bukan tindakan sendiri yang bersifat melawan hukum.

Soal tak ditekennya berita acara rapat pleno KPU oleh saksi pasangan calon nomor urut 2, Aries memastikan penolakan itu tak akan mempengaruhi hasil. Tanpa diteken saksi, pleno sah secara hukum. "Penolakan hak saksi, tapi tidak mempengaruhi hasil pilkada," ujarnya. Menanggapi rencana gugatan pihak yang kalah, Aries menyatakan bahwa gugatan tersebut harus diajukan sekurang-kurangnya tiga tambah dua hari sejak 16 Desember 2015. Bila dalam rentang waktu yang tersedia tidak dilakukan maka, keberatan dianggap kadaluarsa.

Ketua KPU Siak, H Agus Salim juga mengungkapkan kegembiraan dan rasa syukurnya, karena semua tahapan pilkada berjalan baik tanpa kendala berarti. Ia berterima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras mensukseskan pilkada serentak di Kabupaten Siak. Dikatakan, sejak tahapan dimulai sampai rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara, semua berjalan baik, aman dan lancar. Tentu ini tak terlepas dari dukungan berbagai pihak," katanya kepada **AZAM** usai pleno.

Agus Salim menjelaskan, setelah pleno KPU akan menetapkan calon Bupati dan calon Wakil bupati Siak terpilih. Bila tidak ada gugatan dari pasangan calon, penetapan dapat dilakukan beberapa hari ke depan.

“Rencana, penetapan kita jadwal Selasa, 22 Desember. Jika ada gugatan kita siap menghadapinya, dan penetapan calon terpilih kita undur setelah gugatan selesai,” ungkapnya.

Terkait beberapa keberatan dari saksi nomor urut 2 terutama menyangkut pendistribusian formulir C6 yang dinilai tidak terdistribusikan secara baik, Agus Salim memastikan bahwa pihaknya bersama KPPS telah berupaya maksimal menyampaikan C6. Namun diakui memang ada kendala teknis di lapangan, seperti alamat yang tidak ditemukan, atau yang bersangkutan sudah pindah alamat dan tidak ada di rumah.

Yang pasti, kata Agus Salim, KPU Siak beserta seluruh jajaran sudah berupaya maksimal menjalankan tugas dan kewajiban. Kalau terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan, itu bukan kami lakukan secara sengaja.

“Sebagai penyelenggara kami berada diposisi yang netral. Dimata kami kedua pasangan calon sama, tidak ada perbedaan. Saya berharap pilkada serentak yang baru pertama kita laksanakan sekaligus menjadi sarana pembelajaran untuk pelaksanaan pilkada di masa akan datang,” tambah Agus Salim.

Mari kita hormati dan kita hargai hasil ini. KPU berterima kasih kepada masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya 9 Desember lalu. Kita lupakan semua perbedaan dan sekarang kita bersatu lagi untuk membangun Kabupaten Siak.*

Yang Menang Jangan Tepuk Dada

Alhamdulillah. Pilkada Kabupaten Siak berjalan baik. Suasana kebatinan masyarakat tetap terjaga. Saya himbau warga, mari kita dukung bupati dan wakil bupati terpilih, kata Wan Anwar, Ketua Lembaga Adat Melayu. Bangun sportifitas dan jangan tepuk dada.

Menurut Wan Anwar, meski proses pilkada diwarnai dengan persaingan antarcalon dan tim sukses, demokrasi tetap berjalan dinamis. Tertib dan lancar. Dan sekarang pesta politik itu sudah usai. Seluruh elemen masyarakat harus menghilangkan perbedaan dan kembali bersatu membangun Siak.

“Pak Syamsuar dan Pak Alfredri telah dipilih rakyat secara demokratis. Kita sukseskan program-program pembangunan yang mereka rencanakan untuk kemajuan Siak mendatang,” kata Wan Anwar mengajak.

Terkait hasil akhir pilkada, Wan menyebut hasil tersebut tidak jauh beda dengan penghitungan yang dilakukan PPK. Jadi, hitungan KPU dalam pleno Kamis kemaren, murni perolehan suara rakyat untuk pasangan Syamsuar-Alfredri. Raihan suara itu, dalam pandangan Wan mengindikasikan, program-program pembangunan yang dilaksanakan Syamsuar-Alfredri selama satu periode kepemimpinan diterima dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

“Buah dan hasil kerja keras Syamsuar dan Alfredri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Siak periode sebelumnya dinikmati masyarakat. Jadi ketika pasangan ini kembali maju pada pilkada Siak, masyarakat menginginkan kepemimpinan tersebut dilanjutkan kembali supaya program yang belum sempat terlaksana bisa dilanjutkan lagi lima tahun mendatang. Masyarakat berharap, rakyat sejahtera dan Kabupaten Siak lebih maju dari kondisi sekarang,” ungkapanya.

Wan Anwar mengaku bangga dengan berbagai kemajuan yang diraih selama ini. Masyarakat hidup saling rukun tanpa pernah ada gesekan diantara sesama meskipun di sini berdiam beragam agama, suku dan adat isitadat. Kondisi demikian harus tetap dipertahankan untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Siak.

Saya berpesan, jaga ketenangan dan kedamaian. Bupati dan Wakil Bupati terpilih hendaknya terus bekerja menjalankan amanah rakyat. Mudah-mudahan pasangan ini selalu diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah SWT dalam menjalankan tugas dan kewajibannya selaku pemimpin, Sehingga apa yang menjadi harapan bersama yakni terwujudnya Kabupaten Siak yang lebih maju dapat terwujud dalam waktu tak terlalu lama.

“Ini amanah rakyat. Pegang dan jalani amanah tersebut sebaik-baiknya. Jadilah pemimpin bagi seluruh golongan di kabupaten ini. Mudah-mudahan cita-cita kita bersama menjadikan Siak lebih maju dan masyarakatnya hidup sejahtera dapat terwujud,” pungkas Wan Anwar.

Hal senada dikatakan tokoh masyarakat Riau, Azaly Djohan. Disebutnya, pilkada merupakan sarana bagi masyarakat menentukan pemimpin. Siapa yang terpilih mesti dihormati karena itu adalah pilihan rakyat. Yang kalah hendaklah sportif dan dapat menerima kekalahan. Sementara yang menang jangan menepuk dada.

Menurut pria yang kini aktif di Pramuka Riau ini, perbedaan pilihan atau dukungan di hendaknya tidak menjadikan masyarakat terkotak-kotak. Dengan berakhirnya penghitungan suara di KPU, sebaiknya semua elemen masyarakat terutama yang memiliki kepentingan di pilkada hendaknya menyudahi perbedaan. “Semua harus fokus pada kemajuan negeri, bukan lagi mempertajam perbedaan,” ujar Azaly Djohan.

Soal hasil pleno KPU, menurut Azaly Djohan, sudah merupakan cerminan keinginan masyarakat. Hasil tersebut perlu dihormati karena itu merupakan kehendak masyarakat. Selain itu, sebagai orang Islam, kata Azaly, kita juga harus ingat bahwa semua hasil pilkada adalah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak meninggikan derajat seseorang,

maka dalam sekejap dia akan tinggi. Demikian sebaliknya, kalau Allah berkehendak menghinakan seseorang, dalam sekejap pun dia juga akan hina.

Tentang kemenangan Syamsuar-Alfredri, menurut Azaly Djohan, itu tanda bahwa masyarakat masih menginginkan pasangan tersebut melanjutkan kepemimpinan di Siak. Dan ini juga sudah diprediksi banyak orang sebelumnya. Sebab sebagai pasangan *incumbent*, Syamsuar-Alfredri selama menjabat sudah menunjukkan kinerja yang baik. “Kita pun dapat menyaksikan seperti apa Syamsuar-Alfredri memimpin Siak. Banyak yang telah berubah. Pembangunan yang dijalankannya, dapat dirasakan dan dinikmati masyarakat,” ujar Azaly Djohan.

Bukan hanya pembangunan di bidang infrastruktur, akan tetapi juga di bidang-bidang lain, termasuk bidang agama, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Di bidang infrastruktur, urai Azaly Djohan, Syamsuar berhasil merangkai kecamatan dan desa. Tak ada lagi daerah yang benar-benar terisolir di Siak. Semuanya sudah dapat dilalui dengan baik karena pemerintah daerah membangun jalan serta jembatan untuk masyarakat.

“Kalau dahulu ke Pekanbaru memakan waktu hingga 5 jam, kini cukup ditempuh dua jam saja,” ujar pria yang pernah menjadi Ketua LAM Riau ini. Pembangunan bidang keagamaan juga meningkat. Ini dibuktikan dengan peningkatan pembangunan rumah ibadah, sekolah agama, pesantren, majelis taklim dan lain-lain. Begitu pun dengan kesehatan dan pendidikan. Syamsuar dan Alfredri sangat konsen dengan pembangunan di kedua bidang ini.

Yang menjadi daya tarik dari pasangan *incumbent* ini, tegas Azaly Djohan, keduanya selalu seiring sejalan membangun Kabupaten Siak. Tidak pernah terdengar mereka pecah kongsi atau berseberangan. “Kalau mereka sudah seiring sejalan di kantor, imbasnya tentu terhadap pembangunan dan pelayanan masyarakat,” tambah Azaly Djohan.

Terkait keberatan pasangan yang kalah terhadap hasil pilkada, ditegaskan Azaly Djohan, semua adalah hak yang bersangkutan. Tetapi

BAGIAN XIX

SPS  

أشكاتن ذريات أنق، ملايو

AZAM

MAHKAMAH KONSTITUSI



**Rame-rame Menggugat ke MK
PILKADA CURANG
PASLON BERANG**

Zulkri Misran Hafith Syukri

Selamat Natal 25 Desember 2015 & Tahun Baru 2016

Pilkada Curang Calon Berang

Delapan dari sembilan daerah di Provinsi Riau yang berpilkada serentak 9 Desember lalu, rame-rame mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka merasa dicurangi oleh lawan politik. KPU pun terpaksa menunda penetapan bupati dan wakil bupati terpilih sampai mahkamah mengeluarkan keputusan final dan mengikat.

Rabu, 9 Desember 2015. Untuk pertama, Indonesia melaksanakan pemilihan kepada daerah (pilkada) secara serentak di 269 daerah. Terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 36 kota. Pilkada ini menjadi tonggak sejarah baru perjalanan demokrasi di negeri yang berusia 70 tahun ini.

Dari ratusan daerah itu, sembilan berada di Provinsi Riau. Yakni Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hulu, Kuansing, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak dan Kota Dumai. Sesuai tahapan pilkada, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), menetapkan 26 pasangan calon (paslon) kepala daerah dan calon wakil kepala daerah sebagai peserta Pilkada Tahun 2015.

Peserta terbanyak adalah Dumai. Yaitu lima paslon yang diusung empat gabungan partai politik dan satu calon independen. Menyusul kemudian Rohil dengan empat paslon. Tiga kabupaten lain (Rohul, Bengkalis dan Rohul) masing-masing diikuti tiga paslon. Sementara Pelalawan, Meranti dan Inhu, cuma diikuti dua pasangan calon. Dari semua paslon, terdapat tiga calon berstatus petahana. Mereka ialah Syamsuar (Siak), HM Harris (Pelalawan) dan Irwan Nasir (Meranti).

Selain di tiga kabupaten itu, pilkada juga diikuti oleh bupati dan wakil walikota yang pernah menjabat pada periode sebelumnya, Yopi Arianto (Indragiri Hulu), Herliyan Saleh (Bengkalis), Agus Widayat (Dumai) dan

Hafith Syukri di Rohul yang berpasangan dengan Nasrul Hadi, ketua DPRD. Cuma di Kuansing petahana yang tidak ikut bertarung. Namun Bupati Sukarmis jauh-jauh hari telah menyatakan dukungannya kepada *duet* Indra Putera-Komperensi. Begitu juga Achmad di Rokan Hulu yang mendukung Hafith Syukri-Nasrul Hadi.

Rame-rame Menggugat

16-18 Desember. Sembilan KPU masing-masing daerah usai melaksanakan pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara pilkada serentak. Hasilnya, KPU menetapkan sembilan paslon peraih suara terbanyak. Mereka adalah Zulkifli AS-Eko Suharjo (Dumai), Suyatno-Djamiluddin (Rohil), Amril Mukminin-Muhammad (Bengkalis), Irwan Nasir-Said Hasyim (Meranti), Syamsuar-Alfedri (Siak), Harris-Zardewan (Pelalawan), Yopi Arianto-Khairizal (Inhu), Mursini-Halim (Kuansing) dan Suparman-Sukiman (Rohul).

Ditemui **AZAM**, Kamis (17/12) usai memimpin rapat pleno, Ketua KPU Siak, H Agus Salim, SH, memastikan tahapan pleno rekapitulasi telah berakhir dan segera menjadwalkan penetapan paslon terpilih. “Kalau tidak ada gugatan, kita segera menjadwalkan penetapan bupati dan wakil bupati terpilih,” jelas Agus Salim optimis. Optimisme serupa juga datang dari ketua-ketua KPU lain.

Namun apa nyata. Paslon yang kalah rame-rame menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut catatan, ada delapan paslon yang mengajukan permohonan pembatalan penetapan KPU. Akibatnya, KPU harus menunda rencana penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sampai ada keputusan MK. Cuma Kota Dumai satu-satu daerah dimana calon yang kalah tidak menggugat rekapitulasi KPU.

Adapun delapan daerah lain bergerak cepat ke MK. Indra Putra-Komperensi (IKO/Kuansing) yang meraih 63.196 suara atau 39,56 persen, terpaut 348 suara atau 0,22 persen dari Mursini-Halim yang mendapat 63.544 suara (39,78 persen). Zukri Misran-Abdul Anas Badrun (Pelalawan) kalah dari pasangan Harris-Zardewan yang memperoleh 68.618 suara

(50,56 persen), sementara Zukri-Anas mengantongi 67.080 suara (49,43 persen). Atau selisih 1.538 suara (1,14 persen).

Begitu pun Hafith Syukri-Nasrul Hadi. Dari total 207.967 suara sah, Hafith-Nasrul memperoleh 88.100 suara (42,36 persen), sedang rival politiknya Suparman-Sukiman meraih 89.464 suara (43,02 persen), berselisih 0,66 persen. Di Rokan Hilir, meski selisih suara 10,82 persen dengan perbandingan 90.938 suara untuk Suyatno-Djamiluddin dan 65.410 suara buat Herman Sani-Taem Pratama, tapi Herman tak tinggal diam. Ia pun mengikuti langkah Zukri-Anas dan Hafith-Nasrul ke Mahkamah Konstitusi.

Setali tiga uang dengan Tengku Mustafa-Amyurlis di Kepulauan Meranti. Merasa tak puas raihan suaranya yang berbeda 12,70 persen dari Irwan, Tengku tetap melayangkan gugatan ke MK. Langkah serupa diikuti pula oleh Tengku Mukhtaruddin-Hj Aminah di Indragiri Hulu. Walau suaranya terpaut jauh atau berselisih 16,42 persen dari Yopi Arianto, tak mengurungkan niat Tengku mencari keadilan ke MK. Hal serupa dilakukan Sulaiman Zakaria-Noor Charis Putra. Kendati perolehan suaranya mencapai 18,00 persen dari Amril Mukminin-Muhammad, Sulaiman juga mencoba berjuang nasib ke MK. Demikian pula dengan Suhartono-Syahrul di Siak. Selisih suara 19,60 persen dari Syamsuar-Alfedri mendorong Suhartono menempuh jalur hukum membatalkan keputusan KPU yang telah merekap penghitungan suara.

Ketentuan Undang-undang

Pilihan kedelapan paslon maju ke Mahkamah Konstitusi, memang hak konstitusional mereka sebagai warga negara seperti diatur UU No 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Di pasal 142 poin b UU itu, jenis gugatan itu dikategorikan sebagai sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan KPU kabupaten dan kota.

Pasal 157 ayat 1-2 dijelaskan, perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus yang dibentuk sebelum

pelaksanaan pemilihan serentak. Ayat 3, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh MK sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Adapun ketentuan gugatan merujuk pada Pasal 158 ayat 2 yang menyatakan, peserta pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan. *Pertama*, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar dua persen dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kabupaten/kota.

Poin b, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 persen dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kabupaten/kota. Lalu poin c menjelaskan, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000-1.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 persen dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kabupaten/kota.

Poin d, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 persen dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kabupaten/kota.

Kini, nasib kedelapan paslon peraih suara terbanyak itu berada ditangan MK. Apakah Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan permohonan mereka, atau sebaliknya monolak? Kita tunggu setelah tahun berganti.*

Paslon Menggugat KPU Merapat

Menghadapi gugatan delapan paslon, KPU Riau bersama KPU kabupaten/kota siapkan sejumlah langkah, termasuk menyiapkan alat bukti.

Dapat dipastikan penetapan calon kepala daerah terpilih di delapan kabupaten, tertunda oleh gugatan sengketa hasil dan proses pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Kepastian itu disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, Dr H Nurhamin, SPt, MH, yang dihubungi **AZAM**, Kamis (24/12). Ia menegaskan, penetapan calon kepala daerah terpilih menunggu keputusan final MK.

Nurhamin menjelaskan, 21 Desember lalu merupakan hari terakhir rekap gugatan yang masuk ke MK, dan dari Riau ada delapan pasangan calon yang menyatakan menggugat. Hanya Dumai yang tidak mengajukan gugatan, walaupun ada perkara pidana yang diajukan ke Gakumdu dan sudah masuk ke Kejaksaan.

“Kita tidak bisa memaksakan kehendak dengan segera menetapkan kepala daerah terpilih. Sesuai ketentuan bila ada salah satu pasangan calon yang menempuh upaya hukum, maka tahapan berikutnya harus menunggu keputusan tetap dari upaya hukum tersebut,” ujarnya.

Untuk menghadapi gugatan, Nurhamin memastikan KPU Riau telah menyiapkan beberapa langkah serta terus berkoordinasi dengan KPU di delapan kabupaten yang akan berperkara di MK. Adapun proses atau tata beracara di MK sudah ada aturan yang mengaturnya.

Di MK nanti, kata Nurhamin, masing-masing pihak akan memberi argumentasi berikut alat bukti yang dimiliki, baik pihak teradu maupun

pengadu. Ada juga pemohon yang mengajukan sangkaan kepada pihak penyelenggara yang dianggap tidak netral atau tidak independen.

Langkah yang ditempuh KPU antara lain, sebut Nurhamin, pada tanggal 29 Desember, KPU Riau akan melakukan pertemuan dengan delapan KPU kabupaten yang berperkara di MK. Tujuannya, meminta keterangan dan informasi apa sesungguhnya yang terjadi pada setiap tahapan pilkada serentak di masing-masing kabupaten.

“Hasil dari pertemuan itu, akan kita buat rumusan sistem penjawaban, melengkapi segala alat bukti dan bagaimana cara beracara di MK sebagai termohon, serta menyiapkan segala sesuatu sesuai ketentuan MK, ketentuan UU, dan PKPU. Kita sudah membentuk posko di lantai III KPU Riau, yang menjadi sekretariat *update* data perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU),” ungkapnya.

Mengenai gugatan delapan paslon, menurut Nurhamin, itu merupakan hak apalagi dalam sebuah proses pilkada yang menyangkut banyak orang. Sesuai UU No 8 tahun 2015 penanganan perkara di MK tidak saja menyangkut sengketa perselisihan rekapitulasi suara, akan tetapi, sekaligus MK merupakan tempat proses inkonstitusional dan konstitusional yang berkaitan dengan hak pilih atau yang berkaitan dengan orang-orang yang menggunakan hak pilih. Satu orang saja yang tidak sesuai bisa diperkarakan.

“Makanya perkara yang tidak berkaitan dengan selisih penghitungan suara, juga masuk ke ranah proses perselisihan yang berdampak pada hasil. Misalnya orang yang seharusnya tidak memilih, tapi bisa memilih. Orang yang bisa memilih kemudian dihalang-halangi orang per orang atau pihak penyelenggara. Proses tersebut dapat berdampak kepada hasil perolehan suara salah satu pasangan calon. Ini juga bisa di bawa ke MK,” jelasnya.

Memang ada aturan, MK hanya melayani gugatan bila terdapat selisih suara minimal 0,5-2 persen dengan kompersi jumlah penduduk diatas 1 juta jiwa, kemudian diatas 500 ribu hingga 1 juta jiwa. Namun perlu diingat, tegas Nurhamin, dalam proses ini tidak ada pengecualian, sebab

MK juga akan mengakomodir jika terjadi kecurangan karena 1 suara saja, tidak boleh menciderai proses pemilu.

“Kami optimis gugatan termohon tidak seluruhnya dipenuhi MK. Untuk tiga kabupaten memang sudah terpenuhi unsur dua persen, Pelalawan, Kuansing, dan Rohul, karena hasil suara terpaut tipis. Khusus untuk KPU di tiga kabupaten itu, kami sudah instruksikan supaya mempersiapkan alat bukti dan segala sesuatunya tentang tahapan, mulai dari tingkat bawah hingga tingkat kabupaten,” jelas Nurhamin lagi.*

Kuansing, Rokan Hulu, Pelalawan Tak Terima Dicurangi

Tiga dari sembilan kabupaten yang berpilkada di Riau, mengajukan permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Yakni Kuantan Singingi, Rokan Hulu dan Pelalawan.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan, permohonan pembatalan hasil rekapitulasi dapat dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak 0,5 persen sampai 2 persen dari penetapan hasil penghitungan suara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten. Meski begitu, Mahkamah Konstitusi tetap menerima pendaftaran pengajuan gugatan, akan tetapi MK akan kembali memilah gugatan yang akan dikabulkannya.

Seperti sudah tersiar, berdasarkan hitungan KPU pasangan calon Putra-Komperensi dari Kabupaten Kuantan Singingi, bertaut suara 0,21 persen dari *duet* Mursini-Halim. Sementara paslon Hafith Syukri-Nasrul Hadi di Rokan Hulu berselisih suara 0,66 persen dari peraih suara terbanyak Suparman-Sukiman. Dan, Zukri Misran-Anas Badrun kalah tipis 1,13 persen dari pasangan Harris-Zardewan di Pilkada Pelalawan.

Selain percaya diri mengajukan gugatan karena selisih suara yang sedikit, pasangan calon juga memiliki sejumlah daftar pelanggaran yang diduga dilakukan pihak yang menang. Berbekal daftar itu, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati di ketiga kabupaten, resmi mendaftarkan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi.

Gugatan tersebut didaftarkan ke MK tak lama setelah KPU usai menggelar rapat pleno. Dengan didaftarkannya gugatan, tahapan pilkada berakhir. Dan, Komisi Pemilihan Umum harus menunda penetapan pasangan calon terpilih sampai MK menerbitkan keputusan terkait gugatan masing-masing pihak.

“Iya, kita sudah daftarkan gugatan ke MK atas hasil Pilkada Kuansing,” ujar Indra didampingi Komperensi kepada wartawan di Taluk Kuantan, pekan silam.

IKO, jargon politik Indra Putra-Komperensi di Pilkada Kuantan Singingi, menggunakan hak konstitusionalnya dengan menempuh jalur hukum karena tidak menerima hasil pilkada. Pasangan ini pun meminta para pendukungnya untuk tetap menjaga solidaritas, silaturahmi, keamanan, ketertiban dan keharmonisan di tengah masyarakat.

“Jangan ada yang melakukan tindakan-tindakan bersifat memancing kerusuhan dan keributan sehingga merusak cita Kuansing di mata Indonesia,” ujar Indra. Pendukung IKO juga diminta menjunjung tinggi adat istiadat di Kuansing dan meningkatkan komunikasi antar sesama.

“Mari kita menunggu proses yang sedang berlangsung. Apapun hasilnya, itulah yang terbaik untuk Kuansing,” pungkas Indra. IKO mendaftarkan permohonan gugatan bersama Ketua Tim IKO, Andi Putra dan Masdar sebagai sekretaris.

Soal materi gugatan yang disampaikan ke MK, pertama yang bersifat kuantitatif yakni terkait dengan perolehan suara, kedua kualitatif yakni proses penyelenggaraan dan pelanggaran yang terjadi.

Penyelenggaraan pilkada dinilai banyak terdapat kelemahan yang merugikan pasangan IKO. Ada ratusan catatan keberatan atas pelaksanaan pilkada yang telah mereka sampaikan ke KPU sebagai bagian dari keputusan pleno KPU.

Rokan Hulu

Sejurus senafas dengan IKO di Kuansing, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Hafith Syukri-Nasrul Hadi juga menyatakan, pelaksanaan pilkada di Rohul diwarnai banyak kecurangan. Melalui Ketua Tim pemenang, Imam Zamroni, Hafith menyatakan alasan di ajukannya gugatan ke MK atas hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum Rohul. Mereka tak terima atas perolehan suara tertinggi yang diraih Suparman-Sukiman dengan selisih 1.364 suara.

Pengajuan gugatan ke MK, karena ada sejumlah dugaan kecurangan selama proses pencoblosan hingga rekapitulasi suara di tingkat kabupaten. “Diduga ada kecurangan saat pencoblosan di Kecamatan Bonai Darussalam, dan itu salah satu materi yang diajukan pihaknya ke MK. Kecurangan lain, nanti akan dipaparkan di persidang MK,” terang Imam.

Katanya, tim sudah mengumpulkan bukti-bukti dugaan kecurangan Pilkada Rohul. Meski demikian, diterima atau tidaknya gugatan pasangan Hafith-Nasrul nanti akan menjadi keputusan pihak MK.

Pelalawan

Dari Pelalawan dilaporkan, pasangan Zukri Misran-Abdul Anas yang kalah tipis dari Harris-Zardewan juga melakukan gugatan ke MK. Hasil pleno menyimpulkan, pasangan nomor urut 1, Harris-Zardewan memperoleh 68.618 suara atau 50,57 suara sah. Sementara pasangan nomor urut 2, Zukri Misran-Abdul Anas mendapat 67.080 suara (49,43%) dari 135.698 suara sah.

Kedua rival politik itu, berselisih suara 1.538 atau 1,13 %. Atas dasar perselisihan dan, adanya dugaan pelanggaran yang ditemukan penggugat, Zukri-Anas Badrun melayangkan gugatan ke MK.

Sayangnya, hingga liputan ini diturunkan, Sabtu (26/12) belum diketahui tentang materi gugatan, serta bukti-bukti yang mereka kumpulkan terkait dugaan pelanggaran. Zukri masih menutup diri menyebutkan secara rinci materi gugatannya. “Kita melihat selama pilkada banyak kecurangan yang merugikan pasangan kami. Oleh karena itu kita putuskan membawa masalah ini ke MK,” kata Zukri Misran.

Pasangan yang diusung PDI Perjuangan ini mengaku memiliki bukti kuat adanya kecurangan selama pilkada. Kecurangan tersebut disinyalir membuat suaranya berkurang. “Apa bukti kecurangannya, nanti kita beberkan di MK,” tegasnya. Iia mengucapkan terimakasih kepada warga

Pelalawan yang telah memberikan suaranya kepada pasangan Zukri Misran-Abdul Anas.

“Kita semua senang Pilkada Pelalawan berjalan lancar. Kami berterimakasih kepada semua pihak yang sudah mensukseskan pesta demokrasi ini,” ucapnya.*

Bersemangat Walau Suara Galau

Selisih suara yang tinggi tak pengaruhi semangat pasangan calon yang kalah menggugat ke MK. Mereka tetap berjuang menggunakan hak-hak konstitusionalnya.

Bila di Rokan Hulu, Kuantan Singingi dan Pelalawan selisih suara antara peraih suara terbanyak dengan paslon yang kalah hanya terpaut sedikit, tak demikian dengan lima kabupaten/kota lain di Riau. Selisih suaranya cukup tinggi. Meski demikian, pasangan yang kalah tetap mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Padahal Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan, permohonan pembatalan hasil rekapitulasi dapat dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak 0,5 persen sampai 2 persen dari penetapan hasil penghitungan suara KPU provinsi atau KPU kabupaten.

Di Kabupaten Rokan Hilir, Herman Sani-Taem dengan selisih suara 10,82 persen menggugat peraih suara terbanyak Suyatno-Djamaluddin. Begitu pun di Kepulauan Meranti. Pasangan Mustafa-Armayulis dengan 12,70 persen juga mengajukan gugatan atas kemenangan Irwan-Said Hasyim. Sementara di Siak, *duet* Suhartono-Syahrul dengan tautan 19,61 persen juga menyoal keunggulan Syamsuar-Alfedri.

Tak kalah hebat di Bengkalis. Sulaiman Zakaria-Noor Charis Putra yang kalah atas pasangan Mukminin-Muhammad (18 persen) juga mengajukan permohonan pembatalan rekapitulasi suara ke MK. Di Indragiri Hulu sikonnya sama, selisih suara Tengku Mukhtaruddin-Aminah dengan Yopi-Khairizal sebesar 16,42 persen juga berlanjut ke MK.

Kelima gugatan sengketa pilkada itu sudah diterima Mahkamah Konstitusi dan segera diputus atau di sidang dalam waktu dekat. MK sendiri menerima ratusan lebih gugatan pasangan calon dari berbagai provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia yang kalah dalam pilkada serentak. Gugatan tak serta merta ditolak, tapi setelah diterima dilakukan penelitian oleh majelis hakim.

Pendaftaran gugatan dimulai 18-21 Desember untuk pilkada kabupaten/walikota. Sementara untuk pilkada tingkat gubernur 19-22 Desember. Sementara pemeriksaan kelengkapan permohonan/gugatan dilakukan pada 21 Desember untuk kabupaten/kota, dan 22 Desember tingkat gubernur. Tanggal 31 Desember-3 Januari, perbaikan kelengkapan permohonan/gugatan pilkada (gubernur, bupati/walikota). Sementara 4 Januari, pencatatan permohonan/gugatan pilkada dalam buku registrasi perkara konstitusi (BPRK).

4-6 Januari, penyampaian salinan permohonan/gugatan kepada pihak termohon/tergugat dan pihak terkait. Pada tanggal ini juga, MK memberikan informasi jadwal sidang kepada penggugat, tergugat dan pihak terkait. 7-12 Januari, sidang perdana yang didahului dengan pemeriksaan perkara. 8-13 Januari pengajuan jawaban dari pihak termohon/tergugat dan pihak terkait. Tanggal 13 Januari-8 Februari, pemeriksaan sidang dalam sidang panel. 8-14 Februari, pembahasan perkara dan pengambilan putusan dalam rapat pemusyawaratan hakim. 10-14 Februari, penyusunan draf putusan. Dan, 15-17 Februari, pembacaan putusan.

Terstruktur dan Massif

Bagaimana akhir gugatan pasangan calon yang terpaut jauh perolehan suaranya? Kita tunggu putusan MK. Tugas paslon adalah mempersiapkan alat bukti untuk memperkuat materi hukum gugatan ke MK. Pilkada Siak, misalnya, yang dimenangkan *incumbent* digugat atas tuduhan pelanggaran ketentuan KPU yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). “Kita sudah mengajukan permohonan ke MK,” kata Ali, Ketua Tim Suhatono-Syahrul.

Ali menjelaskan, keberatan pihaknya sudah dilaporkan lebih awal ke Panwaslu Kabupaten Siak, namun disebabkan tidak ada tanggapan dari pihak terkait, maka pihaknya mengajukan gugatan ke MK. “Tentang apa saja yang kami adukan, silahkan tanya ke panwaslu,” kata Ali.

Ketua Panwaslu Siak kepada **AZAM** beberapa waktu lalu mengaku, laporan yang masuk ke institusinya tidak memenuhi unsur pelanggaran. Sehingga mereka merasa tak perlu menindaklanjutinya.

20 Pelanggaran

Kemenangan Suyatno-Jamiluddin di Rokan Hilir juga belum bisa ditetapkan KPU sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. Itu karena pasangan ini diduga oleh lawan politiknya melakukan banyak pelanggaran. Menurut Tim Advokasi Hukum Paslon Bupati dan Wakil Bupati Rohil Herman Sani-Taem Pratama, pihaknya mengajukan gugatan kecurangan pilkada ke Mahkamah Konstitusi.

Tim advokasi mencatat, selama proses pilkada serentak, paslon Suyatno melakukan 20 pelanggaran yang kesemua pelanggaran itu sudah mereka laporkan ke Panitia Pengawas Pemilu Rokan Hilir. “Tanggal 20 Desember malam, kuasa hukum kami telah mengajukan gugatan ke MK. Kami juga sudah minta KPU menunda pengumuman penetapan kemenangan paslon petahana,” jelas M Ajimi, Relawan Paslon Herman-Taem.

Selisih 16 Persen

Tengku Mukhtaruddin-Aminah di Inhu juga mengajukan gugatan. Walau selisih suara Mukhtaruddin dengan Yopi terpaut 16%, namun paslon ini tetap ngotot. Mereka tidak puas atas hasil pilkada karena mengaku banyak mengantongi kecurangan. Dan, memilih penyelesaian sengketa melalui MK.

Tim Pemenangan TM-Amin, Dody menilai proses Pilkada Inhu yang mengakibatkan kekalahan pada kubu TM-Amin, banyak diwarnai

kecurangan termasuk oleh penyelenggara pilkada. Juga ada *money* politik. Keikut-sertaan penyelenggara pilkada berkampanye, dugaan keterlibatan oknum PNS hingga ketidak transparanan pelaksanaan perhitungan suara di berbagai TPS.

Tunda Penetapan

Akibat gugatan ke MK, penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah di delapan kabupaten di Riau harus ditunda. Kabupaten Bengkalis, misalnya, sedianya KPU akan menetapkan calon terpilih namun disebabkan adanya gugatan dari Sulaiman Zakaria- Noor Charis Putra, maka penetapan tersebut ditunda. Pasangan ini menggugat kemenangan Amril Mukminin-Muhammad dengan selisih suara 18,00 persen.*

Hanya Tiga Kabupaten Selisih Suara di Bawah 2 %

Banyak perkara pilkada yang hasilnya tak berubah walaupun telah dilakukan pemilihan ulang. Hasil akhir penghitungan suara selalu sama dengan rekapitulasi awal KPU. Tapi kok masih banyak calon kepala daerah yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Riau, Dr Mexsasai Indra mengatakan, tak semua permohonan sengketa hasil Pilkada 9 Desember lalu, dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, hanya gugatan yang memenuhi syarat undang-undang saja yang diterima MK.

“Agar permohonan gugatan sengketa hasil pilkada dikabulkan MK, pemohon harus bisa memenuhi salah satu dari dua aspek. *Pertama*, aspek kuantitatif dan *kedua* aspek kualitatif,” kata Mexsasai kepada **AZAM** Jumat (25/12) yang dihubungi via telepon.

Aspek kuantitatif, menurut Mexsasai, pihak pemohon bisa mengajukan permohonan pembatalan hasil pilkada jika selisih suara sesuai ambang batas yang ditetapkan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang.

Menurut Pasal 158 ayat 2 UU Nomor 8, peserta pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan-ketentuan. Nah ketentuan itu sudah dirincikan di poin-poin selanjutnya..

Mex melanjutkan, ketentuan tersebut diukur dari jumlah penduduk dalam kabupaten maupun kota yang ada di daerah tersebut. Apabila makin banyak jumlah penduduknya maka makin kecil pula rasio persentasi maksimum selisih suara yang harus dipenuhi.

“Daerah dengan penduduk 0 hingga 250 ribu itu selisih maksimal sebesar 2 persen. 250 ribu hingga 500 ribu itu sebesar 1,2 persen. Kemudian 500 ribu hingga 1 juta itu maksimal 1 persen. Dan terakhir, untuk daerah lebih dari 1 juta jiwa maksimal selisih suara yang harus dipenuhi itu sebesar 0,5 persen dari total keseluruhannya,” jelas Mexsasai.

Aturan pembatasan ini dipertegas oleh undang-undang karena mengingat perkara sengketa hasil yang ditangani MK seringkali tak berubah dari penetapan yang dibuat oleh KPU. Hal ini dibuat agar tak semua perkara bisa diperkarakan.

“Banyak perkara yang hasilnya tak berubah walaupun dilakukan pemungutan ulang suara. Ketetapanannya seringkali tak berubah dengan hasil KPU. Makanya dibuatlah aturan ini supaya semuanya tak asal menggugat. Terlalu banyak kandidat yang membabi buta ingin menggugat ke MK,” tandas Mexsasai.

Mexasasai memprediksi, lima kabupaten/kota dari delapan kabupaten/kota di Provinsi Riau yang mengajukan gugatan ke MK tidak memenuhi persyaratan obyek sengketa selisih suara di pilkada sesuai pasal 158 Ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 2015. “Seperti yang saya katakan tadi, permohonan pembatalan hasil rekapitulasi dapat dilakukan bila terdapat perbedaan paling banyak 0,5 persen hingga 2 persen dari penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU provinsi/kabupaten/kota,” ungkapnya.

Sedangkan untuk permohonan gugatan diajukan paling lama 3x24 jam sejak penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang diumumkan oleh KPU provinsi/kabupaten/kota. “Semua persyaratan tertuang dalam pasal 158 Ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 2015. Hak semua orang untuk menyampaikan gugatan, akan tetapi kita tetap berjalan sesuai ketentuan UU. Kalau tidak sesuai ya bisa gugur,” jelasnya.

Sambung Mexsasai, dari delapan kabupaten/kota yang mengajukan gugatan ke MK hanya ada tiga kabupaten yang memenuhi kriteria. “Hanya tiga kabupaten yang selisih suaranya tidak melebihi batas persyaratan, yaitu Kabupaten Kuantan Singingi, Rokan Hulu dan Pelalawan. Selebihnya selisih suara lewat dari 2 persen,” tuturnya.*

Ada Calon Keluar dari *Range* UU

Bawaslu Riau bersama panwas kabupaten/kota mengaku siap memberi keterangan di Mahkamah Konstitusi. Semua keterangan bertitik tolak dari kerja pengawasan selama proses pilkada berlangsung, dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) di sembilan kabupaten/kota yang menggelar pilkada serentak telah selesai melaksanakan pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara, namun penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih belum dapat dilakukan.

Itu karena delapan pasangan calon di delapan kabupaten mengajukan permohonan gugatan ke MK terkait hasil perolehan suara dan proses pilkada. Cuma KPU Dumai yang aman dari gugatan, dan dapat melaksanakan pleno penetapan paslon terpilih.

Menurut Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau Rusidi Rusdan, pilkada masih diwarnai beberapa pelanggaran dan dugaan praktek *money politics* di beberapa daerah. Bawaslu bersama panwaslu kabupaten yang akan berperkara di MK, siap memberikan keterangan dalam persidangan.

Dijelaskan Rusidi, jika ada gugatan dalam pilkada, posisi bawaslu ataupun panswaslu adalah sebagai pihak pemberi keterangan bila diminta. "Jadi prosedurnya MK meminta ke Bawaslu RI agar menghadirkan panwaslu untuk memberikan keterangan dan biasanya itu terjadi pada sidang ketiga atau keempat dengan agenda mendengarkan keterangan dari panwaslu," ujarnya.

Diakui Rusidi, setiap calon diberikan hak dan kesempatan menempuh upaya hukum terkait hasil maupun proses pilkada. Dan menggugat ke MK

merupakan upaya hukum terakhir. Tata cara gugatan telah diatur dalam Undang-Undang Perselisihan Hasil Pemilu (PHP). Hanya saja, kata Rusidi, dalam UU No 1 juncto 8 tahun 2015 ada persyaratan formil dan materil yang harus dipenuhi para penggugat. Antara lain persentase selisih hasil penghitungan suara yang diatur berdasarkan jumlah penduduk, dengan *range* 0,5 persen, 1 persen, 1,5 persen dan 2 persen.

Dari delapan calon bupati dan wakil bupati yang menggugat ke MK ada beberapa yang keluar dari *range* undang-undang. “Kita tidak bisa memvonis paslon berhak atau tidak, karena itu kewenangan yang ditentukan MK,” jelas Rusidi.

Ia memastikan, Bawaslu Riau menghormati upaya paslon yang mengajukan gugatan ke MK. Biarlah MK yang memproses sesuai kewenangan yang dimilikinya. Sejauh ini, panwas kabupaten dan kota di Riau dalam posisi menunggu instruksi Bawaslu RI untuk memberi keterangan terkait hasil dari pengawsan yang telah dilakukan.

“Bawaslu dan panwas di kabupaten menghormati upaya hukum oleh paslon. Kita serahkan kepada MK memprosesnya sesuai kewenangan yang dimilikinya. Kami dalam posisi menunggu instruksi Bawaslu RI saja,” ungkap Rusidi.

Yang pasti, tegas Rusidi, pengawas tidak dalam posisi membenarkan salah satu pasangan yang bersengketa, Kecuali hanya memberi keterangan terkait hasil pengawasan yang dilakukan di lapangan terkait dengan administrasi atau dokumentasi kegiatan pengawasan.

Bila dalam persidangan di MK nanti keterangan yang diberikan lebih menguntungkan salah satu pihak, Rusidi memastikan itu bukan berarti panwas berpihak atau mendukung salah satu yang bersengketa. Sebab apapun keterangan panwas semua bertitik tolak dari kerja pengawasan selama proses pilkada berlangsung, dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

“Kami yakin, apa yang kami sampaikan di persidangan MK nanti dapat dipertanggung jawabkan dimata hukum,” tambah Rusidi.*

Menangkis Gugatan Berharap Kemenangan

Bersikap hati-hati. Langkah pasangan calon peraih suara terbanyak itu dinilai tepat daripada membusung dada kemenangan. Mereka berharap MK mengembalikan semua hasil kepada UU Pilkada.

Pemimpin itu, kata Tennes Effendi, *“berjalan di mukla tahu pedoman, berjalan di belakang seiring jalan, arif melangkah memikul beban, arif bertindak menghadapi cabaran, arif menjaga batas sempadan, arif memilih contoh teladan, arif menapis pendapat kawan, arif membaca gelagak lawan, arif menyimak masa hadapan”*.

Filosofi karakter pemimpin dalam tunjuk ajar Melayu itu seakan tercermin dalam sikap calon pemimpin daerah yang meraih suara terbanyak pada Pilkada Serentak 2015. Utamanya ketika pendapat mereka dimintai **AZAM** terkait dengan gugatan pihak lawan atas rekapitulasi suara oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi.

Hampir semua peraih suara terbanyak menolak berkomentar. HM. Harris misalnya mengaku *no comment*. Bupati Pelalawan ini menyebut, dirinya memilih diam daripada mengomentari langkah hukum saingan politiknya Zukri-Anas Badrun. “Hak konstitusional setiap warga negara dijamin oleh undang-undang. Jadi, kita harus hargai langkah hukum Zukri ke Mahkamah Konstitusi,” kata Harris singkat.

Sikap hati-hati paslon unggulan mencermati hasil pilkada, patut dipuji. Seperti dikata tunjuk ajar, *arif bertindak menghadapi cabaran, arif membaca gelagak lawan, dan arif menyimak masa hadapan*, kehati-hatian itu tak sekedar cerminan karakter dan kepribadian seorang calon pemimpin, tetapi sekaligus menjaga situasi politik di daerah agar tetap stabil pasca pelaksanaan pilkada. Yang menang tak membusung dada.

Kehati-hatian juga ditunjukkan pasangan Musrini-Halim, peraih suara terbanyak di Kuantan Singingi. Kepada **AZAM** Mursini menyatakan, dirinya tak merasa digugat oleh pasangan calon lain. Yang dipersoalkan lawan politiknya adalah rekapitulasi hitungan KPU. “Kalau ndak salah, yang digugat itu KPU,” kata Mursini singkat.

Politisi PPP ini membenarkan walau yang digugat itu KPU, tapi gugatan tersebut dapat berdampak langsung kepadanya. Ia berharap MK mengembalikan semuanya kepada UU No 8 tahun 2015 yang mengatur pelaksanaan pilkada serentak. Mantan Wakil Bupati Kuansing ini mengaku, telah berkoordinasi dengan advokat kondang Yusril Ihza Mahendra & Pathner untuk mendampingi dirinya bila di persidangan nanti diperlukan hakim mahkamah bersaksi. “Kami sudah bertemu di Jakarta dan Pak Yusril Ihza Mahendra bersama 20 pengacara lain siap mendampingi kami di MK,” ungkap Mursini.

Tentang raihan suara, Mursini menjelaskan hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara KPU Kuansing, sesuai C1 yang diperoleh timnya di setiap TPS sama dengan C1 milik KPU dan Panwaslu. Jadi, kata Mursini, memang itulah hasil perolehan suara Pilkada Kuansing. Dia mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kuansing yang telah menyalurkan hak pilihnya, dan mensukseskan pelaksanaan pilkada sampai berjalan aman, tenang serta lancar.

Sama dengan Mursini, Harris juga memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan Zukri. Berbagai langkah hukum sudah ia diformulasikan, termasuk menunjuk Yusril Ihza Mahendra & Pathner selaku kuasa. “Semua kita persiapkan menghadapi gugatan, termasuk kuasa hukum, bukti pembanding dan saksi-saksi,” jelasnya.

Syamsuar yang mengantongi suara tertinggi di Kabupaten Siak juga sama. Ia lebih memilih diam daripada menanggapi gugatan Suhartono-Syahrul. “Kalau soal itu saya *no comment*, maaf ya saudare,” kata Syamsuar dengan logat bahasa Melayu.

Tanggapan senada dilontarkan pula oleh Djamiluddin. Kepada **AZAM** pasangan ‘kawin’ Suyatno yang meraih suara terbanyak di Rokan Hilir ini

menilai, gugatan paslon ke MK merupakan hak konstitusional setiap warga negara. “Itu sudah menjadi hak mereka. Kita harus hormati,” ujarnya.

Dia memastikan, pihaknya tak akan berusaha melarang atau membujuk supaya paslon yang mengadu ke MK mengurungkan niatnya. Juga tidak akan berusaha mengintervensi MK terkait proses hukum yang saat ini sedang dilakukan penggugat. “Semua kita serahkan kepada MK. Kita tak melarang, tidak pula mengintervensi hukum,” tegas mantan Wakil Ketua DPRD Rohil ini.

Soal tuduhan penggugat yang menyebut telah terjadi 20 pelanggaran, Djamiluddin mengaku tak mengetahuinya. Ia menyerahkan sepenuhnya tuduhan tersebut kepada proses hukum yang ditempuh penggugat. Bila diperlukan, pihaknya akan mempersiapkan apa yang diperlukan dalam langkah hukum itu.

Satu hal yang penting untuk dijaga, tambahnya, perolehan suara dan proses perhitungannya. Semua itu berjalan lancar. Pihaknya juga mengantongi C1 sehingga tidak ada yang perlu diragukan. “Selisih suara kita cukup jauh, melebihi ambang batas seperti disebut dalam undang-undang,” katanya.

Meski demikian, Djamiluddin menegaskan, akan mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi. Termasuk menghadiri sidang di MK sembari berharap kemenangan.*

BIODATA



DR. H. Syafriadi, S.H., M.H., adalah Dosen Fakultas Hukum Universtas Islam Riau. Ia juga seorang jurnalis yang tunak di profesinya selama 26 tahun. Menyelesaikan program doktor ilmu hukum di Universitas Islam Bandung, lelaki kelahiran Lima Puluh Kota Baru tahun 1966 ini, juga aktif menulis di berbagai media harian di Riau, jurnal dan bunga rampai. Buah fikirnya tentang isu-isu kontemporer dapat disimak di rubrik Simpai AZAM, tabloid yang diasuhnya sejak tahun 1998 hingga kini.

Selain mengajar, jebolan Fakultas Hukum UII Yogyakarta ini terlibat aktif mengelola sejumlah organisasi. Antara lain Ketua Bidang Anggota SPS (Serikat Perusahaan Pers) Pusat (2015-2019), Ketua SPS Cabang Riau (2007-2009, 2009-2012, 2012-2015), Wakil Sekretaris KONI Riau (2014-2019), Ketua Umum Masjid Nurul Ibadah (2010-2013, 2013-2016), dan lain-lain. Juga menjadi pembicara seminar dan workshop jurnalistik yang diselenggarakan organisasi pers dan pemerintah daerah. Beberapa buku yang pernah disuntingnya, "Riau Kontemporer" (2002), "Rusli-Mambang, Gubernur Pilihan Rakyat (2009), "Riau Kontemporer "Membangun Kebebasan Pers Riau yang Bermartabat" (2011), dan "Menuju Kamar Gemilang" (2010). Sering pula diminta menjadi tim ahli pembahasan rancangan peraturan daerah oleh DPRD Riau, DPRD Kota Pekanbaru dan DPRD Kabupaten Kampar.



Masa berakhirnya kekuasaan Orde Baru di tahun 1998, demokrasi menjadi alat penting untuk menguatkan kekuasaan *civil*. Berbagai peraturan perundang-undangan di bidang politik dicabut, dan direvisi. Salah satu diantaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merevisi UU Nomor 22 tahun 1999. Pasal 56 UU itu menyebutkan, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dan, pasangan calon tersebut diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Sejak undang-undang ini lahir, pemilihan kepala daerah dari awalnya dipilih anggota DPRD provinsi untuk gubernur dan DPRD kabupaten untuk bupati dan walikota, bergeser ke pemilihan langsung. Rakyat memiliki kedaulatan hukum dan politik menentukan siapa figur yang memimpin daerahnya. *One man one vote*. Suara rakyat itu dalam ungkapan latin dikenal dengan istilah *vox pouuli, vox dei* alias suara rakyat adalah suara Tuhan.



DR. H. Syafriadi, S.H., M.H., adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Ia juga seorang jurnalis yang tunak di profesinya selama 26 tahun. Menyelesaikan program doktor ilmu hukum di Universitas Islam Bandung, lelaki kelahiran Lima Puluh Kota Baru tahun 1966 ini, juga aktif menulis di berbagai media harian di Riau, jurnal dan bunga rampai. Buah fikirnya tentang isu-isu kontemporer dapat disimak di rubrik Simpai AZAM, tabloid yang diasuhnya sejak tahun 1998 hingga kini.

Penerbit
Bina Karya

ISBN : 978-602-14117-3-5

